LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

(LPPD)

KABUPATEN BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2024

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
(LPPD)
KABUPATEN BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023
PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2024

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

(LPPD)

KABUPATEN BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2024

BUPATI BANJARNEGARA

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

Penyusunan dan penyampaian LPPD ini merupakan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

LPPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 menyampaikan hasil pengukuran kinerja Pemerintah Daerah yang terdiri atas :

1. Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri atas :
   a. Capaian Kinerja Makro.
   b. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
   c. Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.
2. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan, dan
3. Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Dengan tersusunnya LPPD ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan evaluasi yang komprehensif untuk peningkatan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas dan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banjarnegara pada tahun berikutnya.

Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh jajaran Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara dan seluruh masyarakat Banjarnegara yang telah bergotong royong membangun Banjarnegara dengan semangat untuk mewujudkan " ***Banjarnegara Maju Berbasis Pertanian*** ".

Demikian LPPD ini disampaikan sebagai bahan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Semoga seluruh upaya pelaksanaan pembangunan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banjarnegara dan tercacat sebagai amal ibadah kita semua, Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

Banjarnegara, 28 Maret 2024
Penjabat Bupati Banjarnegara

TRI HARSO WIDIRAHMANTO, SH

D A F T A R I S I

Halaman

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **iii**

DAFTAR TABEL ..... **vii**

DAFTAR GRAFIK ..... **xiii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang 1

1.1.1 Penjelasan Umum 1

a. Undang-Undang Pembentukan Daerah 1

b. Data Geografis Wilayah 2

c. Jumlah Penduduk 6

d. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan 14

e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah 16

f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 21

1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah 39

a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah 39

b. Visi Dan Misi Kepala Daerah 43

c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah 60

d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan 62

1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal 91

a. Dasar Pertimbangan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 91

b. Dasar Penerapan Standar Pelayanan Minimal 94

c. Kebijakan Umum Daerah Dalam Rencana Penerapan Dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Yang Dituangkan Dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 95

d. Gambaran Orientasi Dan Komitmen Yang Ditetapkan Pemerintahan Daerah Selama 1 (Satu) Tahun Dalam Rangka Penerapan Dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Yang Dituangkan Dalam Kebijakan Umum Anggaran 96

BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 98

2.1 Capaian Kinerja Makro 98
2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 113
2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran 113
2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil 199
2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan 229
2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah 235
a. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja 235
b. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja 242
c. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya 248
d. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam Pembangunan Daerah 254
e. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai 261
f. Analisis Program Dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja 395

BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN 417

1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan 417
2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Kabupaten 419
3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan 420

3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota 420
3.1.1 Target Kinerja 420
3.1.2 Realisasi 422
3.2 Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota 431
3.3 Permasalahan dan Kendala 431
3.4 Saran dan Tindak Lanjut 431

BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL 432

4.1 Bidang Urusan Pendidikan 434
4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar 434
4.1.2 Target Pencapaian SPM 434
4.1.3 Realisasi 440
4.1.4 Alokasi Anggaran 447
4.1.5 Dukungan Personil 447
4.1.6 Permasalahan dan Solusi 448
4.2 Bidang Urusan Kesehatan 450
4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar 450
4.2.2 Target Pencapaian SPM 450
4.2.3 Realisasi 471
4.2.4 Alokasi Anggaran 494
4.2.5 Dukungan Personil 494
4.2.6 Permasalahan dan Solusi 497
4.3 Bidang Urusan Pekerjaan Umum 499
4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar 499
4.3.2 Target Pencapaian SPM 499
4.3.3 Realisasi 506
4.3.4 Alokasi Anggaran 513
4.3.5 Dukungan Personil 513
4.3.6 Permasalahan dan Solusi 514
4.4 Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman 516
4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar 516
4.4.2 Target Pencapaian SPM 516
4.4.3 Realisasi 519
4.4.4 Alokasi Anggaran 522

4.4.5 Dukungan Personil 522
4.4.6 Permasalahan dan Solusi 523
4.5 Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 525
4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar 525
4.5.2 Target Pencapaian SPM 525
4.5.3 Realisasi 538
4.5.4 Alokasi Anggaran 552
4.5.5 Dukungan Personil 552
4.5.6 Permasalahan dan Solusi 553
4.6 Bidang Urusan Sosial 555
4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar 555
4.6.2 Target Pencapaian SPM 555
4.6.3 Realisasi 568
4.6.4 Alokasi Anggaran 580
4.6.5 Dukungan Personil 581
4.6.6 Permasalahan dan Solusi 582
4.7 Program dan Kegiatan 584

BAB V PENUTUP 597

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel I.1. Luas Wilayah Kabupaten Banjarnegara Per Kecamatan Tahun 2023 3

Tabel I.2. Kemiringan Lahan Wilayah Kecamatan Di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 6

Tabel I.3. Jumlah Dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Banjarnegara Per Kecamatan Tahun 2023 6

Tabel I.4. Jumlah Penduduk Kabupaten Banjarnegara Menurut Umur Tahun 2023 8

Tabel I.5. Jumlah Penduduk Kabupaten Banjarnegara Menurut Tingkat Pendidikan Dari Sekolah Yang Ditamatkan Tahun 2022 dan Tahun 2023 9

Tabel I.6. Banyaknya Kepala Keluarga (KK) Kabupaten Banjarnegara Per Kecamatan Keadaan Tahun 2022 dan Tahun 2023 10

Tabel I.7. Jumlah Penduduk Kabupaten Banjarnegara Menurut Lapangan Pekerjaan Tahun 2022 dan Tahun 2023..... 11

Tabel I.8. Kedudukan Ibukota Kecamatan, Jumlah Desa & Kelurahan Di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023..... 14

Tabel I.9. Jarak Ibu Kota Kabupaten Ke Ibu Kota Kecamatan Dan Ketinggian Wilayah Kota Kecamatan Dari Permukaan Air Laut Di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 16

Tabel I.10. Jumlah ASN Di Kabupaten Banjarnegara Berdasarkan Perangkat Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Tahun 2023 17

Tabel I.11. Jumlah PNS Di Kabupaten Banjarnegara Berdasarkan Pangkat Dan Golongan Ruang Tahun 2022 dan Tahun 2023 19

Tabel I.12. Jumlah ASN Di Kabupaten Banjarnegara Berdasarkan Pendidikan Tahun 2023 20

Tabel I.13. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2022 23

Tabel I.14. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2022 24

Tabel I.15. Target dan Realisasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2022 24

Tabel I.16. Target Dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2023 dan 2022 25

Tabel I.17. Target Dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2023 dan 2022 27

Tabel I.18. Target Dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2023 dan 2022 27

Tabel I.19. Target Dan Realisasi Pendapatan Tranfer Tahun Anggaran 2023 dan 2022 29

Tabel I.20. Target Dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2023 dan Tahun 2022 31

Tabel I.21. Anggaran Dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Tahun 2022 32

Tabel I.22. Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Tahun 2022 35

Tabel I.23. SiLPA Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Per 31 Desember 2023 35

Tabel I.24. Ringkasan Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2023 Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 36

Tabel I.25. Ringkasan Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2023 Urusan Wajib yang bukan Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 37

Tabel I.26. Ringkasan Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2023 Urusan Pilihan 38

Tabel I.27. Ringkasan Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2023 Unsur Pendukung, Penunjang, Pengawas, Kewilayahan dan Pemerintahan Umum 38

Tabel I.28. Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Tahun 2023 - 2026 Kabupaten Banjarnegara 54

Tabel II.1. Capaian kinerja makro Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 dan 2023 98

Tabel II.2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Banjarnegara Menurut Komponen Tahun 2014- 2023 100

Tabel II.3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Beberapa Kabupaten/Kota Tahun 2022-2023 102

Tabel II.4. Garis Kemiskinan Banjarnegara dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 dan 2023 103

Tabel II.5. Uraian Indikator Kinerja Kunci Keluaran 113

Tabel II.6. Uraian Indikator Kinerja Kunci Hasil 199

Tabel II.7. Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan 229
Tabel II.8. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 237
Tabel II.9. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 242
Tabel II.10. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 248
Tabel II.11. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023 – 2026 Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 254
Tabel II.12. Skala Nilai Peringkat Kinerja 261
Tabel II.13. Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Per Misi Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 262
Tabel II.14. Capaian Indikator Kinerja Tujuan 1 Tahun 2023 264
Tabel II.15. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tujuan 1 Tahun 2023 dengan Tahun 2022 265
Tabel II.16. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tujuan 1 Tahun 2023 dengan Target Akhir RPD Tahun 2026 265
Tabel II.17. Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1 Tahun 2023 268
Tabel II.18. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1 Tahun 2023 dengan Tahun 2022 268
Tabel II.19. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1 Tahun 2023 dengan Target Akhir RPD Tahun 2026 269
Tabel II.20. Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2 Tahun 2023 270
Tabel II.21. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2 Tahun 2023 dengan Tahun 2022 271
Tabel II.22. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2 Tahun 2023 dengan Target Akhir RPD Tahun 2026 271
Tabel II.23. Capaian Indikator Kinerja Tujuan 2 dan Sasaran 3 Tahun 2023 274
Tabel II.24. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tujuan 2 dan Sasaran 3 Tahun 2023 dengan Tahun 2022 274
Tabel II.25. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tujuan 2 dan Sasaran 3 Tahun 2023 dengan Target Akhir RPD Tahun 2026 275
Tabel II.26. Capaian Indikator Kinerja Sasaran 4 Tahun 2023 278

Tabel II.27. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 4 Tahun 2023 dengan Tahun 2022 278
Tabel II.28. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 4 Tahun 2023 dengan Target Akhir RPD Tahun 2026 278
Tabel II.29. Capaian Indikator Kinerja Sasaran 5 Tahun 2023 281
Tabel II.30. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 5 Tahun 2023 dengan Tahun 2022 281
Tabel II.31. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 5 Tahun 2023 dengan Target Akhir RPD Tahun 2026 282
Tabel II.32. Capaian Indikator Kinerja Tujuan 2 Tahun 2023 286
Tabel II.33. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tujuan 2 Tahun 2023 dengan Tahun 2022 286
Tabel II.34. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tujuan 2 Tahun 2023 dengan Target Akhir RPD Tahun 2026 287
Tabel II.35. Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021 – 2023 289
Tabel II.36. Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021 – 2023 290
Tabel II.37. NTP Per Sub Sektor Tahun 2022 291
Tabel II.38. Capaian Indikator Kinerja Sasaran 6 Tahun 2023 293
Tabel II.39. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 6 Tahun 2023 dengan Tahun 2022 294
Tabel II.40. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 6 Tahun 2023 dengan Target Akhir RPD Tahun 2026 294
Tabel II.41. Realisasi Investasi Provinsi Jawa Tenah Dan Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah Tahun 2023 296
Tabel II.42. Capaian Indikator Kinerja Sasaran 7 Tahun 2023 299
Tabel II.43. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 7 Tahun 2023 dengan Tahun 2022 299
Tabel II.44. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 7 Tahun 2023 dengan Target Akhir RPD Tahun 2026 300
Tabel II.45. Capaian Indikator Kinerja Sasaran 8 Tahun 2023 304
Tabel II.46. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 8 Tahun 2023 dengan Tahun 2022 304
Tabel II.47. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 8 Tahun 2023 dengan Target Akhir RPD Tahun 2026 305
Tabel II.48. Capaian Indikator Kinerja Sasaran 9 Tahun 2023 308
Tabel II.49. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 9 Tahun 2023 dengan Tahun 2022 308

Tabel II.50. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 9 Tahun 2023 dengan Target Akhir RPD Tahun 2026 309
Tabel II.51. Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran (YoY) Tahun 2023 310
Tabel II.52. Capaian Indikator Kinerja Sasaran 10 Tahun 2023..... 312
Tabel II.53. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 10 Tahun 2023 dengan Tahun 2022..... 313
Tabel II.54. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 10 Tahun 2023 dengan Target Akhir RPD Tahun 2026 313
Tabel II.55. Skor IDSD Kab. Banjarnegara Tahun 2023..... 315
Tabel II.56. Skor IDSD Kab. Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2023..... 315
Tabel II.57. Capaian Indikator Kinerja Tujuan 4 dan Sasaran 11 Tahun 2023 316
Tabel II.58. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tujuan 4 dan Sasaran 11 Tahun 2023 dengan Tahun 2022 317
Tabel II.59. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tujuan 4 dan Sasaran 11 Tahun 2023 dengan Target Akhir RPD Tahun 2026 316
Tabel II.60. Kategori Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 318
Tabel II.61. Capaian Indikator Kinerja Tujuan 5 Tahun 2023 322
Tabel II.62. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tujuan 5 Tahun 2023 dengan Tahun 2022..... 323
Tabel II.63. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tujuan 5 Tahun 2023 dengan Target Akhir RPD Tahun 2026 323
Tabel II.64. Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023..... 324
Tabel II.65. Capaian Indikator Kinerja Sasaran 12 Tahun 2023..... 326
Tabel II.66. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 12 Tahun 2023 dengan Tahun 2022..... 327
Tabel II.67. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 12 Tahun 2023 dengan Target Akhir RPD Tahun 2026 327
Tabel II.68. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 – 2023..... 328
Tabel II.69. Capaian Indikator Kinerja Tujuan 6 Tahun 2023 335
Tabel II.70. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tujuan 6 Tahun 2023 dengan Tahun 2022..... 336
Tabel II.71. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tujuan 6 Tahun 2023 dengan Target Akhir RPD Tahun 2026 336
Tabel II.72. Riset dan Inovasi Unggulan Daerah Sampai Dengan Tahun 2023 337

Tabel II.73. Capaian Indikator Kinerja Sasaran 13 Tahun 2023..... 341
Tabel II.74. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 13 Tahun 2023 dengan Tahun 2022..... 342
Tabel II.75. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 13 Tahun 2023 dengan Target Akhir RPD Tahun 2026..... 342
Tabel II.76. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2021 – 2023 343
Tabel II.77. Capaian Indikator Kinerja Tujuan 7 Tahun 2023..... 345
Tabel II.78. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tujuan 7 Tahun 2023 dengan Tahun 2022..... 346
Tabel II.79. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tujuan 7 Tahun 2023 dengan Target Akhir RPD Tahun 2026..... 346
Tabel II.80. Capaian Indikator Kinerja Sasaran 14 Tahun 2023..... 351
Tabel II.81. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 14 Tahun 2023 dengan Tahun 2022..... 352
Tabel II.82. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 14 Tahun 2023 dengan Target Akhir RPD Tahun 2026..... 353
Tabel II.83. Capaian Indikator Kinerja Sasaran 15 Tahun 2023..... 368
Tabel II.84. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 15 Tahun 2023 dengan Tahun 2022..... 368
Tabel II.85. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 15 Tahun 2023 dengan Target Akhir RPD Tahun 2026..... 369
Tabel II.86. Capaian Indikator Kinerja Sasaran 16 Tahun 2023..... 376
Tabel II.87. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 16 Tahun 2023 dengan Tahun 2022..... 377
Tabel II.88. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 16 Tahun 2023 dengan Target Akhir RPD Tahun 2026..... 377
Tabel II.89. Capaian Indikator Kinerja Sasaran 17 Tahun 2023..... 380
Tabel II.90. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 17 Tahun 2023 dengan Tahun 2022..... 380
Tabel II.91. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 17 Tahun 2023 dengan Target Akhir RPD Tahun 2026..... 381
Tabel II.92. Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Tahun 2015 -2023 Berdasarkan BDT Tahun 2015..... 382
Tabel II.93. Realisasi Pelaksanaan RTLH di Kabupaten Banjarnegara Dari Berbagai Sumber Anggaran Tahun 2023 383
Tabel II.94. Capaian Indikator Kinerja Sasaran 18 Tahun 2023..... 384
Tabel II.95. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 18 Tahun 2023 dengan Tahun 2022..... 384

Tabel II.96. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 18 Tahun 2023 dengan Target Akhir RPD Tahun 2026 385
Tabel II.97. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai 390
Tabel II.98. Program dan Anggaran Pendukung Tujuan 1 395
Tabel II.99. Program dan Anggaran Pendukung Sasaran 1..... 396
Tabel II.100. Program dan Anggaran Pendukung Sasaran 2..... 396
Tabel II.101. Program dan Anggaran Pendukung Tujuan 2 Sasaran 3..... 397
Tabel II.102. Program dan Anggaran Pendukung Sasaran 4..... 397
Tabel II.103. Program dan Anggaran Pendukung Sasaran 5..... 398
Tabel II.104. Program dan Anggaran Pendukung Tujuan 2 399
Tabel II.105. Program dan Anggaran Pendukung Sasaran 6..... 401
Tabel II.106. Program dan Anggaran Pendukung Sasaran 7..... 402
Tabel II.107. Program dan Anggaran Pendukung Sasaran 8..... 403
Tabel II.108. Program dan Anggaran Pendukung Sasaran 9..... 404
Tabel II.109. Program dan Anggaran Pendukung Sasaran 10..... 404
Tabel II.110. Program dan Anggaran Pendukung Tujuan 4 dan Sasaran 11 406
Tabel II.111. Program dan Anggaran Pendukung Tujuan 5 407
Tabel II.112. Program dan Anggaran Pendukung Sasaran 12..... 408
Tabel II.113. Program dan Anggaran Pendukung Tujuan 6 409
Tabel II.114. Program dan Anggaran Pendukung Sasaran 13..... 409
Tabel II.115. Program dan Anggaran Pendukung Tujuan 7 410
Tabel II.116. Program dan Anggaran Pendukung Sasaran 14..... 413
Tabel II.117. Program dan Anggaran Pendukung Sasaran 15..... 414
Tabel II.118. Program dan Anggaran Pendukung Sasaran 16..... 415
Tabel II.119. Program dan Anggaran Pendukung Sasaran 17..... 415
Tabel II.120. Program dan Anggaran Pendukung Sasaran 18..... 416

Tabel III.1. Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2023 424
Tabel III.2. Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Tahun 2023 427

Tabel IV.1. Kategori Nilai Indeks Pencapaian SPM (IP_{SPM}) 433
Tabel IV.2. Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Urusan Pendidikan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 435
Tabel IV.3. Realisasi Pencapaian Target SPM Bidang Urusan Pendidikan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023..... 440
Tabel IV.4. Alokasi Anggaran Untuk Pemenuhan SPM Bidang Urusan Pendidikan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 447

Tabel IV.5. Dukungan Personil Penerapan SPM Bidang Urusan Pendidikan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023..... 447
Tabel IV.6. Permasalahan dan Solusi SPM Bidang Urusan Pendidikan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023..... 449
Tabel IV.7. Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Urusan Kesehatan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 451
Tabel IV.8. Realisasi Pencapaian Target SPM Bidang Urusan Kesehatan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 471
Tabel IV.9. Alokasi Untuk Pemenuhan SPM Bidang Urusan Kesehatan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 494
Tabel IV.10. Dukungan Personil Penerapan SPM Bidang Urusan Kesehatan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 495
Tabel IV.11. Permasalahan dan Solusi SPM Bidang Urusan Kesehatan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 497
Tabel IV.12. Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 500
Tabel IV.13. Realisasi Pencapaian Target SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023..... 506
Tabel IV.14. Alokasi Anggaran Untuk Pemenuhan SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 513
Tabel IV.15. Dukungan Personil Penerapan SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023..... 513
Tabel IV.16. Permasalahan dan Solusi SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023..... 514
Tabel IV.17. Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023..... 517
Tabel IV.18. Realisasi Pencapaian Target SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023..... 519
Tabel IV.19. Alokasi Anggaran Untuk Pemenuhan SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023..... 522
Tabel IV.20. Dukungan Personil Penerapan SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 522
Tabel IV.21. Permasalahan dan Solusi SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 523
Tabel IV.22. Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 526

Tabel IV.23. Realisasi Pencapaian Target SPM Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 538
Tabel IV.24. Alokasi dan Realisasi Anggaran Untuk Pemenuhan SPM Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 552
Tabel IV.25. Dukungan Personil Penerapan SPM Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 552
Tabel IV.26. Permasalahan dan Solusi SPM Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 553
Tabel IV.27. Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 556
Tabel IV.28. Realisasi Pencapaian Target SPM Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 568
Tabel IV.29. Alokasi dan Realisasi Anggaran Untuk Pemenuhan SPM Bidang Urusan Sosial Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 580
Tabel IV.30. Dukungan Personil Penerapan SPM Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 581
Tabel IV.31. Permasalahan dan Solusi SPM Bidang Sosial Urusan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 582
Tabel IV.32. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SPM Bidang Urusan Pendidikan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 584
Tabel IV.33. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SPM Bidang Urusan Kesehatan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 588
Tabel IV.34. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 589
Tabel IV.35. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 590
Tabel IV.36. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SPM Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 591
Tabel IV.37. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SPM Bidang Urusan Sosial Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 595

DAFTAR GRAFIK

Halaman

Grafik II.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Banjarnegara dan Pertumbuhannya Tahun 2013 - 2023 100

Grafik II.2. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Banjarnegara, 2014 - 2023 102

Grafik II.3. Jumlah Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja di Banjarnegara Tahun 2021 – 2023 105

Grafik II.4. Indeks Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Tahun 2019 - 2023 266

Grafik II.5. Persentase Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 - 2023 272

Grafik II.6. Persentase Pemilih Dalam Pemilu..... 276

Grafik II.7. Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pilpres dan Pileg 276

Grafik II.8. Indeks Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 - 2023 280

Grafik II.9. Perbandingan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018 – 2022 282

Grafik II.10. Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekomoni Kabupaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021 – 2023 288

Grafik II.11. Perbandingan NTP Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022..... 293

Grafik II.12. Nilai Investasi Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018-2023 296

Grafik II.13. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 – 2023 301

Grafik II.14. Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018 – 2023..... 301

Grafik II.15. Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah Tahun 2023..... 302

Grafik II.16. Indeks Gini Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021 - 2023 306

Grafik II.17. Indeks Williamson Kabupaten Banjarnegara dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 - 2022 307

Grafik II.18. Inflasi Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2023..... 312

Grafik II.19. Inflasi Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2023 320
Grafik II.20. Perkembangan Indek Reformasi Biorkrasi Tahun 2021 - 2023 325
Grafik II.21. Indek Reformasi Biorkrasi Kabupaten/Kota dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 - 2023 325
Grafik II.22. Nilai SAKIP Kabupaten/Kota dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 332
Grafik II.23. Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021 - 2023 340
Grafik II.24. Indeks Inovasi Daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi Jawa Tengah 340
Grafik II.25. Nilai SAKIP Kabupaten/Kota dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 344
Grafik II.26. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019-2023 347
Grafik II.27. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023 348
Grafik II.28. Pesentase Penduduk Miskin Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023 349
Grafik II.29. Pesentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2023 350
Grafik II.30. Angka Kematian Neonataldi Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019-2023 355
Grafik II.31. Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018-2023 357
Grafik II.32. Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019-2023 362
Grafik II.33. Prevalensi Stunting (%)di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018-2023 365
Grafik II.34. Angka Harapan Hidup di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021-2023 367
Grafik II.35. Perkembangan Angka Rata-rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019-2023 370
Grafik II.36. Perbandingan Posisi Angka RLS Kabupaten Banjarnegara Dengan Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2023 371

Grafik II.37. Perbandingan Posisi Angka HLS Kabupaten Banjarnegara Dengan Kab/Kota Se Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2023 374

Grafik II.38. Perkembangan IKK Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020 – 2023 379

Grafik II.39. Perbandingan IKK Kabupaten Banjarnegara Dengan Kab/Kota Se Jawa Tengah, Tahun 2023 379

Grafik II.40. Persentase MBR Yang Menghuni Rumah Layak Huni Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015-2023 Berdasarkan BDT Tahun 2015 382

Grafik II.41. Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019-2023..... 388

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kepala Daerah merupakan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yakni pada pasal 69 ayat 1 yang berbunyi bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, memuat tentang :

1. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD),
2. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ),
3. Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) dan
4. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD).

Pasal 11 ayat 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 menyebutkan Bupati menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, Kepala Daerah menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan format yang ditetapkan oleh Menteri. Laporan ini disusun dengan pengumpulan data yang diperlukan sesuai dengan indikator kinerja berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, akurasi dan objektif.

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) digunakan sebagai dasar Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD), penilaian, perumusan kebijakan, dan pembinaan yang dilakukan oleh kementerian/lembaga pemerintah non kementerian.

1.1.1 Penjelasan Umum

a. Undang-undang Pembentukan Daerah

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 9);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 24).

b. Data Geografis Wilayah

1. Batas Administrasi Daerah

Secara geografis Kabupaten Banjarnegara terletak antara 7° 12' - 7° 31' Lintang Selatan dan 109° 20'10” - 109° 45'50" Bujur Timur, dengan batas-batas wilayah :

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang.
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Wonosobo.
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kebumen.
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Banyumas.

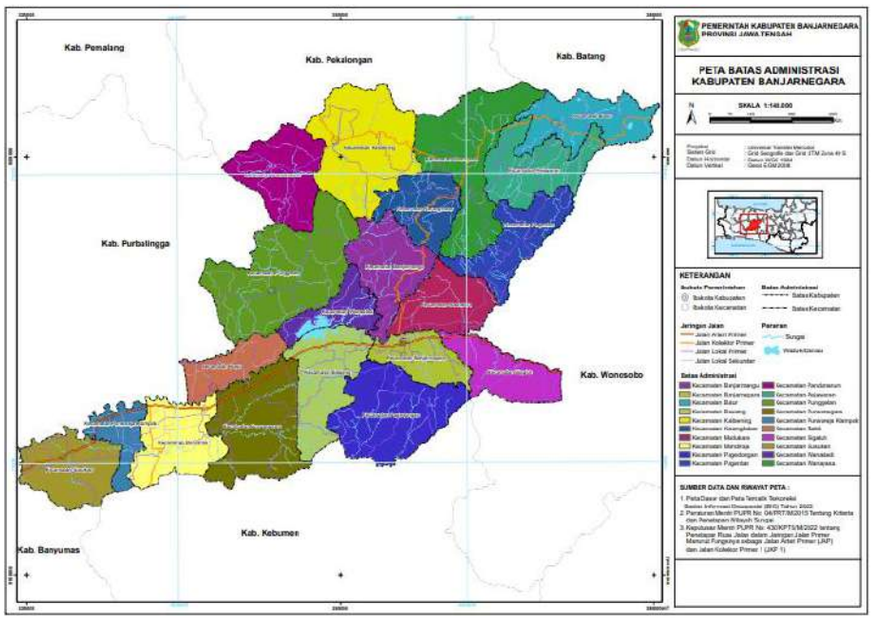

Sumber : Data DPUPR Kab. Banjarnegara Tahun 2024

2. Luas Wilayah

Banjarnegara adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah bagian barat dengan total luas wilayah sebesar 1.069,71 Km^2 atau sekitar 3,29% dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah (3,25 juta ha). Secara administratif Kabupaten Banjarnegara terdiri dari 20 kecamatan, 266 desa, dan 12 kelurahan. Luas wilayah dan pembagian wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Banjarnegara dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel I.1.
Luas Wilayah Kabupaten Banjarnegara Per Kecamatan
Tahun 2023

NO	KECAMATAN	LUAS (Km^2)	PERSENTASE (%)
1	*2*	*3*	*4*
1.	Susukan	52,6567	4,92
2.	Purwareja Klampok	21,8667	2,04
3.	Mandiraja	52,6158	4,92
4.	Purwanegara	73,8653	6,91
5.	B a w a n g	55,2064	5,16
6.	Banjarnegara	26,2420	2,45
7.	Sigaluh	39,5595	3,70
8.	Madukara	48,2015	4,51
9.	Banjarmangu	46,3561	4,33
10.	Wanadadi	28,2741	2,64

NO	KECAMATAN	LUAS (Km^2)	PERSENTASE (%)
1	*2*	*3*	*4*
11.	R a k i t	32,4462	3,03
12.	Punggelan	102,8401	9,61
13.	Karangkobar	39,0694	3,65
14.	Pagentan	46,1898	4,32
15.	Pejawaran	52,2497	4,88
16.	B a t u r	47,1710	4,41
17.	Wanayasa	82,0113	7,67
18.	Kalibening	83,7756	7,83
19.	Pandanarum	58,5605	5,47
20.	Pagedongan	80,5595	7,53
	JUMLAH	**1.069,71**	**100**

Sumber : Data BPS Kab. Banjarnegara 2024

Berdasarkan tabel di atas, tergambarkan bahwa Kecamatan yang memiliki luas wilayah terbesar adalah Kecamatan Punggelan dengan luas mencapai 102,8401 Km^2 atau sebesar 9,61 % dari luas wilayah Kabupaten Banjarnegara. Sedangkan kecamatan yang memiliki luas wilayah terkecil adalah kecamatan Purwareja Klampok dengan luas wilayah hanya 21,8667 Km^2 atau sebesar 2,04 % dari luas wilayah Kabupaten Banjarnegara.

3. Topografis

Kabupaten Banjarnegara memiliki relief yang tersusun mulai dataran rendah, dataran tinggi hingga perbukitan dengan pegunungan landai hingga tinggi dan curam. Bedasarkan bentuk tata alam dan penyebaran geografisnya, dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) zona, yaitu :

a) Bagian Utara merupakan daerah pegunungan dengan relief bergelombang dan curam, meliputi wilayah Kecamatan Kalibening, Pandanarum, Wanayasa, Karangkobar, Pagentan, Pejawaran, Batur, Madukara dan Banjarmangu.

b) Bagian Tengah merupakan wilayah dengan relief datar, merupakan lembah sungai Serayu yang subur, meliputi sebagian Kecamatan Banjarnegara, Madukara, Bawang, Purwareja Klampok, sebagian Kecamatan Susukan, Rakit, Wanadadi dan Banjarmangu.

c) Bagian Selatan merupakan wilayah dengan relief curam. Bagian ini merupakan bagian dari pegunungan Serayu Selatan yang meliputi Kecamatan Sigaluh, sebagian Kecamatan Banjarnegara, Pagedongan, Bawang, Purwanegara, Mandiraja dan sebagian Kecamatan Susukan.

Ditinjau dari segi ketinggian wilayah Kabupaten Banjarnegara terbagi menjadi 4 (empat) wilayah ketinggian,yaitu :

a) Kurang dari 100 m dari permukaan laut, meliputi luas 9,82 % dari seluruh luas wilayah Kabupaten Banjarnegara yang meliputi Kecamatan Susukan dan Purwareja Klampok, Mandiraja, Purwanegara dan Bawang.
b) Antara 100 - 500 m dari permukaan laut, meliputi luas 37,04 % dari seluruh luas wilayah Kabupaten Banjarnegara, meliputi Kecamatan Punggelan, Wanadadi, Rakit Madukara, sebagian Susukan, Mandiraja, Purwanegara, Bawang, Pagedongan, Banjarmangu dan Banjarnegara.
c) Antara 500 - 1.000 m dari permukaan laut, meliputi luas 28,74% dari seluruh luas wilayah Kabupaten Banjarnegara, yang meliputi Kecamatan Sigaluh, sebagian Banjarnegara Pagedongan dan Banjarmangu.
d) Lebih dari 1.000 m dari permukaan laut, meliputi luas 24,40% dari seluruh luas wilayah Kabupaten Banjarnegara yang meliputi Kecamatan Pejawaran, Batur, Wanayasa, Kalibening, Pandanarum, Karangkobar dan Pagentan.

Ditinjau dari segi kemiringan wilayah Kabupaten Banjarnegara, dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu :

a) Antara 0 – 15% meliputi luas 24,61% dari luas wilayah Kabupaten Banjarnegara yang meliputi Kecamatan Susukan, Purwareja Klampok, Mandiraja, Purwanegara, Pagedongan, Bawang dan Rakit.
b) Diatas 15 – 40% meliputi luas 45,04% dari luas wilayah Kabupaten Banjarnegara yang meliputi Kecamatan Madukara, Banjarmangu, Wanadadi, Punggelan, Karangkobar, Pagentan, Wanayasa dan Kalibening.
c) Lebih dari 40% meliputi luas 30,35% dari luas wilayah Kabupaten Banjarnegara meliputi Kecamatan Susukan, Banjarnegara, Sigaluh, Banjarmangu, Pejawaran dan Batur.

Berdasar kemiringan lahan maka ada ¾ (tiga perempat) wilayah Banjarnegara yang memiliki kemiringan lahan di atas 15% yang berpotensi bencana tanah longsor. Data kemiringan lahan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel I.2.
Kemiringan Lahan Wilayah Kecamatan
Di Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2023

NO	KEMIRINGAN	LUAS	KECAMATAN
1	*2*	*3*	*4*
1.	0 – 15 %	24,61 %	Susukan, Purwareja Klampok, Mandiraja, Purwanegara, Pagedongan, Bawang, Rakit.
2.	15 – 40 %	45,04 %	Madukara, Banjarmangu, Wanadadi, Punggelan, Karangkobar, Pagentan, Wanayasa, Kalibening.
3.	di atas 40 %	30,35 %	Susukan, Banjarnegara, Sigaluh, Banjarmangu, Pagedongan, Pejawaran, Pandanarum, Batur.

Sumber : Data Dinas PUPR Kab. Banjarnegara Tahun 2024

c. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 menurut data yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara hasil rekonsiliasi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia adalah sejumlah 1.061.258 jiwa, terdiri atas 539.745 jiwa pria dan 521.513 jiwa wanita.

Jumlah dan kepadatan penduduk secara lengkap Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut :

Tabel I.3.
Jumlah Dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Banjarnegara
Per Kecamatan Tahun 2023

NO	KECAMATAN	LUAS WILAYAH (Km²)	PENDUDUK			
			PRIA (JIWA)	WANITA (JIWA)	JUMLAH (JIWA)	KEPA-DATAN (JIWA/Km²)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Susukan	52,6567	32.943	32.364	65.307	1.240,24
2	Purwareja Klampok	21,8667	24.641	24.419	49.060	2.243,59

NO	KECAMATAN	LUAS WILAYAH (Km²)	PENDUDUK			
			PRIA (JIWA)	WANITA (JIWA)	JUMLAH (JIWA)	KEPA-DATAN (JIWA/Km²)
1	2	3	4	5	6	7
3	Mandiraja	52,6158	41.730	40.835	82.565	1.569,21
4	Purwanegara	73,8653	43.297	42.632	85.929	1.163,32
5	B a w a n g	55,2064	33.344	32.685	66.029	1.196,04
6	Banjarnegara	26,2420	35.673	35.373	71.046	2.707,34
7	Sigaluh	39,5595	16.560	16.262	32.822	829,69
8	Madukara	48,2015	23.940	23.071	47.011	975,30
9	Banjarmangu	46,3561	24.302	23.176	47.479	1.024,22
10	Wanadadi	28,2741	17.867	17.509	35.376	1.251,18
11	R a k i t	32,4462	28.498	27.910	56.408	1.738,51
12	Punggelan	102,8401	47.023	44.789	91.812	892,76
13	Karangkobar	39,0694	17.008	15.909	32.917	842,53
14	Pagentan	46,1898	20.488	19.526	40.014	866,30
15	Pejawaran	52,2497	23.990	22.324	46.314	886,40
16	B a t u r	47,1710	21.980	20.702	42.682	904,84
17	Wanayasa	82,0113	26.773	25.098	51.871	632,49
18	Kalibening	83,7756	24.796	23.742	48.538	579,38
19	Pandanarum	58,5605	12.133	11.558	23.691	404,56
20	Pagedongan	80,5595	22.758	21.629	44.387	550,98
	JUMLAH	**1.069,71**	**539.745**	**521.513**	**1.061.258**	**992,092**

Sumber : Data Dindukcapil Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024

Angka kepadatan penduduk di dapat dari perbandingan antara jumlah penduduk dibandingkan dengan luas wilayahnya. Kepadatan penduduk ini menunjukan berapa jumlah kepadatan penduduk yang mendiami dalam wilayah satu kilometer persegi (Km^2).

Berdasarkan data kependudukan di atas dapat diketahui bahwa kepadatan penduduk Kabupaten Banjarnegara tahun 2023 adalah 992,092 jiwa/Km^2 yaitu artinya setiap 1 Km^2 wilayah Banjarnegara dihuni atau ditempati oleh 992,092 orang. Kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk paling tinggi berdasarkan data diatas dan dapat dimasukkan dalam kategori padat adalah Kecamatan Banjarnegara dengan kepadatan

2.707,34 jiwa/Km^2, kemudian disusul dengan Kecamatan Purwareja Klampok dengan kepadatan penduduk 2.243,59 jiwa/Km^2

Sedangkan Struktur penduduk Kabupaten Banjarnegara menurut kelompok umur Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel I.4.
Jumlah Penduduk Kabupaten Banjarnegara
Menurut Umur Tahun 2023

NO	KELOMPOK UMUR (TAHUN)	JENIS KELAMIN (JIWA)		JUMLAH	PERSENTASE (%)
		PRIA	WANITA		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	0-4	36.471	34.305	70.776	6,67
2	5-9	42.926	40.335	83.261	7,85
3	10-14	44.187	41.619	85.806	8,09
4	15-19	35.602	34.642	70.244	6,62
5	20-24	41.949	40.598	82.547	7,78
6	25-29	40.357	38.033	78.390	7,39
7	30-34	41.508	38.976	80.484	7,58
8	35-39	40.533	38.205	78.738	7,42
9	40-44	42.747	40.774	83.521	7,87
10	45-49	35.849	35.563	71.412	6,73
11	50-54	33.156	33.556	66.712	6,29
12	55-59	29.912	31.054	60.966	5,74
13	60-64	25.721	26.010	51.731	4,87
14	65-69	19.701	19.168	38.869	3,66
15	70-74	13.720	12.766	26.486	2,50
16	>=75	15.406	15.909	31.315	2,95
	JUMLAH	**539.745**	**521.513**	**1.061.258**	**100,00**

Sumber : Data Dindukcapil Kab. Banjarnegara Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas jumlah penduduk menurut kelompok umur yang terbesar adalah penduduk dengan rentang usia 10-14 dengan jumlah 85.806 jiwa dan disusul dengan penduduk rentang usia 40-44 dengan jumlah 83.521 jiwa sebagai urutan kedua terbesar kemudian untuk urutan ketiga terbesar adalah penduduk rentang usia 5-9 dengan jumlah 83.261 jiwa.

Sedangkan jumlah penduduk Kabupaten Banjarnegara menurut tingkat pendidikan dari sekolah yang ditamatkan pada Tahun 2022 dan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel I.5.
Jumlah Penduduk Kabupaten Banjarnegara
Menurut Tingkat Pendidikan Dari Sekolah Yang Ditamatkan
Tahun 2022 dan Tahun 2023

NO	SEKOLAH YANG DITAMATKAN	JUMLAH (JIWA)		PERSENTASE TAHUN 2023 (%)
		TAHUN 2022	TAHUN 2023	
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Tidak/Belum Sekolah	222.480	226.214	21,316
2	Belum Tamat SD/Sederajat	116.154	113.805	10,724
3	Tamat SD/Sederajat	377.487	375.325	35,366
4	Tamat SLTP/Sederajat	171.305	177.701	16,744
5	Tamat SLTA/Sederajat	127.529	131.544	12,395
6	Tamat Diploma I/II	4.014	3.884	0,366
7	Tamat Akademi/Diploma III/Sarjana Muda	6.602	6.691	0,630
8	Tamat Diploma IV/Strata I	24.020	25.038	2,359
9	Tamat Strata II	968	1.018	0,096
10	Tamat Strata III	41	38	0,004
	JUMLAH	**1.050.600**	**1.061.258**	**100,00**

Sumber : Data Dindukcapil Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2023 penduduk dengan tamatan SD dengan jumlah 375.325 jiwa masih menjadi yang terbesar dalam komposisi penduduk Banjarnegara berdasar sekolah yang ditamatkan, kemudian disusul dengan penduduk yang tidak/belum sekolah dengan jumlah 226.214 jiwa.

Penduduk dengan tamatan S1 pada tahun 2023 sebanyak 25.038 jiwa atau mengalami peningkatan sebanyak 1.018 jiwa dibandingkan tahun 2022 yang hanya 24.020 jiwa. Kenaikan juga pada tamatan S2 yang semula pada tahun 2022 sebanyak 968 jiwa bertambah 50 jiwa menjadi 1.018 jiwa.

Perkembangan banyaknya Kepala Keluarga (KK) pada Tahun 2022 dan Tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel I.6.
Banyaknya Kepala Keluarga (KK) Kabupaten Banjarnegara
Per Kecamatan Keadaan Tahun 2022 dan Tahun 2023

NO	KECAMATAN	JUMLAH KK	
		TAHUN 2022	TAHUN 2023
1	*2*	*3*	*4*
1	Susukan	21.320	21.613
2	Purwareja Klampok	16.372	16.573
3	Mandiraja	26.781	27.219
4	Purwanegara	29.389	29.823
5	Bawang	22.382	22.612
6	Banjarnegara	23.493	23.770
7	Sigaluh	10.696	10.863
8	Madukara	15.814	15.965
9	Banjarmangu	16.034	16.202
10	Wanadadi	11.866	12.028
11	R a k i t	19.078	19.362
12	Punggelan	30.412	30.758
13	Karangkobar	10.578	10.764
14	Pagentan	13.238	13.443
15	Pejawaran	15.122	15.347
16	B a t u r	13.772	14.017
17	Wanayasa	15.932	16.154
18	Kalibening	15.235	15.529
19	Pandanarum	7.850	7.966
20	Pagedongan	14.917	15.132
	J U M L A H	**350.281**	**355.140**

Sumber : Data Dindukcapil Kab. Banjarnegara Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa ada penambahan 4.859 KK pada tahun 2023 dari kondisi akhir tahun 2022. Pada tahun 2023 jumlah Kepala Keluarga terbanyak berada di Kecamatan Punggelan dengan jumlah 30.758 KK. Hal ini berbanding lurus dengan besarnya jumlah penduduk di Kecamatan Punggelan yang menempati urutan pertama jumlah penduduk terbesar di Kabupaten Banjarnegara. Jumlah kepala keluarga terbesar kedua berada di Kecamatan Purwanegara

dengan jumlah 29.823 KK kemudian disusul oleh Kecamatan Mandiraja dengan jumlah Kepala Keluarga sebesar 27.219 KK.

Penduduk Kabupaten Banjarnegara menurut Lapangan Pekerjaan Perkembangan kondisi tahun 2022 dan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel I.7.
Jumlah Penduduk Kabupaten Banjarnegara
Menurut Lapangan Pekerjaan Tahun 2022 dan Tahun 2023

NO	LAPANGAN PEKERJAAN	JUMLAH	
		TAHUN 2022	TAHUN 2023 Semester I
1	*2*	*3*	*4*
1	Belum/Tidak Bekerja	233.077	236.465
2	Mengurus Rumah Tangga	184.681	187.932
3	Pelajar/ Mahasiswa	134.248	134.470
4	Pensiunan	6.358	6.422
5	Pegawai Negeri Sipil	8.825	8.617
6	Tentara Nasional Indonesia	452	442
7	Kepolisian RI	585	582
8	Perdagangan	5.976	5.873
9	Petani/ Pekebun	216.743	216.366
10	Peternak	360	361
11	Nelayan Perikanan	85	90
12	Industri	266	256
13	Konstruksi	576	566
14	Transportasi	1.918	1.893
15	Karyawan Swasta	66.921	67.537
16	Karyawan BUMN	781	760
17	Karyawan BUMD	249	244
18	Karyawan Honorer	2.485	2.450
19	Buruh Harian Lepas	47.694	50.472
20	Buruh Tani/Perkebunan	11.490	11.388
21	Buruh Nelayan / Perikanan	60	57
22	Buruh Peternakan	160	160
23	Pembantu Rumah Tangga	1.766	1.681
24	Tukang Cukur	84	84
25	Tukang Listrik	85	80
26	Tukang Batu	3.162	3.132
27	Tukang Kayu	1.840	1.836

NO	LAPANGAN PEKERJAAN	JUMLAH	
		TAHUN 2022	TAHUN 2023 Semester I
1	2	3	4
28	Tukang Sol Sepatu	23	23
29	Tukang Las / Pandai Besi	175	174
30	Tukang Jahit	918	919
31	Tukang Gigi	17	15
32	Penata Rias	85	84
33	Penata Busana	8	7
34	Penata Rambut	56	50
35	Mekanik	677	692
36	Seniman	73	77
37	Tabib	11	9
38	Paraji	39	38
39	Perancang Busana	1	2
40	Penterjemah	2	1
41	Imam Masjid	25	24
42	Pendeta	33	32
43	Pastor	1	1
44	Wartawan	34	33
45	Ustad Mubaligh	128	130
46	Juru Masak	32	29
47	Promotor Acara	1	1
48	Anggota DPR RI	0	1
49	Anggota DPD	0	0
50	Anggota BPK	0	0
51	Presiden	0	0
52	Wakil Presiden	0	0
53	Anggota MK	0	0
54	Anggota Kabinet	0	0
55	Duta Besar	0	0
56	Gubernur	0	0
57	Wakil Gubernur	0	0
58	Bupati	0	0
59	Wakil Bupati	1	0
60	Walikota	0	0
61	Wakil Walikota	0	0
62	Anggota DPRD Provinsi	3	3

NO	LAPANGAN PEKERJAAN	JUMLAH	
		TAHUN 2022	TAHUN 2023 Semester I
1	2	3	4
63	Anggota DPRD Kabupaten / Kota	36	37
64	Dosen	139	134
65	Guru	5.792	5.940
66	Pilot	1	1
67	Pengacara	19	22
68	Notaris	11	12
69	Arsitek	12	11
70	Akuntan	0	0
71	Konsultan	23	24
72	Dokter	131	145
73	Bidan	469	473
74	Perawat	562	597
75	Apoteker	73	80
76	Psikiater/Psikolog	0	2
77	Penyiar Televisi	0	0
78	Penyiar Radio	2	2
79	Pelaut	76	75
80	Peneliti	4	4
81	Sopir	4.914	4.970
82	Pialang	1	
83	Paranormal	8	8
84	Pedagang	33.285	33.102
85	Perangkat Desa	2.853	2.830
86	Kepala Desa	215	212
87	Biarawati	5	4
88	Wiraswasta	50.280	52.664
89	Anggota Lembaga Tinggi Lainnya	16.942	14.592
90	Artis	0	0
91	Atlit	4	3
92	Chef	0	1
93	Manager	0	0
94	Tenaga Tata Usaha	0	1
95	Operator	0	0
96	Pekerja Pengolahan Kerajinan	1	1
97	Teknisi	2	3

NO	LAPANGAN PEKERJAAN	JUMLAH	
		TAHUN 2022	TAHUN 2023 Semester I
1	2	3	4
98	Asisten Ahli	0	0
99	Pekerjaan Lainnya	1.470	2.746
	JUMLAH	**1.050.600**	**1.061.258**

Sumber : Data Dindukcapil Kabupaten Banjarnegara 2024

.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2023 penduduk Kabupaten Banjarnegara sebagian besar belum bekerja, hal ini ditunjukan dengan jumlah penduduk dengan pekerjaan belum bekerja sebagai penduduk terbesar dengan jumlah 236.465 jiwa. Komposisi penduduk berdasar pekerjaan terbesar kedua adalah petani/pekebunan dengan jumlah 216.366 Jiwa, komposisi ketiga adalah penduduk yang bekerja mengurus rumah tangga sebesar 187.932 jiwa kemudian disusul oleh Pelajar/Mahasiswa dengan jumlah 134.470 jiwa.

Keadaan jumlah penduduk menurut lapangan pekerjaan tersebut berdasarkan data yang tercatat pada dokumen kependudukan berupa KTP-el maupun KK tahun 2023. Memang ada beberapa lapangan pekerjaan yang apabila dicermati belum menunjukkan kondisi yang sebenarnya terjadi, karena belum semua penduduk melakukan perubahan / penyesuaian data dalam KTP-el maupun KK sesuai dengan pekerjaan mereka yang terbaru.

d. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, Kabupaten Banjarnegara terdiri dari 20 kecamatan yang terbagi menjadi 12 kelurahan dan 266 desa dengan pusat pemerintahan di Kecamatan Banjarnegara

Tabel I.8.
Kedudukan Ibukota Kecamatan, Jumlah Desa & Kelurahan
Di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023

NO	KECAMATAN	IBUKOTA KECAMATAN	BANYAKNYA		JUMLAH DESA & KEL
			DESA	KELURAHAN	
1	2	3	4	5	6
1	Susukan	Susukan	15	-	15
2	Purwareja Klampok	Klampok	8	-	8
3	Mandiraja	Mandiraja Kulon	16	-	16

NO	KECAMATAN	IBUKOTA KECAMATAN	BANYAKNYA		JUMLAH DESA & KEL
			DESA	KELURAHAN	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
4	Purwanegara	Purwonegoro	13	-	13
5	Bawang	Mantrianom	18	-	18
6	Banjarnegara	Argasoka	4	9	13
7	Pagedongan	Pagedongan	9	-	9
8	Sigaluh	Gembongan	14	1	15
9	Madukara	Kutayasa	18	2	20
10	Banjarmangu	Banjarmangu	17	-	17
11	Wanadadi	Wanadadi	11	-	11
12	Rakit	Rakit	11	-	11
13	Punggelan	Punggelan	17	-	17
14	Karangkobar	Leksana	13	-	13
15	Pagentan	Pagentan	16	-	16
16	Pejawaran	Panusupan	17	-	17
17	Batur	Batur	8	-	8
18	Wanayasa	Wanayasa	17	-	17
19	Kalibening	Kalibening	16	-	16
20	Pandanarum	Beji	8	-	8
	JUMLAH		**266**	**12**	**278**

Sumber : Data Bagian Pemerintahan Setda Kab. Banjarnegara 2024

Tabel tersebut menunjukan bahwa Kecamatan Madukara merupakan kecamatan yang memiliki jumlah desa terbanyak yakni 18 desa dan memiliki 2 kelurahan. Sedangkan Kecamatan Pandanarum, Kecamatan Batur dan Kecamatan Purwareja Klampok sama-sama memiliki 8 wilayah desa. Untuk kecamatan dengan usia termuda adalah Kecamatan Pagedongan dan Kecamatan Pandanarum merupakan kecamatan hasil pemekaran tahun 2004.

Jarak atau orbitrasi kantor pemerintahan berhubungan dengan pelayanan publik, orbitrasi terjauh adalah Kecamatan Pandanarum, Kecamatan Batur dan Kecamatan Kalibening dengan jarak 45-58 Km. Orbitrasi atau jarak pusat kantor pemerintah kecamatan dengan ibukota kabupaten tampak pada tabel berikut ini :

Tabel I.9.
Jarak Ibu Kota Kabupaten Ke Ibu Kota Kecamatan
Dan Ketinggian Wilayah Kota Kecamatan
Dari Permukaan Air Laut Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023

NO	KECAMATAN	JARAK (Km)	KETINGGIAN (Meter) DPL
1	*2*	*3*	*4*
1.	Susukan	36	80
2.	Purwareja Klampok	30	44
3.	Mandiraja	23	131
4.	Purwanegara	15	157
5.	B a w a n g	6	149
6.	Banjarnegara	0	289
7.	Pagedongan	7	639
8.	Sigaluh	8	600
9.	Madukara	8	320
10.	Banjarmangu	6	290
11.	Wanadadi	14	239
12.	R a k i t	24	180
13.	Punggelan	20	374
14.	Karangkobar	26	1.015
15.	Pagentan	27	935
16.	Pejawaran	34	1.130
17.	B a t u r	45	1.633
18.	Wanayasa	30	1.135
19.	Kalibening	47	1.049
20.	Pandanarum	58	1.245

Sumber : Data Dinas PUPR Kab. Banjarnegara Tahun 2024

e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 9) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 24), Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara tahun 2022 terdiri dari 23 Perangkat Daerah yaitu :

a. Sekretariat Daerah : 1
b. Sekretariat DPRD : 1
c. Inspektorat : 1
d. Dinas Daerah : 15
e. Badan daerah : 5
f. Kecamatan : 20

Disamping terdapat sejumlah 23 Perangkat Daerah, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 17 Tahun 2008 terdapat juga 1 Lembaga Teknis Daerah, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah.

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di Kabupaten Banjarnegara (baik yang ber KTP-el Banjarnegara maupun di luar Banjarnegara) per tanggal 31 Desember 2023 adalah sebanyak **8.548** orang, terdiri dari **6.743** orang PNS dan **1.805** orang PPPK, yang tersebar di berbagai Perangkat Daerah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel I.10.
Jumlah ASN Di Kabupaten Banjarnegara
Berdasarkan Perangkat Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Tahun 2023

NO	PERANGKAT DAERAH	PNS			PPPK			JUMLAH ASN
		PRIA	WANITA	JUMLAH	PRIA	WANITA	JUMLAH	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9=(5+8)*
A. PERANGKAT DAERAH								
1	Sekretariat Daerah	65	29	94	2	1	3	97
2	Sekretariat DPRD	26	8	34	1	1	2	36
3	Inspektorat	20	17	37	0	0	0	37
4	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	1522	2214	3736	490	1172	1662	5398
5	Dinas Kesehatan	273	1003	1276	7	31	38	1314
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	95	14	109	5	1	6	115
7	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	86	17	103	0	0	0	103
8	Satuan Polisi Pamong Praja	37	3	40		1	1	41
9	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	20	11	31	2	0	2	33
10	Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal PelayananTerpadu Satu Pintu	24	13	37	0	2	2	39

NO	PERANGKAT DAERAH	PNS			PPPK			JUMLAH ASN
		PRIA	WANITA	JUMLAH	PRIA	WANITA	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(5+8)
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	13	12	25	1	0	1	26
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KeluargaBerencana	19	12	31	3	0	3	34
13	Dinas Perhubungan	47	3	50	0	0	0	50
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	18	12	30	0	0	0	30
15	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	16	17	33	0	0	0	33
16	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	41	12	53	0	1	1	54
17	Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan	69	39	108	40	23	63	171
18	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	66	17	83	0	0	0	83
19	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	17	13	30	0	0	0	30
20	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	39	23	62	0	0	0	62
21	Badan Kepegawaian Daerah	19	15	34		1	1	35
22	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	11	5	16	0	0	0	16
23	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	17	3	20	2	3	5	25
24	Kecamatan Bawang	9	4	13	0	0	0	13
25	Kecamatan Mandiraja	9	5	14	0	0	0	14
26	Kecamatan Banjarnegara	28	40	68	0	0	0	68
27	Kecamatan Sigaluh	16	5	21	0	0	0	21
28	Kecamatan Madukara	17	9	26	0	0	0	26
29	Kecamatan Banjarmangu	8	5	13	0	0	0	13
30	Kecamatan Wanadadi	9	3	12	0	0	0	12
31	Kecamatan Rakit	13	3	16	0	0	0	16
32	Kecamatan Punggelan	12	4	16	0	0	0	16
33	Kecamatan Karangkobar	10	3	13	0	0	0	13
34	Kecamatan Pagentan	7	4	11	0	0	0	11
35	Kecamatan Pejawaran	11	3	14	0	0	0	14
36	Kecamatan Batur	12	3	15	0	0	0	15
37	Kecamatan Wanayasa	8	2	10	0	0	0	10
38	Kecamatan Kalibening	10	3	13	0	0	0	13
39	Kecamatan Pandanarum	13	1	14	0	0	0	14
40	Kecamatan Pagedongan	10	4	14	0	0	0	14
41	Kecamatan Purwanegara	6	3	9	0	0	0	9

NO	PERANGKAT DAERAH	PNS			PPPK			JUMLAH ASN
		PRIA	WANITA	JUMLAH	PRIA	WANITA	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(5+8)
42	Kecamatan Purwareja Klampok	10	3	13	0	0	0	13
43	Kecamatan Susukan	7	3	10	0	0	0	10
B. LEMBAGA TEKNIS DAERAH								
1	Rumah Sakit Umum Daerah	113	223	336	5	10	15	351
	Jumlah	**2.898**	**3.845**	**6.743**	**558**	**1.247**	**1.805**	**8.548**

Sumber : Data BKD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2023, Perangkat Daerah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara menjadi Perangkat Daerah yang memiliki jumlah ASN terbanyak yakni sejumlah 5.398 ASN atau sekitar 63,15 % dari total ASN di Kabupaten Banjarnegara yang berjumlah 8.548 ASN. Sedangkan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Banjarnegara menjadi Perangkat Daerah dengan jumlah ASN terbanyak kedua yakni sejumlah 1.314 ASN atau sekitar 15,37 % dari total ASN di Kabupaten Banjarnegara.

Sedangkan jumlah PNS Kabupaten Banjarnegara tahun 2022 dan tahun 2023 apabila dirinci berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang maka dapat dilihat pada tabel sebagai berikut ini:

Tabel I.11.
Jumlah PNS Di Kabupaten Banjarnegara
Berdasarkan Pangkat Dan Golongan Ruang
Tahun 2022 dan 2023

NO	PANGKAT	GOL RUANG	JUMLAH PNS	
			TAHUN 2022	TAHUN 2023
1	2	3	4	5
1	Juru Muda	I/a	0	0
2	Juru Muda Tk.I	I/b	2	0
3	Juru	I/c	4	6
4	Juru Tk. I	I/d	72	44
5	Pengatur Muda	II/a	99	112
6	Pengatur Muda Tk. I	II/b	99	63
7	Pengatur	II/c	625	600
8	Pengatur Tk. I	II/d	658	561

NO	PANGKAT	GOL RUANG	JUMLAH PNS	
			TAHUN 2022	TAHUN 2023
1	2	3	4	5
9	Penata Muda	III/a	965	985
10	Penata Muda Tk. I	III/b	1.124	802
11	Penata	III/c	1.029	1.120
12	Penata Tk. I	III/d	935	989
13	Pembina	IV/a	1.433	1.189
14	Pembina Tk. I	IV/b	232	220
15	Pembina Utama Muda	IV/c	32	48
16	Pembina Utama Madya	IV/d	1	1
17	Pembina Utama	IV/e	3	3
	JUMLAH		**7.313**	**6.743**

Sumber : Data BKD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2023 PNS dengan Pangkat Pembina atau golongan IV/a menjadi yang terbanyak sejumlah 1.189 orang. Disusul PNS dengan pangkat Penata atau Golongan III/c sejumlah 1.120 orang. Sedangkan PNS dengan pangkat Pembina Utama Madya atau Golongan IV/d menjadi yang paling sedikit yakni sejumlah 1 orang.

Sedangkan Jumlah ASN di Kabupaten Banjarnegara berdasarkan Tingkat Pendidikan pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel I.12.
Jumlah ASN Di Kabupaten Banjarnegara
Berdasarkan Pendidikan Tahun 2023

NO	PENDIDIKAN	PNS		PPPK		ASN	
		JUMLAH	(%)	JUMLAH	(%)	JUMLAH	(%)
1	2	3	4	5	6	7=(3+5)	8
1	S3	2	0,03	0	0,00	2	0,02
2	S2	331	4,91	3	0,17	334	3,91
3	S1	4.207	62,39	1.718	95,18	5925	69,31
4	DIV	152	2,25	1	0,06	153	1,79
5	DIII	1.127	16,71	53	2,94	1180	13,80
6	DII	50	0,74	0	0,00	50	0,58
7	DI	7	0,10	0	0,00	7	0,08

NO	PENDIDIKAN	PNS		PPPK		ASN	
		JUMLAH	(%)	JUMLAH	(%)	JUMLAH	(%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7=(3+5)*	*8*
8	SLTA	727	10,78	30	1,66	757	8,86
9	SLTP	103	1,53	0	0,00	103	1,20
10	SD	37	0,55	0	0,00	37	0,43
	JUMLAH	**6.831**	**100**	**1.792**	**100**	**8.548**	**100**

Sumber : Data BKD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa jumlah ASN di Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2023 yang terbanyak adalah berpendidikan S1 yakni sejumlah 4.207 ASN atau mencapai 62,39 % dari jumlah ASN yang ada di Kabupaten Banjarnegara.

Dengan kekuatan ASN sebagaimana tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2023 telah menghasilkan capaian kinerja pembangunan di berbagai urusan sesuai dengan bidangnya masing-masing.

f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

1. Pendapatan Daerah.

Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan sebagai penambah ekuitas daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran. Termasuk pendapatan daerah adalah pendapatan yang diterima tanpa melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), yaitu Pendapatan Dana Desa dan Pendapatan yang diterima melalui Bendahara Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD dan Puskesmas serta Laboratorium Kesehatan Daerah dan Pendapatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas. Selain itu, juga termasuk pendapatan yang diterima melalui Bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD dan SMP Negeri serta SD dan SMP Swasta dan Pendapatan yang diterima melalui Bendahara Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Negeri dan Swasta serta Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Pendidikan Kesetaraan Negeri dan Swasta /PKBM.

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dan memberikan stimulus dalam mendukung kondisi perekonomian yang lebih berkualitas dengan memperhatikan potensi yang ada, guna tercapainya peningkatan kemandirian daerah serta mengurangi tingkat ketergantungan terhadap dana transfer dari Pemerintah Pusat.

Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain PAD Yang Sah, mengalami peningkatan dibandingkan realisasi Tahun 2022.

Realisasi Pendapatan Transfer secara umum juga mengalami kenaikan baik Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat maupun Transfer antar Daerah (Provinsi).

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Daerah meliputi komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Sedangkan Lain-lain Pendapatan Daerah lainnya, yang merupakan pendapatan hibah, mengalami penurunan dibanding realisasi Tahun 2022.

Pendapatan Daerah merupakan ukuran kemampuan daerah di dalam membiayai belanja maupun pembiayaan, baik yang bersifat wajib maupun Pilihan dan Penunjang sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang maupun peraturan/ketentuan lainnya dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan baik untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun maupun Tahunan.

Untuk mengoptimalkan penerimaan pendapatan daerah, strategi dan upaya Pemerintah Kabupaten Banjarnegara yang dilaksanakan dalam mencapai target Pendapatan Daerah Tahun 2023, antara lain sebagai berikut :

a) Optimalisasi penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah, khususnya pungutan pajak daerah yang merupakan salah satu komponen dari PAD.
b) Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola penerimaan PAD.
c) Peningkatan kualitas data dasar seluruh pendapatan daerah.
d) Optimalisasi kinerja BUMD.

e) Optimalisasi pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
f) Mengembangkan alternatif pembiayaan pembangunan.

Pendapatan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sejumlah **Rp.2.190.885.738.000,00** tercapai realisasinya sejumlah **Rp.2.154.558.314.566,00** atau **98,34** %, realisasi tersebut mengalami kenaikan sejumlah **Rp.110.011.911.261,00** atau **5,38** %, dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2022. Hal ini ditunjukan dalam tabel berikut:

Tabel I.13.
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

NO	URAIAN	TARGET TA. 2023 (Rp)	REALISASI			Kenaikan/ (penurunan) dari realisasi TA. 2022	% Kenaikan/ (penurunan) dari realisasi TA. 2022
			TA. 2023 (Rp)	%	TA. 2022 AUDITED (Rp)		
1	*2*	*3*	*4*	*7*	*6*	*7*	*8*
1	Pendapatan Asli Daerah	327.741.867.848,00	335.493.222.864,00	102,37	284.507.773.825,00	50.985.449.039,00	17,92
2	Pendapatan Transfer	1.835.789.893.152,00	1.799.718.855.166,00	98,04	1.732.713.483.308,00	67.005.371.858,00	3,87
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	27.353.977.000,00	19.346.236.536,00	70,73	27.325.146.172,00	(7.978.909.636,00)	(29,20)
	Jumlah Pendapatan Daerah	**2.190.885.738.000,00**	**2.154.558.314.566,00**	**98,34**	**2.044.546.403.305,00**	**110.011.911.261,00**	**5,38**

Sumber : Data BPPKAD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024
Per 31 Desember 2023 (Unaudited)

a. Pendapatan Asli Daerah.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah pada Tahun 2023 lebih tinggi dari target yang telah ditetapkan, yakni mencapai 102,37 %. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022, realisasi pendapatan tahun 2023 mengalami peningkatan sejumlah Rp.50.985.449.039,00 atau 17,92 %.

Realisasi pendapatan daerah dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel I.14.
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

NO	URAIAN	TARGET TA. 2023 (Rp)	REALISASI			Kenaikan/ (penurunan) dari realisasi TA. 2022	% Kenaikan/ (penurunan) dari realisasi TA. 2022
			TA. 2023 (Rp)	%	TA. 2022 AUDITED (Rp)		
1	*2*	*3*	*4*	*7*	*6*	*7*	*8*
1	Pendapatan Pajak Daerah	80.153.600.000,00	82.082.493.343,00	102,41	74.794.300.599,00	7.288.192.744,00	9,74
2	Hasil Retribusi Daerah	29.348.140.000,00	31.636.787.602,00	107,80	29.886.824.338,00	1.749.963.264,00	5,86
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	21.247.184.203,00	21.421.057.648,00	100,82	18.112.778.934,00	3.308.278.714,00	18,26
4	Lain-lain PAD Yang Sah	196.992.943.645,00	200.352.884.271,00	101,71	161.713.869.954,00	38.639.014.317,00	23,89
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	**327.741.867.848,00**	**335.493.222.864,00**	**102,37**	**284.507.773.825,00**	**50.985.449.039,00**	**17,92**

Sumber : Data BPPKAD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024
Per 31 Desember 2023 (Unaudited)

1) Pajak Daerah.

Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sejumlah Rp.80.153.600.000,00 terealisasi sejumlah Rp.82.082.493.343,00 atau 104,21 %, bila dibandingkan Tahun Anggaran 2022 terdapat kenaikan sejumlah Rp.7.288.192.744,00atau 9,74 %. Rincian Realisasi Pajak Daerah Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel I.15.
Target dan Realisasi Pajak Daerah
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

NO	URAIAN	TARGET TA. 2023 (Rp)	REALISASI			Kenaikan/ (penurunan) dari realisasi TA. 2022	% Kenaikan/ (penurunan) dari realisasi TA. 2022
			TA. 2023 (Rp)	%	TA. 2022 AUDITED (Rp)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	Pajak Hotel	1.650.000.000,00	1.818.405.933,00	110,21	877.844.798,00	940.561.135,00	107,14
2	Pajak Restoran	5.800.000.000,00	7.474.022.761,00	128,86	5.002.622.653,00	2.471.400.108,00	49,40
3	Pajak Hiburan	550.000.000,00	623.272.174,00	113,32	372.960.857,00	250.311.317,00	67,11
4	Pajak Reklame	1.000.000.000,00	1.044.370.180,00	104,44	1.224.505.036,00	(180.134.856,00)	(14,71)
5	Pajak Penerangan Jalan	26.750.000.000,00	27.062.947.871,00	101,17	25.440.606.784,00	1.622.341.087,00	6,38
6	Pajak Parkir	550.000.000,00	604.536.761,00	109,92	385.631.221,00	218.905.540,00	56,77

NO	URAIAN	TARGET TA. 2023 (Rp)	REALISASI			Kenaikan/ (penurunan) dari realisasi TA. 2022	% Kenaikan/ (penurunan) dari realisasi TA. 2022
			TA. 2023 (Rp)	%	TA. 2022 AUDITED (Rp)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
7	Pajak Air Tanah	350.000.000,00	400.133.180,00	114,32	405.509.280,00	(5.376.100,00)	(1,33)
8	Pajak Sarang Burung Walet	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00	3.600.000,00	0,00	0,00
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	4.000.000.000,00	3.377.222.044,00	84,43	2.482.944.296,00	894.277.748,00	36,02
10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	28.000.000.000,00	28.051.397.516,00	100,18	27.354.584.381,00	696.813.135,00	2,55
11	Pajak BPHTB	11.500.000.000,00	11.622.584.923,00	101,07	11.243.491.293,00	379.093.630,00	3,37
	Jumlah Pendapatan Pajak Daerah	**80.153.600.000,00**	**82.082.493.343,00**	**102,41**	**74.794.300.599,00**	**7.288.192.744,00**	**9,74**

Sumber : Data BPPKAD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024
Per 31 Desember 2023 (Unaudited)

Tabel tersebut menunjukan bahwa dari 11 komponen Pajak Daerah, yang paling tinggi kenaikannya dibandingkan tahun 2022 adalah pajak Restoran sebesar Rp.2.471.400.108,00 atau 49,40%. Sedangkan yang paling tinggi penurunannya adalah pajak Reklame sebesar Rp.180.134.856,00 atau 14,71 %.

2) Retribusi Daerah.

Retribusi Daerah pada Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp.29.348.140.000,00 terealisasi sejumlah Rp.31.636.787.602,00 atau 107,8 %, realisasi tersebut mengalami kenaikan sejumlah Rp.1.749.963.264,00 atau 5,86 %. Retribusi Daerah terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perijinan tertentu yang dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel I.16.
Target Dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

NO	URAIAN	TARGET TA. 2023 (Rp)	REALISASI			Kenaikan/ (penurunan) dari realisasi TA. 2022	% Kenaikan/ (penurunan) dari realisasi TA. 2022
			TA. 2023 (Rp)	%	TA. 2022 AUDITED (Rp)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	**Retribusi Jasa Umum**	7.561.000.000,00	6.053.830.666,00	80,07	5.619.306.000,00	434.524.666,00	7,73
	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	900.000.000,00	718.737.000,00	79,86	708.852.500,00	9.884.500,00	1,39
	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.344.000.000,00	824.195.000,00	61,32	669.518.000,00	154.677.000,00	23,10

NO	URAIAN	TARGET TA. 2023 (Rp)	REALISASI			Kenaikan/ (penurunan) dari realisasi TA. 2022	% Kenaikan/ (penurunan) dari realisasi TA. 2022
			TA. 2023 (Rp)	%	TA. 2022 AUDITED (Rp)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	Retribusi Pelayanan Pasar	3.600.000.000,00	2.997.852.740,00	83,27	2.851.371.299,00	146.481.441,00	5,14
	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.100.000.000,00	772.865.000,00	70,26	862.535.000,00	(89.670.000,00)	(10,40)
	Pelayanan Tera/Tera Ulang	100.000.000,00	73.265.500,00	73,27	77.136.500,00	(3.871.000,00)	(5,02)
	Pengendalian Menara Telekomunikasi	517.000.000,00	666.915.426,00	129,00	449.892.701,00	217.022.725,00	48,24
2	**Retribusi Jasa Usaha**	20.812.140.000,00	25.089.503.716,00	120,55	23.498.459.118,00	1.591.044.598,00	6,77
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.491.000.000,00	2.671.406.466,00	107,24	2.515.284.518,00	156.121.948,00	6,21
	Retribusi Terminal	354.840.000,00	293.759.000,00	82,79	308.965.500,00	(15.206.500,00)	(4,92)
	Retribusi Tempat Khusus Parkir	490.000.000,00	255.705.500,00	52,18	267.384.000,00	(11.678.500,00)	(4,37)
	Retribusi Rumah Potong Hewan	100.000.000,00	87.171.000,00	87,17	87.948.000,00	(777.000,00)	(0,88)
	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	16.976.300.000,00	21.460.615.000,00	126,42	20.062.898.000,00	1.397.717.000,00	6,97
	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	400.000.000,00	320.846.750,00	80,21	255.979.100,00	64.867.650,00	25,34
3	**Retribusi Perizinan Tertentu**	975.000.000,00	493.453.220,00	50,61	769.059.220,00	(275.606.000,00)	(35,84)
	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	925.000.000,00	424.953.220,00	45,94	712.459.220,00	(287.506.000,00)	(40,35)
	Retribusi Izin Trayek	50.000.000,00	68.500.000,00	137,00	56.600.000,00	11.900.000,00	21,02
	Jumlah Retribusi Daerah	**29.348.140.000,00**	**31.636.787.602,00**	**107,80**	**29.886.824.338,00**	**1.749.963.264,00**	**5,86**

Sumber : Data BPPKAD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024
Per 31 Desember 2023 (Unaudited)

Tabel diatas menunjukan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga paling tinggi kenaikannya yakni mencapai 76,05 % atau naik sebesar Rp.1.397.717.000,00. Sedangkan yang paling tinggi penurunannya adalah Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang turun sebesar Rp.287.506.000,00 atau sebesar 40,35 %.

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan yang berupa dividen/bagian laba perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ditargetkan sejumlah Rp.21.247.184.203,00 terealisasi sejumlah Rp.21.421.057.648,00 atau 100,82 %. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sejumlah Rp.3.308.278.714,00 atau 18,26 %. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut :

Tabel I.17.
Target Dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

NO	URAIAN	TARGET TA. 2023 (Rp)	REALISASI			Kenaikan/ (penurunan) dari realisasi TA. 2022	% Kenaikan/ (penurunan) dari realisasi TA. 2022
			TA. 2023 (Rp)	%	TA. 2022 AUDITED (Rp)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	21.226.791.169,00	21.400.664.613,00	100,82	18.066.207.565,00	3.334.457.048,00	18,46
2	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	20.393.034,00	20.393.035,00	100,00	46.571.369,00	(26.178.334,00)	(56,21)
	Jumlah	**21.247.184.203,00**	**21.421.057.648,00**	**100,82**	**18.112.778.934,00**	**3.308.278.714,00**	**18,26**

Sumber : Data BPPKAD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024
Per 31 Desember 2023 (Unaudited)

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah ditargetkan sejumlah Rp.196.992.943.648,00 dan terealisasi Rp.200.352.884.271,00 atau 101,71 %. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp.38.639.014.324,00 dibanding Tahun 2022 atau 23,89%. Lain- lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah meliputi:

Tabel I.18.
Target Dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

NO	URAIAN	TARGET TA. 2023 (Rp)	REALISASI			Kenaikan/ (penurunan) dari realisasi TA. 2022	% Kenaikan/ (penurunan) dari realisasi TA. 2022
			TA. 2023 (Rp)	%	TA. 2022 AUDITED (Rp)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	530.000.000,00	618.238.248,00	116,65	1.280.561.447,00	(662.323.199,00)	(51,72)
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.712.700.000,00	1.347.058.177,00	78,65	576.303.323,00	770.754.854,00	133,74
3	Hasil Kerja Sama Daerah	130.000.000,00	76.441.000,00	58,80	53.004.100,00	23.436.900,00	44,22
4	Jasa Giro	1.300.000.000,00	625.778.870,78	48,14	1.123.429.086,00	(497.650.215,22)	(44,30)
5	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	1.608.003.154,00	-	377.166.777,00	1.230.836.377,00	326,34
6	Pendapatan Bunga	4.020.628.645,00	0,00	-	1.876.849.298,00	(1.876.849.298,00)	(100,00)
7	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan	0,00	350.000,00	-	3.958.750,00	(3.608.750,00)	(91,16)

NO	URAIAN	TARGET TA. 2023 (Rp)	REALISASI			Kenaikan/ (penurunan) dari realisasi TA. 2022	% Kenaikan/ (penurunan) dari realisasi TA. 2022
			TA. 2023 (Rp)	%	TA. 2022 AUDITED (Rp)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	Daerah						
8	Penerimaan Komisi Potongan atau Bentuk Lain	1.500.000.000,00	1.549.326.351,00	103,29	2.237.153.701,00	(687.827.350,00)	(30,75)
9	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	484.037.073,00	-	400.545.395,00	83.491.678,00	20,84
10	Pendapatan Denda Pajak Daerah	0,00	286.913.796,00	-	188.503.440,00	98.410.356,00	52,21
11	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	21.435.915,00	-	28.412.237,00	(6.976.322,00)	(24,55)
12	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	0,00	81.944.878,00	-	143.013.386,00	(61.068.508,00)	(42,70)
13	Pendapatan dari Pengembalian	750.000.000,00	1.397.459.665,00	186,33	185.028.938,00	1.212.430.727,00	655,27
14	Pendapatan BLUD	187.049.615.000,00	192.254.597.022,00	102,78	152.915.518.258,00	39.339.078.764,00	25,73
15	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00	250.000,00	-	324.421.818,00	(324.171.818,00)	(99,92)
16	Remunerasi	0,00	1.050.121,22		0,00	1.050.121,22	-
	Jumlah	**196.992.943.648,00**	**200.352.884.271,00**	**101,71**	**161.713.869.960,00**	**38.639.014.324,00**	**23,89**

Sumber : Data BPPKAD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024
Per 31 Desember 20223 (Unaudited)

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer merupakan dana yang bersumber dari dana APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Pendapatan Transfer diberikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan/kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan antar-pemerintah daerah. Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sejumlah Rp.1.835.789.893.152,00 terealisasi sebesar Rp.1.799.718.855.166,00 atau 98,04 %. Kontribusinya terhadap realisasi pendapatan daerah sebesar 83,53 %. Apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022 terdapat kenaikan sejumlah Rp.67.612.796.858,00 atau 3,90 %.

Adapun rincian realisasi Pendapatan Tranfer sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Tabel I.19.
Target Dan Realisasi **Pendapatan Transfer**
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

URAIAN				TARGET TA. 2023 (Rp)	REALISASI			Kenaikan/ (penurunan) dari realisasi TA. 2022	% Kenaikan/ (penurunan) dari realisasi dari TA. 2022
					TA. 2023 (Rp)	%	TA. 2022 AUDITED (Rp)		
1				*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
PENDAPATAN TRANSFER				**1.835.789.893.152,00**	**1.799.718.855.166,00**	**98,04**	**1.732.713.483.308,00**	**67.612.796.858,00**	**3,90**
1	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**			**1.659.955.869.808,00**	**1.648.625.871.102,00**	**99,32**	**1.593.758.070.388,00**	**55.475.225.714,00**	**3,48**
	a	**Dana Perimbangan**		**1.356.797.312.808,00**	**1.345.467.314.102,00**	**99,16**	**1.301.237.650.388,00**	**44.837.088.714,00**	**3,45**
	a.1	***Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)***		***37.896.200.808,00***	***38.369.249.813,00***	***101,25***	***44.529.649.559,00***	***(6.160.399.746,00)***	***(13,83)***
			DBH Pajak Bumi dan Bangunan	483.137.000,00	483.137.000,00	100,00	520.152.000,00	(37.015.000,00)	(7,12)
			DBH PPh Pasal 21	1.039.201.000,00	1.037.481.000,00	99,83	9.767.621.000,00	(8.730.140.000,00)	(89,38)
			DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	4.192.719.000,00	4.192.295.000,00	99,99	6.923.227.837,00	(2.730.932.837,00)	(39,45)
			DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	489.586.000,00	489.586.000,00	100,00	0,00	489.586.000,00	-
			DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	9.078.696.000,00	7.882.160.895,00	86,82	0,00	7.882.160.895,00	-
			DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	2.339.568.000,00	2.189.536.747,00	93,59	4.007.691.582,00	(1.818.154.835,00)	(45,37)
			DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	1.058.201.000,00	1.043.736.552,00	98,63	2.347.411.800,00	(1.303.675.248,00)	(55,54)
			DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	19.004.912.000,00	12.562.967.300,00	66,10	1.280.304.000,00	11.282.663.300,00	881,25
			DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)	5.458.699.000,00	3.821.089.300,00	70,00	0,00	3.821.089.300,00	-
			DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	8.669.535.000,00	8.669.533.000,00	100,00	5.284.444.060,00	3.385.088.940,00	64,06
	a.2	***Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)***		***927.320.164.000,00***	***6.581.867.000,00***	***99,87***	***895.961.511.000,00***	***(3.363.966.400,00)***	***(0,38)***
	a.3	***Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik***		***61.448.427.000,00***	***52.327.289.494,00***	***85,16***	***68.528.368.869,00***	***(16.201.079.375,00)***	***(23,64)***
			DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	483.137.000,00	483.137.000,00	100,00	520.152.000,00	(37.015.000,00)	(7,12)
			DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	1.039.201.000,00	1.037.481.000,00	99,83	9.767.621.000,00	(8.730.140.000,00)	(89,38)
			DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	4.192.719.000,00	4.192.295.000,00	99,99	6.923.227.837,00	(2.730.932.837,00)	(39,45)
			DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	489.586.000,00	489.586.000,00	100,00	0,00	489.586.000,00	-
			DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	9.078.696.000,00	7.882.160.895,00	86,82	0,00	7.882.160.895,00	-
			DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	2.339.568.000,00	2.189.536.747,00	93,59	4.007.691.582,00	(1.818.154.835,00)	(45,37)
			DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	1.058.201.000,00	1.043.736.552,00	98,63	2.347.411.800,00	(1.303.675.248,00)	(55,54)
			DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)	19.004.912.000,00	12.562.967.300,00	66,10	1.280.304.000,00	11.282.663.300,00	881,25
			DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan	5.458.699.000,00	3.821.089.300,00	70,00	0,00	3.821.089.300,00	
			DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	8.669.535.000,00	8.669.533.000,00	100,00	5.284.444.060,00	3.385.088.940,00	64,06

URAIAN	TARGET TA. 2023 (Rp)	REALISASI			Kenaikan/ (penurunan) dari realisasi TA. 2022	% Kenaikan/ (penurunan) dari realisasi dari TA. 2022
		TA. 2023 (Rp)	%	TA. 2022 AUDITED (Rp)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	6.581.867.000,00	6.581.867.000,00	100,00	6.420.940.950,00	160.926.050,00	2,51
DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	3.052.306.000,00	3.373.899.700,00	110,54	0,00	3.373.899.700,00	
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	0,00	0,00	-	4.366.973.145,00	(4.366.973.145,00)	(100,00)
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	0,00	0,00	-	6.447.677.249,00	(6.447.677.249,00)	(100,00)
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	0,00	0,00	-	14.125.605.494,00	(14.125.605.494,00)	(100,00)
DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	0,00	0,00	-	3.367.773.852,00	(3.367.773.852,00)	(100,00)
DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	0,00	0,00		3.668.545.900,00	(3.668.545.900,00)	(100,00)
a.4 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	**330.132.521.000,00**	**314.506.563.795,00**	**95,27**	**295.582.087.360,00**	**19.531.901.435,00**	6,61
DAK Non Fisik-BOS Reguler	97.535.300.000,00	97.181.304.705,00	99,64	96.363.768.730,00	817.535.975,00	0,85
DAK Non Fisik-BOS Kinerja	4.502.500.000,00	4.502.500.000,00	100,00	60.000.000,00	4.442.500.000,00	7.404,17
DAK Non Fisik-TPG PNSD	158.727.242.000,00	156.541.470.075,00	98,62	148.816.483.215,00	7.724.986.860,00	5,19
DAK Non Fisik-TKG PNSD	4.379.250.000,00	2.831.421.321,00	64,66	3.261.000.000,00	(429.578.679,00)	(13,17)
DAK Non Fisik-BOP PAUD	14.418.000.000,00	14.379.646.978,00	99,73	13.535.479.000,00	844.167.978,00	6,24
DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	4.213.700.000,00	4.213.700.000,00	100,00	3.054.600.000,00	1.159.100.000,00	37,95
DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	33.187.841.000,00	22.749.461.000,00	68,55	20.202.563.544,00	2.546.897.456,00	12,61
DAK Non Fisik-PK2UKM	406.770.000,00	406.770.000,00	100,00	445.836.000,00	(39.066.000,00)	(8,76)
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataan	660.957.000,00	660.182.000,00	99,88	0,00	660.182.000,00	-
DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	333.900.000,00	254.136.800,00	76,11	8.808.045.471,00	(8.553.908.671,00)	(97,11)
DAK Non Fisik-BOKB-KB	10.955.336.000,00	10.014.271.916,00	91,41	184.886.400,00	9.829.385.516,00	5.316,45
DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	811.725.000,00	771.699.000,00	95,07	242.000.000,00	529.699.000,00	218,88
DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	0,00	0,00	0,00	607.425.000,00	(607.425.000,00)	(100,00)
b Dana Insentif Daerah (DID)	**18.150.156.000,00**	**18.150.156.000,00**	**100,00**	**25.984.697.000,00**	**(7.834.541.000,00)**	**(30,15)**
c Dana Desa	**285.008.401.000,00**	**285.008.401.000,00**	**100,00**	**266.535.723.000,00**	**18.472.678.000,00**	**6,93**
2 Pendapatan Transfer Antar Daerah	**175.834.023.344,00**	**151.092.984.064,00**	**85,93**	**138.955.412.920,00**	**12.137.571.144,00**	**8,73**
a Pendapatan Bagi Hasil	**162.529.023.344,00**	**140.493.747.715,00**	**86,44**	**138.202.412.920,00**	**2.291.334.795,00**	**1,66**
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	162.529.023.344,00	140.493.747.715,00	86,44	138.202.412.920,00	2.291.334.795,00	1,66
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	37.211.583.645,00	32.527.043.277,00	87,41	31.980.110.736,00	546.932.541,00	1,71
Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	21.817.928.822,00	16.810.021.137,00	77,05	16.458.515.658,00	351.505.479,00	2,14
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	32.111.063.395,00	33.570.751.487,00	104,55	30.867.082.561,00	2.703.668.926,00	8,76
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	2.160.110.804,00	1.522.293.524,00	70,47	1.293.090.858,00	229.202.666,00	17,73

URAIAN	TARGET TA. 2023 (Rp)	REALISASI			Kenaikan/ (penurunan) dari realisasi TA. 2022	% Kenaikan/ (penurunan) dari realisasi dari TA. 2022
		TA. 2023 (Rp)	%	TA. 2022 AUDITED (Rp)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	69.228.336.678,00	56.063.638.290,00	80,98	57.603.613.107,00	(1.539.974.817,00)	(2,67)
b Bantuan Keuangan Provinsi	**13.305.000.000,00**	**10.599.236.349,00**	**79,66**	**753.000.000,00**	**9.846.236.349,00**	**1.307,60**
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi	13.305.000.000,00	10.599.236.349,00	79,66	753.000.000,00	9.846.236.349,00	1.307,60

Sumber : Data BPPKAD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024
Per 31 Desember 2023 (Unaudited)

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan pendapatan yang berasal dari pendapatan hibah. Pendapatan ini ditargetkan sejumlah Rp.27.353.977.000,00 dan terealisasi Rp.19.346.236.536,00 atau 70,73 %. Realisasi pendapatan ini menurun sejumlah Rp.7.978.909.636,00 atau 29,20 % dibanding dengan realisasi Tahun 2022. Adapun rincian realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Tabel I.20.
Target Dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

NO	URAIAN	TARGET TA. 2023 (Rp)	REALISASI			Kenaikan/ (penurunan) dari realisasi TA. 2022	% Kenaikan/ (penurunan) dari realisasi TA. 2022
			TA. 2023 (Rp)	%	TA. 2022 AUDITED (Rp)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	Pendapatan Hibah	27.353.977.000,00	19.346.236.536,00	70,73	27.325.146.172,00	(7.978.909.636,00)	(29,20)
	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	**27.353.977.000,00**	**19.346.236.536,00**	**70,73**	**27.325.146.172,00**	**(7.978.909.636,00)**	**(29,20)**

Sumber : Data BPPKAD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024
Per 31 Desember 2023 (Unaudited)

2. Belanja Daerah

Belanja daerah disusun mendasarkan prinsip-prinsip penganggaran yang dilakukan menggunakan pendekatan anggaran berbasis kinerja dengan memperhatikan prioritas dan program strategis pembangunan secara efisien, efektif, selektif, akuntabel dan transparan serta mengacu pada RKPD. Belanja daerah dipergunakan untuk

mendanai pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, yang terdiri dari urusan pemerintah wajib dan urusan pilihan serta penunjang. Belanja daerah terdiri dari :

a. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

b. Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

c. Belanja Tak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

d. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa .

Belanja Daerah Tahun 2023 dianggarkan sejumlah Rp.2.264.296.861.000,00 terealisasi Rp.2.175.572.447.545,00 atau 96,08 %. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022, belanja daerah meningkat sejumlah Rp.136.361.517.141,00 atau 6,69 %.

Tabel I.21.
Anggaran Dan Realisasi Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No	Uraian			Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi			Kenaikan/ (penurunan) dari realisasi TA. 2022	% Kenaikan/ (penurunan) dari realisasi TA. 2022
					TA. 2023 (Rp)	%	TA. 2022 AUDITED (Rp)		
1	*2*			*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	BELANJA			**2.264.296.861.000,00**	**2.175.572.447.545,00**	**96,08**	**2.039.210.930.404,00**	**136.361.517.141,00**	**6,69**
1		**BELANJA OPERASI**		**1.555.800.065.481,00**	**1.496.360.855.708,00**	**96,18**	**1.422.892.577.443,00**	**73.468.278.265,00**	**5,16**
		a	Belanja Pegawai	888.829.931.213,00	860.598.828.833,00	96,82	822.165.098.279,00	38.433.730.554,00	4,67
		b	Belanja Barang	511.496.469.409,00	485.754.456.215,00	94,97	460.739.268.016,00	25.015.188.199,00	5,43
		c	Belanja Hibah	234.000.000,00	202.222.224,00	86,42	0,00	202.222.224,00	-
		d	Belanja Bantuan Sosial	147.012.842.859,00	141.636.772.436,00	96,34	124.972.787.105,00	16.663.985.331,00	13,33

No	Uraian			Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi			Kenaikan/ (penurunan) dari realisasi TA. 2022	% Kenaikan/ (penurunan) dari realisasi TA. 2022
					TA. 2023 (Rp)	%	TA. 2022 AUDITED (Rp)		
1	*2*			*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
		e	Belanja Bantuan Keuangan	8.226.822.000,00	8.168.576.000,00	99,29	15.015.424.043,00	(6.846.848.043,00)	(45,60)
2	**BELANJA MODAL**			**265.266.811.046,00**	**238.397.698.407,00**	**89,87**	**191.794.043.374,00**	**46.603.655.033,00**	**24,30**
		a	Belanja Tanah	1.670.000.000,00	0,00	-	2.093.268.000,00	(2.093.268.000,00)	(100,00)
		b	Belanja Peralatan dan Mesin	70.469.570.650,00	64.114.716.058,00	90,98	51.750.636.616,00	12.364.079.442,00	23,89
		c	Belanja Bangunan dan Gedung	134.926.776.754,00	117.409.209.690,00	87,02	69.077.600.844,00	48.331.608.846,00	69,97
		d	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	46.109.642.060,00	44.498.040.419,00	96,50	61.669.040.480,00	(17.171.000.061,00)	(27,84)
		e	Belanja Aset Tetap Lainnya	12.090.821.582,00	12.375.732.240,00	102,36	7.203.497.434,00	5.172.234.806,00	71,80
3	**BELANJA TAK TERDUGA**			**5.171.362.473,00**	**3.288.493.930,00**	**63,59**	**9.705.855.737,00**	**(6.417.361.807,00)**	**(66,12)**
			Belanja Tak Terduga	5.171.362.473,00	3.288.493.930,00	63,59	9.705.855.737,00	(6.417.361.807,00)	(66,12)
4	**TRANSFER**			**438.058.622.000,00**	**437.525.399.500,00**	**99,88**	**414.818.453.850,00**	**22.706.945.650,00**	**5,47**
			Transfer Bagi Hasil Ke KAB/KOTA/ DESA	438.058.622.000,00	437.525.399.500,00	99,88	414.818.453.850,00	22.706.945.650,00	5,47
			Belanja Bagi Hasil	13.197.691.000,00	12.937.698.500,00	98,03	13.609.639.250,00	(671.940.750,00)	(4,94)
			Bantuan Keuangan	424.860.931.000,00	424.587.701.000,00	99,94	401.208.814.600,00	23.378.886.400,00	5,83

Sumber : Data BPPKAD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024
Per 31 Desember 2023 (Unaudited)

3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakekatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Kebijakan umum pembiayaan terdiri dari Kebijakan dan Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah serta Kebijakan dan Rencana Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Pembiayaan daerah netto dianggarkan sejumlah Rp.73.411.123.000,00 dan terealisasi Rp.74.111.123.167,00 atau 100,95 %.

a. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan pembiayaan daerah dari sisi penerimaan pembiayaan merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya dan diarahkan untuk penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2022 sebagai sumber

penerimaan pada APBD Tahun Anggaran 2023 yang didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional.

Penerimaan pembiayaan Tahun 2023 juga mengandung kebijakan peminjaman jangka pendek ke PT Bank Jateng dalam rangka menjaga likuiditas Kas Daerah, senilai Rp.60.000.000.000,00.

Pada sisi penerimaan pembiayaan juga teranggarkan penerimaan kembali pinjaman daerah (chanelling pedagang pasar Banjarnegara), sebesar Rp.1.200.000.000,00, namun tidak ada realisasinya , hal ini dikarenakan saat ini investasi dana bergulir chanelling sudah dikategorikan sebagai Piutang Dana Bergulir, sehingga realisasi angsurannya masuk sebagai Pendapatan Dana Bergulir, bukan Pembiayaan Penerimaan.

Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023 dianggarakan sejumlah Rp.135.654.123.000,00 terealisasi sejumlah Rp.134.454.123.167,00 atau 99,12%. Apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2022, terdapat kenaikan sejumlah Rp.49.935.472.901,00 atau 59,08%.

b. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan pembiayaan daerah dari sisi pengeluaran pembiayaan merupakan pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya dan diarahkan untuk penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban dalam prinsip kehati-hatian dan pengelolaannya berdasarkan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal, pemberian pinjaman, dan pembentukan dana cadangan, Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2023 sejumlah Rp.62.243.000.000,00 terealisasi sejumlah Rp.60.343.000.000,00 atau 96,95%. Apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2022, terdapat kenaikan sejumlah Rp.44.943.000.000,00 atau 291,84 %.

Secara keseluruhan, realisasi Total Pembiayaan Netto pada tahun 2023 lebih tinggi dari realisasi tahun 2022 sebesar 7,22 %. Rincian lebih lanjut anggaran dan realisasi pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut :

Tabel I.22.
Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi			Kenaikan/ (penurunan) dari realisasi TA. 2022	% Kenaikan/ (penurunan) dari realisasi TA. 2022
			TA. 2023 (Rp)	%	TA. 2022 AUDITED (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8
	PEMBIAYAAN						
1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**135.654.123.000,00**	**134.454.123.167,00**	**99,12**	**84.518.650.266,00**	**49.935.472.901,00**	**59,08**
	a. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	74.454.123.000,00	74.454.123.167,00	100,00	84.518.650.266,00	(10.064.527.099,00)	(11,91)
	b. Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank BUMD Jangka Pendek	60.000.000.000,00	60.000.000.000,00	100,00	0,00	60.000.000.000,00	-
	c. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	1.200.000.000,00	0.00	0,00	0,00	0,00	-
2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**62.243.000.000,00**	**60.343.000.000,00**	**96,95**	**15.400.000.000,00**	**44.943.000.000,00**	**291,84**
	a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.243.000.000,00	343.000.000,00	15,29	15.400.000.000,00	(15.057.000.000,00)	(97,77)
	b. Pembayaran kembali Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank BUMD Jangka Pendek	60.000.000.000,00	60.000.000.000,00	100,00	0,00	60.000.000.000,00	-
3.	**PEMBIAYAAN NETTO**	**73.411.123.000,00**	**74.111.123.167,00**	**100,95**	**69.118.650.266,00**	**4.992.472.901,00**	**7,22**
4.	**SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)**	**0,00**	**53.096.990.188,00**		**74.454.123.167,00**	**(21.357.132.979,00)**	**(28,68)**

Sumber : Data BPPKAD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024
Per 31 Desember 2023 (Unaudited)

Adapun SiLPA Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Per 31 Desember 2023 senilai Rp.53.096.990.188,00, berada pada :

Tabel I.23.
SiLPA Pemerintah Kabupaten Banjarnegara
Per 31 Desember 2023

NO	URAIAN REKENING	JUMLAH (Rp)
1	2	3
1	Rekening Kas Umum Daerah Kab.Banjarnegara	26.969.645.437,00
2	Bendahara Penerimaan	440.447.600,00
3	Rekening BLUD RSUD	16.566.234.437,00
4	Rekening BLUD Puskesmas dan Labkesda Dinkes	4.772.763.655,00
5	Rekening Bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD dan SMP Negeri serta BOP Kesetaraan	522.691.792,00
6	Rekening Kas di Bendaharawan FKTP/ BOK	3.825.207.267,00
	Total SiLPA Tahun 2023	**53.096.990.188,00**

4. **Ringkasan Anggaran dan Realisasi Anggaran sesuai urusan pemerintahan tahun 2023**

1) Ringkasan Urusan Pemerintahan

1. Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Tabel I.24.
Ringkasan Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah
Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2023
Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

NO	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PELAKSANA URUSAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Urusan Pendidikan	738.545.609.106,00	711.140.049.026,00	1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
2	Urusan Kesehatan	482.745.519.097,00	450.094.572.240,00	1. Dinas Kesehatan 2. RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara
3	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	113.621.736.186,00	109.930.141.045,00	1. Dinas PekerjaanUmum dan Penataan Ruang 2. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
4	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	24.248.788.467,00	23.335.461.033,00	1. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
5	Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	16.511.663.877,00	15.985.549.050,00	1. Satuan Polisi Pamong Praja 2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6	Urusan Sosial	7.565.350.700,00	7.357.365.862,00	1. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	TOTAL URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	**1.383.238.667.433,00**	**1.317.017.859.256,00**	

Sumber : Data BPPKAD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024
Per 31 Desember 2023 (Unaudited)

2. Urusan Wajib yang Bukan Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Tabel I.25.
Ringkasan Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah
Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2023
Urusan Wajib yang Bukan Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

NO	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PELAKSANA URUSAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Urusan Ketenagakerjaan	7.490.110.011,00	7.083.037.759,00	1. DinasTenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	344.596.900,00	332.515.975,00	1. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3	Urusan Pangan	1.572.481.000,00	1.453.534.610,00	1. Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan
4	Urusan Pertanahan	708.327.000,00	569.575.632,00	1. BPPKAD
5	Urusan Lingkungan Hidup	5.895.153.800,00	5.510.177.853,00	1. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
6	Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil	7.660.438.297,00	6.814.189.907,00	1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7	Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa	12.514.966.506,00	12.162.945.438,00	1. Dinas Pemberdayaan Masayarakat, Desa dan PPKB
8	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	12.363.205.400,00	11.471.626.719,00	1. Dinas Pemberdayaan Masayarakat, Desa dan PPKB
9	Urusan Perhubungan	8.701.762.415,00	8.409.274.143,00	1. Dinas Perhubungan
10	Urusan Komunikasi dan Informatika	8.031.815.688,00	7.788.455.166,00	1. Dinas Komunikasi dan Informatika
11	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	786.870.000,00	779.056.550,00	1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
12	Urusan Penanaman Modal	2.124.655.100,00	1.894.981.450,00	1. DinasTenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
13	Urusan Kepemudaan dan Olah Raga	11.903.497.500,00	11.796.338.013,00	1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
14	Urusan Statistik	72.883.800,00	68.324.200,00	1. Dinas Komunikasi dan Informatika
15	Urusan Persandian	70.726.900,00	69.022.000,00	1. Dinas Komunikasi dan Informatika
16	Urusan Kebudayaan	6.546.175.100,00	6.468.539.735,00	1. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
17	Urusan Perpustakaan	9.987.696.000,00	8.756.453.800,00	1. Dinas Kerarsipan dan Perpustakaan
18	Urusan Kearsipan	3.918.780.308,00	3.858.127.062,00	1. Dinas Kerarsipan dan Perpustakaan
	TOTAL URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR	**100.694.141.725,00**	**95.286.176.012,00**	

Sumber : Data BPPKAD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024
Per 31 Desember 2023 (Unaudited)

3. Ringkasan Urusan Pilihan

Tabel I.26.
Ringkasan Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah
Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2023
Urusan Pilihan

NO	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PELAKSANA URUSAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Urusan Kelautan dan Perikanan	2.001.771.315,00	1.915.468.085,00	1. Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan
2	Urusan Pariwisata	19.380.955.823,00	17.705.931.038,00	1. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3	Urusan Pertanian	53.044.569.922,00	48.214.740.533,00	1. Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan
4	Urusan Perdagangan	1.623.231.200,00	1.534.766.725,00	1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
5	Urusan Perindustrian	13.356.058.402,00	12.924.350.973,00	1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
6	Urusan Transmigrasi	5.000.000,00	3.341.500,00	1. DinasTenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	TOTAL URUSAN PILIHAN	**89.411.586.662,00**	**82.298.598.854,00**	

Sumber : Data BPPKAD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024
Per 31 Desember 2023 (Unaudited)

2) Ringkasan Unsur Pendukung, Penunjang, Pengawas, Kewilayahan dan Pemerintahan Umum

Tabel I.27.
Ringkasan Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah
Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2023
Unsur Pendukung, Penunjang, Pengawasan, Kewilayahan dan Pemerintahan Umum

NO	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PELAKSANA URUSAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Unsur Pendukung UrusanPemerintahan	78.040.577.882,00	74.444.358.904,00	1. Sekretariat Daerah 2. Sekretariat DPRD
2	Unsur Penunjang UrusanPemerintahan	505.647.065.373,00	501.417.222.020,00	1. BPPKAD 2. BKD 3. Baperlitbang
3	Unsur Pengawasan UrusanPemerintahan	10.250.612.718,00	9.941.288.613,00	1. Inspektorat
4	Unsur Kewilayahan	59.410.646.562,00	57.393.377.439,00	1. Kecamatan Banjarnegara 2. Kecamatan Bawang 3. Kecamatan Madukara 4. Kecamatan Sigaluh 5. Kecamatan Purwareja Klp. 6. Kecamatan Susukan 7. Kecamatan Mandiraja 8. Kecamatan Purwanegara 9. Kecamatan Wanadadi

NO	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PELAKSANA URUSAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				10. Kecamatan Banjarmangu 11. Kecamatan Rakit 12. Kecamatan Punggelan 13. Kecamatan Karangkobar 14. Kecamatan Wanayasa 15. Kecamatan Kalibening 16. Kecamatan Batur 17. Kecamatan Pagentan 18. Kecamatan Pejawaran 19. Kecamatan Pagedongan 20. Kecamatan Pandanarum
5	Unsur Pemerintahan Umum	37.603.562.645,00	37.380.535.415,00	1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	TOTAL	**690.952.465.180,00**	**680.576.782.391,00**	

Sumber : Data BPPKAD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024
Per 31 Desember 2023 (Unaudited)

Total Anggaran : Rp. 2.264.296.861.000,00

Total Realisasi : Rp. 2.176.004.695.513,00

1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Proses perencanaan merupakan tindakan pengambilan keputusan di depan, mengenai apa, bagaimana, bilamana dan siapa yang berkaitan dengan sesuatu kegiatan dalam mencapai tujuannya. Dalam upaya mencapai tingkat kehidupan yang lebih baik, pemerintah harus menyelenggarakan proses perencanaan pembangunan yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dalam salah satu amanatnya adalah melaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada Tahun 2024. Menindaklanjuti amanat tersebut, kemudian diterbitkanlah Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan

Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, yang menginstruksikan agar Kabupaten/Kota menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023–2026 yang selanjutnya disebut Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten/Kota.

Sebagai salah satu daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2022, maka berdasarkan Inmendagri tersebut, penyusunan RPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 disusun dengan memperhatikan RPJMN Tahun 2020-2024, RPJPD kabupaten Banjarnegara Tahun 2005-2025, hasil evaluasi RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022, RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, isu-isu strategis yang berkembang, kebijakan nasional, dan mengacu pada regulasi yang berlaku. Secara umum, RPD Kabupaten Banjarnegara menjadikan RPJPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005-2025 menjadi acuan penyusunan. Selanjutnya RPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan lebih lanjut akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan APBD.

Isu strategis didefinisikan sebagai kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Sebagai bagian dari wilayah nasional maupun provinsi, pembangunan daerah juga dilaksanakan secara sinergis dengan kebijakan di atasnya. Dalam rangka meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi kawasan, kawasan Banjarnegara menurut Perpres nomor 79 tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes Tegal - Pemalang masuk ke dalam kawasan pendukung dan pemberi nilai tambah pembangunan kawasan. Dalam perpsektif RPJMD Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2013-2018, Kabupaten Banjarnegara sebagai bagian dari kawasan Barlingmascakeb difokuskan pengembangannya ke arah PKN, PKW dan PKL di wilayah Jawa Tengah bagian barat dan selatan. Sektor unggulan yang dapat dikembangkan adalah pertanian, perkebunan, pariwisata, industri dan perikanan, ditunjang oleh agroindustri, peternakan dan perdagangan. Potensi berupa industri unggulan batik, keramik; agropolitan Jakabaya, STA Batur di Kecamatan Batur dengan komoditas sayuran; klaster pariwisata Dieng, keramik Klampok, olahan makanan Barasnack, batik Gumelem; serta destinasi wisata Dieng dan Seruling Mas.

Dari sisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), rencana pengembangan ekonomi wilayah kecamatan di Kabupaten Banjarnegara dibagi menjadi 3 (tiga) wilayah pengembangan yang meliputi : Wilayah pengembangan I dengan pusat pengembangan Kawasan Perkotaan Banjarnegara, meliputi: Kecamatan Madukara, Kecamatan Banjarmangu, Kecamatan Punggelan, Kecamatan Wanadadi, Kecamatan Banjarnegara, Kecamatan Bawang, Kecamatan Pagedongan, dan Kecamatan Sigaluh. Diarahkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL), dan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK). Dengan fungsi wilayah sebagai pusat perdagangan dan jasa, industri, pendidikan, pariwisata, pertanian, sumberdaya energi, dan sumberdaya mineral. Wilayah pengembangan II dengan pusat pengembangan Kawasan Perkotaan Purwareja Klampok, meliputi: Kecamatan Rakit; Kecamatan Purwonegoro; Kecamatan Mandiraja; Kecamatan Purwareja Klampok; dan Kecamatan Susukan. Diarahkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL), dan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK). Dengan fungsi wilayah sebagai Pusat perdagangan dan jasa, hasil kerajinan, pertanian, sumberdaya energi, industri, perikanan darat; dan sumberdaya mineral. Wilayah pengembangan III dengan pusat pengembangan Kawasan Perkotaan Karangkobar, meliputi Kecamatan Batur, Kecamatan Pagentan, Kecamatan Pejawaran, Kecamatan Wanayasa, Kecamatan Kalibening, Kecamatan Pandanarum, dan Kecamatan Karangkobar. Diarahkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLP), dan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK). Dengan fungsi wilayah sebagai Pusat pertanian, pariwisata, agropolitan, konservasi lingkungan, sumberdaya energi, dan sumberdaya mineral.

Dengan melakukan penelaahan terhadap isu/kebijakan dalam RPJMN Tahun 2020-2024, pencapaian visi RPJPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005-2025, isu/kebijakan dalam RPJMD Provinsi

Jawa Tengah Tahun 2018-2023, serta hasil evaluasi RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022, maka isu strategis yang diangkat dalam RPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

1. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia.

   Kondisi terlihat dari masih rendahnya angka rata-rata lama sekolah (6,75 tahun), harapan lama sekolah (11,63 tahun), dan usia harapan hidup (74,28 tahun). Selain itu, pelayanan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat masih terkendala dengan masih rendahnya cakupan pemenuhan SPM.

2. Pemulihan perekonomian daerah yang berjalan lambat.

   Kondisi perekonomian yang terimbas terjadinya pandemi Covid-19 membutuhkan penanganan yang baik. Hal ini ditandai dengan terkontraksinya hampir semua lapangan usaha dalam struktur perekonomian daerah. Oleh karena itu, diperlukan revitalisasi sektor-sektor potensial seperti pariwisata, perdagangan, serta jasa. Sebagai bagian dari pengembangan ekonomi secara nasional dan regional, pengembangan ekonomi Banjarnegara juga disusun sebagai bagian dari pengembangan ekonomi kawasan Purwomanggung (Perpres nomor 79 tahun 2019) maupun pengembangan kawasan Barlingmascakeb. Selain itu, sebagai bagian dari rencana pengembangan ekonomi dan ketahanan pangan, diperlukan penyiapan kawasan peruntukan industri dan kawasan pertanian lahan berkelanjutan.

3. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur.

   Hal ini ditandai dengan persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik 81,23, rendahnya kualitas irigasi, persentase penduduk berakses air minum 95%, dan persentase kepala keluarga terlayani Pengelolaan Sistem Air Limbah 65,24%.

4. Masih belum optimalnya tata Kelola pemerintahan.

   Hal ini ditandai oleh nilai skor SAKIP B, tingkat maturitas SPIP, penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan proporsi Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan daerah.

5. Masih tingginya kemiskinan dan pengangguran.

   Hal ini ditandai dengan persentase penduduk miskin sebesar 16,23% dan tingkat pengangguran 5,86%.

b. Visi Dan Misi Kepala Daerah

1) Visi RPJPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005-2025

Sebagai bagian dari tahapan pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025, maka RPD Tahun 2023-2026 mempedomani RPJPD Tahun 2005-2025, khususnya tahapan keempat dalam penyusunannya. Untuk itu diperlukan pemahaman mengenai visi RPJPD Tahun 2005-2025. Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.

Visi pembangunan dalam RPJPD Tahun 2005-2025 adalah: *"Banjarnegara Maju Berbasis Pertanian".* Visi Pembangunan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005-2025 mengarah pada pencapaian tujuan, cita-cita dan harapan masyarakat Kabupaten Banjarnegara. Visi pembangunan daerah tersebut harus dapat diukur untuk dapat mengetahui tingkat kemandirian, kemajuan, kesejahteraan, dan kelestarian yang ingin dicapai. Oleh karena itu, perlu kiranya diberikan penjelasan makna visi untuk mendapatkan kesamaan persepsi tentang muatan substansi filosofis yang terkandung, sehingga segenap pemangku kepentingan secara sinergis dan optimal dapat memberikan kontribusi dalam rangka pencapaiannya.

Kabupaten *Banjarnegara* diartikan sebagai suatu daerah otonom. Daerah otonom (selanjutnya disebut daerah) adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah menunjukkan suatu kesatuan pemerintahan dan kemasyarakatan beserta semua potensi yang dimiliki.

Maju artinya bahwa pelaksanaan pembangunan daerah senantiasa dilandasi dengan keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik secara fisik maupun nonfisik didukung oleh sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing tinggi, berperadaban tinggi, profesional serta berwawasan ke depan yang luas. Maju juga diarahkan pada terbentuknya daerah yang mampu mengelola segenap potensinya namun tetap mengedepankan pentingnya kerja sama dan sinergitas. Beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai

ukuran tercapainya kondisi maju adalah tercapainya daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat; terbangunnya jaringan sarana dan prasarana pembangunan, pemerintahan dan pelayanan yang merata yang berdampak pada berkurangnya kesenjangan antarwilayah, pembangunan perdesaan dan daerah terpencil; optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan aset- aset daerah dan sumber-sumber keuangan lainnya bagi kepentingan pembangunan; dan meningkatnya investasi dalam pembangunan yang didukung kondusivitas daerah.

Berbasis artinya bahwa pembangunan daerah terkonsentrasi pada salah satu tujuan, sedangkan aspek-aspek yang lain tetap diperhatikan dan dilaksanakan untuk mendukung tercapainya tujuan tersebut.

Pertanian, konsep pertanian dimaksudkan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan daerah, pertanian merupakan konsentrasi selama periode RPJPD. Pertanian yang dimaksud adalah meliputi pertanian tanaman pangan seperti padi, palawija dan hortikultura yang meliputi sayur mayur dan buah-buahan. Di samping pertanian tanaman pangan juga bidang peternakan, perikanan dan perkebunan, yang kesemuanya diharapkan dapat memberikan kontribusi penuh dan besar yang dapat menopang pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

2) Misi RPJPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005-2025

Misi merupakan pernyataan tentang rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025, terdapat penyederhanaan misi dalam RPJPD Tahun 2005-2025, sehingga misi menjadi sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat madani yang agamis, dengan menciptakan masyarakat Banjarnegara yang berkualitas, sehat, cerdas, produktif, kompetitif, kreatif, inovatif dan berakhlak mulia, serta menghargai dan menerapkan nilai-nilai luhur agama dan budaya masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

dan Indeks Pembangunan Gender (IPG), meningkatnya pemerataan pendidikan dan kesempatan memperoleh pendidikan yang layak, meningkatnya akses, pemerataan, dan mutu pelayanan kesehatan, meningkatnya kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, meningkatnya pemenuhan hak-hak dasar bagi penduduk miskin, mantapnya kearifan lokal yang tercermin dalam meningkatnya peradaban, harkat, dan martabat manusia, dan menguatnya jati diri dan kepribadian masyarakat, meningkat dan menguatnya sumber daya manusia dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam berbagai bidang, meningkatnya karakter masyarakat yang berbudaya yang mendasarkan pada kearifan lokal dan jati diri, serta meningkatnya kesadaran dan pengamalan agama dalam kehidupan sehari-hari sehingga membentuk karakter masyarakat bermoral dan berakhlak mulia.

2. Mewujudkan perekonomian rakyat yang maju dengan mengembangkan serta memperkuat perekonomian daerah melalui sektor pertanian yang berorientasi pada pasar dengan senantiasa menjaga kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan dalam pengelolaannya melalui regulasi yang tepat dalam mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif dalam rangka menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman dan damai yang ditandai dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga pendapatan per kapita pada akhir periode pembangunan jangka panjang mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan kabupaten-kabupaten yang maju di Indonesia, meningkatnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif (sektor pertanian, perdagangan, perindustrian, dan pariwisata didukung dengan sektor lain) yang berdaya saing tinggi menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien sehingga menghasilkan komoditi pertanian yang berkualitas, berdaya saing global, menjadi motor penggerak perekonomian sekaligus mendorong peningkatan sumber-sumber pembiayaan pembangunan, disertai dengan peningkatan kualitas pelayanan lebih bermutu, meningkatnya ketersediaan kebutuhan pokok dan dapat dipertahankan pada tingkat aman melalui swasembada pangan dan disertai dengan tersedianya instrumen jaminan pangan di masyarakat melalui revitalisasi pertanian dalam

arti luas, meningkatnya sektor pertanian ke arah agribisnis dan agroindustri serta agrowisata yang didukung dengan meningkatnya perdagangan dalam usaha untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatnya pemanfaatan aset dan produk daerah yang berdaya saing tinggi sebagai sumber kekayaan daerah, meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup yang dicerminkan oleh tetap terjaganya fungsi, daya dukung, dan kemampuan pemulihannya dalam mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi dan seimbang, meningkatnya keterpeliharaan kekayaan keragaman jenis dan kekhasan sumber daya alam untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing, dan modal pembangunan daerah, meningkatnya kualitas sumber daya air, udara, dan tanah sesuai baku mutu dan terlindunginya kesehatan masyarakat dari dampak akibat pencemaran, meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, serta mengurangi dampak bencana alam, menurunnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial, tercapainya penduduk tumbuh seimbang, serta berkurangnya tindak kekerasan berbasis gender dan anak tanpa diskriminasi, menurunnya tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin, meningkatnya upaya perlindungan HAM dan meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, meningkatnya kestabilan situasi dan kondisi perikehidupan bermasyarakat yang didukung oleh penegakan HAM dan terwujudnya kesetaraan gender, meningkatnya keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat Kabupaten Banjarnegara, meningkatnya upaya-upaya yang dilakukan untuk menjaga dan memelihara persatuan, kesatuan serta kerukunan masyarakat, serta meningkatnya perlindungan dan pengayoman terhadap masyarakat dari segala tindak kejahatan.

3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam kehidupan politik yang demokratis dan bertanggung jawab yang ditandai dengan meningkatnya partisipasi dan kesadaran politik masyarakat terutama menyangkut hak dan kewajiban warga negara serta institusionalisasi partai politik dalam kegiatan politik, meningkatnya profesionalisme aparatur daerah untuk mewujudkan

tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, beretika, dan bertanggung jawab, serta mampu mendukung pembangunan daerah yang bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar mutu pelayanan yang berorientasi pada terciptanya kepuasan masyarakat, meningkatnya perkembangan sistem dan iklim demokrasi pada berbagai aspek kehidupan politik yang dapat diukur dengan adanya pemerintahan yang berdasarkan hukum, birokrasi yang profesional dan netral, dan masyarakat yang mandiri, Meningkatnya kemampuan dan kemandirian daerah dalam mendukung pembangunan daerah, menguatnya kelembagaan lokal yang mampu mengakomodasi tuntutan perubahan dan berperan aktif dalam pembangunan daerah, serta meningkatnya hubungan kerja sama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak pada tingkat lokal, nasional, dan internasional.

4. Mewujudkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dasar yang ditandai dengan meningkatnya infrastruktur wilayah dan yang andal sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas faktor-faktor yang mendukung berkembangnya aktivitas produksi dan mampu membuka isolasi daerah serta membentuk kawasan-kawasan pertumbuhan baru, meningkatnya perumahan rakyat layak huni yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukungnya untuk mewujudkan daerah tanpa permukiman kumuh, meningkatnya keterpenuhan dan pemerataan kebutuhan prasarana dan sarana pelayanan dasar di seluruh wilayah perdesaan dan perkotaan dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatnya jaringan irigasi, bendung dalam rangka menciptakan ketahanan pangan.

3) Tahapan dan Skala Prioritas Periode keempat (2020-2024) RPJPD Tahun 2005-2025

Berlandaskan pada pelaksanaan, pencapaian, serta sebagai kelanjutan dari periode sebelumnya yang diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Banjarnegara yang maju berbasis pertanian melalui akselerasi pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur kehidupan sosial budaya dan ekonomi masyarakat Banjarnegara yang kokoh berlandaskan keunggulan

kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Dalam rangka mencapai tujuan akhir maka pada tahap ini pembangunan diselenggarakan untuk mencapai daerah agropolitan, mencakup tahapan sebagai berikut:

1. Pemantapan pelayanan pendidikan dasar yang bermutu didukung oleh sarana prasarana yang memadai dan tenaga pendidik yang berkompetensi, serta kurikulum pendidikan dasar yang sesuai dengan iptek, jenjang pendidikan lebih tinggi, dan pangsa pasar kerja.
2. Pemantapan peranan pemuda dalam pembangunan yang didukung oleh peningkatan kreativitas, keterampilan, seni budaya, dan olahraga, serta kewirausahaan yang berbasis pada penggunaan dan pemanfaatan teknologi.
3. Penyerapan tenaga kerja yang tinggi pada sektor industri dan pertanian.
4. Pengembangan riset yang mengarah pada penciptaan teknologi baru.
5. Pemantapan pelayanan perpustakaan berbasis teknologi informasi yang dapat berfungsi untuk mencerdaskan masyarakat.
6. Pemantapan pelayanan kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan perseorangan/rujukan yang prima dengan mendayagunakan tenaga kesehatan yang profesional, serta didukung oleh sistem jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat yang andal.
7. Pemantapan sistem pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan pengaturan persebarannya melalui KB dan transmigrasi mandiri.
8. Pemantapan penguasaan iptek di berbagai bidang secara kompetitif dalam mewujudkan kemandirian daerah dan kesejahteraan masyarakat.
9. Pemantapan karakter masyarakat yang mempunyai jati diri yang tangguh, bermoral, dan mampu bersaing dengan tetap berlandaskan pada nilai-nilai agama dan budaya lokal yang memiliki ketahanan dalam dinamika pergaulan nasional, regional, dan internasional.
10. Pelestarian nilai-nilai kearifan budaya lokal dalam rangka memperkuat jati diri dalam pergaulan nasional maupun internasional.

11. Pemantapan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama disertai pembinaan dan pemeliharaan kerukunan hubungan antarumat beragama.
12. Pemantapan UMKM yang mempunyai keunggulan kompetitif dan komparatif di pasar global yang berbasis teknologi informasi.
13. Pemantapan struktur perekonomian yang didukung oleh produk-produk unggulan yang mempunyai nilai ekonomi strategis, berkualitas, serta mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif di pasar global.
14. Pemantapan pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan yang diarahkan untuk menghasilkan produk-produk yang bertumpu pada sistem agribisnis guna menjamin ketahanan dan swasembada pangan, serta peningkatan nilai tambah produk ekspor.
15. Pemantapan kualitas dan pemasaran produk pada sektor perindustrian, perdagangan, dan pariwisata.
16. Meningkatkan keragaman kegiatan perekonomian kawasan agropolitan dan wilayah penyangganya.
17. Pembangunan industri yang terarah sesuai dengan kluster dan potensi di daerah yang bersangkutan, serta memperhatikan tata wilayah untuk mewujudkan pembangunan yang terintegrasi dan teratur.
18. Pemantapan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup berbasis kelembagaan masyarakat dalam rangka menjaga keberlanjutan fungsi dalam menopang kehidupan.
19. Pelestarian sumber daya genetis berbasis masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
20. Pemantapan manajemen pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas daya tampung dan daya dukung lingkungan.
21. Pemantapan fungsi kelembagaan dan sistem pengurangan risiko bencana.
22. Pemantapan sistem dan kelembagaan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan pemberdayaan penduduk usia lanjut melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas.

23. Pemantapan kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai bidang kehidupan serta perlindungan anak dan remaja sesuai dengan norma-norma agama dan falsafah Pancasila.
24. Pemantapan kondisi perekonomian daerah yang berkelanjutan dalam rangka memperluas kesempatan kerja, pengurangan dan pengentasan kemiskinan.
25. Pemantapan budaya penegakan hukum guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi supremasi hukum.
26. Pemantapan sistem dan pelestarian tata pengelolaan kehidupan bermasyarakat yang memahami dan menerapkan prinsip-prinsip dasar hukum dan HAM.
27. Pemantapan kondisi keamanan dan ketertiban melalui program/kegiatan yang mengutamakan keterpaduan aparat dan masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban serta menjaga kerukunan sosial dalam kehidupan masyarakat serta melibatkan masyarakat sebagai salah satu unsur utama dalam membangun pertahanan negara dengan tetap memperhatikan penegakan hukum dan HAM.
28. Pemantapan perlindungan terhadap masyarakat, penghargaan yang tinggi terhadap penegakan hukum dan peradilan untuk menjaga dan memelihara keamanan, ketertiban, persatuan, dan kesatuan serta kerukunan masyarakat dalam rangka mewujudkan terjaminnya keamanan dan ketertiban.
29. Pemantapan sistem dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance melalui peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan keadilan, serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
30. Pemantapan sistem budaya kerja aparatur yang berkualitas, profesional, bersih, beretika, dan berwibawa dalam rangka menunjang tata pengelolaan pemerintahan yang baik.
31. Pemantapan sistem dan akses pelayanan publik melalui peningkatan kompetensi sesuai kewenangan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada bidang pelayanan dasar dan penunjang yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan dan pengangguran.

32. Pemantapan sistem demokrasi, politik, dan penegakan hukum serta HAM melalui peningkatan kedewasaan politik rakyat serta penegakan hukum yang dilandasi prinsip transparansi, keadilan, dan HAM.
33. Pemantapan sistem perencanaan yang implementatif dan berkualitas yang berorientasi pada pemanfaatan sumber daya pembangunan secara sinergis.
34. Pemantapan kerja sama dan kemitraan strategis pada seluruh sektor pembangunan dengan tetap berbasis jati diri budaya masyarakat Banjarnegara dalam mengantisipasi kemajuan dan pengaruh globalisasi.
35. Semakin terbukanya peluang investasi domestik atau investasi asing untuk masuk ke daerah melalui perbaikan iklim investasi dan kebijakan yang mendukung dengan adanya kemunculan kutub-kutub pertumbuhan yang mampu menjadi motor penggerak perekonomian.
36. Terwujudnya perekonomian daerah yang mandiri dan saling mendukung satu sama lain serta sistem kelembagaan yang mantap dan terintegrasi.
37. Memperluas kerja sama dengan institusi nasional atau internasional yang akan mendukung perkembangan industri pertanian.
38. Terwujudnya keterkaitan kegiatan ekonomi antar wilayah perkotaan dan perdesaan dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang saling menguntungkan, sehingga terjadi keseimbangan pertumbuhan antara perdesaan dan perkotaan.
39. Pemantapan sistem transportasi yang berorientasi pada keamanan dan kenyamanan serta pemenuhan kebutuhan transportasi massal yang andal.
40. Pemenuhan kebutuhan rumah dan permukimannya yang berkualitas dalam menunjang perekonomian daerah, kesejahteraan masyarakat, dan lingkungan hidup.
41. Pemantapan prasarana dan sarana sumberdaya air dan irigasi untuk mendukung aktivitas produksi yang handal dan berdaya saing, dan terpenuhinya secara mantap kebutuhan prasarana dasar perdesaan dan perkotaan, dalam rangka peningkatan kemandirian, kualitas hidup, dan kesejahteraan masyarakat.

42. Pemantapan penatagunaan pertanahan, administrasi, dan hukum; pemanfaatan dan pengendalian pertanahan untuk menunjang perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.
43. Pemantapan sistem penataan ruang yang nyaman, produktif, dan berkelanjutan melalui pemantapan penerapan perencanaan tata ruang; pemantapan dan pengembangan pemanfaatan ruang; dan peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang untuk menunjang perekonomian daerah, pelestarian fungsi lingkungan hidup, dan kesejahteraan masyarakat.
44. Pemantapan sistem manajemen penyelenggaraan telekomunikasi dan telematika yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat yang berstandar internasional baik dari aspek kelembagaan, organisasi, maupun regulasinya.
45. Pemantapan pasokan kebutuhan energi listrik bagi masyarakat luas (rumah tangga dan industri) secara konsisten melalui peningkatan sistem dan pemantapan manajemen operasi dan pemeliharaan jaringan distribusi secara terpadu.
46. Pemantapan pemerataan dan keserasian pembangunan wilayah kecamatan untuk meningkatkan daya saing dalam menunjang perekonomian daerah, kesejahteraan masyarakat, dan lingkungan hidup melalui pemantapan pembangunan kawasan strategis, keserasian peran, dan fungsi perkotaan dan perdesaan, serta ketersediaan infrastruktur wilayah yang andal.
47. Penciptaan Tata Ruang sesuai dengan hirarki perencanaan (RTRW Kabupaten) sebagai daerah pertanian yang memperhatikan koordinasi dan sinkronisasi pembangunan antar sektor dan antar wilayah.

4) Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan, sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Dengan kata lain tujuan dan sasaran merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Tujuan dan sasaran dalam RPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 diuraikan sebagai berikut:

Tujuan 1 : Meningkatnya kondusivitas wilayah

Sasaran :
1. Tertanganinya kejadian konflik antar kelompok masyarakat, suku dan agama.
2. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan masyarakat dalam penanggulangan bencana.

Tujuan 2 : Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai kehidupan bermasyarakat dan berdemokrasi

Sasaran :
1. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat.
2. Meningkatnya penghargaan masyarakat terhadap nilai-nilai kebudayaan dan kearifan lokal.
3. Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan dengan memperhatikan hak-hak anak.

Tujuan 3 : Meningkatnya kinerja perekonomian daerah

Sasaran :
1. Meningkatnya kesempatan lapangan berusaha.
2. Meningkatnya kesempatan kerja.
3. Meningkatnya pemerataan pembangunan.
4. Meningkatnya stabilitas harga.
5. Meningkatnya daya saing daerah

Tujuan 4 : Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan

Sasaran : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang meliputi kualitas udara, kualitas air sungai, dan tutupan lahan.

Tujuan 5 : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah

Sasaran : Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

Tujuan 6 : Meningkatnya kualitas layanan publik

Sasaran : Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik.

Tujuan 7 : Meningkatnya cakupan pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar yang berkualitas.

Sasaran :
1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.
2. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan Pendidikan.
3. Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah.
4. Meningkatnya cakupan rumah layak huni.
5. Menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Tujuan dan sasaran jangka menengah selama periode RPD Tahun 2023-2026 disajikan pada tabel berikut:

Tabel I.28.
Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Tahun 2023 - 2026 Kabupaten Banjarnegara

NO	MISI, TUJUAN DAN SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2022	TARGET CAPAIAN				KONDISI AKHIR
						2023	2024	2025	2026	
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Misi 1	**:**	**Mewujudkan masyarakat madani yang agamis, dengan menciptakan masyarakat Banjarnegara yang berkualitas, sehat, cerdas, produktif, kompetitif, kreatif, inovatif dan berakhlak mulia, serta menghargai dan menerapkan nilai-nilai luhur agama dan budaya masyarakat.**								
Tujuan	**:**									
1	Meningkatkan kondusivitas wilayah	1	Indeks ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan mayarakat	Angka	74,79	76,00	76,50	77	77,50	77,50
Sasaran	**:**									
1	Tertanganinya kejadian konflik antar kelompok masyarakat, suku dan agama	1	Persentase penanganan konflik sosial	%	NA	100	100	100	100	100
2	Meningkatnya Kualitas Kesiapsiagaan Dalam Ketanggapdaruratan Bencana	1	Persentase desa tangguh bencana	%	45,64	40	40	42	44	44
Tujuan	**:**									
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap nilai-	1	Persentase penggunaan hak pilih Pilkades	%	NA	-	80,50	80,65	-	80,65

NO	MISI, TUJUAN DAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	KONDISI AWAL 2022	TARGET CAPAIAN				KONDISI AKHIR
						2023	2024	2025	2026	
1	*2*	*3*		*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	nilai kehidupan bermasyarakat dan berdemokrasi	2	Persentase penggunaan hak pilih Pilgub	%	NA	-	75	-	-	75
		3	Persentase penggunaan hak pilih Pilbup	%	NA	-	75	-	-	75
		4	Persentase penggunaan hak pilih Pileg	%	NA	-	75	-	-	75
		5	Persentase penggunaan hak pilih pilpres	%	NA	-	75	-	-	75
Sasaran :										
3	Meningkatnya partisipasi politik masyarakat	1	Persentase penggunaan hak pilih Pilkades	%	NA	-	80,50	80,65	-	80,65
		2	Persentase penggunaan hak pilih Pilgub	%	NA	-	75	-	-	75
		3	Persentase penggunaan hak pilih Pilbup	%	NA	-	75	-	-	75
		4	Persentase penggunaan hak pilih Pileg	%	NA	-	75	-	-	75
		5	Persentase penggunaan hak pilih pilpres	%	NA	-	75	-	-	75
4	Meningkatnya penghargaan masyarakat terhadap nilai-nilai kebudayaan dan	1	Indeks kebudayaan	Angka	83	65	67	69	71	71

NO	MISI, TUJUAN DAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	KONDISI AWAL 2022	TARGET CAPAIAN				KONDISI AKHIR
						2023	2024	2025	2026	
1	*2*	*3*		*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	kearifan lokal									
5	Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan dengan memperhatikan hak-hak anak	1	Indeks Pemberdayaan Gender	Angka	73,70	73,70	74,20	74,70	75,20	75,20
Misi 2 :	**Mewujudkan perekonomian rakyat yang maju dengan mengembangkan serta memperkuat perekonomian daerah melalui sektor pertanian yang berorientasi pada pasar dengan senantiasa menjaga kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan dalam pengelolaannya melalui regulasi yang tepat dalam mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif dalam rangka menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman dan damai**									
Tujuan :										
3	Meningkatnya kinerja perekonomian daerah	1	Laju pertumbuhan ekonomi	%	5,29	4,50 – 5,50	4,50 – 5,50	4,50 – 5,50	4,50 – 5,50	4,50 – 5,50
		2	PDRB per kapita	Juta Rupiah	24,9	>22,40	>22,60	>22,80	>23,00	>23,00
		3	Nilai Tukar Petani	%	105,66	103 – 106	103 – 106	103 – 106	103 – 106	103 – 106
Sasaran :										
6	Meningkatnya kesempatan lapangan berusaha	1	Persentase peningkatan nilai investasi	%	NA	1	1,5	2,5	4	4
7	Meningkatnya kesempatan kerja	1	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,38	< 5	<4,75	<4,5	<4,25	<4,25

NO	MISI, TUJUAN DAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	KONDISI AWAL 2022	TARGET CAPAIAN				KONDISI AKHIR
						2023	2024	2025	2026	
1	*2*	*3*		*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
8	Meningkatnya pemerataan pembangunan	1	Indeks Gini	Angka	NA	0,36	0,36	0,35	0,35	0,35
		2	Indeks Ketimpangan Williamson	Angka	0,56*	0,42	0,40	0,38	0,35	0,35
9	Meningkatnya stabilitas harga	1	Laju inflasi	%	6,49	3 ± 1	3 ± 1	3 ± 1	3 ± 1	3 ± 1
10	Meningkatnya daya saing daerah	1	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	2,83	3,00	3,10	3,20	3,30	3,30
Tujuan :										
4	Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	64,08	67,5	68,5	68,75	69	69
Sasaran :										
11	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang meliputi kualitas udara, kualitas air sungai, dan tutupan lahan	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	64,08	67,5	68,5	68,75	69	69
Misi 3 :										
Tujuan :										
5	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	1	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	61,66	64,00	65,00	66,00	67,00	67,00

NO	MISI, TUJUAN DAN SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2022	TARGET CAPAIAN				KONDISI AKHIR
						2023	2024	2025	2026	
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Sasaran :										
12	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	1	Nilai SAKIP	Nilai	B	B	B	B	B	B
		2	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Tujuan :										
6	Meningkatnya kualitas layanan publik	1	Indeks Inovasi Daerah	Angka	41,77	45	50	55	60	60
Sasaran :										
13	Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik	1	Survey Kepuasan Masyarakat	Angka	82,75	84,34	85,00	85,34	86,00	86,00
Misi 4 : Mewujudkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dasar										
Tujuan :										
7	Meningkatnya cakupan pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar yang berkualitas	1	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	68,61	68	68,25	68,50	68,75	68,75
		2	Persentase penduduk miskin	%	15,20	15,64 – 14,46	14,46 – 13,64	13,64 – 12,46	12,46 – 11,64	12,46 – 11,64
Sasaran :										
14	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1	Menurunnya angka kematian neonatal	Per 1000 KH	NA	8,5	8	7,5	7	7
		2	Angka Harapan Hidup	Tahun	74,37	74,48	74,68	74,88	75,08	75,08

NO	MISI, TUJUAN DAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	KONDISI AWAL 2022	TARGET CAPAIAN				KONDISI AKHIR
						2023	2024	2025	2026	
1	*2*	*3*		*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
		3	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 KH	NA	210	190	170	150	150
		4	Angka Kematian Bayi	Per 1000 KH	NA	12,5	12,3	12,1	11,9	11,9
		5	Prevalensi stunting	%	NA	19	18	17	16	16
15	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan	**1**	Angka harapan lama sekolah	Tahun	11,81	11,65	11,66	11,67	11,69	11,69
		2	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	6,80	6,80	6,85	6,90	7,01	7,01
16	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	**1**	Indeks Kemahalan Konstruksi	%	NA	92,50	92	91,50	91,00	91,00
17	Meningkatnya cakupan rumah layak huni	**1**	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	87,12	82	84	86	88	88
18	Menurunnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	**1**	Persentase penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial/ Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	%	5,64	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

Sumber : Data Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara, 2022

c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPD Tahun 2023-2026. Program prioritas yang akan dilaksanakan selama tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

Tujuan 1: Meningkatnya kondusivitas wilayah

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

1. Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum
2. Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya
3. Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial
4. Program penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan
5. Program penanggulangan bencana
6. Program penanganan bencana
7. Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran.

Tujuan 2: Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap nilai- nilai kehidupan bermasyarakat dan berdemokrasi

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

1. Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik
2. Program pengembangan kebudayaan
3. Program penelitian dan pengembangan daerah
4. Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan
5. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Tujuan 3: Meningkatnya kinerja perekonomian daerah

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

1. Program pengembangan iklim penanaman modal
2. Program penyelenggaraan penataan ruang
3. Program pengelolaan perikanan budidaya
4. Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
5. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian

6. Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian
7. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
8. Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata
9. Program pemasaran pariwisata
10. Program pengembangan UMKM
11. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
12. Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi
13. Program peningkatan sarana distribusi perdagangan
14. Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri
15. Program penempatan tenaga kerja
16. Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja
17. Program hubungan industrial
18. Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah.
19. Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting
20. Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif.

Tujuan 4: Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

1. Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
2. Program pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI).

Tujuan 5: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

1. Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
2. Program penyelenggaraan pengawasan
3. Program pengelolaan keuangan daerah
4. Program pengelolaan pendapatan daerah
5. Program pengembangan sumber daya manusia
6. Program administrasi pemerintahan desa
7. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

Tujuan 6: Meningkatnya kualitas layanan publik

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

1. Program administrasi umum

2. Program penunjang urusan pemerintah kabupaten/kota
3. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Tujuan 7: Meningkatnya cakupan pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar yang berkualitas

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

1. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat.
2. Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan
3. Program pengelolaan pendidikan
4. Program pendidik dan tenaga kependidikan
5. Program pengelolaan pendidikan
6. Program penyelenggaraan jalan
7. Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase
8. Program penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
9. Program peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)`
10. Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh
11. Program pengembangan perumahan
12. Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum
13. Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah
14. Program perlindungan jaminan sosial
15. Program pemberdayaan sosial
16. Program rehabilitasi sosial.

d. Kegiatan pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan tahunan.

Dengan ditetapkannya arah kebijakan tahunan dalam RPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026, maka RKPD Tahun 2023 mengambil tema “Pemulihan Perekonomian melalui Peningkatan Daya Saing Daerah’’. Kebijakan tahun 2023 diarahkan pada:

1. Peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing, dengan fokus pada:
   a. Meningkatkan pemerataan akses dan kualitas pendidikan, terutama bagi masyarakat miskin dan wilayah dengan akses rendah;
   b. Meningkatkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi;

c. Meningkatan pengetahuan, sikap dan perilaku hidup bersih dan sehat pada masyarakat;
d. Peningkatan kerja sama pengembangan riset daerah;
e. Melestarikan kesenian lokal, benda dan bangunan cagar budaya;
f. Peningkatan kualitas pemenuhan hak anak dan perempuan
g. Meningkatkan minat dan budaya baca.

2. Penguatan perekonomian daerah berbasis pertanian, dengan fokus pada:
   a. Menyediakan regulasi dan prosedur perizinan yang pro investasi;
   b. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung investasi;
   c. Penyediaan Mal Pelayanan Publik;
   d. Peningkatan jumlah wirausaha;
   e. Memfasilitasi sarana dan prasarana produksi pertanian dan perikanan;
   f. Meningkatkan kualitas pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi;
   g. Meningkatkan sarana dan prasarana pariwisata serta aksesibilitas destinasi wisata;
   h. Peningkatan kapasitas ekonomi kreatif
3. Peningkatan konektivitas antarwilayah, dengan fokus pada:
   a. Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan
   b. pendukung perekonomian;
   c. Mendorong terbukanya aksesibilitas kawasan untuk
   d. pertumbuhan ekonomi;
   e. Mengembangkan pusat-pusat kegiatan ekonomi lokal.
4. Penanganan kemiskinan ekstrim dan pengurangan pengangguran, dengan fokus pada:
   a. Meningkatkan koordinasi antar lembaga terkait dalam rangka pelaksanaan strategi penanggulangan kemiskinan;
   b. Perluasan kesempatan kerja dan lapangan berusaha;
   c. Penguatan koordinasi dan jaringan kemitraan dengan berbagai pihak mengenai bantuan RTLH;
   d. Peningkatan akses air minum dan sanitasi;
   e. Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan.
   a. Peningkatan kapasitas fiskal daerah;
   b. Penyederhanaan prosedur untuk mengakses layanan publik;

c. Fasilitasi pendidikan dan pelatihan SDM aparatur;
d. Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi pembangunan daerah;
e. Meningkatkan kualitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
f. Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan.

6. Peningkatan kondusivitas wilayah, dengan fokus pada:
   a. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar lembaga terkait dalam menciptakan ketenteraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat;
   b. Meningkatkan pendidikan politik pada segmen pemilih rentan;
   c. Meningkatkan toleransi dan kerukunan antar dan intra umat beragama;
   d. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana;
   e. Meningkatkan penanganan pasca bencana.

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional tahun 2023 dan RKP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, maka ditetapkan sasaran makro pembangunan Kabupaten Banjarnegara tahun 2023 sebagai berikut:

1) Pertumbuhan ekonomi antara 4,50 – 5,50%;
2) Laju inflasi sebesar 3% ± 1%;
3) PDRB per kapita sebesar lebih dari Rp. 22 juta;
4) Persentase penduduk miskin sebesar 15,35 – 14,35%;
5) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,5% - 5,00%; dan
6) IPM sebesar 68,34

Kegiatan pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan tahunan Kabupaten Banjarnegara tahun 2023. dilaksanakan melalui rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahun 2023 dijabarkan ke dalam semua urusan yang menjadi kewenangan Kabupaten Banjarnegara, yaitu sebagai berikut:

Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota terdiri dari 12 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah; Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang

Urusan Pemerintahan Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Peningkatan Pelayanan BLUD; Penataan Organisasi; Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD. Dengan 42 sub kegiatan yaitu Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD; Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD; Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD; Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan; Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi; Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya; Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Bahan Logistik Kantor; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan; Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya; Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya; Penyediaan Jasa Surat Menyurat; Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor; Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya; Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD; Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan; Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana; Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi; Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut

Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD; Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD; Pelaksanaan Medical Check Up DPRD. Pelaksanaan program ini salah satunya untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah sebesar 100 %.

A. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar.

a. Urusan Pendidikan

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Pendidikan.

Program pengelolaan pendidikan terdiri dari 4 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan pengelolaan pendidikan sekolah dasar, pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama, pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD), pengelolaan pendidikan nonformal/kesetaraan.

b. Program Pengembangan Kurikulum.

Program pengembangan kurikulum terdiri dari 1 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar.

c. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Program pendidikan dan tenaga kependidikan terdiri dari 1 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan dasar, paud, dan pendidikan nonformal/kesetaraan.

b. Urusan Kesehatan

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.

Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat terdiri dari 4 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Sistem

Informasi Kesehatan secara Terintegrasi, Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan terdiri dari 2 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota; Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman.

Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman terdiri dari 5 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT); Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga; Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga; Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM); Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga.

d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan terdiri dari 3 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota; Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota; Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya

Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

c. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Program pengelolaan sumber daya air (SDA) terdiri dari 2 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota; Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase.

Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase terdiri dari 1 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota.

c. Program Penataan Bangunan Gedung.

Program penataan bangunan gedung terdiri dari 1 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung.

d. Program Penyelenggaraan Jalan

Program penyelenggaraan jalan terdiri dari 1 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota.

e. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Program pengembangan jasa konstruksi terdiri dari 1 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi.

f. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Program penyelenggaraan penataan ruang terdiri dari 4 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota; Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota; Koordinasi dan Sinkronisasi

Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota; Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota.

g. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.

Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum terdiri dari 1 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota.

h. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah.

Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah terdiri dari 1 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota.

d. Urusan Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Perumahan

Program pengembangan perumahan terdiri dari 4 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota; Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota; Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota; Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan.

b. Program Kawasan Permukiman.

Program kawasan permukiman terdiri dari 3 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman; Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha; Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha.

c. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh.

Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh terdiri dari 1 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Pencegahan

Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota.

d. Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU).

Program peningkatan Prasrana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) terdiri dari 1 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan.

e. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman terdiri dari 1 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil.

e. Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat.

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum terdiri dari 2 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota; Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota.

b. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.

Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran terdiri dari 1 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran.

c. Program Penanggulangan Bencana.

Program penanggulangan bencana terdiri dari 4 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota; Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Terhadap Bencana; Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana; Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana.

f. Urusan Sosial.

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pemberdayaan Sosial

Program pemberdayaan sosial terdiri dari 2 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota; Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota.

b. Program Rehabilitasi Sosial

Program rehabilitasi sosial terdiri dari 2 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial; Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial.

c. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Program perlindungan dan jaminan sosial terdiri dari 1 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.

d. Program Penanganan Bencana

Program penanganan bencana terdiri dari 2 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota; Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota.

e. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.

Program pengelolaan taman makam pahlawan terdiri dari 1 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota.

B. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar.

1. Urusan Tenaga Kerja.

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan Tenaga Kerja.

Program perencanaan tenaga kerja terdiri dari 1 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK).

b. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja terdiri dari 2 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi; Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil.

c. Program Penempatan Tenaga Kerja.

Program penempatan tenaga kerja terdiri dari 3 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota; Pengelolaan Informasi Pasar Kerja; Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota.

d. Program Hubungan Industrial.

Program hubungan industrial terdiri dari 2 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota; Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota.

2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.

Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan terdiri dari 3 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota; Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota; Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota.

b. Program Perlindungan Perempuan

Program perlindungan perempuan terdiri dari 1 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota.

c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga.

Program peningkatan kualitas keluarga terdiri dari 2 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota; Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota.

d. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak.

Program pengelolaan sistem data gender dan anak terdiri dari 1 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

e. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA).

Program pemenuhan hak anak (PHA) terdiri dari 2 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota; Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota.

f. Program Perlindungan Khusus Anak.

Program perlindungan khusus anak terdiri dari 2 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota; Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

3. Urusan Pangan.

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan.

Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan terdiri dari 1 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

b. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat.

Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat terdiri dari 3 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan; Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota; Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi.

c. Program Penanganan Kerawanan Pangan.

Program penanganan kerawanan pangan terdiri dari 2 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan; Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota.

d. Program Pengawasan Keamanan Pangan.

Program pengawasan keamanan pangan terdiri dari 1 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota.

4. Urusan Lingkungan Hidup.

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup.

Program perencanaan lingkungan hidup terdiri dari 1 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota.

b. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terdiri dari 1 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.

c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

Program pengelolaan keanekaragaman hayati terdiri dari 1 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota.

d. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) terdiri dari 1 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

e. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat.

Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat terdiri dari 1 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

f. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat terdiri dari 1 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

g. Program Pengelolaan Persampahan.

Program pengelolaan persampahan terdiri dari 1 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Pengelolaan Sampah.

5. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pendaftaran Penduduk.

Program pendaftaran penduduk terdiri dari 4 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk; Penataan Pendaftaran Penduduk; Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk; Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk.

b. Program Pencatatan Sipil

Program pencatatan sipil terdiri dari 3 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan pelayanan pencatatan sipil, penyelenggaraan pencatatan sipil; pembinaan dan pengawasan penyelenggaran pencatatan sipil.

c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan terdiri dari 3 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan pemyajian database kependudukan; Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan; Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi administarsi kependudukan.

d. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

Program profil kependudukan terdiri dari 3 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan.

6. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penataan Desa

Program penataan desa terdiri dari 1 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa.

b. Program Peningkatan Kerjasama Desa

Program peningkatan kerjasama desa terdiri dari 1 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Fasilitasi Kerja sama antar Desa.

c. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Program administrasi pemerintahan desa terdiri dari 1 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa.

d. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.

Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat terdiri dari 1 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat

Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota.

7. Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana.

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengendalian Penduduk.

Program pengendalian penduduk terdiri dari 2 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk; Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.

b. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB).

Program pembinaan keluarga berencana (KB) terdiri dari 4 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal; Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB); Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota; Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB.

c. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS).

Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera terdiri dari 1 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

8. Urusan Perhubungan.

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) terdiri dari 11 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Penetapan

Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota; Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota; Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C; Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir; Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor; Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota; Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota; Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan; Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota; Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota; Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

9. Urusan Komunikasi dan Informatika.

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.

Program informasi dan komunikasi publik terdiri dari 1 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

b. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika.

Program aplikasi informatika terdiri dari 2 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

10. Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah.

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi.

Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi terdiri dari 1 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota.

b. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi.

Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi terdiri dari 1 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.

c. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

Program pendidikan dan latihan perkoperasian terdiri dari 1 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota.

d. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi.

Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi terdiri dari 1 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota.

e. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM).

Program pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) terdiri dari 1 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan.

f. Program Pengembangan UMKM.

Program pengembangan UMKM terdiri dari 1 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil.

11. Urusan Penanaman Modal.

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Program pengembangan iklim penanaman modal terdiri dari 1 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota.

b. Program Promosi Penanaman Modal.

Program promosi penanaman modal terdiri dari 1 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

c. Program Pelayanan Penanaman Modal.

Program pelayanan penanaman modal terdiri dari 1 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota.

d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal terdiri dari 1 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

12. Urusan Kepemudaan dan Olahraga.

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan.

Program pengendalian perizinan pendidikan terdiri dari 2 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota, dan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

b. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan.

Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan terdiri dari 3 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi, dan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga.

c. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

Program pengembangan kapasitas kepramukaan terdiri dari 1 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan.

13. Urusan Statistik.

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral.

Program penyelenggaraan statistik sektoral terdiri dari 1 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota.

14. Urusan Persandian.

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi.

Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi terdiri dari 1 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

15. Urusan Kebudayaan.

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Kebudayaan.

Program pengembangan kebudayaan terdiri dari 1 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota.

b. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya terdiri dari 1 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota.

16. Urusan Perpustakaan.

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pembinaan Perpustakaan.

Program pembinaan perpustakaan terdiri dari 2 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota; Pembudayaan gemar membaca tingkat daerah kabupaten/kota. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

17. Urusan Kearsipan.

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Arsip.

Program pengelolaan arsip terdiri dari 2 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota; Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota; Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota.

b. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip.

Program perlindungan dan penyelamatan arsip terdiri dari 3 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun; Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota; Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang.

c. Program Perizinan Penggunaan Arsip.

Program perizinan penggunaan arsip terdiri dari 1 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota.

C. Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Urusan Kelautan dan Perikanan

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap.

Program pengelolaan perikanan tangkap terdiri dari 1 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.

b. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya.

Program pengelolaan perikanan budidaya terdiri dari 2 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil; Pengelolaan Pembudidayaan Ikan.

c. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan terdiri dari 1 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota.

d. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan terdiri dari 1 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota.

2. Urusan Pariwisata

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata.

Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata terdiri dari 3 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota; Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota; Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota.

b. Program Pemasaran Pariwisata.

Program pemasaran pariwisata terdiri dari 1 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota.

c. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif terdiri dari 1 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif.

d. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif terdiri dari 2 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar; Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif.

3. Urusan Pertanian

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian.

Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian terdiri dari 6 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian; Pengelolaan Sumber Daya

Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota; Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota; Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer; Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota; Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain.

b. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian.

   Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian terdiri dari 3 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian; Pembangunan Prasarana Pertanian; Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota.

c. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

   Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner terdiri dari 4 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota; Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota; Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota; Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner.

d. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian.

   Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian terdiri dari 1 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota.

e. Program Penyuluhan Pertanian.

   Program penyuluhan pertanian terdiri dari 1 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian.

4. Urusan Perdagangan

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan.

   Program peningkatan sarana distribusi perdagangan terdiri dari 2 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan; Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya.

b. Program Stabilitasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

   Program stabilitasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting terdiri dari 1 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota.

c. Program Pengembangan Ekspor.

   Program pengembangan ekspor terdiri dari 1 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.

d. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

   Program standardisasi dan perlindungan konsumen terdiri dari 2 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan.

e. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri.

   Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri terdiri dari 1 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.

5. Urusan Perindustrian

   Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

   Program perencanaan dan pembangunan industri terdiri dari 1 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.

b. Program Pengendalian Izin Usaha Industri.

Program pengendalian izin usaha industri terdiri dari 1 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota.

c. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional.

Program pengelolaan sistem informasi industri nasional terdiri dari 1 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota.

6. Urusan Transmigrasi.

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

Program pembangunan kawasan transmigrasi terdiri dari 1 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.

D. Urusan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1. Sekretariat Daerah

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat terdiri dari 4 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan; Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat; Fasilitasi dan Koordinasi Hukum; Fasilitasi Kerja Sama Daerah.

b. Program Perekonomian dan Pembangunan.

Program perekonomian dan pembangunan terdiri dari 4 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian; Pelaksanaan Administrasi Pembangunan; Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa; Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam.

2. Sekretariat DPRD

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.

Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD terdiri dari 6 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD; Pembahasan Kebijakan Anggaran; Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan; Peningkatan Kapasitas DPRD; Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat; Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD.

E. Urusan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan.

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah terdiri dari 1 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan.

b. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah terdiri dari 1 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

2. Keuangan.

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah.

Program pengelolaan keuangan daerah terdiri dari 5 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah; Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah; Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah; Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah; Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah.

b. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Program pengelolaan barang milik daerah terdiri dari 1 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

c. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Program pengelolaan pendapatan daerah terdiri dari 1 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah.

3. Kepegawaian.

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Kepegawaian Daerah.

Program kepegawaian daerah terdiri dari 4 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN; Mutasi dan Promosi ASN; Pengembangan Kompetensi ASN; Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur.

4. Pendidikan dan Pelatihan.

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Program pengembangan sumber daya manusia terdiri dari 2 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis; Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional.

5. Penelitian dan Pengembangan.

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Program penelitian dan pengembangan terdiri dari 1 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan.

F. Urusan Pengawasan Urusan Pemerintahan

1. Inspektorat Daerah.

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Pengawasan.

Program penyelenggaraan pengawasan terdiri dari 2 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal; Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu.

b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi terdiri dari 2 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan; Pendampingan dan Asistensi.

G. Urusan Unsur Kewilayahan

1. Kecamatan.

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik.

Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terdiri dari 3 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum; Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat; Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.

b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan.

Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan terdiri dari 4 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan pemberdayaan kelurahan; Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat; Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa; Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan; Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan.

c. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum.

Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum terdiri dari 1 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum terdiri dari 1 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.

e. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa terdiri dari 1 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

H. Urusan Unsur Pemerintahan Umum

1. Kesatuan Bangsa dan Politik.

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.

   Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan terdiri dari 1 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.

b. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik.

   Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik terdiri dari 1 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.

c. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

   Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan terdiri dari 1 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

d. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

   Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya terdiri dari 1 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.

e. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

   Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial terdiri dari 1

kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.

1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

a. Dasar Pertimbangan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki masing-masing pemerintah daerah.

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat tentunya dapat dilakukan melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, pada pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, disebutkan bahwa penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Dalam ketentuan umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM). Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Penekanan kata “minimal” dalam istilah SPM ini mengacu pada batas minimal tingkat cakupan dan kualitas pelayanan dasar yang harus mampu dicapai oleh setiap daerah pada batas waktu yang ditentukan. Penyusunan laporan penerapan SPM di daerah adalah sebuah bentuk pertanggungjawaban daerah dalam melaksanakan SPM sesuai dengan kebutuhan pelayanan dasar yang harus diberikan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang ada.

SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal dengan tahapan meliputi : pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar. Rencana pemenuhan Pelayanan Dasar ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah sebagai prioritas belanja daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jenis Standar Pelayanan Minimal (SPM) terdiri atas SPM:

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan Umum;
4. Perumahan Rakyat;
5. Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang meliputi Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban, Sub Urusan Bencana Daerah dan Sub Urusan Pemadam Kebakaran; dan
6. Sosial.

Di dalam konteks perencanaan nasional terkait dengan penerapan Standar Pelayanan Minimal, Bappenas telah membuat perencanaan jangka panjang (RPJP) pemerintah selama 20 tahun yang dimulai tahun 2005-2025, terkait dengan pelaksanaan desentralisasi dimana menekankan pada kualitas pelayanan publik yang lebih murah, cepat, transparan dan akuntabel. Pada intinya makin meningkatnya kualitas pelayanan ditandai dengan terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) di semua tingkatan pemerintahan.

Dalam dokumen perencanaan nasional (RPJMN periode 2015–2020) dinyatakan bahwa salah satu prioritas nasional yang tercantum di dalam dokumen tersebut adalah tentang reformasi birokrasi dan tata kelola. Upaya penataan birokrasi salah satunya adalah dengan melakukan sinergi pusat dan daerah. Dalam kontek reformasi birokrasi maka penerapan Standar Pelayanan Minimal di daerah adalah salah satu bentuk strategi pemerintah untuk bisa menyelaraskan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait dengan pelaksanaan pembangunan.

Target pencapaian Standar Pelayanan Minimal tertuang dalam RPJMN tahun 2015-2020. Prioritas reformasi birokrasi dan tata kelola menginginkan terjadinya pemantapan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui terobosan kinerja secara terpadu, penuh integritas, akuntabel, taat kepada hukum yang berwibawa, dan transparan. Hal itu kemudian didukung dengan peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditopang oleh efisiensi struktur pemerintah di pusat dan di daerah, kapasitas pegawai pemerintah yang memadai dan data kependudukan yang baik.

Pada tahapan ke-4 dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banjarnegara yaitu tahun 2020-2024, disebutkan bahwa pemantapan sistem dan akses pelayanan publik melalui peningkatan kompetensi sesuai kewenangan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada bidang pelayanan dasar dan penunjang yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan dan pengangguran. Didalam dokumen RPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026, dalam tujuan yang ke-1 (satu) yaitu; Meningkatnya kondusivitas wilayah dan ke-7 (tujuh) yaitu: Meningkatnya cakupan pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar yang berkualitas, program-program prioritas yang akan dilaksanakan terkait dengan dengan pelaksanaan SPM didaerah yaitu:

1. Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum;
2. Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya;
3. Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial;
4. Program penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan;
5. Program penanggulangan bencana;
6. Program penanganan bencana;
7. Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran.
8. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat;
9. Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan;
10. Program pengelolaan pendidikan;
11. Program pendidik dan tenaga kependidikan;
12. Program pengelolaan pendidikan;
13. Program penyelenggaraan jalan;

14. Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase;
15. Program penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ);
16. Program peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU);
17. Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh;
18. Program pengembangan perumahan;
19. Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum;
20. Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan Daerah;
21. Program perlindungan jaminan sosial;
22. Program pemberdayaan sosial;
23. Program rehabilitasi sosial.

b. Dasar Penerapan Standar Pelayanan Minimal

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;

8. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor : 85 Tahun 2018 tentang Pelaksanan Standar Pelayanan Minimal pada Dinas Kesehatan;
12. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor : 58 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Banjarnegara;
13. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor : 8 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat;

c. Kebijakan Umum Daerah Dalam Rencana Penerapan Dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Yang Dituangkan Dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

Penyusunan rencana Kebijakan Umum Daerah Dalam Rencana Penerapan Dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dituangkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2023-2026 Kabupaten Banjarnegara.

Kebijakan umum daerah untuk rencana penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal dalam Dokumen RPD Kabupaten Banjarnegara tahun 2023-2026, disusun dengan berdasar capaian kinerja pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar meliputi Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Sosial di Kabupaten Banjarnegara yang tertuang pada gambaran umum kondisi daerah dimana pada Bab tersebut menjelaskan hasil capaian kinerja urusan Wajib Pelayanan Dasar tahun 2021. Data capaian tersebut menjadi dasar/data awal dalam menentukan permasalahan dan isu strategis, strategi, arah kebijakan dan program yang dapat mendukung capaian kinerja Standar Pelayanan

Minimal (SPM) Kabupaten Banjarnegara selama periode RPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 – 2026.

Secara umum pelaksanaan dan penerapan SPM telah tertuang dalam penjabaran Visi dan Misi RPJPD tahun 2005-2025, yang menitik beratkan kebijakan umum terkait dengan upaya pemenuhan SPM dapat terlihat dalam misi-misi yang ditetapkan, yaitu:

1. Mewujudkan masyarakat madani yang agamis, dengan menciptakan masyarakat Banjarnegara yang berkualitas, sehat, cerdas, produktif, kompetitif, kreatif, inovatif dan berakhlak mulia, serta menghargai dan menerapkan nilai-nilai luhur agama dan budaya masyarakat;
2. Mewujudkan perekonomian rakyat yang maju dengan mengembangkan serta memperkuat perekonomian daerah melalui sektor pertanian yang berorientasi pada pasar dengan senantiasa menjaga kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan dalam pengelolaannya melalui regulasi yang tepat dalam mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif dalam rangka menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman dan damai;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam kehidupan politik yang demokratis dan bertanggung jawab;
4. Mewujudkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dasar.

Secara substansi indikator penerapan SPM pada RPD Kabupaten Banjarnegara 2023-2026, mengacu pada pedoman teknis dan target pencapaian seluruh jenis layanan dasar yang ditetapkan oleh Pemerintah pada pedoman teknis dan target pencapaian seluruh jenis layanan dasar yang ditetapkan.

d. Gambaran Orientasi Dan Komitmen Yang Ditetapkan Pemerintahan Daerah Selama 1 (Satu) Tahun Dalam Rangka Penerapan Dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Yang Dituangkan Dalam Kebijakan Umum Anggaran.

Komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara terhadap penerapan dan pencapaian SPM ditetapkan dalam arah kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen RPD tahun 2023 – 2026 tahun pertama (2023).

Adapun arah Kebijakan RPD tahun pertama (2023) yaitu "Pemulihan perekonomian melalui peningkatan daya saing daerah":

1. Peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing, dengan fokus pada:
   a. Meningkatkan pemerataan akses dan kualitas pendidikan, terutama bagi masyarakat miskin dan wilayah dengan akses rendah;
   b. Meningkatkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi;
   c. Meningkatan pengetahuan, sikap dan perilaku hidup bersih dan sehat pada masyarakat;
2. Penanganan kemiskinan ekstrim dan pengurangan pengangguran, dengan fokus pada:
   a. Penguatan koordinasi dan jaringan kemitraan dengan berbagai pihak mengenai bantuan RTLH;
   b. Peningkatan akses air minum dan sanitasi;
   c. Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).
3. Peningkatan kondusivitas wilayah, dengan fokus pada:
   a. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar lembaga terkait dalam menciptakan ketenteraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat;
   b. Meningkatkan pendidikan politik pada segmen pemilih rentan;
   c. Meningkatkan toleransi dan kerukunan antar dan intra umat beragama;
   d. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana;
   e. Meningkatkan penanganan pasca bencana.

Adapun Komitmen Pemerintahan Kabupaten Banjarnegara dalam rangka penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal tahun 2023 yang dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran ditetapkan dijabarkan didalam dokumen perencanaan tahunan atau RKPD Kabupaten Banjarnegara tahun 2023.

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro Kabupaten Banjarnegara tahun 2023 merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 dan 2023 sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel II.1.
Capaian Kinerja Makro Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2022 dan 2023

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja 2022	Capaian Kinerja 2023	Perubahan (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5=(4-3)/3x100*
1	Indeks Pembangunan Manusia	68,61	69,16	0,802
2	Angka Kemiskinan	15,20	14,90	-1,974
3	Angka Pengangguran	6,38	6,26	-1,881
4	Pertumbuhan Ekonomi	5,29	4,98	-5,86
5	Pendapatan Per kapita	24.113.959*	25.964.623	7,675
6	KetimpanganPendapatan (Gini Ratio)	0,365	0,376	3,014

Sumber : Data Badan Pusat Statistik Banjarnegara Tahun 2024
** Angka revisi (update data jumlah penduduk berdasarkan hasil Proyeksi Sensus Penduduk 2020*

Keterangan :

Kolom (1) diisi nomor urut
Kolom (2) diisi nama indikator kinerja makro
Kolom (3) diisi capaian kinerja indikator kinerja makro tahun sebelumnya
Kolom (4) diisi capaian kinerja indikator kinerja makro tahun pelaporan
Kolom (5) diisi dengan persentase perubahan capaian kinerja makro, dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{Capaian\ kinerja\ makro\ tahun\ pelaporan - capaian\ kinerja\ makro\ tahun\ sebelumnya}{Capaian\ kinerja\ makro\ tahun\ sebelumnya} X\ 100$$

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Banjarnegara tahun 2023 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. IPM Banjarnegara tahun 2023 sebesar 69,16 atau tumbuh 0,79 persen (meningkat 0,54 poin) dibandingkan capaian tahun 2022.

Peningkatan IPM Banjarnegara tahun 2023 didukung oleh peningkatan semua komponen penyusun IPM. Kondisi ini sudah lebih baik dibandingkan tahun 2022 dan 2021. Pada tahun 2023, pengeluaran per kapita yang disesuaikan kembali naik 4,60 persen dibanding tahun 2022.

Dari sisi pendidikan, anak-anak di Banjarnegara yang berusia 7 tahun pada tahun 2023 memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 11,82 tahun atau hampir setara dengan lamanya waktu untuk menyelesaikan pendidikan hingga kelas 2 SMA atau kelas 3 SMA. Angka ini meningkat 0,01 tahun dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 11,81 tahun. Selain itu, rata-rata lama sekolah penduduk umur 25 tahun ke atas juga meningkat 0,02 tahun, dari 6,84 tahun pada tahun 2022 menjadi 6,86 tahun pada tahun 2023.

Dari sisi kesehatan, bayi di Banjarnegara yang lahir pada tahun 2023 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga usia 74,50 tahun, lebih lama 0,10 tahun dibandingkan dangan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Pengukuran usia harapan hidup ini sudah disesuaikan dengan hasil Sensus Penduduk Long Form 2020.

a. Perkembangan IPM Banjarnegara Tahun 2014-2023.

   Dalam satu dekade, pembangunan manusia di Banjarnegara terus mengalami kemajuan. IPM Banjarnegara meningkat dari 63,15 di tahun 2014 menjadi 69,16 di tahun 2023. Selama periode tersebut, IPM Banjarnegara rata-rata tumbuh sebesar 0,97 persen per tahun dengan status IPM level “sedang”. Namun, pandemi COVID-19 pada tahun 2020 telah membawa sedikit perubahan dalam pencapaian pembangunan manusia di Banjarnegara. IPM Banjarnegara tahun 2020 tercatat sebesar 67,45 atau tumbuh hanya 0,16 persen terhadap tahun 2019, melambat dibandingkan pertumbuhan tahun 2019 yang mencapai 1,20 persen. Namun demikian, pada tahun 2021-2023 IPM Banjarnegara mulai kembali tumbuh cukup signifikan meskipun masih pada level “sedang”.

b. Perkembangan Dimensi Pembentuk IPM Banjarnegara Tahun 2014-2023.

Capaian IPM yang meningkat 0,54 poin di tahun 2023 didukung oleh peningkatan semua komponen penyusun IPM Banjarnegara. Kondisi ini sudah menunjukkan perbaikan jika dibandingkan tahun 2022 dan 2021. Perubahan IPM selama satu dekade terlihat pada grafik berikut:

Grafik II.1.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014-2023

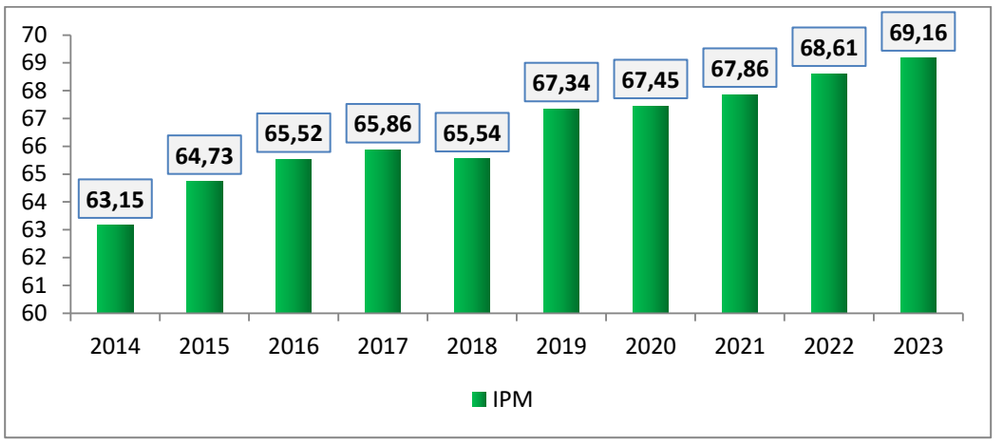

Sumber : Data Badan Pusat Statistik Banjarnegara Tahun 2024

Sedangkan perubahan komponen penyusunnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.2.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Banjarnegara Menurut Komponen Tahun 2014- 2023

Komponen	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Umur Harapan Hidup saatLahir (UHH)	Tahun	73,39	73,59	73,69	73,79	73,91	74,01	74,21	74,31	74,40	74,50
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	10,70	11,39	11,40	11,41	11,42	11,45	11,46	11,63	11,81	11,82
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	5,90	6,17	6,26	6,27	6,28	6,50	6,74	6,75	6,84	6,86
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan	Rp 000	7.683	7.930	8.400	8.630	9.160	9.547	9.263	9.407	9.776	10.226
IPM		63,15	64,73	65,52	65,86	66,54	67,34	67,46	67,87	68,62	69,16
Selisih	poin	0,31	1,58	0,79	0,34	0,68	0,80	0,12	0,41	0,75	0,54
Pertumbuhan IPM	persen	0,49	2,50	1,22	0,52	1,03	1,20	0,16	0,61	1,11	0,79

Sumber : Data Badan Pusat Statistik Banjarnegara Tahun 2024
Catatan : UHH Tahun 2020-2023 menggunakan hasil SPLF2020

Usia Harapan Hidup saat lahir (UHH) yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke

tahun. Selama periode 2014- 2023, UHH telah meningkat 1,11 tahun atau rata-rata tumbuh sebesar 0,16 persen pertahun. Pada tahun 2014, Usia Harapan Hidup saat lahir di Banjarnegara adalah 73,39 tahun dan pada tahun 2023 mencapai 74,50 tahun. Meskipun ada pandemi COVID-19 pada tahun 2020-2021, pertumbuhan UHH Banjarnegara relatif selalu meningkat setiap tahunnya.

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas. Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2014 hingga 2023, HLS Banjarnegara telah meningkat rata-rata 1,48 persen per tahun. Sementara RLS meningkat 1,60 persen per tahun. Pemulihan pasca pandemi COVID-19, HLS dan RLS tahun 2023 tumbuh menguat.

Dimensi terakhir yang mewakili kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak yang direpresentasikan oleh pengeluaran per kapita (atas dasar harga konstan 2012) yang disesuaikan. Pada tahun 2023, pengeluaran per kapita yang disesuaikan masyarakat Banjarnegara mencapai 10,23 juta rupiah per tahun. Angka ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 4,60 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa setelah lebih dari dua tahun pandemi COVID-19 melanda Banjarnegara, pengeluaran per kapita mulaimeningkat kembali setelah di tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan, bahkan pada tahun 2023 pengeluaran per kapita sudah lebih dari 10 juta rupiah.

Seiring dengan meningkatnya IPM Provinsi Jawa Tengah, IPM kabupaten/kota di Jawa Tengah juga mengalami peningkatan khususnya yang ada di wilayah ex. Karesidenan Banyumas dan sekitarnya. Dari sisi perbandingan antar kabupaten, dari 6 kabupaten yang diperbandingkan pada tabel 2 nampak tidak ada perbedaan yang cukup signifikan. Dari 6 kabupaten tersebut, IPM tertinggi pada tahun 2023 adalah Kabupaten Banyumas dengan angka 73,17 sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Banjarnegara dengan IPM 68,61.

Dari sisi status IPM, pada tahun 2022 Kabupaten Banyumas, Cilacap, dan Kebumen ada pada kategori IPM level “tinggi” sedangkan untuk Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, dan Wonosobo masih berstatus IPM “sedang”.

Tabel II.3.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Beberapa Kabupaten/Kota
Tahun 2022-2023

Provinsi/ Kabupaten	UHH (tahun)		HLS (tahun)		RLS (tahun)		PPP (tahun)		1PM (tahun)		Perub 2022 - 2023
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
JAWA TENGAH	74,58	74,69	12,81	12,85	7,93	8,0	11.377	11.835	72,80	73,39	0,59
Cilacap	74,59	74,73	12,66	12,67	7,18	7,39	10.904	11.432	71,22	72,04	0,82
Banyumas	74,16	74,20	13,21	13,26	7,78	7,87	11.905	12.492	73,30	73,96	0,66
Purbalingga	73,89	73,98	12,01	12,02	7,33	7,34	10.277	10.964	69,80	70,51	0,71
Banjarnegara	**74,40**	**74,50**	**11,81**	**11,82**	**6,84**	**6,86**	**9.776**	**10.226**	**68,62**	**69,16**	**0,54**
Kebumen	74,85	74,98	13,36	13,37	7,85	7,86	9.282	9.734	71,29	71,88	0,59
Wonosobo	73,89	74,01	11,78	11,80	6,88	6,89	11.108	11.577	69,69	70,18	0,49

Sumber : Data Badan Pusat Statistik Banjarnegara Tahun 2024

Kemiskinan adalah kondisi yang dinamis. Penduduk yang tahun sebelumnya masuk dalam kategori tidak miskin bisa jadi di tahun berikutnya jatuh menjadi penduduk miskin, demikian pula sebaliknya. Kondisi sosial ekonomi memegang peran penting dalam masalah kemiskinan, juga kejadian luar biasa yang terjadi juga mempengaruhi kondisi suatu wilayah atau Negara.

Secara umum, pada periode 2014-2023, tingkat kemiskinan di Kabupaten Banjarnegara mengalami penurunan, baik dari sisi jumlah maupun persentase, perkecualian pada tahun 2015, 2020, dan 2021. Perkembangan tingkat kemiskinan tahun 2014 sampai dengan tahun 2023 disajikan pada grafik berikut:

Grafik II.2.
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Banjarnegara
Tahun 2014 - 2023

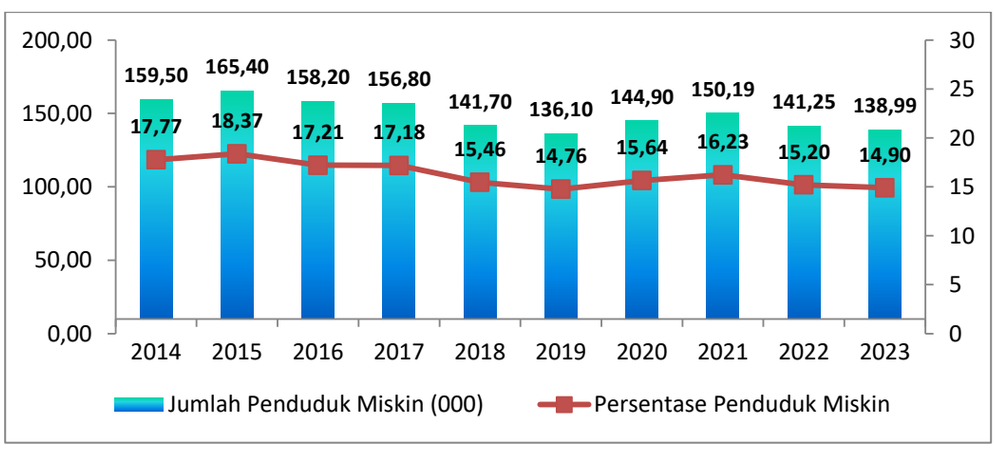

Sumber : Data Badan Pusat Statistik Banjarnegara Tahun 2024

Jumlah penduduk miskin Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2023 mencapai 138,99 ribu orang. Dibandingkan dengan tahun 2022, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banjarnegara berkurang sebanyak 2,26 ribu orang. Persentase penduduk miskin pada tahun 2023 tercatat sebesar 14,90 persen, menurun 0,30 persen poin dari tahun 2022. Angka ini menempatkan tingkat kemiskinan Kabupaten Banjarnegara pada peringkat ke 30 dari 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, naik satu peringkat dibandingkan tahun 2022.

Pengukuran kemiskinan BPS menggunakan konsep kebutuhan dasar (*basic needs approach*) dengan menentukan Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan bukan makanan yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.

Garis Kemiskinan Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2023 sebesar Rp. 380.046,00 per kapita per bulan. Dibandingkan tahun 2022, Garis Kemiskinan naik sebesar 6,89 persen. Perkembangan garis kemiskinan Kabupaten Banjarnegara dan Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.4.
Garis Kemiskinan Banjarnegara dan Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2014 - 2023

Tahun	Kabupaten Banjarnegara (Rp/kapita/bulan)	Provinsi Jawa Tengah (Rp/kapita/bulan)
(1)	(1)	(1)
2014	229.718	281.570
2015	236.399	297.851
2016	252.328	317.348
2017	264.387	333.224
2018	278.210	350.875
2019	301.792	369.385
2020	318.334	395.407
2021	328.679	409.193
2022	351.333	438.833
2023	380.046	477.580

Sumber : Data Badan Pusat Statistik Banjarnegara Tahun 2024

Garis kemiskinan Kabupaten Banjarnegara selalu mengalami tren peningkatan setiap tahunnya. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, garis kemiskinan Kabupaten Banjarnegara mengalami peningkatan sebesar Rp. 150.328,00 per kapita per bulan. Salah satu faktor penyebab kenaikan ini adalah naiknya harga barang-barang yang dikonsumsi masyarakat, sehingga berdampak pada pada peningkatan biaya hidup masyarakat.

Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan yaitu:

1. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic need approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur menurut Garis Kemiskinan.
2. Garis Kemiskinan (GK) terdiri dari dua komponen, yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM). Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan.
3. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kkalori per kapita per hari. Paket komoditas kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditas (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buahbuahan, minyak dan lemak, dll).
4. Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditas kebutuhan dasar bukan makanan diwakili oleh 51 jenis komoditas di perkotaan dan 47 jenis komoditas di perdesaan.
5. Garis Kemiskinan per rumah tangga dihitung dari Garis Kemiskinan per kapita dikalikan dengan rata-rata banyaknya anggota rumah tangga pada rumah tangga miskin.
6. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.
7. Sumber data utama yang dipakai untuk menghitung tingkat kemiskinan 2022 adalah data Susenas bulan Maret 2022.

Angka pengangguran Banjarnegara adalah tingkat pengangguran di Kabupaten Banjarnegara, khususnya tingkat pengangguran terbuka yang dilihat dari persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan

kerja. Penganggur terbuka terdiri dari : mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena mereka tidak mungkin mendapatkan pekerjaan dan mereka yang sudah punya pekerjaan tapi belum mulai bekerja

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka/unemployment rate) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT Kabupaten Banjarnegara selama lima tahun terakhir berada pada kisaran 4%. Angka pengangguran terbuka tahun 2023 sebesar 6,26%, turun dibandingkan tahun 2022 sebesar 6,38%. Tingkat Partisipasi Angkatan kerja (TPAK) tahun 2023 sebesar 71,64%, turun dibandingkan tahun 2022 sebesar 72,17%.

Penduduk usia kerja dan angkatan kerja Kabupaten Banjarnegara disajikan pada grafik berikut:

Grafik II.3.
Jumlah Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja di Banjarnegara Tahun 2021 – 2023

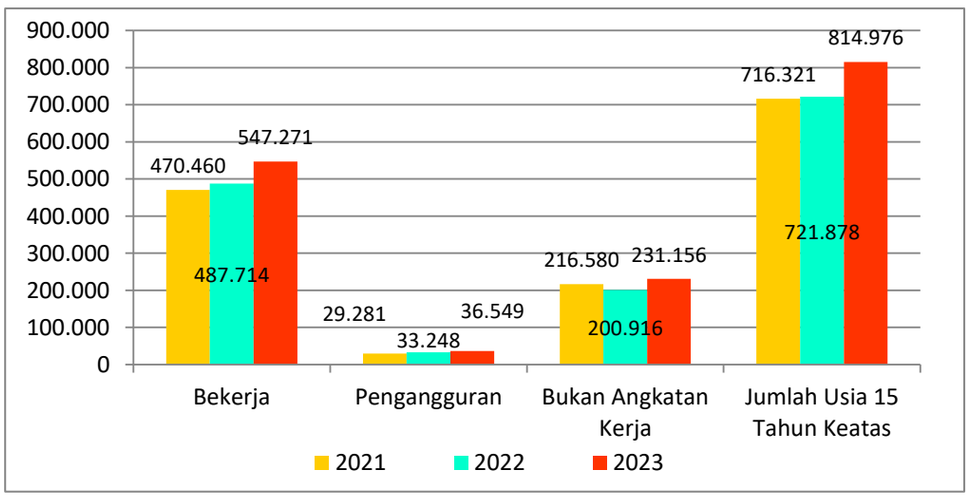

Sumber : Data Badan Pusat Statistik Banjarnegara Tahun 2024

Penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Pada tahun 2023 sebesar 814.976 orang. Penduduk usia kerja mengalami kecenderungan meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di Kabupaten Banjarnegara. Dari sebanyak 814.976 orang pada tahun 2023, terbagi atas Angkatan Kerja sebanyak 583.820 orang dan Bukan Angkatan Kerja sebanyak 231.156 orang. Penduduk usia kerja pada Agustus 2023 mengalami kenaikan sebanyak 93.098 orang jika dibanding Agustus 2022.

Angkatan kerja terdiri dari 547.271 jiwa yang bekerja dan 36.549 yang mencari pekerjaan. Apabila dibandingkan dengan kondisi tahun sebelumnya jumlah penduduk yang bekerja mengalami kenaikan sebesar 59.557 jiwa. Sedangkan penduduk usia 15 tahun keatas yang bukan merupakan Angkatan Kerja, pada tahun 2023 sebanyak 231.156 jiwa. Penduduk tersebut kebanyakan dari mereka kegiatan sehari-hari dalam seminggu terakhir pada periode survei adalah mengurus rumah tangga, bersekolah dan kegiatan lainnya.

Jumlah penduduk yang bekerja di Kabupaten Banjarnegara tahun 2023, sebanyak 547.271 jiwa, dengan proporsi terbanyak adalah mereka yang bekerja pada sektor jasa, kemudian disusul mereka yang bekerja pada sektor pertanian dan yang terakhir adalah sektor manufaktur. Berbeda dengan kondisi susunan tahun 2021 dan 2022 dimana sektor terbanyak adalah pertanian kemudian disusul jasa dan terakhir manufaktur. Pada tahun 2023 terdapat penambahan jumlah pekerja sebesar 59.557 jiwa atau sebesar 12,21 persen dari jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang dapat ditampung oleh lowongan kerja yang ada.

Dari sejumlah 547.271 jiwa penduduk yang bekerja pada tahun 2023, sebagian besar mereka bekerja pada status Buruh/Karyawan/Pegawai, kemudian status Berusaha Sendiri menempati posisi kedua, selanjutnya dengan status Berusaha dibantu pekerja tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar. Kondisi pada tahun 2023 ini, sisi yang menguntungkan adalah tumbuhnya usaha-usaha baru yang sifatnya masih kecil dan hanya dilakukan oleh pemilik usaha, kondisi ini memerlukan penanganan serta pembinaan sehingga akan tumbuh besar dan pada akhirnya dapat menciptakan usaha-usaha baru yang besar yang dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak. Untuk status lain pertumbuhan tenaga kerja pada tahun 2023 menunjukkan kondisi yang variatif walaupun secara keseluruhan menunjukkan tanda-tanda yang positif, terbukti dari serapan tenaga kerja yang cukup besar.

Perekonomian Banjarnegara pada tahun 2023 berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai 27.190,83 miliar rupiah dan atas dasar harga konstan (ADHK) 2010 mencapai 17.173,45 miliar rupiah.

Perekonomian Banjarnegara tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 4,98 persen, melambat dibandingkan pencapaian pada tahun

2022 yakni tumbuh sebesar 5,29 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi dialami oleh lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 13,28 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi tercatat pada Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga sebesar 7,68 persen.

Struktur ekonomi Banjarnegara tahun 2023 dari sisi produksi masih didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan kontribusi sebesar 28,62 persen terjadi penurunan jika dibandingkan pada tahun 2022 yang mencapai 29,61 persen. Dari sisi pengeluaran, struktur ekonomi Banjarnegara didominasi oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dengan kontribusi sebesar 77,53 persen yang mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2022 yakni sekitar 76,43 persen.

Beberapa lapangan usaha yang menjadi sumber pertumbuhan pada perekonomian Banjarnegara adalah Industri Pengolahan sebesar 1,26 persen; Perdagangan Besar, Eceran, dan Reparasi Mobil Motor sebesar 073 persen; dan Konstruksi sebesar 0,65 persen.

Nilai PDRB per kapita Banjarnegara tahun 2023 mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2022 yakni dari 24,11 juta rupiah menjadi 25,97 juta rupiah atau meningkat sekitar 7,68 persen.

a. PDRB Kabupaten Banjarnegara Menurut Lapangan Usaha.

1. Pertumbuhan dan Struktur Ekonomi Tahun 2023.

   Stabilitas ekonomi di tahun 2023 relatif sudah terprediksi dengan semakin berkembangnya sektor jasa-jasa terutama aktivitas transportasi dan pendukung pariwisata. Namun, kondisi cuaca ekstreem di akhir tahun mendorong perlambatan ekonomi di Kabupaten Banjarnegara. Seluruh lapangan usaha mengalami pertumbuhan dan mayoritas dalam percepatan pertumbuhan. Aktivitas Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum merupakan lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 13,28 persen. Semakin meningkatnya aktivitas masyarakat dan pemulihan pasca pandemi diwujudkan pada semakin banyaknya usaha penyediaan makan minum, seperti cafe, rumah makan, penjaja makanan pinggir jalan. Lapangan usaha lain yang juga mengalami pertumbuhan cukup tinggi meliputi Informasi dan Komunikasi yang meningkat sebesar 11,24 persen serta Konstruksi

sebesar 8,31 persen. Sementara lapangan usaha yang mengalami perlambatan pertumbuhan di bawah 1 persen sepanjang tahun 2023 adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 0,59 persen seiring cuaca ekstreem di akhir tahun 2023 yang menyebabkan penurunan panen komoditas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan serta kurangnya pasokan air pada aktivitas perikanan karena panjangnya musim kemarau.

Selain itu, aktivitas jasa pendukung kegiatan pariwisata juga mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan, seperti Transportasi dan Pergudangan tumbuh hingga 7,83 persen; Real Estate 6,84 persen; Jasa Perusahaan tumbuh 7,05 persen; dan Jasa Lainnya 7,48 persen. Hal ini menjadi tolok ukur peningkatan aktivitas sekunder di Kabupaten Banjarnegara.

Struktur PDRB Banjarnegara menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku selama tahun 2023 masih didominasi oleh empat lapangan usaha utama, yaitu Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 28,62 persen; Industri Pengolahan sebesar 16,40 persen; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 14,64 persen; dan Konstruksi sebesar 7,86 persen. Terjadinya pertumbuhan yang cukup tinggi pada lapangan usaha Penyedian Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; dan Konstruksi pada tahun 2023 menyebabkan peningkatan kontribusi pada ketiga lapangan usaha tersebut.

2. Sumber Pertumbuhan dan Indeks Implisit PDRB Tahun 2023.

Penyumbang pertumbuhan tertinggi terhadap perekonomian tahun 2023 di Kabupaten Banjarnegara dicatat oleh lapangan usaha Industri Pengolahan yang menyumbang sebesar 1,26 persen; diikuti Perdagangan Besar, Eceran, dan Reparasi Mobil dan Motor sebesar 0,73 persen; dan Konstruksi sebesar 0,65 persen.

Jika dibandingkan dengan kondisi 2022, sumber pertumbuhan pada pertumbuhan ekonomi Banjarnegara 2023 tidak berubah signifikan. Hal ini disebabkan tinggi kontribusi sektor Industri Pengolahan dan Perdagangan Besar, Eceran, dan Reparasi Mobil dan Motor pada perekonomian Banjarnegara. Pada tahun 2022, sumber pertumbuhan perekonomian Banjarnegara disumbang oleh lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 2,84

persen; diikuti Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 1,14 persen; dan Industri Pengolahan sebesar 0,74 persen.

Kontribusi sektor Industri Pengolahan yang terus meningkat setiap tahunnya disebabkan karena tingginya permintaan barang produksi hasil industri oleh pasar, baik konsumen akhir, unit perdagangan, maupun usaha jasa pendukung pariwisata. Industri makanan dan minuman memiliki kontribusi paling besar dalam memberikan nilai tambah sektor industri pengolahan Banjarnegara. Pada tahun 2023, aktivitas industri makanan dan minuman juga meningkat pesat. Selain itu, produksi industri menengah dan besar juga meningkat pesat karena tingginya permintaan. Peningkatan aktivitas perdagangan sebagai dampak langsung dari tingginya permintaan pasar akan barang dan jasa di Banjarnegara.

Dalam menggambarkan kecenderungan perubahan harga sebagai faktor inflasi pada penghitungan PDRB, digunakan laju Indeks Harga Implisit sebagai pendekatannya. Pada tahun 2023 laju Indeks Harga Implisit yang terjadi adalah sekitar 3,62 persen dengan Indeks Harga Implisit sebesar 158,33. Lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan memiliki laju indeks harga implisit yang paling besar selama tahun 2023 yakni sekitar 7,91 persen; diikuti Industri Pengolahan sebesar 5,37 persen; dan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 4,53 persen. Tahun 2023 seluruh lapangan usaha mengalami laju indeks implisit yang bertanda positif.

b. PDRB Kabupaten Banjarnegara Menurut Pengeluaran.

1. Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2023.

Ekonomi Banjarnegara sampai dengan akhir tahun 2023 yang mengalami pertumbuhan sebesar 4,98 persen, disebabkan tumbuhnya seluruh komponen PDRB dari sisi pengeluaran. Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (PKLNPRT) tumbuh paling tinggi sebesar 7,68 persen. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) memiliki kontribusi 77,53 persen dalam PDRB Kabupaten Banjarnegara juga mengalami pertumbuhan sebesar 6,00 persen.

Komponen lainnya yaitu Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP) dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) juga mengalami pertumbuhan. Masing-masing komponen, secara

berurutan mencatat pertumbuhan sebesar 2,80 persen dan 4,55 persen. Pertumbuhan ekonomi selama tahun 2023 didorong karena meningkatnya aktivitas lembaga nonprofit dalam menyambut Pemilihan Umum 2024. Selain itu, aktivitas keagamaan juga semakin banyak dan masif terjadi hampir di setiap kecamatan dan desa. Konsumsi rumah tangga juga mengalami peningkatan yang cukup pesat yang disebabkan semakin tingginya mobilitas masyarakat.

2. Andil dan Struktur PDRB Tahun 2023.

Daya tahan peranan ekspor memberi gambaran bahwa pasar ekonomi Banjarnegara semakin luas, tidak sekedar lokal Banjarnegara tetapi juga wilayah luar Banjarnegara baik pada tingkat kabupaten/kota, provinsi, maupun nasional. Peningkatan pasar ini ditopang oleh investasi (PMTB) sebagai komponen penting bagi peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa.

Peningkatan peranan ekspor dalam perekonomian Banjarnegara tidak terlepas dari kinerja komponen tersebut yang tumbuh cukup tinggi pada komponen ekonomi Banjarnegara. Selama tahun 2023, Konsumsi Pemerintah tumbuh hingga 2,80 persen dan PMTB tumbuh 4,55 persen. Jauh lebih tinggi dari konsumsi pemerintah dan PMTB, Konsumsi Rumah Tangga tumbuh hingga 6,00 persen. Dampak tumbuhnya komponen-komponen tersebut, pertumbuhan ekonomi Banjarnegara mengalami pertumbuhan hingga 4,98 persen.

Komponen konsumsi rumah tangga memberikan andil tertinggi pada pertumbuhan ekonomi Banjarnegara tahun 2023 yakni sekitar 4,65 persen. Tingginya andil pertumbuhan ini dipengaruhi oleh positifnya angka pertumbuhan dan tingginya kontribusi komponen tersebut. Hal yang tidak jauh berbeda terjadi pada komponen PMTB. Komponen ini memiliki peranan sekitar 22,03 persen dengan pertumbuhan sekitar 4,55 persen pada tahun 2023 sehingga memberikan andil pertumbuhan ekonomi Banjarnegara sekitar 0,98 persen. Sementara itu, komponen pengeluaran konsumsi pemerintah meskipun hanya tumbuh sekitar 2,80 persen, andil terhadap pertumbuhan ekonomi Banjarnegara hanya sekitar 0,20 persen. Hal ini dipicu karena relatif rendahnya kontribusi komponen ini pada perekonomian Banjarnegara.

Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan penduduk Kabupaten Banjarnegara yang diukur dengan Gini Ratio tercatat sebesar 0,376. Angka ini naik 0,011 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,365 poin.

Berdasarkan Ukuran ketimpangan Bank Dunia, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah tercatat sebesar 18,48 persen, menurun dibandingkan tahun 2022 dimana distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah tercatat sebesar 18,74 persen. Hal ini memberikan gambaran bahwa pengeluaran penduduk Kabupaten Banjarnegara pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.

a. Perkembangan Gini Ratio Maret 2021-Maret 2023.

Salah satu ukuran ketimpangan pendapatan atau pengeluaran antar penduduk yang sering digunakan adalah Gini Ratio. Perubahan Gini Ratio merupakan indikasi dari adanya perubahan distribusi pengeluaran penduduk. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0-1. Semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan ketidakmerataan pendapatan yang semakin tinggi.

Kondisi ketimpangan di Kabupaten Banjarnegara yang digambarkan dari angka Gini Ratio pada periode 2021-2023 terlihat cenderung meningkat dan mencapai angka tertinggi pada Maret 2023 yaitu sebesar 0,376. Pada Maret 2022 Gini Ratio tidak mengalami kenaikan dibandingkan Gini Ratio Maret 2021, yaitu stagnan di angka 0,365. Namun, pada Maret 2023 Gini Ratio mengalami kenaikan dibandingkan Maret 2022, yaitu dari 0,365 menjadi 0,376, atau naik sebesar 0,011 poin.

Dibandingkan dengan wilayah Provinsi Jawa Tengah secara umum, Gini Ratio Kabupaten Banjarnegara Pada Maret 2023 yaitu 0,376 cenderung lebih tinggi dibandingkan angka Gini Ratio Provinsi Jawa Tengah yang tercatat sebesar 0,369. Namun, pada periode Maret 2021-Maret 2022 Gini Ratio Banjarnegara lebih rendah dibandingkan Gini Ratio Provinsi Jawa Tengah.

Naiknya Gini Ratio merupakan indikasi bahwa perbedaan pendapatan antar penduduk semakin melebar. Bantuan sosial Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah khususnya untuk masyarakat berpendapatan rendah sangat membantu masyarakat dalam mengurangi beban pengeluaran yang

kemudian berdampak pada pengurangan ketimpangan pendapatan penduduk.

b. Perkembangan Distribusi Pengeluaran Maret 2021-Maret 2023.

Selain Gini Ratio ukuran ketimpangan lain yang sering digunakan adalah persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah atau yang dikenal dengan ukuran ketimpangan Bank Dunia. Berdasarkan ukuran ini tingkat ketimpangan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu tingkat ketimpangan tinggi jika persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah nilainya di bawah 12 persen, ketimpangan sedang jika nilainya berkisar antara 12-17 persen, serta ketimpangan rendah jika nilainya berada di atas 17 persen.

Pada Maret 2023, persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah tercatat sebesar 18,48 persen, yang berarti Kabupaten Banjarnegara berada pada kategori ketimpangan rendah. Persentase pengeluaran yang dinikmati kelompok 40 persen terbawah pada Maret 2023 sedikit mengalami penurunan jika dibandingkan dengan kondisi Maret 2022, yaitu turun sebesar 0,26 poin. Namun jika dibandingkan dengan Maret 2021yang sebesar 18,19 persen, naik 0,19 poin.

Sebaliknya, pada kelompok penduduk 20 persen atas, persentase pengeluaran pada Maret 2023 sebesar 45,65 persen, mengalami kenaikan sebesar 1,00 poin jika dibandingkan Maret 2022 yang sebesar 44,65 persen, dan naik sebesar 0,16 poin jika dibandingkan dengan Maret 2021 yang sebesar 43,49 persen.

Sejalan dengan informasi yang dicerminkan oleh Gini Ratio, ukuran ketimpangan Bank Dunia pun mencatat hal yang sama, yaitu persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah dalam kurun waktu Maret 2021-Maret 2023 nilainya diatas 17 persen, tergolong ketimpangan rendah. Sementara itu, persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah pada Maret 2023 sebesar 18,48 persen, lebih rendah dibandingkan Maret 2022, yang mencerminkan kondisi ketimpangan yang lebih tinggi dibandingkan Maret 2022.

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja urusan pemerintahan Kabupaten Banjarnegara merupakan gambaran dari keberhasilan Kabupaten Banjarneagara dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang dilaporkan pada tabel sebagai berikut :

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran

Tabel II.5.
Uraian Indikator Kinerja Kunci Keluaran

NO	Urusan Pemerintahan	No IKK	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	PENDIDIKAN	**1.**	**Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD**					
		1	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)		400	Unit	DINDIKPORA	
		2	Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah		23354	Orang	DINDIKPORA	
		3	Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan		23354	Orang	DINDIKPORA	

NO	Urusan Pemerintahan	No IKK	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
		4	Jumlah minimal kebutuhan pendidik PAUD (Negeri dan Swasta)		1983	Orang	DINDIKPORA	
		5	Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta)		1992	Orang	DINDIKPORA	
		6	Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini		1112	Orang	DINDIKPORA	
		7	Jumlah kepala sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintah		470	Orang	DINDIKPORA	
		2.	**Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar**					
		1	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi		671	Unit	DINDIKPORA	
		2	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah		548	Orang	DINDIKPORA	

NO	Urusan Pemerintahan	No IKK	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
		3	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah		290	Orang	DINDIKPORA	
		4	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan		70794	Orang	DINDIKPORA	
		5	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan		30186	Orang	DINDIKPORA	
		6	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)		5168	Orang	DINDIKPORA	
		7	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)		1895	Orang	DINDIKPORA	
		8	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar		4484	Orang	DINDIKPORA	
		9	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)		1788	Orang	DINDIKPORA	
		10	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)		1848	Orang	DINDIKPORA	

NO	Urusan Pemerintahan	No IKK	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
		11	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)		1000	Orang	DINDIKPORA	
		12	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)		583	Orang	DINDIKPORA	
		13	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)		366	Orang	DINDIKPORA	
		14	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik		4329	Orang	DINDIKPORA	
		15	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik		1736	Orang	DINDIKPORA	
		16	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah		565	Orang	DINDIKPORA	

NO	Urusan Pemerintahan	No IKK	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
		17	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah		91	Orang	DINDIKPORA	
		18	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/sederajat		165	Orang	DINDIKPORA	
		19	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/sederajat		40	Orang	DINDIKPORA	
		3.	**Tingkat partisipasi warga negara usia 13 -15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama**					
		1	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi		671	Unit	DINDIKPORA	
		2	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah		548	Orang	DINDIKPORA	
		3	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah		290	Orang	DINDIKPORA	

NO	Urusan Pemerintahan	No IKK	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
		4	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan		70794	Orang	DINDIKPORA	
		5	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan		30186	Orang	DINDIKPORA	
		6	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)		5168	Orang	DINDIKPORA	
		7	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)		1895	Orang	DINDIKPORA	
		8	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar		4484	Orang	DINDIKPORA	
		9	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)		1788	Orang	DINDIKPORA	
		10	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)		1848	Orang	DINDIKPORA	
		11	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)		1000	Orang	DINDIKPORA	

NO	Urusan Pemerintahan	No IKK	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
		12	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)		583	Orang	DINDIKPORA	
		13	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)		366	Orang	DINDIKPORA	
		14	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik		4329	Orang	DINDIKPORA	
		15	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik		1736	Orang	DINDIKPORA	
		16	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah		565	Orang	DINDIKPORA	

NO	Urusan Pemerintahan	No IKK	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
		17	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah		91	Orang	DINDIKPORA	
		18	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/sederajat		165	Orang	DINDIKPORA	
		19	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/sederajat		40	Orang	DINDIKPORA	
		4.	**Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan**					
		1	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta)		15	Unit	DINDIKPORA	
		2	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah		2727	Orang	DINDIKPORA	
		3	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan		4893	Orang	DINDIKPORA	

NO	Urusan Pemerintahan	No IKK	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
		4	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)		322	Orang	DINDIKPORA	
		5	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)		340	Orang	DINDIKPORA	
		6	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)		340	Orang	DINDIKPORA	
		7	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah		0	Orang	DINDIKPORA	
		8	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1		18	Orang	DINDIKPORA	
2	**KESEHATAN**	**1.**	**Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan**					
		1	Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar		4	Unit	DINKES	
		2.	**Persentase Rumah Sakit Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota Yang Terakreditasi**					

NO	Urusan Pemerintahan	No IKK	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
		1	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya		4	Unit	DINKES	
		3.	**Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil**					
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		278	ANC KIT	DINKES	
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal		464	Orang	DINKES	
		4.	**Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan**					
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		278	unit	DINKES	✓Persalinan KIT/Set =(278) ✓PNC KIT=(278) ✓Emergency Persalinan KIT =(35)
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar		464	Orang	DINKES	
		5.	**Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir**					
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yangtersedia		278	unit	DINKES	✓KN KIT =(278) ✓Emergency Neonatal KIT=(35)
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar		464	Orang	DINKES	

NO	Urusan Pemerintahan	No IKK	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
		6.	**Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar**					
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		278	SDIDTK Kit	DINKES	
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar		464	Orang	DINKES	
		7.	**Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar**					
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		13	UKS KIT	DINKES	
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar		128	Orang	DINKES	
		8.	**Persentase Orang Usia 15-59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar**					
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		205	Posbindu Kit	DINKES	
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar		105	Orang	DINKES	
		9.	**Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun Ke Atas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar**					
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		12	Lansia Kit	DINKES	

NO	Urusan Pemerintahan	No IKK	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar		70	Orang	DINKES	
		10.	**Persentase Penderita Hipertensi Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar**					
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		205	Posbindu Kit	DINKES	
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar		105	Orang	DINKES	
		11.	**Persentase Penderita DM Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar**					
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		278	Glukometer	DINKES	
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar		105	Orang	DINKES	
		12.	**Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar**					
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		70	Fiksasi Kit	DINKES	
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar		30	Orang	DINKES	
		13.	**Persentase Orang Terduga TBC Mendapatkan Pelayanan TBC Sesuai Standar**					

NO	Urusan Pemerintahan	No IKK	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		9640	Unit	DINKES	
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar		37	orang	DINKES	✓ Analisis Laboratorium=35 ✓ OJT TB=35
		14.	**Persentase Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV Sesuai Standar**					
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang Tersedia		22000	RDT HIV	DINKES	
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar		35	Orang	DINKES	
3	**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	**1.**	**Rasio Luas Kawasan Pemukiman Rawan Banjir Yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir**					
		1	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)		0	Ha	DPUPR	
		2	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)		0	M	DPUPR	
		3	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)		0	Ha	DPUPR	

NO	Urusan Pemerintahan	No IKK	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
		4	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m)		0	M	DPUPR	
		5	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kota		Tidak	Ada/Tidak	DPUPR	Tidak
		6	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota		Ada	Ada/Tidak	DPUPR	Tidak
		7	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota		0	Jumlah	DPUPR	Tidak
		2.	**Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten**					
		1	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)		0	Ha	DPUPR	
		2	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)		0	M	DPUPR	
		3	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)		0	Ha	DPUPR	

NO	Urusan Pemerintahan	No IKK	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
		4	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m)		0	M	DPUPR	
		5	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kota		Tidak	Ada/Tidak	DPUPR	Tidak
		6	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota		Ada	Ada/Tidak	DPUPR	3394.97
		7	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota		0	Jumlah	DPUPR	Tidak
		3.	**Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota Yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi**					
		1	Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	Panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik (m)	74.33	%	DPUPR	282042.67 m
				Panjang jaringan irigasi primer(m)				379450 m
		2	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	Panjang jaringan irigasi Sekunder dalam kondisi baik (m)	74.33	%	DPUPR	22533,68 m
				Panjang jaringan irigasi Sekunder(m)				30316 m
		3	Persentase panjang jaringan irigasi Tersier dalam kondisi baik	Panjang jaringan irigasi Tersier dalam kondisi baik (m)	0	%	DPUPR	0 m

NO	Urusan Pemerintahan	No IKK	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
				Panjang jaringan irigasi Tersier (m)				0 m
		4.	**Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui Spam Jaringan Perpipaan Dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Rumah Tangga Di Seluruh Kota**					
		1	Pemenuhan dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) lintas kabupaten/kota		Ada	Ada/Tidak	DPKP LH	
		2	Tersusun dan ditetapkannya Kebijakan Strategis Daerah (JAKSTRADA) kabupaten/kota		Ada	Ada/Tidak	DPKP LH	
		3	Jumlah BUMD dan atau UPTD kabupaten/kota penyelenggara SPAM		Ada	Ada/Tidak	DPKP LH	1 BUMD (PDAM)
		4	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM		0	Izin	DPKP LH	
		5	Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain		3	Kerjasama	DPKP LH	
		5.	**Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik**					
		1	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S		1408	Rumah	DPKP LH	

NO	Urusan Pemerintahan	No IKK	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
		2	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T		7111	Rumah	DPKP LH	
		3	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T		2119	Rumah	DPKP LH	
		4	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja		473	Rumah	DPKP LH	
		5	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja		473	Rumah	DPKP LH	
		6	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik		2119	Rumah	DPK PLH	
		7	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	∑ rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk atau tanki septik	73.98	%	DPKP LH	195668
				∑ rumah di wilayah pengembangan SPALD dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun <25 jiwa/ha				264487
		8	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	∑ rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di IPLT	6.50	%	DPKP LH	473

NO	Urusan Pemerintahan	No IKK	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
				∑ rumah di wilayah pengembangan IPLT dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun >25 jiwa/ha				72273
		9	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	∑ rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di SPALD	16.31	%	DPKPLH	2119
				∑ rumah di wilayah pengembangan SPALD T				12994
		10	Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	∑ rumah yang memiliki akses unit pengolahan setempat	7.17	%	DPKPLH	1408
				∑ jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPALD-S				19632
		11	Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	∑ jumlah sarana pengangkutan yang tersedia	100	%	DPKPLH	1
				∑ jumlah sarana pengangkutan yang dibutuhkan kabupaten				1
		12	Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	∑ jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang tersedia	0	%	DPKPLH	0
				∑ jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang dibutuhkan kabupaten/kota				1
		13	Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	∑ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah yang tersambung dengan IPALD	29.80	%	DPKPLH	2119
								711

NO	Urusan Pemerintahan	No IKK	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
				∑ jumlah rumah yang dilayani dengan SPALD-T pada kabupaten/kota				
		14	Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	∑ Jumlah rumah yang tangki septiknya sudah disedot	2.41	%	DPKPLH	473
				∑ jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPADLD-S				19632
		6.	**Rasio Kepatuhan IMB Kab/ Kota**					
		1	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	Jumlah bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi yang berlaku	100	%	DPUPR	1027
				Jumlah bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana)				1027
		2	Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/kota dalam tahun eksisting		158	Izin	DPUPR	
		3	Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung		Ada	Ada/Tidak	DPUPR	1 dokumen
		4	Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung		Ada	Ada/Tidak	DPUPR	1 dokumen
		5	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk		0	Bangunan	DPUPR	

NO	Urusan Pemerintahan	No IKK	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
			dilindungi dan dilestarikan					
		6	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah kabupaten		0	Bangunan	DPUPR	
		7	Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah kabupaten/kota		150	Bangunan	DPUPR	
		8	Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat		4	Bangunan	DPUPR	
		7.	**Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota**					
		1	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan kabupaten/kota		938.65	KM	DPUPR	
		2	Panjang jalan yang dibangun		0	KM	DPUPR	
		3	Panjang jembatan yg dibangun		0	M	DPUPR	
		4	Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)		0	KM	DPUPR	
		5	Panjang jembatan yang diganti/ dilebarkan		67.75	M	DPUPR	
		6	Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi		16576.5	KM	DPUPR	

NO	Urusan Pemerintahan	No IKK	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
		7	Panjang jembatan yang direhabilitasi		0	M	DPUPR	
		8	Panjang jalan yang dipelihara		5.1585	KM	DPUPR	
		9	Panjang jembatan yang dipelihara		34	M	DPUPR	
		8.	**Rasio Tenaga Kerja Operator/Teknisi/Analisis Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi**					
		1	Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah kabupaten/kota		46	Orang	DPUPR	
		2	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota		216	Orang	DPUPR	
		3	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analis di wilayah kabupaten/kota		216	Orang	DPUPR	
		4	Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi cakupan kabupaten yang aktif dengan data termutakhir		0	sistem	DPUPR	
		5	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kabupaten/kota		403	data	DPUPR	
		6	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan		3	data	DPUPR	

NO	Urusan Pemerintahan	No IKK	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
			yang bersumber dari APBN					
		7	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya		6	data	DPUPR	
		8	Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala		78	data	DPUPR	
		9	Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi Kabupaten/kota		1	data	DPUPR	
		10	Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analis konstruksi di wilayah kabupaten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.		216	data	DPUPR	
		11	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan		216	orang	DPUPR	

NO	Urusan Pemerintahan	No IKK	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
			sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analis					
		12	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analis di wilayah kabupaten/kota		216	orang	DPUPR	
		13	Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota		3	Badan Usaha	DPUPR	
		14	Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui		0	pemohon	DPUPR	
		15	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya		0	data	DPUPR	
		16	Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya		0	data	DPUPR	
		17	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang		0	data	DPUPR	

NO	Urusan Pemerintahan	No IKK	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
			menjadi kewenangan pengawasannya					
		18	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kabupaten/kota		0	Badan Usaha	DPUPR	
		19	Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota		0	Badan Usaha	DPUPR	
		20	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah kabupaten/kota		173	Badan Usaha	DPUPR	
		21	Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota		3	Badan Usaha	DPUPR	
		22	Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui		0	izin	DPUPR	
		23	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya		0	Pengawasan	DPUPR	
		24	Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya		0	Kecelakan Konstruksi	DPUPR	

NO	Urusan Pemerintahan	No IKK	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
		25	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya		0	Pengawasan	DPUPR	
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	**1.**	**Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota**					
		1	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya		285	Unit	DPKP LH	
		2	Jumlah rumah yang terkena bencana alam		111	Unit	DPKP LH	
		3	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam		278	Orang	DPKP LH	
		4	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi		0	Unit	DPKP LH	
		5	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi		0	Unit	DPKP LH	
		6	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi		14	Unit	DPKP LH	

NO	Urusan Pemerintahan	No IKK	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
		7	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana		0	Unit	DPKP LH	
		8	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi		61	Orang	DPKP LH	
		9	Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan		1.2	Ha	DPKP LH	
		2.	**Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Terdampak Relokasi Program Pemerintah kabupaten/kota**					
		1	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM		61	RT	DPKP LH	
		2	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM		0	RT	DPKP LH	
		3	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM		0	RT	DPKP LH	
		4	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM		61	RT	DPKP LH	

NO	Urusan Pemerintahan	No IKK	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
		5	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM		0	RT	DPKP LH	
		6	Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah		1.2	Ha	DPKP LH	
		3.	**Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Dibawah 10 Ha Di Kab/ Kota Yang Ditangani**					
		1	Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha		43.017	Ha	DPKP LH	
		2	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH		2340	Unit	DPKP LH	
		3	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh		8.2	Ha	DPKP LH	
		4.	**Berkurangnya Jumlah Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)**					
		1	Jumlah rumah di kab/kota		264487	Rumah	DPKP LH	
		2	Jumlah unit Peningkatan Kualitas RTLH		2340	Rumah	DPKP LH	
		3	Jumlah rumah tidak layak huni		30832	Rumah	DPKP LH	
		4	Jumlah rumah yang tidak dihuni		0	Rumah	DPKP LH	
		5	Rasio rumah dan KK	Jumlah KK	118.55	%	DINDUKCAPIL	313558
				Jumlah total unit rumah			DPKP LH	264487
		6	Jumlah rumah pembangunan baru		33	Rumah	DPKP LH	

NO	Urusan Pemerintahan	No IKK	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
		5.	**Jumlah Perumahan Yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum)**					
		1	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU		36	Perumahan	DPKP LH	
		2	Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum		2147	Rumah	DPKP LH	
		3	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan		1785	Rumah	DPKP LH	
		4	Jumlah unit rumah yang terfasiltasi akses sanitasi (on site / off site)		2147	Rumah	DPKP LH	
		5	Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH		8	Perumahan	DPKP LH	
		6	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU		1785	Rumah	DPKP LH	
		7	Jumlah pengembang yang tersertifikasi		6	Pengembang	DPKP LH	
		8	Jumlah pengembang yang teregistrasi		5	Pengembang	DPKP LH	
		9	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan		11	Pengembang	DPKP LH	
5	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN	**1.**	**Persentase Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan**					
		1	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/kota yang ditangani		37	Jumlah	SATPOLPP	

NO	Urusan Pemerintahan	No IKK	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
	MASYARAKAT	2	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan		2278	Orang	SATPOLPP	
		3	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan		18	Perda& Perkada	SATPOLPP	
		4	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS		3	Orang	SATPOLPP	
		5	Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum		14	Orang	SATPOLPP	
		6	Tersedianya sarana prasarana minimal		10	SOP	SATPOLPP	
		2.	**Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan**					
		3.	**Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana**					
		1	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun	100	%	BPBD	1
				Jumlah satu dokumen KRB yang lengkap dan sudah disahkan				1
		2	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	100	%	BPBD	283437
				Seluruh penduduk di kawasan rawan rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana				283437

NO	Urusan Pemerintahan	No IKK	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
		4.	**Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**					
		1	Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun	100	%	BPBD	1
				Jumlah satu dokumen RPB yang lengkap dan sudah disahkan				1
		2	Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun	100	%	BPBD	1
				Jumlah satu dokumen Renkon yang lengkap dan sudah				1
		3	Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	Jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	1.74	%	BPBD	18475
				Jumlah aparatur dengan warga negara di kawasan rawan				1061258
		4	Persentase warga negara yang ikut pelatihan	Jumlah warga negara yang ikut pelatihan	1.74	%	BPBD	18475
				Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana				1061258
		5	Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	Jumlah warga negara yang mendapat layanan pusdalops	100	%	BPBD	991033
				Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana				991033
		6	Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	Jumlah warga negara yang mendapat layanan peralatan perlindungan	0.148	%	BPBD	1574

NO	Urusan Pemerintahan	No IKK	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
				Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana				1061258
		5.	**Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana**					
		1	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan KLB	0	%	BPBD	0
				Jumlah seluruh penetapan status KLB				0
		2	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan darurat bencana	100	%	BPBD	2328
				Jumlah seluruh penetapan status darurat bencana				2328
		3	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	Jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	100	%	BPBD	53
				Jumlah keseluruhan petugas dalam penanganan darurat				53
		4	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	Jumlah korban yang berhasil dicari,ditolong dan dievakuasi	100	%	BPBD	1574
				Perkiraan jumlah korban keseluruhan dari bencana				1574
		6.	**Persentase Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran**					
		1	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi		570	Layanan	SATPOLPP	

NO	Urusan Pemerintahan	No IKK	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
			membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kab/kota					
		2	Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan		3	Pos	SATPOLPP	
		3	Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan		36	Orang	SATPOLPP	
		4	Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa		3	Pos	SATPOLPP	
		5	Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi		167	Sarpras	SATPOLPP	
		6	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran		15	Orang	SATPOLPP	

NO	Urusan Pemerintahan	No IKK	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
		7	Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dimas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran		24	Orang	SATPOLPP	
		8	Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran		1	Kegiatan	SATPOLPP	
		7.	**Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran**					
6	**SOSIAL**	**1.**	**Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Dan Gelandangan Pengemis Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Di Luar Panti (Indikator SPM)**					
		1	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki		1	Buah	DINSOS PPPA	
		2	Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM		3773	Orang	DINSOS PPPA	
		3	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk		1	Unit	DINSOS PPPA	
		4	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau		654	Orang	DINSOS PPPA	

NO	Urusan Pemerintahan	No IKK	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
		5	Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki		5	Unit	DINSOS PPPA	
		6	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi		155	Orang	DINSOS PPPA	
		7	Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar		1	Unit	DINSOS PPPA	
		8	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang		75	Orang	DINSOS PPPA	
		9	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu		227	Orang	DINSOS PPPA	
		10	Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter		3	Unit	DINSOS PPPA	
		11	Jumlah paket perbekalan Kesehatan yang tersedia		1	paket	DINSOS PPPA	
		12	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan		4	Orang	DINSOS PPPA	

NO	Urusan Pemerintahan	No IKK	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
		13	Jumlah tenaga Kesehatan yang disediakan di rumah singgah		1	Orang	DINSOS PPPA	
		14	Jumlah pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan		24	Orang	DINSOS PPPA	
		15	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/ Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial		126	Orang	DINSOS PPPA	
		16	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat		26	kali	DINSOS PPPA	
		17	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan		5	Orang	DINSOS PPPA	
		18	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan Kesehatan dasar		4	Orang	DINSOS PPPA	
		19	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan		10	Orang	DINSOS PPPA	

NO	Urusan Pemerintahan	No IKK	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
			gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga					
		20	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga		11	Orang	DINSOS PPPA	
		21	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk		32	Orang	DINSOS PPPA	
		2.	**Persentase Korban Bencana Alam Dan Sosial Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota**					
		1	Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan		430	Orang	DINSOS PPPA	
		2	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang		380	Orang	DINSOS PPPA	
		3	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki		0	Penampungan	DINSOS PPPA	
		4	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan		175	paket	DINSOS PPPA	
		5	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial		245	Orang	DINSOS PPPA	
		6	Jumlah pekerja social professional/ tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia		65	Orang	DINSOS PPPA	

NO	Urusan Pemerintahan	No IKK	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
7	TENAGA KERJA	**1.**	**Persentase Kota/Kota Yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja**					
		1	Dokumen perencanaan tenaga kerja Kabupaten/kota	Mengidentifikasi/ membandingkan kesesuaian dokumen RTK yang telah tersusun dengan peraturan perundangan yang berlaku	1	dokumen	DISNAKER PMPTSP	
		2	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	Realisasi Indikator – Target Indikator	0	%	DISNAKER PMPTSP	0
				Realisasi Indikator				0
		3	Jumlah perusahaan yang Menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota		0	Perusahaan	DISNAKER PMPTSP	
		2.	**Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi**					
		1	Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	Jumlah penerapan program PBK kualifikasi KKNI atau okupasi pada tahun 2023	0	%	DISNAKER PMPTSP	0
				keseluruhan program pelatihan baik kualifikasi kompetensi maupun klaster pada tahun 2023				43
		2	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	jumlah instruktur bersertifikat kompetensi pada tahun 2023	31.81	%	DISNAKER PMPTSP	7
				jumlah instruktur seluruhnya pada tahun 2023				22
		3	Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	Jumlah instruktur pada tahun 2023	0.69	%	DISNAKER PMPTSP	22
				jumlah peserta pelatihan pada tahun 2023				3163

NO	Urusan Pemerintahan	No IKK	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
		4	Persentase LPK yang terakreditasi	Jumlah LPK yang terakreditasi pada tahun 2023	23.80	%	DISNAKER PMPTSP	10
				jumlah seluruh LPK pada tahun 2023				42
		5	Persentase LPK yang memiliki perizinan	Jumlah LPK yang memiliki perizinan pada tahun 2023	64.28	%	DISNAKER PMPTSP	27
				jumlah LPK yang terdata pada tahun 2023				42
		6	Jumah penganggur yang dilatih		0	Orang	DISNAKER PMPTSP	
		7	Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat pelatihan pada tahun 2023	100	%	DISNAKER PMPTSP	674
				Jumlah orang yang dilatih pada tahun 2023				674
		8	Persentase penyerapan lulusan	Jumlah lulusan yang bekerja pada tahun 2023	100	%	DISNAKER PMPTSP	1823
				jumlah lulusan pada tahun 2023				1823
		9	Lulusan bersertifikat kompetensi	Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat Kompetensi pada tahun 2022	100	%	DISNAKER PMPTSP	417
				Jumlah lulusan bersertifikat Kompetensi pada tahun 2022				417
		10	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	∑CPMI dilatih	100	%	DISNAKER PMPTSP	674
				∑CPMI terdaftar				674

NO	Urusan Pemerintahan	No IKK	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
		11	Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia(CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia(CTKI)		0	orang	DISNAKER PMPTSP	
		3.	**Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja**					
		1	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	Jumlah perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas pada tahun 2022	100	%	DISNAKER PMPTSP	121
				jumlah perusahaan pada tahun 2022				121
		2	Data tingkat produktivitas total	Pertumbuhan ekonomi dikurangi (pertumbuhan modal+ pertumbuhan tenaga kerja)	0	data	DISNAKER PMPTSP	
		4.	**Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, Dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)**					
		1	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	Jumlah perusahaan yang telah memiliki PP pada tahun 2022	70.72	%	DISNAKER PMPTSP	78
				Jumlah perusahaan yg memiliki tenaga kerja 10 orang atau lebih				111
		2	Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	Jumlah perusahaan yang telah memiliki PKB pada tahun 2022	76.92	%	DISNAKER PMPTSP	10
				Jumlah perusahaan yg memiliki Serikat Pekerja/ Serikat Buruh				13

NO	Urusan Pemerintahan	No IKK	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
		3	Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan		23	SP/SB	DISNAKER PMPTSP	
		4	Persentase perusahaan yang sudah Menyusun struktur skala upah	Jumlah perusahaan yang sudah menyusun struktur dan skala upah	105.68	%	DISNAKER PMPTSP	93
				Jumlah perusahaan yang telah mengatur syarat kerja (yang diatur dalam PP atau PKB)				88
		5	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	Jumlah perusahaan yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	72.72	%	DISNAKER PMPTSP	88
				Jumlah perusahaan berdasarkan perusahaan wajib lapor				121
		6	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	Jumlah perusahaan yang berselisih	6.61	%	DISNAKER PMPTSP	8
				Jumlah perusahaan pada tahun 2022				121
		7	Jumlah mogok kerja		0	Mogok	DISNAKER PMPTSP	
		8	Jumlah penutupan perusahaan		1	Perusahaan		
		9	Jumlah perselisihan kepentingan		12	Perselisihan		

NO	Urusan Pemerintahan	No IKK	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
		10	Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan		0	Perselisihan		
		11	Jumlah perselisihan PHK		1	Perselisihan		
		12	Jumlah Pekerja/buruh yang ter PHK		129	Pekerja		
		13	Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartit		6	Perselisihan	DISNAKER PMPTSP	
		14	Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Kabupaten/Kota yang diberdayakan		1	LKS	DISNAKER PMPTSP	
		15	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator hubungan industrial	Jumlah Perjanjian Bersama	60	%	DISNAKER PMPTSP	9
				Jumlah kasus perselisihan				15
		5.	**Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Lintas Daerah Kota/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**					
		1	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota		2468	Lowongan Kerja	DISNAKER PMPTSP	
		2	Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kabupaten/kota		1823	Orang		
		3	Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kabupaten/kota		27	BKK		

NO	Urusan Pemerintahan	No IKK	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
		4	Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota		16	Orang		
		5	Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja		3	Orang		
		6	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kabupaten/kota		13	Lembaga		
		7	Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota		379	Perjanjian		
		8	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)		1823	orang		
		9	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	∑ CPM/CTKI yang mendapatkan sosialisasi	100	Orang	DISNAKER PMPTSP	1823
				∑ CPM/CTKI				1823
		10	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata		1823	Orang		
		11	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan	∑ Fasilitas PMI yang dipulangkan	100	%		2
				∑ PMI yang pulang				2

NO	Urusan Pemerintahan	No IKK	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
		12	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	∑ PMI/TKI yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	100	%		674
				∑ PMI/TKI				674
		13	Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	∑ PMI/TKI purna dan keluarganya yang diberdayakan	33.81	%		70
				∑ PMI/TKI purna dan keluarganya				2071
		14	Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentukan	∑ LTSA yang terbentuk	0	%		0
				Jumlah daerah kantong PMI/TKI				2
8	**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	**1.**	**Persentase ARG Pada Belanja Langsung APBD**					
		1	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG		24	Lembaga	DINSOS PPPA	
		2	Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat Kabupaten/kota		28	Prog/Keg	DINSOS PPPA	
		2.	**Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota**					

NO	Urusan Pemerintahan	No IKK	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
		1	Jumlah media massa (cetak, elektronIk) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas PPPA) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak		1	Media Massa	DINSOS PPPA	
		2	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal (standar pelayanan minimal yang dimaksud seperti apa, dan dasar regulasinya)		1	Lembaga	DINSOS PPPA	
		3	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	Jumlah korban kekerasan anak yang dilayani	100	%	DINSOS PPPA	65
				jumlah korban kekerasan anak di tingkat kabupaten/kota				65
		4	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan		1	Lembaga	DINSOS PPPA	P2TP2A
		5	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/ fasilitas oleh Pemkab/kota (APBD kab/kota)		1	Lembaga	DINSOS PPPA	P2TP2A
		3.	**Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)**					
		1	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan		1	Organisasi	DINSOS PPPA	Dharma Wanita Persatuan Kab. Banjarnegara

NO	Urusan Pemerintahan	No IKK	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
		2	Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih		0	Orang	DINSOS PPPA	
		3	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan		2	Lembaga	DINSOS PPPA	
		4	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten /kota		2	Lembaga	DINSOS PPPA	
		5	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi		1	Kebijakan/ Program	DINSOS PPPA	P2TP2A
		6	Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandardisasi		1	Lembaga	DINSOS PPPA	P2TP2A
		7	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	Jumlah korban kekerasan perempuan yang mendapatkan layanan	100	%	DINSOS PPPA	16
				Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan			DINSOS PPPA	16

NO	Urusan Pemerintahan	No IKK	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
9	PANGAN	**1.**	**Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)**					
		1	Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	Ada/tidak infrastruktur pergudangan	Ada	Ada/Tidak	DISTANKAN KP	
		2	Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	Ada/tidak penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya	Ada	Ada/Tidak	DISTANKAN KP	
		3	Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	Ada/tidak regulasi harga minimum daerah	Ada	Ada/Tidak	DISTANKAN KP	
		4	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	Ada/tidak kegiatan pemberdayaan masyarakat	Ada	Ada/Tidak	DISTANKAN KP	
		5	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	Ada/tidak peta ketahanan dan kerentanan pangan	Ada	Ada/Tidak	DISTANKAN KP	
		6	Tertanganinya kerawanan pangan	Ada/tidak penanganan daerah rentan rawan pangan	Ada	Ada/Tidak	DISTANKAN KP	
		7	Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	Ada/tidak penyaluran cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	Ada	Ada/Tidak	DISTANKAN KP	
		8	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	Ada/tidak kegiatan pengawasan keamanan pangan segar	Ada	Ada/Tidak	DISTANKAN KP	

NO	Urusan Pemerintahan	No IKK	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
10	PERTANAHAN	**1.**	**Persentase Pemanfaatan Tanah Yang Sesuai Dengan Peruntukkan Tanahnya Diatas Izin Lokasi Dibandingkan Dengan Luas Izin Lokasi Yang Diterbitkan**					
		1	SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota	Jumlah izin lokasi yang diterbitkan + jumlah surat penolakan pemohonan izin lokasi setelah melalui proses (ditolak seluruhnya)	100	%	DPKP LH	28
				Jumlah permohonan izin lokasi dalam 1 tahun				28
		2	SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek	Jumlah penerbitan SK Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari tanah kelebihan maksimum absentee	0	%	DPKP LH	0
				Jumlah permohonan yang diusulkan Panitia Pertimbangan Landreform				0
		3	SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee	Jumlah luas tanah yang telah dibayarkan ganti rugi kepada bekas pemilih tanah kelebihan maksimum/absentee	0	%	DPKP LH	0
				Jumlah luas tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah obyek landreform yang berasal dari tanah kelebihan maksimum absentee dan daftar subyek				0
		4	Dokumen Izin membuka tanah	Jumlah dokumen izin membuka tanah yang disetujui + jumlah izin membuka tanah yang ditolak	100	%	DPKP LH	28

NO	Urusan Pemerintahan	No IKK	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
				Jumlah dokumen izin membuka tanah yang dimohon dalam 1 tahun				28
		5	Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah kabupaten/kota	Jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik	0	%	DPKP LH	0
				Jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik yang direncanakan dalam 1 tahun				0
11	LINGKUNGAN HIDUP	**1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota**						
		1	Hasil Perhitungan kab/kota terhadap :				DPKP LH	
			a) Indeks Kualitas Air (IKA)	**Indeks Kualitas Air (IKA)** $Nilai\ relatif = \frac{C_i}{L_{ij}}$ $: IP = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})^2_{Rata-rata} + (C_i/L_{ij})^2_{Maksimum}}{2}}$ Rumus Metode IP : $0 \leq PI_j \leq 1{,}0$ → baik (memenuhi baku mutu) $1{,}0 < PI_j \leq 5{,}0$ → cemar ringan $5{,}0 < PI_j \leq 10{,}0$ → cemar sedang $PI_j > 10{,}0$ → cemar berat IKU = 100 – [50/0.9 x (Ieu – 0.1)]	42.68			
			b) Indeks Kualitas Udara (IKU)		89.36			
			c) Indeks Tutupan Hutan (ITH)		42.39			

NO	Urusan Pemerintahan	No IKK	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
			d) Indeks Tutupan Hutan (IKL)	Dimana : IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan TH = Tutupan Hutan	61.51			
		2.	**Terlaksananya Pengelolaan Sampah Di Wilayah Kabupaten/Kota**					
		1	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kab/kota	1.Tersedianya informasi terkait rasio angkutan pengelolaan sampah terhadap volume timbulan sampah 2.Tersedianya informasi terkait kapasitas TPA terhadap volume timbulan sampah. 3.Terrsedianya informasi terkait jumlah TPST dibagi jumlah sampah pada masing2 lingkungan.	100	%	DPKP LH	3 3
		3.	**Ketaatan Penanggung Jawab Usaha Dan/Atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin Pplh Dan Puu Lh Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kota**					
		1	Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	Izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota Jumlah usulan permohonan yang teregestrasi	100	%	DPKP LH	2 2

NO	Urusan Pemerintahan	No IKK	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
		2	Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di kabupaten/kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	Jumlah PPLHD yang ada	200	%	DPKP LH	4
				Jumlah kegiatan dan atau usaha yang izin ingkungan,izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten				2
		3	Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/ Kota	Jumlah MHA (Masyarakat Hukum Adat) yg diakui	0	%	DPKP LH	0
				Jumlah usulan MHA Masyarakat Hukum Adat adalah WNI yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun				0
		4	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	Jumlah Masyarakat Hukum Adat (MHA) yg mendapatkan pelatihan	0	%	DPKP LH	0
				Jumlah Masyarakat Hukum Adat (MHA) yg ada				0

NO	Urusan Pemerintahan	No IKK	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
		5	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	Jumlah lembaga kemasyarakatan yg diberikan diklat/rencana	93.33	%	DPKP LH	14
				Target lembaga kemasyarakatan yg akan diberikan diklat				15
		6	Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten/kota yang ditangani.	Pengaduan masyarakat yang ditangani	0	%	DPKP LH	0
				Total jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi				0
12	**ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**	**1.**	**Perekaman Ktp Elektronik**					
		1	Penerbitan akta perkawinan	Jumlah akta perkawinan yang diterbitkan	100	%	DINDUKCAPIL	29
				Peristiwa perkawinan yang dilaporkan				29
		2	Penerbitan akta perceraian	Jumlah akta Percerian yang diterbitkan	100	%	DINDUKCAPIL	8
				Peristiwa Perceraian yang dilaporkan				8
		3	Penerbitan akta kematian	Jumlah akta kematian yang diterbitkan	100	%	DINDUKCAPIL	7921
				Peristiwa kematian yang dilaporkan				7921

NO	Urusan Pemerintahan	No IKK	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
		4	Penyajian data kependudukan	Jumlah penyajian data kependudukan skala kabupaten/kota dalam satu tahun	100	%	DINDUKCAPIL	2
				2 tahun				2
13	**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**	**1.**	**Persentase Pengentasan Desa Tertinggal**					
		1	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa		82	Desa	DISPERMADES PPKB	
		2	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya		6	Desa	DISPERMADES PPKB	
		3	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan		911	Lembaga	DISPERMADES PPKB	
		4	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan		12	Desa	DISPERMADES PPKB	

NO	Urusan Pemerintahan	No IKK	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
		2.	**Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri**					
		1	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa		82	Desa	DISPERMADES PPKB	
		2	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya		6	Desa	DISPERMADES PPKB	
		3	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan		911	Lembaga	DISPERMADES PPKB	
		4	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan		12	Desa	DISPERMADES PPKB	
14	**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**	**1.**	**TFR (Angka Kelahiran Total)**					
		1	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan		Tidak	Ada/Tidak	DISPERMADES PPKB	0

NO	Urusan Pemerintahan	No IKK	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
		2	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	Median Usia Kawin Pertama Wanita Usia 25-49 tahun didefinisikan sebagai usia dimana 50% dari semua perempuan dalam kelompok umur sudah melakukan perkawinan. Trend usia kawin pertama penting untuk menentukan pola fertilitas di Indonesia	27	tahun	DISPERMADES PPKB	
		3	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	$\mathrm{ASFRi} = \frac{\mathrm{bi}}{\mathrm{di}^{f}}\ x\ k$ ASFR adalah angka kelahiran di kelompok usia 15-19 tahun	11,52		DISPERMADES PPKB	$\frac{389}{33758}\ x\ 100$
		4	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	Jumlah masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK advokasi dan KIE	81,02	%	DISPERMADES PPKB	854585
				Jumlah sasaran masyarakat program KKBPK advokasi dan KIE				1054804
		5	Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK		38	Stakeholder	DISPERMADES PPKB	

NO	Urusan Pemerintahan	No IKK	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
		2.	**Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/ MCPR)**					
		1	Persentase Fasilitasi Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	Jumlah faskes yang siap melayani KB MKJP	100	%	DISPERMADES PPKB	55
				Jumlah faskes				55
		2	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Peserta KB Aktif	81,24	%	DISPERMADES PPKB	147299
				Jumlah PUS				181303
		3	Pemerintah Daerah kab/kota yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	Jumlah kelompok kerja KKBPK yang efektif	2593		DISPERMADES PPKB	
		4	Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	jumlah peserta KB pasca persalinan menurut metode kontrasepsi cara modern	67,52	%	DISPERMADES PPKB	8651
				jumlah sasaran peserta KB pasca persalinan				12813
		3.	**Persentase Kebutuhan Ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)**					
		1	Persentase kesertaan KB di kab/kota dengan kesertaan rendah	Daftar Desa/Kelurahan yang memiliki persentase kesertaan KB paling rendah dalam satu Kabupaten/Kota. Data/informasi yang diambil adalah 50% dari total seluruh Desa/Kelurahan dengan persentase kesertaan KB paling rendah	29,9655	%	DISPERMADES PPKB	$\frac{44118}{147229} x\ 100$
		2	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	jumlah peserta KB pada Keluarga Penerima PBI	77.28	%	DISPERMADES PPKB	

NO	Urusan Pemerintahan	No IKK	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
				Jumlah Keluarga PBI Penerima Bantuan Iuran (PBI) adalah peserta yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu yang iuran jaminan kesehatannya dibayarkan oleh Pemerintah				$\frac{94276}{121993} x\ 100$
15	PERHUBUNGAN	**1.**	**Rasio Konektivitas Kabupaten**					
		1	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C	Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C yang tersedia	84,84	%	DINHUB	28
				Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan sesuai dengan standar pelayanan penyelenggaraan terminal angkutan jalan				33
		2	Terlaksananya pelayanan uji berkala	Jumlah kendaraan yang diuji per tahun	88.37	%	DINHUB	8196
				Jumlah kendaraan wajib uji				9274
		3	Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	Jumlah penetapan tarif lintas penyeberangan	1	%	DINHUB	Tidak memiliki lintas Penyeberanagn
				Jumlah lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota				

NO	Urusan Pemerintahan	No IKK	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
		4	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	Jumlah pemasangan perlengkapan jalan Kabupaten/ Kota	86.59	%	DINHUB	4618
				Target kebutuhan perlengkapan jalan Kabupaten/Kota				5333
16	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	**1. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Yang Terhubung Dengan Akses Internet Yang Disediakan Oleh Dinas Kominfo**						
		1	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah perangkat daerah yang saling terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100	%	DINKOMINFO	44
				Jumlah Perangkat Daerah			ORGANISASI	44
		2	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan dinas kominfo	100	%		44
				Jumlah Perangkat Daerah			BAG. ORGANISASI	44
		3	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	Ada (5)	Ada	Ada/Tidak	DINKOMINFO	Srikandi, Zoom, e mail Pemkab, video dan Radio, Lapor Tri Harso

NO	Urusan Pemerintahan	No IKK	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
		2.	**Persentase Layanan Publik Yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi**					
		1	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara	Jumlah kegiatan (event),perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang diselenggarakan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015)	81.250	%	DINKOMINFO	26
				Jumlah Kegiatan (event),perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah				32
		2	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	Jumlah perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	100	%	DIKOMINFO	44
				Jumlah Perangkat Daerah			BAG. ORGANISASI	44
		3	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Jumlah Perangkat Daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	100	%	DIKOMINFO	44
				Jumlah Perangkat Daerah			BAG. ORGANISASI	44

NO	Urusan Pemerintahan	No IKK	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
		4	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	Layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	100	%	DIKOMINFO	48
				Jumlah layanan				48
		5	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	Jumlah layanan SPBE layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan yang memanfaatkan sertifikat elektronik	12.5	%	DIKOMINFO	6
				Jumlah layanan				48
		6	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Jumlah sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	66.66	%	DIKOMINFO	2
				Jumlah sistem elektronik				3
		7	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	Jumlah layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	90.91	%	DIKOMINFO	20
				Jumlah layanan publik dan layanan administrasi				22
		8	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	100	%	DIKOMINFO	44

NO	Urusan Pemerintahan	No IKK	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
				Jumlah perangkat daerah			BAG. ORGANISASI	44
		9	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	Jumlah perangkat daerah yang menyimpan data di pusat	100	%	DIKOMINFO	44
				Jumlah perangkat daerah			BAG. ORGANISASI	44
		10	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	Jumlah perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis datanya	100	%	DIKOMINFO	44
				Jumlah perangkat daerah			BAG. ORGANISASI	44
		11	Persentase data yang dapat berbagi pakai	Jumlah data yang dapat berbagi pakai	100	%	DIKOMINFO	684
				Jumlah data yang dimiliki pemerintah daerah				684
		12	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	54.54	%	DIKOMINFO	24
				Jumlah perangkat daerah			BAG. ORGANISASI	44
		13	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	Jumlah ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan dinas kominfo	41.6666	%	DIKOMINFO	5
				Jumlah ASN Pengelola TIK				12

NO	Urusan Pemerintahan	No IKK	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
		14	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	(Ada atau Tidak ada) : 1. Dokumen Master Plan Poin dalam master plan paling sedikit memuat: ▪ Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran ▪ Penganggaran ▪ Strategi ▪ Peta Jalan ▪ Arah Kebijakan ▪ Cetak biru teknis/Peta rencana strategi 2. Perda/Perkada tentang pengelolaan TIK di daerah paling sedikit memuat tentang GCIO (Government Chief of Information Officer): - Penugasan pejabat - Kewenangan - Tugas dan tanggung jawab	Ada	Ada/tidak	DIKOMINFO	Perbup 50/2020 tentang Penyelenggaraan SPBE
		3.	**Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten**					
		1	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kab/kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kab/kota	Σ komunitas masyarakat atau mitra strategis Pemerintah Daerah kab/kota yang telah menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah	42.86	%	DIKOMINFO	6
				Σ komunitas masyarakat atau Mitra Komunikasi Pemerintah Daerah kab/kota				14

NO	Urusan Pemerintahan	No IKK	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
		2	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kab/ kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	Jumlah konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kab/kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	100	%	DIKOMINFO	7
				Σ konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kab/kota				7
		3	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	Diseminasi dan layanan Informasi Publik yang dilaksanakan sesuai dengan Strategi Komunikasi (STRAKOM) dan SOP	100	%	DIKOMINFO	39
				Σ Diseminasi dan layanan informasi Publik				39
17	KOPERASI DAN UKM	**1. Meningkatnya Koperasi Yang Berkualitas**						
		1	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah penerbitan izin usaha simpan pinjam koperasi pada tahun yang dilaporkan	1.33	%	DISPERIN DAGKOP UKM	1
				Jumlah usaha simpan pinjam koperasi yang belum mempunyai izin usaha simpan pinjam				75
		2	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah	Jumlah penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan	0	%	DISPERIN DAGKOP UKM	0

NO	Urusan Pemerintahan	No IKK	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
			keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah permohonan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan				0
		3	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi	19.88	%	DISPERIN DAGKOP UKM	34
				Jumlah koperasi yang ada				171
		4	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya	27.27	%	DISPERIN DAGKOP UKM	27
				Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang ada				99
		5	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihanuntuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	93.56	%	DISPERIN DAGKOP UKM	160
				Jumlah koperasi yang ada				171
		6	Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah anggota koperasi yang mengikuti pelatihan perkoperasian	0.42	%	DISPERIN DAGKOP UKM	185
				Jumlah anggota koperasi yang ada				43995
		7	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam	Jumlah koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan	**3..5**	%	DISPERIN DAGKOP UKM	**6**
				Jumlah koperasi yang ada				171

NO	Urusan Pemerintahan	No IKK	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
			daerah kabupaten/kota					
		8	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan		5.85	%	DISPERIN DAGKOP UKM	10
								171
		9	Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang telah diterbitkan sertifikat Nomor Induk Koperasinya	59.6	%	DISPERIN DAGKOP UKM	102
				Jumlah koperasi yang ada				171
		10	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pembiayaan	5.8	%	DISPERIN DAGKOP UKM	10
				Jumlah koperasi yang ada				171
		11	Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pemasaran	1.75	%	DISPERIN DAGKOP UKM	3
				Jumlah koperasi yang ada				171
		12	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha	80.12	%	DISPERIN DAGKOP UKM	137
				Jumlah koperasi yang ada				171
		13	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan	16.95	%	DISPERIN DAGKOP UKM	29
				Jumlah koperasi yang ada				171

NO	Urusan Pemerintahan	No IKK	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
			kabupaten/kota					
		2.	**Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha**					
		1	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	Jumlah pertumbuhan wirausaha baru	7.18	%	DISPERIN DAGKOP UKM	2133
				Jumlah wirausaha yang ada				29706
		2	Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	Jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem data online (ODS)	0	%	DISPERIN DAGKOP UKM	0
				Jumlah usaha mikro yang ada				0
		3	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	Jumlah usaha mikro yang bermitra	3.92	%	DISPERIN DAGKOP UKM	1.046
				Jumlah usaha mikro yang ada				29706
		4	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi	11.25	%	DISPERIN DAGKOP UKM	2699
				Jumlah usaha mikro yang belum memiliki standar dan sertifikasi produk				23980
		5	Persentase jumlah usaha mikro yang dberikan dukungan fasilitasi pemasaran	Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	17.61	%	DISPERIN DAGKOP UKM	3996
				Jumlah usaha mikro yang belum mendapatkan dukungan pemasaran				22683
		6	Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	7.01	%	DISPERIN DAGKOP	1872

NO	Urusan Pemerintahan	No IKK	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
				Jumlah usaha mikro yang ada			UKM	26679
		7	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan	Jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha	21.51	%	DISPERIN DAGKOP UKM	5740
				Jumlah usaha mikro yang ada				26679
18	PENANAMAN MODAL	**1.**	**Persentase Peningkatan Investasi Di Kota**					
		1	PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Jumlah fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/ Kota yang bisa diberikan kepada investor	Tidak	Ada/Tidak	DISNAKER PMPTSP	Raperda edang dalam pembahasan
		2	Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas insentif penanaman modal	Tersedianya dokumen SOP pelaksanaan Pemberian fasilitas/ Insentif penanaman modal	Tidak	Ada/Tidak	DISNAKER PMPTSP	Belum ada Perda
		3	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan Pemberian fasilitas/ Insentif penanaman modal pertahun	0	Jumlah Laporan	DISNAKER PMPTSP	
		4	Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	Jumlah kegiatan seminar bisnis/ business forum, one on one meeting	7	Jumlah Kegiatan	DISNAKER PMPTSP	

NO	Urusan Pemerintahan	No IKK	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
		5	Kegiatan pameran penanaman modal	Jumlah kegiatan pameran penanaman modal	2	Jumlah Kegiatan	DISNAKER PMPTSP	
		6	Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	Jumlah kegiatan penerimaan misi penanaman modal	3	Jumlah Kegiatan	DISNAKER PMPTSP	
		7	Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	Jumlah konsultasi perizinan dan nonperizinan penanaman modal	318	Jumlah Konsultasi	DISNAKER PMPTSP	
		8	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	Jumlah penerbitan perizinan dan nonperizinan	2576	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan	DISNAKER PMPTSP	
		9	Laporan realisasi penanaman modal	Jumlah nilai realisasi penanaman modal yang terpantau di tingkat Kabupaten/Kota	837473768941	Jumlah Realisasi (Rupiah)	DISNAKER PMPTSP	
		10	Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota	Jumlah aparatur dan penanam modal yang memahami ketentuan pelaksanaan kegiatan penanaman modal	638	Jumlah Aparatur	DISNAKER PMPTSP	

NO	Urusan Pemerintahan	No IKK	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
		11	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	Jumlah perusahaan yang mendapatkan pengawasan dan pelaksanaan penanaman modal	638	Jumlah Perusahaan	DISNAKER PMPTSP	
		12	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan kabupaten/kota	Jumlah permintaan data dan informasi yang terpenuhi/ Jumlah permintaan data dan informasi yang diterima	10	Ada/Tidak	DISNAKER PMPTSP	ada
19	PEMUDA DAN OLAHRAGA	**1.**	**Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri**					
		1	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	360	Orang	DINDIKPORA	
		2	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	15	Orang	DINDIKPORA	
		2.	**Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan Dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan**					
		1	Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	10	Orang	DINDIKPORA	
		2	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	40	Orang	DINDIKPORA	

NO	Urusan Pemerintahan	No IKK	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
		3.	**Peningkatan Prestasi Olahraga**					
		1	Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan		157	Orang	DINDIKPORA	
		2	Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah		3	Event	DINDIKPORA	
20	**STATISTIK**	**1.**	**Persentase Organisasi Perangkat Daerah (Opd) Yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah**					
		1	Tersedianya buku profil daerah		Ada	Ada/tidak	DINKOMINFO	
		2	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan		8	Jumlah Survey		
		3	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan		44	Jumlah Kompilasi		
		4	Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS		1	Jumlah Survey		
		5	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS		44	Jumlah Kompilasi		
		6	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik	Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral	100	%		44

NO	Urusan Pemerintahan	No IKK	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
				Jumlah kegiatan statistik sektoral				44
		7	Persentase kelengkapan metadata variabel Sektoral	Jumlah metadata indikator statistik sektoral	100	%		44
				jumlah indikator statistik sektoral				44
21	PERSANDIAN	1.	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah					
		1	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumah kegiatan strategis yang harus diamankan	Jumlah kegiatan strategis teramankan	0	%	DINKOMINFO	0
				Jumlah kegiatan strategis yang ada				0
		2	Persentase system elektronik yang telahmenerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	Jumlah SE yang menerapkan SMKI dan diamankan sertifikat elektronik atau aplikasi penyandian	12.5	%		6
				Jumlah SE yang ada				48
		3	Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	Jumlah SE atau aset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	2.08	%		1
				Jumlah SE yang ada				48

NO	Urusan Pemerintahan	No IKK	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
		4	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan	Jumlah titik teramankan / Jumlah titik pada PHKS	0	%		PHKS belum ditetapkan
22	KEBUDAYAAN	**1.**	**Terlestarikannya Cagar Budaya**					
		1	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	Jumlah objek PK yang (diinventaris + diamankan + dipelihara + diselamatkan + dipublikasikan)	1307	Obyek	DISPARBUD	
		2	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	Jumlah objek PK (disebarluaskan + dikaji + dikayakan keberagamannya)	162	Obyek	DISPARBUD	
		3	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa,meningkatkan ketahanan budaya,dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	Jumlah objek dimanfaatkan	402	Obyek	DISPARBUD	
		4	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	Jumlah sdm ditingkatkan kompetensi + Jumlah sdm disertifikasi + Jumlah lembaga distandarisasi + Jumlah lembaga ditingkatkan kapasitas tata kelola + Jumlah pranata ditingkatkan kapasitas tata kelola	352	Orang	DISPARBUD	

NO	Urusan Pemerintahan	No IKK	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
		5	Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	Jumlah CB ditetapkan – Jumlah CB dihapuskan	0	Cagar Budaya	DISPARBUD	
		6	Perlindungan cagar budaya kab/kota (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	Jumlah CB (diselamatkan + diamankan + dizonasi + dipelihara + dipugar	99	Cagar Budaya	DISPARBUD	
		7	Layanan perizinan membawa cagar budaya kab/kota ke luar kab/kota dengan dukungan data	Jumlah CB diberikan izin ke luar Kabupaten/Kota	0	Cagar Budaya	DISPARBUD	
		8	Pengembangan cagar budaya kab/kota (penelitian, revitalisasi, adaptasi),	Jumlah CB (diteliti + direvitalisasi + diadaptasi)	521	Cagar Budaya	DISPARBUD	
		9	Pemanfaatan cagar budaya kota (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	Jumlah CB dimanfaatkan	522	Cagar Budaya	DISPARBUD	
		10	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	Jumlah koleksi museum (dikelola + diamankan + dikembangkan + dimanfaatkan)	487	Koleksi		
		11	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum	Jumlah pengunjung museum	7176	Orang		
		12	Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum kab/kota	Jumlah berpartisipasi dalam pengelolaan museum	0	Orang		
		13	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	Jumlah tim pendaftaran CB yang dibentuk	1	Tim		

NO	Urusan Pemerintahan	No IKK	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
		14	Pembentukan tim ahli cagar budaya kabupaten	Jumlah pembentukan tim ahli CB	1	Tim		
		15	Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	Jumlah ahli CB yang disertifikasi	1	Tim		
		16	Pemetaan SDM cagar budaya dan permuseuman	Jumlah sdm CB + jumlah sdm Museum	8	Orang		
		17	Peningkatan kompetensi SDM cagar budaya dan permuseuman kab/kota	Jumlah sdm yang ditingkatkan kompetensinya (CB + Museum)	2	Orang		
		18	Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	Jumlah sarana dan prasarana (CB + Museum)	13	Unit		
		19	Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	Jumlah kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	1	Kegiatan		
23	**PERPUSTAKAAN**	**1.**	**Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat**					
		1	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	Koleksi perpustakaan yang tersedia di berbagai perpustakaan di wilayahnya (dalam eksemplar)	212.81	%	DISARPUS	2258536
				Jumlah penduduk di wilayahnya (dalam jiwa)			DINDUKCAPIL	10061258
		2	Persentase ketermanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat	Jumlah kunjungan pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan baik secara online maupun onsite	2.92	%	DISARPUS	31000
				Jumlah penduduk di wilayahnya			DINDUKCAPIL	1061258

NO	Urusan Pemerintahan	No IKK	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
		3	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	Ketersediaan tenaga perpustakaan di berbagai perpustakaan di wilayahnya	0.12	%	DISARPUS	1300
				Jumlah penduduk di wilayahnya (dalam jiwa)			DINDUKCAPIL	1061258
		4	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Jumlah perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	6.30		DISARPUS	51
				Jumlah perpustakaan dari berbagai jenis yang terdapat di wilayahnya				809
		5	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat		13		DISARPUS	
		2.	**Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat**					
		1	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya		1	Naskah Kuno	DISARPUS	
		2	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa		0	Naskah Kuno	DISARPUS	
		3	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)		297	Budaya Etnis	DISARPUS	

NO	Urusan Pemerintahan	No IKK	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
24	KEARSIPAN	**1.**	**Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti Yang Sah Dan Pertanggungjawaban Nasional) Pasal 40 Dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan**					
		1	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	Jumlah arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	100	%	DISARPUS	1719
				Jumlah seluruh arsip aktif				1719
		2	Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	Jumlah arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip	100	%	DISARPUS	1001
				Jumlah seluruh arsip inaktif				1001
		3	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	Jumlah arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	100	%	DISARPUS	110
				Jumlah seluruh arsip Statis				110
		4	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	Jumlah arsip yang telah dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	0	%	DISARPUS	0
				Jumlah seluruh arsip dinamis danarsip statis pemerintahan kabupaten/kota				85845
		2.	**Tingkat Keberadaan Dan Keutuhan Arsip Sebagai Bahan Pertanggungjawaban Setiap Aspek Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Untuk Kepetingan Negara, Pemerintahan, Pelayanan Publik Dan Kesejahteraan Rakyat**					
		1	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	NSPK pemusnahan arsip merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 25/2012 tentang Pedoman Pemusnahan Arsip	31524	Jumlah Arsip	DISARPUS	
		2	Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	NSPK perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana merujuk pada Peraturan Kepala	0	Jumlah Arsip		

NO	Urusan Pemerintahan	No IKK	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
				ANRI 23/2015 tentang Perlindungan dan Penyelamatan Arsip dari Bencana				
		3	Penyelamatan arsip perangkat daerah kabupaten/kota yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kab/kota yang sesuai NSPK di kab/kota	NSPK penyelamatan arsip penggabungan/pembubaran perangkat daerah merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 46/2015 tentang Penyelamatan Arsip Penggabungan atau Pembubaran Lembaga Negara dan Perangkat Daerah	110	Jumlah Arsip		
		4	Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kab/kota yang sesuai NSPK	NSPK autentikasi arsip merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 20/2011 tentang Pedoman Autentikasi Arsip Elektronik	700	Jumlah Arsip		
		5	Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah kab/kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	NSPK pencarian arsip statis merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 18/2012 tentang Pedoman Pembuatan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	6	Jumlah Arsip		
		6	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah kab/kota yang sesuai NSPK	NSPK perizinan penggunaan arsip tertutup merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 28/2011 tentang Pedoman Akses dan Layanan Arsip Statis	0	Jumlah Arsip		

NO	Urusan Pemerintahan	No IKK	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
URUSAN PILIHAN								
25	**KELAUTAN PERIKANAN**	**1.**	**Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap Dan Budidaya) Kabupaten/Kota (Sumber Data: One Data Kkp)**					
		1	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)		946	RTP	DISTANKAN KP	
		2	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	Jumlah TPI yang operasional	0	%		0
				Jumlah seluruh TPI yang ada di wilayah kabupaten/kota				1
		3	Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam1 (satu) Daerah kabupaten/kota yang diterbitkan	Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam1 (satu) Daerah kabupaten/kota yang diterbitkan	0	Izin		
		4	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan per tahun	7920	Pembudidaya		
		5	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi		2416705700	Benih		
26	**PARIWISATA**	**1.**	**Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara Per Kebangsaan**					
		1	Jumlah entitas pengelolaan destinasi		8		DISPARBUD	

NO	Urusan Pemerintahan	No IKK	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
		2	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata		129		DISPARBUD	
		3	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kab/kota		5	TDUP		
		4	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan		574	orang		
		5	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri		61	Kegiatan		
		6	Jumlah event luar negeri yang diikuti Kabupaten/kota		0	orang		
		7	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri		14	Industri		
		8	Persentase tenaga kerja di sektor parwisata yang disertifikasi	Jumlah tenaga kerja pariwisata tersertifikasi	8,37	%		211
				Jumlah tenaga kerja pariwisata				2520
		9	Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	Jumlah peserta pembekalan sektor kepariwisataan	18,13	%		457
				Jumlah sasaran pembekalan sektor kepariwisataan				2520
		10	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat		50	Lokasi		

NO	Urusan Pemerintahan	No IKK	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
27	PERTANIAN	**1.**	**Produktivitas Pertanian Per Hektar Per Tahun**					
		1	Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan	Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan	4037	Unit	DISTANKAN KP	
		2	Prasarana pertanian yang digunakan	Jumlah Prasarana pertanian yang digunakan	392			
		3	Penerbitan izin usaha pertanian	Jumlah fasilitasi Penerbitan izin usaha pertanian	3	Dokumen		
		4	Persentase Prasarana pertanian yang digunakan	Jumlah prasarana yang aktif digunakan	100	%		392
				Jumlah prasarana yang dibangun				392
		5	Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian kab/kota	Jumlah usulan yang difasilitasi	100	%		3
				Jumlah usulan usaha pertanian				3
		2.	**Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular**					
		1	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	Jumlah Area yang dapat ditanggulangi	100	%	DISTANKAN KP	18
				Luas Area terkena bencana				18

NO	Urusan Pemerintahan	No IKK	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
28	KEHUTANAN							
		1	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura		tidak	ada/tidak	DPKPLH	Urusan kehutanan merupakan kewenangan provinsi
		2	Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga		tidak	ada/tidak		
		3	Pemulihan ekosistem pada Tahura		tidak	ada/tidak		
		4	Menurunnya gangguan kawasan TAHURA		tidak	ada/tidak		
29	ESDM	**PERSENTASE PERUSAHAAN PEMANFAATAN PANAS BUMI YANG MEMILIKI IJIN DI KOTA**						
		1	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kota		ada	ada/tidak	DISNAKER PMPTSP	1
30	PERDAGANGAN	**1.**	**Persentase Pelaku Usaha Yang Memperoleh Izin Sesuai Dengan Ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan Dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)**					
		1	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin :				DISPERIN DAGKOP UKM	
			a. Pusat perbelanjaan	Jumlah izin pusat perbelanjaan yang diterbitkan < 5 hari kerja	100			4
				Jumlah permohonan izin pusat perbelanjaan yang dokumennya sudah lengkap dan benar				4

NO	Urusan Pemerintahan	No IKK	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
			b. Toko swalayan	Jumlah Izin Toko Swalayan yang diterbitkan < 5 hari kerja	100			86
				Jumlah permohonan izin Toko Swalayan yang dokumennya sudah lengkap dan benar				86
		2	Persentase penerbitan TDG	Jumlah penerbitan TDG < 5 hari kerja	100	%	DISPERIN DAGKOP UKM	49
				Jumlah Permohonan Penerbitan TDG				49
		3	Persentase Gudang yang tidak mempunyai TDG	Jumlah penerbitan TDG	66.21	%	DISPERIN DAGKOP UKM	49
				Jumlah gudang yang ada di Kab /kota				74
		4.	Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk :				DISPERIN DAGKOP UKM	
			a) Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri	Jumlah STPW untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri yang terbit ≤2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar	-	%		-
				Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri				-

NO	Urusan Pemerintahan	No IKK	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
			b) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri	Jumlah STPW untuk penerima lanjutan waralaba dari waralaba dalam negeri yang terbit ≤ 2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar	-	%		-
				Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri				-
			c) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri	Jumlah STPW untuk penerima lanjutan waralaba dari waralaba luar negeri yang terbit ≤2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar	-	%		-
				Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri				
		5	Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbaya di tingkat daerah Kab/kota	Jumlah pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi,pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat Daerah kab/kota	-	%	DISPERIN DAGKOP UKM	-
				Jumlah permohonan SIUP Bahan Berbahaya bagi Pengecer				-

NO	Urusan Pemerintahan	No IKK	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
		6	Persentase penerbitan SPKA yang tepat waktu	Jumlah SPKA yang terbit ≤1 hari kerja 1 x 24 jam	-	%	DISPERIN DAGKOP UKM	-
				Jumlah permohonan penerbitan SPKA yang dokumennya telah diterima dengan lengkap dan benar				-
		7	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	a = Pembangunan sarana distribusi perdagangan telah dilakukan sesuai target waktunya (nilai 0.5)	100	%	DISPERIN DAGKOP UKM	0.5
				b = sarana distribusi perdagangan telah dimanfaatkan sesuai peruntukannya (nilai 0.5)				0.5
		3	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	Persentase koefisien variasi harga antar waktu per komoditas bahan pokok	34.10	%	DISPERIN DAGKOP UKM	
		PERSENTASE KINERJA REALISASI PUPUK						
		1.		X = a/(b x c) x 100% X = Persentase jumlah pupuk yang disalurkan	21718	%	DISTANKAN & KP	
				a = Jumlah pupuk yang disalurkan		Kg		
				b = Target komisi pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di Tingkat kota sebesar (90% dari RDKK)		Kg		
				c = RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok)		Kg		

NO	Urusan Pemerintahan	No IKK	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
		3.	**Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang Dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah Yang Berlaku**					
		1	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	Jumlah UTTP bertanda tera sah yang berlaku pada tahun berjalan	71.59	%	DISPERIN DAGKOP UKM	2783
				Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah Kab kota				3887
		2	Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	Jumlah sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan sesuai ketentuan yang berlaku	100	%	DISPERIN DAGKOP UKM	300
				Total sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan				300
31	PERINDUSTRIAN	**1.**	**Pertambahan Jumlah Industri Kecil Dan Menengah Di Kabupaten/Kota**					
		1	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	Jumlah realisasi izin yang diterbitkan	0	%	DISPERIN DAGKOP UKM	0
				Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk				0
		2.	**Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Termasuk Turunan Indikator Pembangunan Industri Dalam RIPIN Yang Ditetapkan Dalam RPIK**					
		1	Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi perda	Capaian target tahapan penyelesaian RPIK Tahapan :	75	%	DISPERIN DAGKOP UKM	
				a) Tersusunnya naskah akademik (30%)				30

NO	Urusan Pemerintahan	No IKK	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
				b) Tersusunnya Draft Raperda RPIK (20%)				20
				c) Draft Raperda RPIK yang disetujui DPRD dan mendapat Rekomendasi dinas yang membidangi perindustrian di Provinsi (25%)				25
				d) Persetujuan Draft Raperda RPIK oleh Gubernur Provinsi (15%)				
				e) Penetapan Perda RPIK (10%)				
				Keterangan : penilaian bersifat akumulatif terhadap tahapan penyelesaian RPIK				
		3.	**Persentase Jumlah Hasil Pemantauan Dan Pengawasan Dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil Yang Dikeluarkan Oleh Instansi Terkait**					
		1	Persentase jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI Menengah yang diterbitkan	Jumlah realisasi izin yang diterbitkan	100	%	DISPERIN DAGKOP UKM	126
				Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk				126
		4.	**Persentase Jumlah Hasil Pemantauan Dan Pengawasan Dengan Jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Bagi Industri Kecil Yang Dikeluarkan Oleh Instansi Terkait**					

NO	Urusan Pemerintahan	No IKK	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	RUMUS	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
		1	Persentase jumlah izin perluasan industri IPUI) bagi industri kecil dan menengah yang diterbitkan	Jumlah realisasi izin yang diterbitkan	0	%	DISPERIN DAGKOP UKM	0
				Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk				0
		5.	**Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap Dan Terkini**					
		1	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan indusri di kab/kota yg masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasanindustri di kab/kota	Jumlah data perusahaan industri kecil dan perusahaan kawasan industri di kab/kota di SIINas	62,5	%	DISPERIN DAGKOP UKM	5
				Total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota				8
32	**TRANSMIGRASI**							
		1	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya		tidak	ada/tidak	DISNAKER PMPTSP	0
		2	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya		tidak	ada/tidak		0
		3	Jumlah satuan pemukiman yang dibina		tidak	ada/tidak		0

Sumber : Data Bagian Pemerintahan Setda Kab. Banjarnegara, 2024

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil

Tabel II.6.
Uraian Indikator Kinerja Kunci Hasil

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	No IKK	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	RUMUS	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA
1	PENDIDIKAN	1.a.1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD D adalah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat dan sedang belajar	29219	89,1067 %	DINDIKPORA
				Jumlah anak usia 5-6 tahun pada kabupaten/kota yang bersangkutan	32791		DINDUKCAPIL
		1.a.2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar	94506	92,7229 %	DINDIKPORA
				Jumlah anak usia 7-12 tahun pada kabupaten/kota yang bersangkutan	101923		DINDUKCAPIL
		1.a.3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama	48054	94,3604 %	DINDIKPORA
				Jumlah anak usia 13-15 tahun pada kabupaten/kota yang bersangkutan	50926		DINDUKCAPIL

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	No IKK	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	RUMUS	CAPAIAN KINERJA			SUMBER DATA
		1.a.4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan	2.603	79,4324	%	DINDIKPORA
				Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada kabupaten/kota yang bersangkutan	3.277			
2	KESEHATAN	1.b.1	Rasio daya tampung Rumah Sakit Rujukan	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan	567	0,534	%	DINKES
				Jumlah Penduduk di kabupaten/kota	1061258			DINDUKCAPIL
		1.b.2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	Jumlah RS Rujukan Kabupaten/Kota yang terakreditasi	4	100	%	DINKES
				Jumlah Rumah Sakit kabupaten/kota	4			
		1.b.3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	11369	90,4239	%	DINKES
				Jumlah ibu hamil di kabupaten/Kota	12573			
		1.b.4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan	11902	99,2246	%	DINKES

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	No IKK	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	RUMUS	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA
				Jumlah ibu bersalin di kabupaten/kota	11995		
		1.b.5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	11838	99,1457 %	DINKES
				Jumlah bayi baru lahir di kabupaten/kota	11940		
		1.b.6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah balita yang mendapatkan Layanan kesehatan sesuai standar	62502	96,1096 %	DINKES
				Jumlah balita di kabupaten/kota	65032		DINDUKCAPIL
		1.b.7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	131427	97,7406 %	DINKES
				Jumlah anak usia pendidikan dasar di kabupaten/kota	134465		DINDUKCAPIL
		1.b.8	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	418519	89,5342 %	DINKES
				Jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten/kota	467440		DINDUKCAPIL
		1.b.9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	131518	95,8467 %	DINKES

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	No IKK	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	RUMUS	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA
				Jumlah orang warga negara usia 60 tahun ke atas di kabupaten/kota	137217		DINDUKCAPIL
		1.b.10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	247475	100 %	DINKES
				Jumlah penderita hipertensi di kabupaten/kota	247475		
		1.b.11	Persentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	15765	100 %	DINKES
				Jumlah penderita Diabetes Mellitus di kabupaten/kota	15765		
		1.b.12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2697	100 %	DINKES
				Jumlah penderita ODGJ di kabupaten/kota	2697		
		1.b.13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	9209	100 %	DINKES
				Jumlah penderita TBC di kabupaten/kota	9209		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	No IKK	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	RUMUS	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA
		1.b.14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	18715	100 %	DINKES
				Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di kabupaten/kota	18715		
3	**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	1.c.1	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai Kewenangan kabupaten/kota (ha)	0	0 %	DPUPR
				Luas kawasan permukiman rawan banjir di Wilayah Sungai Kewenangan kabupaten/kota (ha)	1		
		1.c.2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di Wilayah Sungai Kewenangan kabupaten/Kota (ha)	0	0 %	DPUPR
				Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di Wilayah Sungai kewenangan kabupaten/Kota (ha)	1		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	No IKK	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	RUMUS	CAPAIAN KINERJA			SUMBER DATA
		1.c.3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Luas irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasi dan pelihara (ha)	12539	76,07	%	DPUPR
				Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota	16483			
		1.c.4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah Kabupaten/kota	255157	96.76	%	DPKP LH
				Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten/kota tersebut	263701			
		1.c.5	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD	203282	76.8589	%	DPKP LH
				Jumlah rumah di Kabupaten/kota	264487			
		1.c.6	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	Jumlah pemanfaatan Persetujuan	1027	100	%	DPUPR

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	No IKK	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	RUMUS	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA
				bangunan gedung yang sesuai peruntukannya			
				Jumlah persetujuan bangunan gedung yang berlaku	1027		
		1.c.7	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	Panjang jalan kewenangan kabupaten/kota yang mantap	801,05	85,3417 %	DPUPR
				Panjang jalan keseluruhan di wilayah kabupaten/kota	938,65		
		1.c.8.1	Rasio tenaga operator/ teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analis	216	78,2608 %	DPUPR
				Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analis di wilayah kabupaten/kota	276		
		1.c.8.2	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa terjadi kecelakaan konstruksi	276	100 %	DPU PR
				Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	276		
4	**PERUMAHAN RAKYAT DAN**	1.d.1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun 2023	14	77,78 %	DPKP LH

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	No IKK	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	RUMUS	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA
	KAWASAN PERMUKIMAN		kabupaten/kota	Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun 2023	18		
		1.d.2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni	0	0 %	DPKP LH
				Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan	1		
		1.d.3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha)	8.2	19,06 %	DPKP LH
				Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha	43.017		
		1.d.4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Jumlah unit rumah tidak layak huni	30832	11,6528 %	DPKP LH
				Jumlah total unit rumah Kab/kota	264487		
		1.d.5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU	3932	94,7926 %	DPKP LH

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	No IKK	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	RUMUS	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA
			dan Utilitas Umum)	Jumlah unit rumah kab/kota	4148		
5	**KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**	1.e.1	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah pengaduan yang ditangani	37	100 %	SATPOL PP
				Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk	37		
		1.e.2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Perda atau Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan	18	100 %	SATPOL PP
				Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi	18		
		1.e.3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	283437	100 %	BPBD
				Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sesuai target yang ditetapkan	283437		
		1.e.4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	126733	12,0148 %	BPBD
				Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana	1054804		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	No IKK	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	RUMUS	CAPAIAN KINERJA			SUMBER DATA
		1.e.5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	1574	100	%	BPBD
				Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana	1574			BPBD
		1.e.6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di kabupaten /kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah ditambah jumlah layanan pemadaman di kab /kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah	104	89,6552	%	SATPOL PP
				Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten.kota	116			
		1.e.7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran	14,0481	14,0481	Menit	SATPOL PP

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	No IKK	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	RUMUS	CAPAIAN KINERJA			SUMBER DATA
6	SOSIAL	1.f.1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	654	100	%	DINSOS PPPA
				Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis	654			
		1.f.2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/kota	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran	430	100	%	DINSOS PPPA
				Jumlah korban bencana alam dan sosial di daerah Kab/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kab/kota	430			
7	TENAGA KERJA	2.a.1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD	6	100	%	DISNAKER PMPTSP
				Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di Kabupaten/kota	6			
		2.a.2	Persentase Tenaga Kerja	Jumlah tenaga kerja yang memiliki	2167	100	%	DISNAKER

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	No IKK	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	RUMUS	CAPAIAN KINERJA			SUMBER DATA
			Bersertifikat Kompetensi	sertifikat kompetensi				PMPTSP
				Jumlah tenaga kerja keseluruhan	2167			
		2.a.3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan)	17173451620000	31380160 14,004	%	DISNAKER PMPTSP (SUMBER DATA DARI BPS)
				Jumlah tenaga kerja	547271			DISNAKER PMPTSP
		2.a.4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	88	72,7272	%	DISNAKER PMPTSP
				Jumlah Perusahaan	121			
		2.a.5	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah pencari kerja (pencaker) yang ditempatkan	1823	33,0074	%	DISNAKER PMPTSP
				Jumlah pencaker yang terdaftar	5523			
8	**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN**	2.g.1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Jumlah ARG pada belanja Operasional dan Modal APBD	41691277910	2.2893	%	DINSOS PPPA

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	No IKK	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	RUMUS	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA
	PERLINDUNGAN ANAK			Jumlah seluruh Anggaran belanja Operasional dan Modal di APBD	1821066876527		DINSOS PPPA **(SUMBER DATA DARI BPPKAD)**
		2.g.2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/kota	Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat Kabupaten/kota yang didampingi	65	100 %	DINSOS PPPA
				Jumlah Anak korban kekerasan yang menjadi kewenangan Kabupaten/kota (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun)	65		DINDUKCAPIL
		2.g.3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan	16	3,0679 %	DINSOS PPPA
				Jumlah penduduk perempuan	521513		DINDUKCAPIL
9	**PANGAN**	2.h.1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	Jumlah cadangan pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	15008	71,4666 %	DISTANKAN KP
				Jumlah Target Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota Yang Ditetapkan	21000		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	No IKK	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	RUMUS	CAPAIAN KINERJA			SUMBER DATA
10	PERTANAHAN	2.i.1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Luas tanah sesuai peruntukan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)	410674.4	52.1023	%	DPKP LH
				Seluruh luas tanah yang diberikan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)	788206.7			
		2.i.2	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	Luas penetapan tanah untuk Pembangunan Fasilitas umum	13224	100	%	DPKP LH
				Jumlah Kebutuhan Tanah untuk Pembangunan Fasilitas umum	13224			
		2.i.3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)	410674,4	52.1023	%	DPKP LH
				Luas Tanah di atas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang diterbitkan	788206.7			
		2.i.4	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Jumlah penerima tanah obyek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0,5 ha	0	0	%	DPKP LH
				Jumlah penerima tanah obyek landreform	1			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	No IKK	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	RUMUS	CAPAIAN KINERJA			SUMBER DATA
		2.i.5	Tersedianya tanah untuk masyarakat.	Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan Izin Membuka Tanah	34066	100	%	DPKP LH
				Luas Izin Membuka Tanah yang diterbitkan	34066			
		2.i.6	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani	0	0	%	DPKP LH
				Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan	1			
11	LINGKUNGAN HIDUP	2.j.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	IKLH Kab/Kota = (0,376 x IKA) + (0,405 x IKU) + (0,219 x IKL). IKA = Indeks Kualitas Air (.....) IKU = Indeks Kualitas Udara (.....) IKL = Indeks Kualitas Lahan (.....)	(0,376 x 42,68) + (0,405 x 89,36) + (0,219 x 42,39)	61.52		DPKP LH
		2.j.2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	Total Volume sampah yang ditangani	313728.58	77.6363		DPKP LH
				Total volume timbunan sampah Kabupaten/kota	404099.14			
		2.j.3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah	Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah kab/Kota	11	33.3333	%	DPKP LH

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	No IKK	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	RUMUS	CAPAIAN KINERJA			SUMBER DATA
			Daerah Kab/Kota	Jumlah Usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan	33			
12	**ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**	2.k.1.1	Perekaman KTP Elektronik	Jumlah penduduk berumur 17 tahun keatas yang memiliki KTP	791405	98,336	%	DINDUKCAPIL
				Jumlah penduduk 17 tahun keatas	804792			
		2.k.1.2	Persentase anak usia 0 - 17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Jumlah anak usia 0 - 17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA	158624	58,729	%	DINDUKCAPIL
				Jumlah anak usia 0 - 17 tahun	270094			
		2.k.1.3	Kepemilikan akta kelahiran	Jumlah anak usia 0 - 18 Tahun tahun yang memiliki akte lahir	278552	98,684	%	DINDUKCAPIL
				Jumlah anak usia 0 - 18 tahun	282264			
		2.k.1.4	Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	3	12,50	%	DINDUKCAPIL
				Jumlah PD	24			DINDUKCAPIL (SUMBER DATA MINTA BAG. ORGANISASI)

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	No IKK	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	RUMUS	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA
13	**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**	2.I.1	Persentase pengentasan desa tertinggal	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun	1	100 %	DISPERMADES PPKB
				Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun n)	1		
		2.I.2	Persentase peningkatan status desa mandiri	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun	4	2,01 %	DISPERMADES PPKB
				Jumlah desa berkembang (per-awal tahun n)	119		
14	**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**	2.m.1		$TFR = 5 \sum_{I=1}^{7} ASFRi$ $\mathrm{ASFRi} = \frac{\mathrm{bi}}{\mathrm{di}^{f}}\ x\ k$	1,65	1,65	DISPERMADES PPKB
				TFR = Angka Kelahiran Total ASFR = Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	No IKK	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	RUMUS	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA
				bi = Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur i pada tahun tertentu pi = Jumlah penduduk perempuan kelompok umur i pada pertengahan tahun yang sama i = kelompok umur (i=1 untuk kelompok umur 15-19,1=2 untuk kelompok umur 20-24,....., i=7 untuk kelompok Umur 45-49 K = Bilangan Konstanta biasanya 1000			
		2.m.2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah peserta KB Aktif Modern	147299	81,244 %	DISPERMADES PPKB
				Jumlah Pasangan Usia Subur	181303		
		2.m.3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani	11548	6,369 %	DISPERMADES PPKB
				Jumlah Pasangan Usia Subur	181303		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	No IKK	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	RUMUS	CAPAIAN KINERJA			SUMBER DATA
15	PERHUBUNGAN	2.n.1	Rasio konektivitas kabupaten/kota	Rasio konektvitas kab/kota = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan)	0,46	0,46	%	DINHUB
		2.n.2	V/C ratio di jalan kabupaten	V/C ratio di jalan Kabupaten/Kota	0,284	0,284		DINHUB
16	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.o.1	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah PD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	44	100	%	DINKOMINFO
				Jumlah PD	44			DINKOMINFO (DATA MINTA BAG.ORGANISASI)
		2.o.2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	20	90,9090	%	DINKOMINFO
				Jumlah Layanan Publik	22			DINKOMINFO (DATA MINTA BAG.ORGANISASI)

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	No IKK	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	RUMUS	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA
		2.o.3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran Penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	724745	100 %	DINKOMINFO
				Jumlah penduduk	724745		DINKOMINFO (DATA MINTA DINDUKCAPIL)
17	**KOPERASI DAN UKM**	2.p.1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset	62	36,257 %	DISPERIN DAGKOP UKM
				Jumlah seluruh koperasi	171		
		2.p.2	Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha	26238	98,347 %	DISPERIN DAGKOP UKM
				Jumlah usaha mikro	26679		
18	**PENANAMAN MODAL**	2.q	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	(Jumlah investasi tahun n - jumlah investasi tahun n-1) di kabupaten/kota	107798195379	14,7734 %	DISNAKER PMPTSP
				Jumlah investasi tahun n-1 di kabupaten/kota	729675573562		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	No IKK	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	RUMUS	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA
19	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.r.1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di kabupaten/kota	55923	24,1759 %	DINDIKPORA
				Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota	231317		DINDIKPORA (DATA MINTA DINDUKCAPIL)
		2.r.2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yg menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten/kota	110448	47,7474 %	DINDIKPORA
				jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota	231317		DINDIKPORA (DATA MINTA DINDUKCAPIL)
		2.r.3	Peningkatan prestasi olahraga	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional	6	MENDALI	DINDIKPORA
20	STATISTIK	2.s.1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	44	100 %	DINKOMINFO
				Jumlah OPD	44		DINKOMINFO (DATA MINTA

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	No IKK	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	RUMUS	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA
							BAG. ORGANISASI)
		2.s.2	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	44	100 %	DINKOMINFO
				Jumlah PD	44		DINKOMINFO (DATA MINTA BAG. ORGANISASI)
21	**PERSANDIAN**	2.t	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Jumlah nilai per area keamanan informasi	151	23,4108	DINKOMINFO
				Jumlah area penilaian	645		
22	**KEBUDAYAAN**	2.u	Terlestarikannya Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	522	100 %	DISPARBUD
				Jumlah cagar budaya yang ditetapkan	522		
23	**PERPUSTAKAAN**	2.v.1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca	55,72	55,72	DISARSPUS

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	No IKK	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	RUMUS	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA
				masyarakat			
		2.v.2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM) Pemerataan layanan perpustakaan UPLM 2 = Ketercukupan koleksi Ketercukupan tenaga perpustakaan Tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan UPLM 5 = Perpustakaan ber-SNP Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan UPLM 7 = Anggota perpustakaan $\sum \frac{UPLM}{ALM} x\ 100$		60,84	DISARSPUS
24	**KEARSIPAN**	2.w.1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional)	T = (a+i+s+i)/4			
				Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip		75	DISARSPUS

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	No IKK	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	RUMUS	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA
			Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip			
				Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip			
				Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik			
				Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN			
		2.w.2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	T = (m + b + g + a + c + i)/6			
				Tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK		66.67	DISARSPUS
				Tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK			
				Tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip Perangkat Daerah Kabupaten/kota yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran daerah Kabupaten/Kota dengan NSPK			
				Tingkat kesesuaian kegiatan autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	No IKK	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	RUMUS	CAPAIAN KINERJA			SUMBER DATA
				Tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK				
				Tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK				
25	**KELAUTAN DAN PERIKANAN**	3.a	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/ (sumber data: one data KKP)	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota	41843,26	105,7834	Ton	DISTANKAN KP
				Target Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) yang ditetapkan Mengacu Renstra Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	39555,6			
26	**PARIWISATA**	3.b.1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun n-1	536	1410,52	%	DISPARBUD
				Jumlah wisatawan tahun n-1	38			
		3.b.2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun n-1	106075	5,2299	%	DISPARBUD
				Jumlah wisatawan tahun n-1	2028206			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	No IKK	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	RUMUS	CAPAIAN KINERJA			SUMBER DATA
		3.b.3	Tingkat hunian akomodasi	Jumlah kamar yang terjual	78666	22,4737	%	DISPARBUD
				Jumlah kamar yang tersedia	350036			
		3.b.4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Total nilai Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	620450000000	2,2818	%	DISPARBUD (DATA MINTA BPS)
				Total PBRB harga berlaku	27190820000000			
		3.b.5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Total Realisasi PAD dari sektor pariwisata	21499715000	6,408	%	DISPARBUD (DATA MINTA BPPKAD)
				Total Realisasi PAD	335493222864			
27	PERTANIAN	3.c.1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun (ton)	277503.3	855,6	Ton/Ha	DISTANKAN KP
				Luas Panen (ha)	32435			
		3.c.2	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Jumlah kejadian penyakit/kasus tahun berjalan (t) – jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1)	276	52,2727	%	DISTANKAN KP
				Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1)	528			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	No IKK	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	RUMUS	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA
28	**KEHUTANAN**	3.d		Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura	0		Bukan Kewenangan Kabupaten
				Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga	0		
				Pemulihan ekosistem pada Tahura	0		
				Menurunnya gangguan kawasan T	0		
29	**ESDM**	3.e	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/Kabupaten	Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin	1	100 %	BAG. PEMERINTAHAN
				Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi	1		
30	**PERDAGANGAN**	3.f.1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/ SIUP Toko Swalayan)	Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan	90	100 %	DPMPTSP
				Jumlah pelaku usaha di wilayah Kabupaten/kota	90		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	No IKK	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	RUMUS	CAPAIAN KINERJA				SUMBER DATA
		3.f.2	Persentase kinerja realisasi pupuk	Realisasi / RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani) X 100	21718 / 46547	X 100	46,6582	%	DINTANKAN KP
		3.f.3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku pada tahun berjalan	2783		71,597	%	DISPERIN DAGKOP UKM
				Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah Kabupaten/kota	3887				
31	PERINDUSTRIAN	3.g.1	Pertambahan jumlah industri Kecil dan Menengah di kabupaten/kota	(Jumlah Industri kecil dan menengah tahun n– Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1)	47		0,2048	%	DISPERIN DAGKOP UKM
				Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1	22943				
		3.g.2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK			100	%	DISPERIN DAGKOP UKM
		3.g.3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan	126		100	%	DISPERIN DAGKOP

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	No IKK	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	RUMUS	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA
			dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dikeluarkan	126		UKM
		3.g.4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) bagi Industri Kecil dan Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan	0	0 %	DISPERIN DAGKOP UKM
				Jumlah izin yang dikeluarkan	1		
		3.g.5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/kota	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan	0	0 %	DISPERIN DAGKOP UKM
				Jumlah izin yang dikeluarkan	1		
		3.g.6	Tersedianya informasi industri secara lengkapdan terkini	7 Informasi industri secara lengkap dan terkini Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan (50%)	50	100	DISPERIN DAGKOP UKM
				Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan (25%)			
				Tidak menyampaikan informasi industri (0%)			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	No IKK	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	RUMUS	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA
				Kelengkapan informasi industri meliputi : Informasi produksi dan kapasitas produksi (10%)	10		
				Informasi bahan baku dan bahan penolong (10%)	10		
				Informasi bahan bakar/energi (10%)	10		
				Informasi tenaga kerja (10%)	10		
				Informasi Investasi (10%)	10		
32	**TRANSMIGRASI**			Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	0	0	DISNAKER PMPTSP
				Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	0		
				Jumlah satuan pemukiman yang dibina	0		

Sumber : Data Bagian Pemerintahan Setda Kab. Banjarnegara, 2024

2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Tabel II.7.
Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

NO	FUNGSI PENUNJANG	No IKK	INDIKATOR KINERJA KUNCI	RUMUS	CAPAIAN KINERJA			SUMBER DATA
1	**PERENCANAAN DAN KEUANGAN)**	4.a.1	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	Jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan (realisasi)	647639086028	29,7686	%	BPPKAD
				Jumlah APBD (realisasi)	2175572447545			
		4.a.2	Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Jumlah PAD	335493222864	15,5713	%	BPPKAD
				Jumlah Pendapatan pada APBD	2154558314566			BPS
		4.a.3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	2.926 (level 2)	2,00	level	INSPEKTORAT
		4.a.4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Nilai 3	3,00	level	INSPEKTORAT
		4.a.5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Jumlah Belanja Urusan Pemerintahan – transfer expenditures (realisasi)	1346353285048	61,8850	%	BPPKAD
				Jumlah belanja APBD (realisasi)	2175572447545			

NO	FUNGSI PENUNJANG	No IKK	INDIKATOR KINERJA KUNCI	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
		4.a.6	Opini Laporan Keuangan	Opini BPK atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022	1 WTP	INSPEKTORAT
				Opini BPK atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021	1 WTP	
				Opini BPK atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020	1 WTP	
				Opini BPK atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019	1 WTP	
				Opini BPK atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018	1 WTP	
				Opini BPK atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2017	1 WTP	
				Opini BPK atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2016	1 WTP	
				Opini BPK atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2015	1 WTP	
				Opini BPK atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2014	1 WTP	
				Opini BPK atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2013	1 WDP	

NO	FUNGSI PENUNJANG	No IKK	INDIKATOR KINERJA KUNCI	RUMUS	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA
2	**FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (PENGADAAN) KABUPATEN/KOTA**	4.b.1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	Jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n	0	0 %	BAG. PBJ
				Jumlah kontrak keseluruhan tahun n	274		
		4.b.2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	3019	52,9556 %	BAG. PBJ
				Jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif	5701		
		4.b.3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Jumlah nilai belanja Modal dan Operasional yang melalui pengadaan	279778348336	38,6353 %	BAG. PBJ
				Total belanja Modal dan Operasional	724151902590		BPPKAD
		4.b.4	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun n - Jumlah Nilai PBJ yangMenggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun n – 1 (realisasi)	103470005040	50,3960	BAG. PBJ

NO	FUNGSI PENUNJANG	No IKK	INDIKATOR KINERJA KUNCI	RUMUS	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA
				Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dalam Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun n – 1 (realisasi)	**205313559133**		
3	**FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (KEPEGAWAIAN)**	4.c.1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai menurut pendidikan Pendidikan Tinggi ke atas ((PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	1185	57,4406 %	BKD
				Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	2063		
		4.c.2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan)	405	19,6316 %	BKD
				Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	2063		
		4.c.3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%)	Jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi	189	46,6666 %	BKD

NO	FUNGSI PENUNJANG	No IKK	INDIKATOR KINERJA KUNCI	RUMUS	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA
			(PNS tidak termasuk guru dantenaga kesehatan)	Seluruh jumlah pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	405		
4	**MANAJEMEN KEUANGAN**	4.d.1	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Nilai absolut dari Total belanja dalam realisasi	2175572447545	3,4366 %	BPPKAD
				Total belanja APBD dikurangi satu (Sebelum Perubahan)	2252999719000		
		4.d.2	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Total PAD dalam realisasi	335493222864	3,3107 %	BPPKAD
				Total PAD dalam APBD	324741867848		
		4.d.3	Assets management	1. Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak)	Ya	4	BPPKAD
				2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak)	Ya		
				3. Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak)	Ya		
				4. Apakah nilai asset tercantum dalam Laporan anggaran? (Ya/Tidak)	Ya		

NO	FUNGSI PENUNJANG	No IKK	INDIKATOR KINERJA KUNCI	RUMUS	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA
		4.d.4	Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	Nilai Realisasi SiLPA	53096990188	2,454 %	BPPKAD
				Total Belanja Anggaran tahun 2021 (realisasi)	2163664553750		
5	**TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK**	4.e.1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	Realisasi Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda	44	100 %	DINKOMINFO
				Anggaran belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda	44		
		4.e.2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website Pemda	12	100 %	DINKOMINFO
				Total jumlah dokumen yang telah dirinci	12		

Sumber : Data Bagian Pemerintahan Setda Kab. Banjarnegara, 2024

2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

a. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja

Pada Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara telah menetapkan 7 (tujuh) tujuan dan 18 (delapan belas) sasaran yang menjadi target kinerja dalam perjanjian kinerja Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 yang diuraikan sebagai berikut:

Tujuan 1 : Meningkatkan kondusivitas wilayah.

Sasaran :

1. Tertanganinya kejadian konflik antar kelompok masyarakat, suku dan agama.
2. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan masyarakat dalam penanggulangan bencana.

Tujuan 2 : Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai kehidupan bermasyarakat dan berdemokrasi.

Sasaran :

3. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat.
4. Meningkatnya penghargaan masyarakat terhadap nilai-nilai kebudayaan dan kearifan lokal.
5. Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan dengan memperhatikan hak-hak anak

Tujuan 3 : Meningkatnya kinerja perekonomian daerah

Sasaran :

6. Meningkatnya kesempatan lapangan berusaha.
7. Meningkatnya kesempatan kerja.
8. Meningkatnya pemerataan pembangunan
9. Meningkatnya stabilitas harga
10. Meningkatnya daya saing daerah

Tujuan 4 : Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan

Sasaran :

11. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang meliputi kualitas

udara, kualitas air sungai, dan tutupan lahan.

Tujuan 5 : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sasaran :

12. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Tujuan 6 : Meningkatnya kualitas layanan publik.

Sasaran :

13. Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik.

Tujuan 7 : Meningkatnya cakupan pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar yang berkualitas.

Sasaran :

14. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.
15. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan Pendidikan.
16. Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah.
17. Meningkatnya cakupan rumah layak huni.
18. Menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Ke-7 (tujuh) tujuan tersebut selanjutnya diukur dengan 10 (sepuluh) indikator kinerja dan 18 (delapan belas) sasaran tersebut diukur dengan 24 (dua puluh empat) indikator kinerja.

Adapun Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel II.8.
Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja
Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2023
1	*2*		*3*	*4*	*5*
Misi 1 :	**Mewujudkan masyarakat madani yang agamis, dengan menciptakan masyarakat Banjarnegara yang berkualitas, sehat, cerdas, produktif, kompetitif, kreatif, inovatif dan berakhlak mulia, serta menghargai dan menerapkan nilai-nilai luhur agama dan budaya masyarakat.**				
Tujuan :					
1	Meningkatkan kondusivitas wilayah	1	Indeks ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan mayarakat	Angka	76,00
Sasaran :					
1	Tertanganinya kejadian konflik antar kelompok masyarakat, suku dan agama	1	Persentase penanganan konflik sosial	%	100
2	Meningkatnya Kualitas Kesiapsiagaan Dalam Ketanggapdaruratan Bencana	1	Persentase desa tangguh bencana	%	40
Tujuan :					
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai kehidupan bermasyarakat dan berdemokrasi	1	Persentase penggunaan hak pilih Pilkades	%	-
		2	Persentase penggunaan hak pilih Pilgub	%	-
		3	Persentase penggunaan hak pilih Pilbup	%	-
		4	Persentase penggunaan hak pilih Pileg	%	-
		5	Persentase penggunaan hak pilih pilpres	%	-

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET 2023
1	*2*	*3*		*4*	*5*
Sasaran :					
3	Meningkatnya partisipasi politik masyarakat	1	Persentase penggunaan hak pilih Pilkades	%	-
		2	Persentase penggunaan hak pilih Pilgub	%	-
		3	Persentase penggunaan hak pilih Pilbup	%	-
		4	Persentase penggunaan hak pilih Pileg	%	-
		5	Persentase penggunaan hak pilih pilpres	%	-
4	Meningkatnya penghargaan masyarakat terhadap nilai-nilai kebudayaan dan kearifan lokal	1	Indeks kebudayaan	Angka	65
5	Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan dengan memperhatikan hak-hak anak	1	Indeks Pemberdayaan Gender	Angka	73,70
Misi 2 :	**Mewujudkan perekonomian rakyat yang maju dengan mengembangkan serta memperkuat perekonomian daerah melalui sektor pertanian yang berorientasi pada pasar dengan senantiasa menjaga kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan dalam pengelolaannya melalui regulasi yang tepat dalam mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif dalam rangka menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman dan damai**				
Tujuan :					
3	Meningkatnya kinerja perekonomian daerah	1	Laju pertumbuhan ekonomi	%	4,50 – 5,50
		2	PDRB per kapita	Juta Rupiah	>22,40
		3	Nilai Tukar Petani	%	103 – 106

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET 2023
1	*2*	*3*		*4*	*5*
Sasaran :					
6	Meningkatnya kesempatan lapangan berusaha	1	Persentase peningkatan nilai investasi	%	1
7	Meningkatnya kesempatan kerja	1	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	< 5
8	Meningkatnya pemerataan pembangunan	1	Indeks Gini	Angka	0,36
		2	Indeks Ketimpangan Williamson	Angka	0,42
9	Meningkatnya stabilitas harga	1	Laju inflasi	%	3 ± 1
10	Meningkatnya daya saing daerah	1	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3,00
Tujuan :					
4	Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	67,5
Sasaran :					
11	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang meliputi kualitas udara, kualitas air sungai, dan tutupan lahan	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	67,5
Misi 3 :	**Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam kehidupan politik yang demokratis dan bertanggung jawab**				
Tujuan :					
5	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	1	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	64,00

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET 2023
1	*2*	*3*		*4*	*5*
Sasaran :					
12	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	1	Nilai SAKIP	Nilai	B
		2	Opini BPK	Opini	WTP
Tujuan :					
6	Meningkatnya kualitas layanan publik	1	Indeks Inovasi Daerah	Angka	45
Sasaran :					
13	Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik	1	Survey Kepuasan Masyarakat	Angka	84,34
Misi 4 : Mewujudkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dasar					
Tujuan :					
7	Meningkatnya cakupan pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar yang berkualitas	1	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	68
		2	Persentase penduduk miskin	%	15,64 – 14,46
Sasaran :					
14	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1	Menurunnya angka kematian neonatal	Per 1000 KH	8,5
		2	Angka Harapan Hidup	Tahun	74,48
		3	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 KH	210
		4	Angka Kematian Bayi	Per 1000 KH	12,5
		5	Prevalensi stunting	%	19

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET 2023
1	*2*	*3*		*4*	*5*
15	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan	1	Angka harapan lama sekolah	Tahun	11,65
		2	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	6,80
16	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	1	Indeks Kemahalan Konstruksi	%	92,50
17	Meningkatnya cakupan rumah layak huni	1	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	82
18	Menurunnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	1	Persentase penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial/ Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	%	0,2

Sumber : Data Bagian Organisasi Setda Kab. Banjarnegara 2024

b. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja

Tabel II.9.
Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja
Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023 (%)
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Misi 1 :	**Mewujudkan masyarakat madani yang agamis, dengan menciptakan masyarakat Banjarnegara yang berkualitas, sehat, cerdas, produktif, kompetitif, kreatif, inovatif dan berakhlak mulia, serta menghargai dan menerapkan nilai-nilai luhur agama dan budaya masyarakat.**						
Tujuan :							
1	Meningkatkan kondusivitas wilayah	1	Indeks ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan mayarakat	Angka	76,00	57,15	75,20
Sasaran:							
1	Tertanganinya kejadian konflik antar kelompok masyarakat, suku dan agama	1	Persentase penanganan konflik sosial	%	100	100	100
2	Meningkatnya Kualitas Kesiapsiagaan Dalam Ketanggapdaruratan Bencana	1	Persentase desa tangguh bencana	%	40	50,76	126,9
Tujuan :							
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai kehidupan bermasyarakat dan berdemokrasi	1	Persentase penggunaan hak pilih Pilkades	%	-	-	-

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023 (%)
1	*2*	*3*		*4*	*5*	*6*	*7*
		2	Persentase penggunaan hak pilih Pilgub	%	-	-	-
		3	Persentase penggunaan hak pilih Pilbup	%	-	-	-
		4	Persentase penggunaan hak pilih Pileg	%	-	76,11	100
		5	Persentase penggunaan hak pilih pilpres	%	-	76,15	100
Sasaran:							
3	Meningkatnya partisipasi politik masyarakat	1	Persentase penggunaan hak pilih Pilkades	%	-	-	-
		2	Persentase penggunaan hak pilih Pilgub	%	-	-	-
		3	Persentase penggunaan hak pilih Pilbup	%	-	-	-
		4	Persentase penggunaan hak pilih Pileg	%	76,11	100	76,11
		5	Persentase penggunaan hak pilih pilpres	%	76,15	100	76,15

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023 (%)
1	*2*	*3*		*4*	*5*	*6*	*7*
4	Meningkatnya penghargaan masyarakat terhadap nilai-nilai kebudayaan dan kearifan lokal	1	Indeks kebudayaan	Angka	65	59,01	90,78
5	Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan dengan memperhatikan hak-hak anak	1	Indeks Pemberdayaan Gender	Angka	73,70	73,80*)	100,14
Misi 2 :	**Mewujudkan perekonomian rakyat yang maju dengan mengembangkan serta memperkuat perekonomian daerah melalui sektor pertanian yang berorientasi pada pasar dengan senantiasa menjaga kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan dalam pengelolaannya melalui regulasi yang tepat dalam mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif dalam rangka menciptakan kehidupan masyarakat yang**						
Tujuan :							
3	Meningkatnya kinerja perekonomian daerah	1	Laju pertumbuhan ekonomi	%	4,50 – 5,50	5,29*)	100
		2	PDRB per kapita	Juta Rupiah	>22,40	24,9*)	108,67
		3	Nilai Tukar Petani	%	103 – 106	107,49*)	101,41
Sasaran:							
6	Meningkatnya kesempatan lapangan berusaha	1	Persentase peningkatan nilai investasi	%	1	14,77	1.477
7	Meningkatnya kesempatan kerja	1	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	< 5	6,26	74,8
8	Meningkatnya pemerataan pembangunan	1	Indeks Gini	Angka	0,36	0,376	95,56
		1	Indeks Ketimpangan Williamson	Angka	0,42	0,6*)	57,14
9	Meningkatnya stabilitas harga	1	Laju inflasi	%	3 ± 1	2,61	113

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023 (%)
1	*2*	*3*		*4*	*5*	*6*	*7*
10	Meningkatnya daya saing daerah	1	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3,00	3,05	101,67
Tujuan :							
4	Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	67,5	61,52	91,14
Sasaran:							
11	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang meliputi kualitas udara, kualitas air sungai, dan tutupan lahan	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	67,5	61,52	91,14
Misi 3 :	**Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam kehidupan politik yang demokratis dan bertanggung jawab**						
Tujuan :							
5	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	1	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	64,00	62,41	97,51
Sasaran:							
12	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	1	Nilai SAKIP	Nilai	B	B	100
		2	Opini BPK	Opini	WTP	WTP*)	100
Tujuan :							
6	Meningkatnya kualitas layanan publik	1	Indeks Inovasi Daerah	Angka	45	42,90	95,33

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023 (%)
1	*2*	*3*		*4*	*5*	*6*	*7*
Sasaran:							
13	Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik	1	Survey Kepuasan Masyarakat	Angka	84,34	84,05	99,66
Misi 4 : Mewujudkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dasar							
Tujuan :							
7	Meningkatnya cakupan pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar yang berkualitas	1	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	68	69,14	101,68
		1	Persentase penduduk miskin	%	15,64 – 14,46	14,90	100
Sasaran:							
14	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1	Menurunnya angka kematian neonatal	Per 1000 KH	8,5	10,2	76,47
		2	Angka Harapan Hidup	Tahun	74,48	74,50	100,02
		3	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 KH	210	125,6	140,19
		4	Angka Kematian Bayi	Per 1000 KH	12,5	13,10	95,2
		5	Prevalensi stunting	%	19	17,46	108,11
15	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan	1	Angka harapan lama sekolah	Tahun	11,65	11,82	101,46
		2	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	6,80	6,86	101,63

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023 (%)
1	*2*	*3*		*4*	*5*	*6*	*7*
16	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	1	Indeks Kemahalan Konstruksi	%	92,50	98,54	93,47
17	Meningkatnya cakupan rumah layak huni	1	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	82	88	107,32
18	Menurunnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	1	Persentase penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial/ Penyandang Masalah esejahteraan Sosial	%	0,2	8,33	4.165

Sumber : Data Bagian Organisasi Setda Kab. Banjarnegara 2024

c. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya

Tabel II.10.
Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya
Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI 2022	REALISASI 2023	% KENAIKAN/ (PENURUNAN)
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Misi 1 :	**Mewujudkan masyarakat madani yang agamis, dengan menciptakan masyarakat Banjarnegara yang berkualitas, sehat, cerdas, produktif, kompetitif, kreatif, inovatif dan berakhlak mulia, serta menghargai dan menerapkan nilai-nilai luhur agama dan budaya masyarakat.**						
Tujuan :							
1	Meningkatkan kondusivitas wilayah	1	Indeks ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan mayarakat	Angka	74,79	57,15	(13,84)
Sasaran:							
1	Tertanganinya kejadian konflik antar kelompok masyarakat, suku dan agama	1	Persentase penanganan konflik sosial	%	NA	100	0
2	Meningkatnya Kualitas Kesiapsiagaan Dalam Ketanggapdaruratan Bencana	1	Persentase desa tangguh bencana	%	45,64	50,79	11,28
Tujuan :							
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai kehidupan bermasyarakat dan berdemokrasi	1	Persentase penggunaan hak pilih Pilkades	%	NA	-	-
		2	Persentase penggunaan hak pilih Pilgub	%	NA	-	-

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	REALISASI 2022	REALISASI 2023	% KENAIKAN/ (PENURUNAN)
1	*2*	*3*		*4*	*5*	*6*	*7*
		3	Persentase penggunaan hak pilih Pilbup	%	NA	-	-
		4	Persentase penggunaan hak pilih Pileg	%	76,11	76,11	0
		5	Persentase penggunaan hak pilih pilpres	%	76,15	76,15	0
Sasaran:							
3	Meningkatnya partisipasi politik masyarakat	*1*	Persentase penggunaan hak pilih Pilkades	%	NA	-	-
		2	Persentase penggunaan hak pilih Pilgub	%	NA	-	-
		3	Persentase penggunaan hak pilih Pilbup	%	NA	-	-
		4	Persentase penggunaan hak pilih Pileg	%	76,11	76,11	0
		5	Persentase penggunaan hak pilih pilpres	%	76,15	76,15	0
4	Meningkatnya penghargaan masyarakat terhadap nilai-nilai kebudayaan dan kearifan lokal	1	Indeks kebudayaan	Angka	83	59,01	(28,90)
5	Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan dengan memperhatikan hak-hak anak	1	Indeks Pemberdayaan Gender	Angka	73,80	73,80*)	0

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI 2022	REALISASI 2023	% KENAIKAN/ (PENURUNAN)
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Misi 2 :	**Mewujudkan perekonomian rakyat yang maju dengan mengembangkan serta memperkuat perekonomian daerah melalui sektor pertanian yang berorientasi pada pasar dengan senantiasa menjaga kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan dalam pengelolaannya melalui regulasi yang tepat dalam mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif dalam rangka menciptakan kehidupan masyarakat yang**						
Tujuan :							
3	Meningkatnya kinerja perekonomian daerah	1	Laju pertumbuhan ekonomi	%	5,29	5,29*)	0
		2	PDRB per kapita	Juta Rupiah	24,34	24,34*)	0
		3	Nilai Tukar Petani	%	107,49	107,49*)	0
Sasaran:							
6	Meningkatnya kesempatan lapangan berusaha	1	Persentase peningkatan nilai investasi	%	45,79	14,77	(32,26)
7	Meningkatnya kesempatan kerja	1	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,38	6,26	1,88
8	Meningkatnya pemerataan pembangunan	1	Indeks Gini	Angka	0,365	0,376	(3,01)
		2	Indeks Ketimpangan Williamson	Angka	0,6	0,6*)	0
9	Meningkatnya stabilitas harga	1	Laju inflasi	%	6,49	2,61	118,77
10	Meningkatnya daya saing daerah	1	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	2,83	3,05	7,77

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	REALISASI 2022	REALISASI 2023	% KENAIKAN/ (PENURUNAN)
1	*2*	*3*		*4*	*5*	*6*	*7*
Tujuan :							
4	Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	64,08	61,52	(4,00)
Sasaran:							
11	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang meliputi kualitas udara, kualitas air sungai, dan tutupan lahan	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	64,08	61,52	(4,00)
Misi 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam kehidupan politik yang demokratis dan bertanggung jawab							
Tujuan :							
5	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	1	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	61,66	62,41	0,75
Sasaran:							
12	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	1	Nilai SAKIP	Nilai	B	B	0,00
		2	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	0,00
Tujuan :							
6	Meningkatnya kualitas layanan publik	1	Indeks Inovasi Daerah	Angka	41,77	42,90	2,71

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	REALISASI 2022	REALISASI 2023	% KENAIKAN/ (PENURUNAN)
1	*2*	*3*		*4*	*5*	*6*	*7*
Sasaran:							
13	Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik	1	Survey Kepuasan Masyarakat	Angka	82,75	84,05	1,21
Misi 4 : Mewujudkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dasar							
Tujuan :							
7	Meningkatnya cakupan pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar yang berkualitas	1	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	68,61	69,14	0,77
		1	Persentase penduduk miskin	%	15,20	14,90	1,97
Sasaran:							
14	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1	Menurunnya angka kematian neonatal	Per 1000 KH	7,70	10,20	(32,47)
		2	Angka Harapan Hidup	Tahun	74,37	74,47	0,13
		3	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 KH	130,83	125,60	4,00
		4	Angka Kematian Bayi	Per 1000 KH	13,01	13,10	(0,69)
		5	Prevalensi stunting	%	18,27	17,46	4,43

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	REALISASI 2022	REALISASI 2023	% KENAIKAN/ (PENURUNAN)
1	*2*	*3*		*4*	*5*	*6*	*7*
15	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan	1	Angka harapan lama sekolah	Tahun	11,81	11,82	0,08
		1	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	6,84	6,86	0,29
16	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	1	Indeks Kemahalan Konstruksi	%	99,46	98,54	0,93
17	Meningkatnya cakupan rumah layak huni	1	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	87,12	88	1,01
18	Menurunnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	1	Persentase penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial/ Penyandang Masalah esejahteraan Sosial	%	5,64	8,33	47,70

Sumber : Data Bagian Organisasi Setda Kab. Banjarnegara 2024

d. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam Rencana Pembangunan Daerah

Tabel II.11.
Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023 - 2026
Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2023			TARGET AKHIR RPD 2026	% CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR RPD
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9=(6:8)X100*
Misi 1 :	**Mewujudkan masyarakat madani yang agamis, dengan menciptakan masyarakat Banjarnegara yang berkualitas, sehat, cerdas, produktif, kompetitif, kreatif, inovatif dan berakhlak mulia, serta menghargai dan menerapkan nilai-nilai luhur agama dan budaya masyarakat.**								
Tujuan :									
1	Meningkatkan kondusivitas wilayah	1	Indeks ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan mayarakat	Angka	76,00	57,15	75,20	77,50	73,74
Sasaran :									
1	Tertanganinya kejadian konflik antar kelompok masyarakat, suku dan agama	1	Persentase penanganan konflik sosial	%	100	100	100	100,00	100,00
2	Meningkatnya Kualitas Kesiapsiagaan Dalam Ketanggapdaruratan Bencana	2	Persentase desa tangguh bencana	%	40	50,76	126,9	44,00	115,36

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TAHUN 2023			TARGET AKHIR RPD 2026	% CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR RPD
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	*2*	*3*		*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9=(6:8)X100*
Tujuan :									
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai kehidupan bermasyarakat dan berdemokrasi	1	Persentase penggunaan hak pilih Pilkades	%	-	-	-	80,65	-
		2	Persentase penggunaan hak pilih Pilgub	%	-	-	-	75,00	-
		3	Persentase penggunaan hak pilih Pilbup	%	-	-	-	75,00	-
		4	Persentase penggunaan hak pilih Pileg	%	-	76,11	100	75,00	101,48
		5	Persentase penggunaan hak pilih pilpres	%	-	76,15	100	75,00	101,53
Sasaran :									
3	Meningkatnya partisipasi politik masyarakat	1	Persentase penggunaan hak pilih Pilkades	%	-	-	-	80,65	-
		2	Persentase penggunaan hak pilih Pilgub	%	-	-	-	75,00	-

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TAHUN 2023			TARGET AKHIR RPD 2026	% CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR RPD
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	*2*	*3*		*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9=(6:8)X100*
		3	Persentase penggunaan hak pilih Pilbup	%	-	-	-	75,00	-
		4	Persentase penggunaan hak pilih Pileg	%	76,11	100	76,11	75,00	101,48
		5	Persentase penggunaan hak pilih pilpres	%	76,15	100	76,15	75,00	101,53
4	Meningkatnya penghargaan masyarakat terhadap nilai-nilai kebudayaan dan kearifan lokal	1	Indeks kebudayaan	Angka	65	59,01	90,78	71,00	83,11
5	Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan dengan memperhatikan hak-hak anak	1	Indeks Pemberdayaan Gender	Angka	73,70	73,80*)	100,14	75,20	98,13
Misi 2 :	**Mewujudkan perekonomian rakyat yang maju dengan mengembangkan serta memperkuat perekonomian daerah melalui sektor pertanian yang berorientasi pada pasar dengan senantiasa menjaga kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan dalam pengelolaannya melalui regulasi yang tepat dalam mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif dalam rangka menciptakan kehidupan masyarakat yang**								
Tujuan :									
3	Meningkatnya kinerja perekonomian daerah	1	Laju pertumbuhan ekonomi	%	4,50 – 5,50	5,29*)	100	4,50 – 5,50	100

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TAHUN 2023			TARGET AKHIR RPD 2026	% CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR RPD
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	*2*	*3*		*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9=(6:8)X100*
		2	PDRB per kapita	Juta Rupiah	>22,40	24,9*)	108,67	>23,00	108,67
		3	Nilai Tukar Petani	%	103 – 106	107,49*)	101,41	103 – 106	101,41
Sasaran :									
6	Meningkatnya kesempatan lapangan berusaha	1	Persentase peningkatan nilai investasi	%	1	14,77	1.477	4	369,25
7	Meningkatnya kesempatan kerja	1	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	< 5	6,26	74,8	<4,25	52,71
8	Meningkatnya pemerataan pembangunan	1	Indeks Gini	Angka	0,36	0,376	95,56	0,35	92,57
		2	Indeks Ketimpangan Williamson	Angka	0,42	0,6*)	57,14	0,35	28,57
9	Meningkatnya stabilitas harga	1	Laju inflasi	%	3 ± 1	2,61	113	3 ± 1	113,00
10	Meningkatnya daya saing daerah	1	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3,00	3,05	101,67	3,30	92,42

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2023			TARGET AKHIR RPD 2026	% CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR RPD
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9=(6:8)X100*
Tujuan :									
4	Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	67,5	61,52	91,14	69,00	89,15
Sasaran :									
11	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang meliputi kualitas udara, kualitas air sungai, dan tutupan lahan	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	67,5	61,52	91,14	69,00	89,16
Misi 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam kehidupan politik yang demokratis dan bertanggung jawab									
Tujuan :									
5	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	1	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	64,00	62,41	97,51	93,15	74,71
Sasaran :									
12	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	1	Nilai SAKIP	Nilai	B	B	100	B	100
		2	Opini BPK	Opini	WTP	WTP*)	100	WTP	100

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TAHUN 2023			TARGET AKHIR RPD 2026	% CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR RPD
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	*2*	*3*		*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9=(6:8)X100*
Tujuan :									
6	Meningkatnya kualitas layanan publik	1	Indeks Inovasi Daerah	Angka	45	42,90	95,33	60,00	71,50
Sasaran :									
13	Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik	1	Survey Kepuasan Masyarakat	Angka	84,34	84,05	99,66	86,00	97,73
Misi 4 : Mewujudkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dasar									
Tujuan :									
7	Meningkatnya cakupan pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar yang berkualitas	1	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	68	69,14	101,68	68,75	100,57
		2	Persentase penduduk miskin	%	15,64 – 14,46	14,90	100	12,46-11,64	80,42
Sasaran :									
14	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1	Menurunnya angka kematian neonatal	Per 1000 KH	8,5	10,2	76,47	7	54,29
		2	Angka Harapan Hidup	Tahun	74,48	74,50	100,02	75,08	99,19

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TAHUN 2023			TARGET AKHIR RPD 2026	% CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR RPD
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	*2*	*3*		*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9=(6:8)X100*
		3	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 KH	210	125,6	140,19	150	116,27
		4	Angka Kematian Bayi	Per 1000 KH	12,5	13,10	95,2	11,9	89,92
		5	Prevalensi stunting	%	19	17,46	108,11	16	89,92
15	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan	1	Angka harapan lama sekolah	Tahun	11,65	11,82	101,46	11,69	101,11
		2	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	6,80	6,86	101,63	7,01	97,86
16	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	1	Indeks Kemahalan Konstruksi	%	92,50	98,54	93,47	91,00	91,71
17	Meningkatnya cakupan rumah layak huni	1	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	82	88	107,32	88,00	100,00
18	Menurunnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	1	Persentase penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial/ Penyandang Masalah esejahteraan Sosial	%	0,2	8,33	4.165	0,2	4.165

Sumber : Data Bagian Organisasi Setda Kab. Banjarnegara 2024

e. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai

Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target yang ditetapkan. Kerangka pengukuran di Kabupaten Banjarnegara mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003. Adapun rumus pengukuran kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukan semakin tinggi kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\ \%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendahnya realisasi menunjukan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target - (Realisasi - Target)}}{\text{Target}} \times 100\ \%$$

Atau

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{(2 x Target) - Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\ \%$$

Penilaian Capaian Kinerja menggunakan interpretasi pengukuran dengan Skala Ordinal, yaitu :

Tabel II.12.
Skala Nilai Peringkat Kinerja

Interval Nilai	Kriteria	Keterangan
91% ≤ 100%	Sangat Tinggi	●
76% ≤ 90%	Tinggi	■
66% ≤ 75%	Sedang	▶
51% ≤ 65%	Rendah	◆
≤ 50%	Sangat rendah	▼

Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator yang ada disetiap kelompok sasaran dengan nilai rata-

rata setiap kelompok sasaran dibagi jumlah indikator yang ada di kelompok sasaran tersebut.

$$\text{Capaian Sasaran} = \frac{\text{Jumlah Indikator x Rata-rata Capaian Indikator}}{\text{Jumlah Indikator}} \text{ x } 100\ \%$$

Analisis pengukuran kinerja dilakukan terhadap capaian kinerja indikator tujuan dan indikator sasaran dengan membandingkan antara realisasi dengan target tahun 2023, serta mengaitkannya dengan kemungkinan ketercapaian sasaran pada tahun terakhir Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2023-2026.

Pada tahun anggaran 2023, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara telah menetapkan 7 (tujuh) tujuan dengan 10 (sepuluh) indikator tujuan, 18 (delapan belas) sasaran dengan 24 (dua puluh empat) indikator sasaran yang akan dicapai, sesuai indikator pada RPD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Analisis terhadap 7 (tujuh) tujuan dengan 10 (sepuluh) indikator tujuan, 18 (delapan belas) sasaran dengan 24 (dua puluh empat) indikator sasaran yang ditetapkan sebagai alat untuk mewujudkan tujuan strategis pada RPD 2023-2026.

Realisasi indikator sasaran sampai akhir tahun 2023 tercapai dengan 29 (dua puluh sembilan) indikator dengan kriteria capaian sangat tinggi, 3 (tiga) indikator dengan kriteria capaian tinggi, 1 (satu) indikator dengan kriteria capaian sedang dan 1 (satu) indikator dengan kriteria capaian rendah. Rata-rata capaian kinerja tujuan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara tahun 2023 sebesar 96,29%, sedangakan capain kinerja sasaran sebesar 249,29% dengan kategori sangat tinggi.

Tabel II.13.
Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Per Misi Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023

No	Misi	Jumlah Indikator		Rata-Rata Capaian			
		Tujuan	Sasaran	Tujuan	Ket	Sasaran	Ket
1.	Mewujudkan Masyarakat Madani yang Agamis dengan Menciptakan Masyarakat Banjarnegara yang Berkualitas, Sehat,	2	5	87,6	Sedang	103,56	Sangat Tinggi

No	Misi	Jumlah Indikator		Rata-Rata Capaian			
		Tujuan	Sasaran	Tujuan	Ket	Sasaran	Ket
	Cerdas, Produktif, Kompetitif, Kreatif, Inovatif dan Berakhlak Mulia, serta menghargai dan Menerapkan Nilai-nilai Luhur Agama dan Budaya Masyarakat						
2.	Mewujudkan Perekonomian Rakyat yang Maju dengan Mengembangkan serta Memperkuat Perekonomian Daerah Melalui Sektor Pertanian yang Berorientasi pada Pasar dengan Senantiasa Menjaga Kelestarian Sumberdaya Alam dan Lingkungan dalam Pengelolaannya melalui Regulasi yang Tepat dalam Mendukung Penciptaan Iklim Investasi yang Kondusif dalam Rangka Menciptakan Kehidupan Masyarakat yang Sejahera, Aman dan Damai	2	6	100,31	Sangat Tinggi	287	Sangat Tinggi
3.	Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) dalam Kehidpuan Pollitik yang Demokratis dan Bertanggung Jawab	2	2	96,42	Sangat Tinggi	99,89	Sangat Tinggi
4.	Mewujudkan Mewujudkan Kuantitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana Dasar	1	5	100,84	Sangat Tinggi	509,16	Sangat Tinggi

Sumber : Data Bagian Organanisasi Setda Kab. Banjarnegara 2024

Analisis capaian kinerja tujuan dan sasaran per misi adalah sebagai berikut :

Misi 1	**:**	**Mewujudkan masyarakat madani yang agamis, dengan menciptakan masyarakat Banjarnegara yang berkualitas, sehat, cerdas, produktif, kompetitif, kreatif, inovatif dan berakhlak mulia, serta menghargai dan menerapkan nilai-nilai luhur agama dan budaya masyarakat.**

Tujuan 1	**:**	**Meningkatnya Kondusivitas Wilayah**

Untuk mencapai Tujuan 1 ”Meningkatnya Kondusivitas Wilayah”, diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Indeks ketenteraman, ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat. Adapun pencapaian target dari indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel II.14.
Capaian Indikator Kinerja Tujuan 1 Tahun 2023

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Keterangan
		Target	Realisasi	Capaian (%)	
Indeks ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Angka	76	57,15	75,20	Sedang

Capaian indikator kinerja Tujuan 1 “Meningkatnya Kondusivitas Wilayah” yaitu Indeks Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat tahun 2023 sebesar 57,15 dari target 76 dengan capaian kinerja 75,20%, sebagaimana ditampilkan dalam tabel diatas.

Capaian indikator kinerja Tujuan 1 pada tahun 2023 apabila dibandingkan dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel II.15.
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tujuan 1
Tahun 2023 dengan Tahun 2022

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Keterangan
		2022	2023	Tingkat Kemajuan (%)	
Indeks ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Angka	74,79	57,15	13,84	Menurun

Hasil pengukuran tingkat kemajuan indikator kinerja indeks ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat apabila diperbandingkan antara realisasi tahun 2023 dengan 2022 maka realisasi indikator kinerja Tujuan 1 mengalami penurunan dari tahun 2022 sebesar 13,84%

Capain indikator kinerja Tujuan 1 tahun 2023 apabila dibandingkan dengan target tahun terakhir Rencana Pembangunan Daerah atau tahun 2026, maka dapat ditampilkan sebagaimana tabel berikut :

Tabel II.16.
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tujuan 1
Tahun 2023 dengan Target Akhir RPD Tahun 2026

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Keterangan
		2023	Target akhir RPD Tahun 2026	Capaian (%)	
Indeks ketenteraman, ketertiban umum dan Perlindungan masyarakat	Angka	57,15	76,50	74,71	Belum tercapai

Capaian indikator kinerja indeks ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat pada tahun 2023 apabila dibandingkan dengan dari target akhir tahun RPD tahun 2026, maka realisasi kinerja belum tercapai atau masih dibawah target yang telah ditetapkan.

Indeks ketenteraman dan ketertiban masyarakat diukur dengan tiga komponen yaitu rasio anggota linmas per rumah tangga, persentase penegakan perda, dan persentase penurunan angka

kriminalitas. Dari tiga komponen tersebut semua berkontribusi positif terhadap pencapaian indeks ketenteraman dan ketertiban.

Untuk menghitungan persentase penurunan kriminalitas menggunakan tiga komponen yaitu angka kriminalitas, tipiring dan gangguan trantibum. Pada tahun 2023 terdapat 99 kasus atau terjadi penurunan 4,81% dari angka kriminalitas tahun 2022 sejumlah 104 kasus, kasus tipiring 2 kasus atau sama dengan tahun tahun 2022 dan gangguan trantibum 119 kasus menurun 4,03% dari tahun 2022 sejumlah 124 kasus. 119 kasus gangguan trantibum yang terjadi pada tahun 2023 terdiri dari 10 kasus penertiban pasangan bukan suami istri, 45 kasus penertiban PKL, 5 kasus kenakalan remaja, 22 kasus penertiban minuman keras, 3 kasus penertiban anak jalanan, 9 kasus PGOT dan 17 kasus ODGJ.

Realisasi kinerja tahun 2023, apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya dapat digambarkan sebagai berikut :

Grafik II.4.
Indeks Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 – 2023

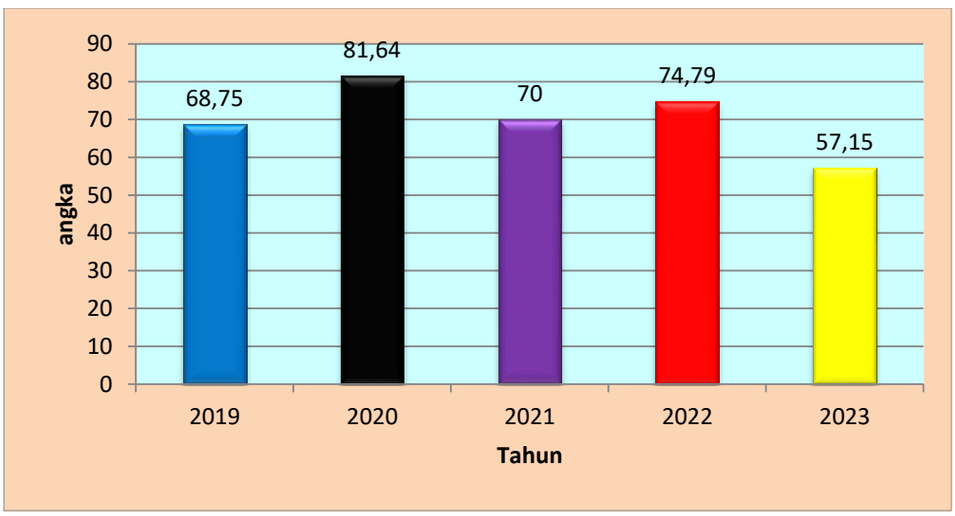

Sumber : Data Satpol PP Kab. Banjarnegara 2024

Berdasarkan grafik diatas, secara kuantitatif capaian indikator kinerja Tujuan 1 yaitu Indeks Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat terdapat kecenderungan menurun. Hal ini menggambarkan bahwa Kabupaten Banjarnegara dari tahun ke tahun masih ada kejadian terhadap gangguan keamanan dan ketertiban dimasyarakat yang membutuhkan penanganan yang serius dalam rangka menciptakan kondusivitas lingkungan.

Dalam rangka mewujudkan kondusivitas wilayah di Kabupaten Banjarnegara, kebijakan maupun kegiatan sebagai berikut :

1. Mendapatkan dukungan yang tinggi dari Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dalam penegakan Perda.
2. Koordinasi yang baik dengan instansi vertikal (TNI, Polri, Kejaksaan) maupun dinas /instansi terkait tingkat Kabupaten.
3. Melaksanakan pengawasan dan penertiban secara periodik, serta menindaklanjuti pengaduan yang masuk dengan mengoptimalkan segala sumber daya dan jejaring yang ada.
4. Memberikan pembinaan dan menindak secara tegas bagi warga yang melakukan pelanggaran agar tidak mengulang lagi.
5. Mengikutsertakan PPNS dalam kegiatan peningkatan kapasitas yang diselenggarakan propinsi.
6. Adanya tindakan yang tegas dan terukur bagi masyarakat yang melanggar ketentraman dan ketertiban umum.
7. Terbangunnya koordinasi dan pengawasan yang intensif ditingkat bawah sampai pengambil kebijakan dalam rangka pengendalian kinerja.
8. Satpol PP secara rutin melaksanakan patroli 3 kali sehari selama 24 jam dan pengendalian keamanan lingkungan melalui pengamanan asset-aset daerah, hari-hari besar dan keramaian warga.
9. Meningkatkan peran Kecamatan, Desa dan sekolah dalam sosialisasi dan pembinaan untuk menjaga ketertiban dan keamanan wilayah masing-masing serta menggiatkan Siskamling.
10. Sosialisasi peraturan perundang-undangan daerah dan pengawasan serta penertiban secara berkala, berkesinambungan dan berkelanjutan. optimalisasi strategi penegakan perda secara preemtif dan preventif melalui sosialiasasi berbasis sekolah melalui Satpol PP Maring Sekolah (SMS), komunitas pengusaha dan organisasi-organisasi masyarakat yang ada.
11. Meningkatkan kapasitas bagi anggota LINMAS, ORMAS, tokoh masyarakat, tokoh agama dalam menjaga ketertiban, keamanan dan ketenteraman masyarakat.

Sedangkan kendala dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Banjarnegara, antara lain :

1. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dan pengusaha terhadap peraturan-peraturan daerah yang memuat sanksi.
2. Keterbatasan anggota SATPOL PP dan LINMAS
3. Kurang maksimalnya pemberdayaan anggota LINMAS
4. Dukungan sarana prasarana operasional belum memadai

Sasaran 1	:	Tertanganinya kejadian konflik antar kelompok masyarakat, suku dan agama

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran 1 “Tertanganinya Kejadian Konflik Antar Kelompok Masyarakat Suku dan Agama” dengan 1 (satu) indikator kinerja sebagaimana berikut :

Tabel II.17.
Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1 Tahun 2023

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Keterangan
		Target	Realisasi	Capaian (%)	
Persentase Penanganan Konflik Sosial	%	100	100	100	Sangat Tinggi

Capaian indikator kinerja Sasaran 1, yaitu Persentase Penanganan Konflik Sosial tahun 2023 dari target 100% terealisasi 100% dengan capaian kinerja 100%, sebagaimana ditampilkan pada tabel diatas.

Adapun capaian indikator kinerja Sasaran 1 pada tahun 2023 apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel II.18.
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1
Tahun 2023 dengan Tahun 2022

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Keterangan
		2022	2023	Tingkat Kemajuan (%)	
Persentase Penanganan Konflik Sosial	Angka	NA	100	100	Sama

Hasil pengukuran tingkat kemajuan indikator kinerja Sasaran 1 yaitu Persentase Penanganan Konflik Sosial apabila diperbandingkan

antara capaian indikator kinerja tahun 2023 dengan 2022 maka capaian indikator kinerja Sasaran 1 tidak mengalami peningkaatan atau penurunan.

Sedangkan apabila capain indikator kinerja Sasaran 1 tahun 2023 apabila dibandingkan dengan target tahun terakhir RPD tahun 2026, maka dapat ditampilkan sebagaimana tabel berikut :

Tabel II.19.
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1
Tahun 2023 dengan Target Akhir RPD Tahun 2026

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Keterangan
		2023	Target akhir RPD Tahun 2026	Capaian (%)	
Persentase Penanganan Konflik Sosial	Angka	100	100	100	Tercapai

Capaian indikator kinerja Persentase Penanganan Konflik Sosial pada tahun 2023 apabila dibandingkan dengan dari target akhir tahun RPD tahun 2026, maka realisasi kinerja telah tercapai 100% atau sesuai target yang telah ditetapkan.

Pemerintah Kabupaten banjarnegara terus melakukan koordinasi dengan aparat keamanan dan pihak-pihak lain dalam rangka memantau setiap perkembangan berbagai kondisi yang berpotensi menimbulkan konflik dimasyarakat, termasuk bahaya radikalisme dan tindakan-tindakan intoleransi yang berlatarbelakang kelompok masyarakat, suku dan agama. Dengan terpeliharanya sikap toleransi yang dibangun ditengah tengah kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Banjarnegara selama ini diharapkan mampu memberikan rasa aman dan nyaman dalam menjalankan kehidupan beragama, bermasyarakat dan bernegara.

Sedangkan upaya untuk menurunkan angka konflik didalam masyaraakat dilaksanakan sosialisasi / pembinaan kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan pelajar serta tokoh elemen lainnya serta memberdayakan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia (FPBI) dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) serta Kominda.

Adapun langkah-langkah dalam rangka mengurangi kejadian konflik antar kelompok masyarakat, suku dan agama Pemerintah Kabupaten Banjarnegara melakukan sebagai berikut :

1. Rapat koordinasi Forum Kerukunan Umat Beragma (FKUB) secara rutin
2. Melaksanakan pembinaan FKUB di 3 (tiga) wilayah, yaitu Kecamatan Pagedongan, Sigauh dan Wanayasa.
3. Melaksanakan koordinasi dan peninjauan terkait pengajuan pendirian tempat ibadah.
4. Sosialisasi berkaitan dengan pencegahan konflik di masyarakat dengan peserta dari unsur masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama yang diselenggarakan di kecamatan Punggelan, Rakit, Banjarnegara dan Bawang.

Sasaran 2	**:**	**Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana**

Dalam rangka meningkatkan kualitas kapasitas kelembagaan dan masyarakat lam penanggulangan bencana di daerah, maka ditetapkan indikator Persentase Desa Tangguh Bencana sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Desa Tangguh Bencana.

Hasil pengukuran capaian kinerja Sasaran 2 “Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana” dengan 1 (satu) indikator kinerja sebagaimana berikut :

Tabel II.20.
Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2 Tahun 2023

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Keterangan
		Target	Realisasi	Capaian (%)	
Persentase Desa Tangguh Bencana	%	40	50,76	126,9	Sangat Tinggi

Capaian indikator kinerja Sasaran 2, yaitu Persentase Desa Tangguh Bencana tahun 2022 dari target 40% terealisasi 50,76% dengan capaian kinerja 126,9%, ditampilkan dalam tabel diatas.

Adapun capaian indikator kinerja Sasaran 2 pada tahun 2023 apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel II.21.
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2
Tahun 2023 dengan Tahun 2022

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Keterangan
		2022	2023	Tingkat Kemajuan (%)	
Persentase Desa Tangguh Bencana	%	45,64	50,79	11,28	Meningkat

Hasil pengukuran tingkat kemajuan indikator kinerja Sasaran 2 yaitu Persentase Desa Tangguh Bencana apabila diperbandingkan antara capaian indikator kinerja tahun 2023 dengan 2022 maka capaian indikator kinerja Sasaran 2 mengalami peningkatan sebesar 11,28%.

Sedangkan apabila capain indikator kinerja Sasaran 2 tahun 2023 dibandingkan dengan target tahun terakhir Rencana Pembangunan Daerah atau tahun 2026, maka dapat ditampilkan sebagaimana tabel berikut :

Tabel II.22.
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2
Tahun 2023 dengan Target Akhir RPD Tahun 2026

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Keterangan
		2023	Target akhir RPD Tahun 2026	Capaian (%)	
Persentase Desa Tangguh Bencana	Angka	50,79	44	115,43	Tercapai

Dari tabel diatas diketahiu bahwa capaian indikator kinerja Persentase Persentase Desa Tangguh bencana pada tahun 2023 apabila dibandingkan dengan dari target akhir tahun RPD tahun 2026, maka realisasi kinerja telah tercapai 115,43% atau melampaui target yang telah ditetapkan.

Pemerintah Kabupaten Banjarnegara telah membentuk desa tangguh bencana (DESTANA) sampai dengan tahun 2023 sejumlah 99

desa dari 195 desa rawan bencana atau 50,79% yang tersebar di 16 Kecamatan Se Kabupaten Banjarnegara.

Berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan oleh Badan Vulkanologi Metereologi dan Bencana Geologi kondisi geografis di Kabupaten Banjarnegara 70 % merupakan daerah rawan bencana pergerakan tanah, adapun jenis bencana lainnya yang terjadi adalah seperti tanah longsor, gas beracun, banjir, kebakaran, kekeringan dan angin kencang.

Dari 266 desa yang tersebar diseluruh kecamatan, 195 desa yang dinyatakan sebagai desa rawan bencana. Dalam rangka kesiapsiagaan bencana Pemerintah Kabupaten Banjarnegara mentargetkan untuk meningkatkan pembentukan desa tangguh bencana dengan target di akhir RPD pada tahun 2026 terbentuk 44% atau sejumlah 86 desa tangguh bencana.

Pembentukan desa tangguh bencana dari tahun sebelumnya maka dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik II.5.
Jumlah Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2018 - 2023

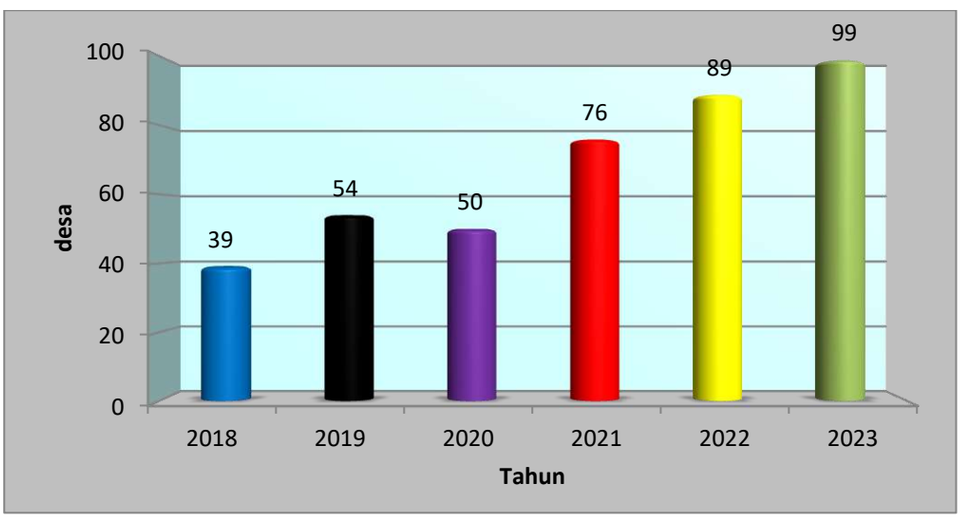

Sumber : Data BPBD Kab. Banjarnegara 2024

Secara kuantitatif, terdapat kecenderungan (*trend*) meningkat. Capaian yang meningkat didukung oleh beberapa hal tersebut :

1. Meningkatnya kesadaran masyarakat didaerah rawan bencana dengan ikut berpartisipasi aktif dalam pengurangan resiko bencana;

2. Dibangunnya jejaring kerjasama dan pendekatan antar pemangku kepentingan baik pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha untuk lebih peduli pada upaya pengurangan resiko bencana;
3. Sudah adanya peta desa rawan bencana sehingga memudahkan dalam pemantauan;

Untuk lebih mengoptimalkan pembentukan desa tangguh bencana maka dilaksanakan beberapa hal sebagai berikut :

1. Memberikan pelatihan/sosialisasi kepada masyarakat sebagai pencegahan dini agar masyarakat memahami ancaman bencana yang ada didaerahnya;
2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dan pemeliharaan kearifan lokal bagi penanganan rawan bencana;
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bencana.
4. Penguatan kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banjarnegara, dari kantor menjadi Badan, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjarnegara
5. Adanya partisipasi desa melalui alokasi anggaran dana desa. Pada tahun 2023 ada 2 (dua) DASTANA yang menganggarkan dana desan untuk penguatan kapasitas DESTANA.

Tujuan 2	**:**	**Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Nilai-Nilai Kehidupan Bermasyarakat Dan Berdemokrasi**

Sasaran 3	**:**	**Meningkatnya Partisipasi Politik Masyarakat**

Untuk mencapai tujuan 2 Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Nilai-nilai Kehidupan Bermasyarakat dan Berdemokrasi dan Sasaran 3 Meningkatnya Partisipasi Politik Masyarakat, diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Persentase Penggunaan Hak Pilih. Adapun pencapaian target dari indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel II.23.
Capaian Indikator Kinerja Tujuan 2 dan Sasaran 3 Tahun 2023

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Keterangan
		Target	Realisasi	Capaian (%)	
Persentase penggunaan hak pilih :	%				Sangat Tinggi
Pilkades		0	0	0	
Pilgub		0	0	0	
Pilbup		0	0	0	
Pileg		0	76,11*	100	
Pilpres		0	76,15*	100	

**) = Capaian 2019*

Hasil pengukuran indikator kinerja Tujuan 2 dan Sasaran 3 pada tahun 2023 memakai hasil terakhir tahun 2019, karena pada tahun 2023 tidak melaksanakan Pilkades, Pilgub, Pilbup, Pileg dan Pilpres yaitu Persentase Penggunaan Hak Pilih, realisasi pemilihan Legislatif 76,11% dan pemilihan Presiden 76,15% dengan capaian kinerja 100%, ditampilkan dalam tabel diatas.

Adapun capaian indikator kinerja Tujuan 2 dan Sasaran 3 pada tahun 2023 apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel II.24.
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tujuan 2 dan Sasaran 3 Tahun 2023 dengan Tahun 2022

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Keterangan
		2022	2023	Tingkat Kemajuan (%)	
Persentase penggunaan hak pilih :	%				Sama
Pilkades		0	0	0	
Pilgub		0	0	0	
Pilbup		0	0	0	
Pileg		0	76,11*	100	
Pilpres		0	76,15*	100	

**) = Capaian 2019*

Hasil pengukuran tingkat kemajuan indikator kinerja Tujuan 2 dan Sasaran 3 yaitu Persentase Penggunaan Hak Pilih apabila

diperbandingkan antara capaian indikator kinerja tahun 2023 dengan 2022 maka capaian indikator kinerja Tujuan 2 dan Sasaran 3 sama.

Sedangkan apabila capaian indikator kinerja Tujuan 2 dan Sasaran 3 tahun 2023 yang menggunakan data hasil pemilihan umum yang diselenggarakan pada tahun 2019 apabila dibandingkan dengan target tahun terakhir Rencana Pembangunan Daerah atau tahun 2026, maka dapat ditampilkan sebagaimana tabel berikut :

Tabel II.25.
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tujuan 2 dan Sasaran 3 Tahun 2023 dengan Target Akhir RPD Tahun 2026

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Keterangan
		2023	Target akhir RPD Tahun 2026	Capaian (%)	
Persentase penggunaan hak pilih : Pilkades	%	0	80,65	0	Tercapai
Pilgub		0	0	0	
Pilbup		0	0	0	
Pileg		76,11	76,11*	101,48	
Pilpres		76,15	76,15*	101,53	

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian indikator kinerja Persentase penggunaan hak pilih pada tahun 2023 yang menngunakan data hasil pemilihan umum tahun 2019 yaitu pemilihan presiden dan pemilihan legislatif apabila dibandingkan dengan dari target akhir tahun RPD tahun 2026, maka realisasi kinerja telah tercapai, yaitu persentase penggunaan hak pilih pada memilihan legislatif sebesar 101,48% dan 101,53% untuk pemilihan presiden.

Pada tahun 2022, Pemerintah Pusat, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Banjarnegara tidak menyelenggarakan Pemilihan Presiden, Gubernur, Bupati, Legistaif dan Kepala Desa. Namun demikian, hasil penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan Legislatif tahun 2019 tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu sebesar 76,11% untuk pemilihan legislatif dan 76,15% untuk pemilihan presiden. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 Prosentase Pemilih dalam Pemilu sudah tercapai sesuai dengan yang ditergetkan. Jumlah pemilih yang terdaftar sejumlah 791.041 orang, adapun partisipasi pemilih

pada pemilihan presiden sejumlah 602.380 orang sedangkan untuk pemilihan anggota legislatif adalah sejumlah 602.032 orang.

Data terakhir menunjukkan capaian di masing-masing pemilihan dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:

Grafik II.6.
Persentase Pemilih Dalam Pemilu

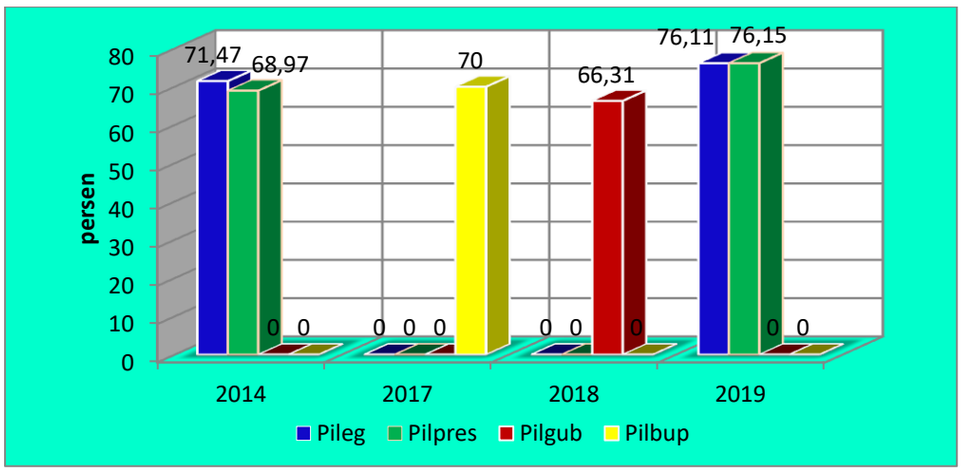

Sumber : Data Bakesbangpol Kab. Banjarnegara, 2020

Apabila dibandingkan angka partisipasi pemilih dalam pemilihan presiden dan pemilihan legislatif pada tahun 2014 dengan tahun 2019 terjadi kenaikan angka partisipasi pemilih sebesar 4,64 % untuk pemilihan legislatif dan 7,18 % untuk pemilihan presiden. Sedangkan, apabila angka partisipasi pemilih dalam pemilihan presiden dan legislatif dibandingkan dengan pemilihan gubernur pada tahun 2018 ada peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu legislatif dan presiden sebesar 9,82 %.

Grafik II.7.
Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pilpres dan Pileg

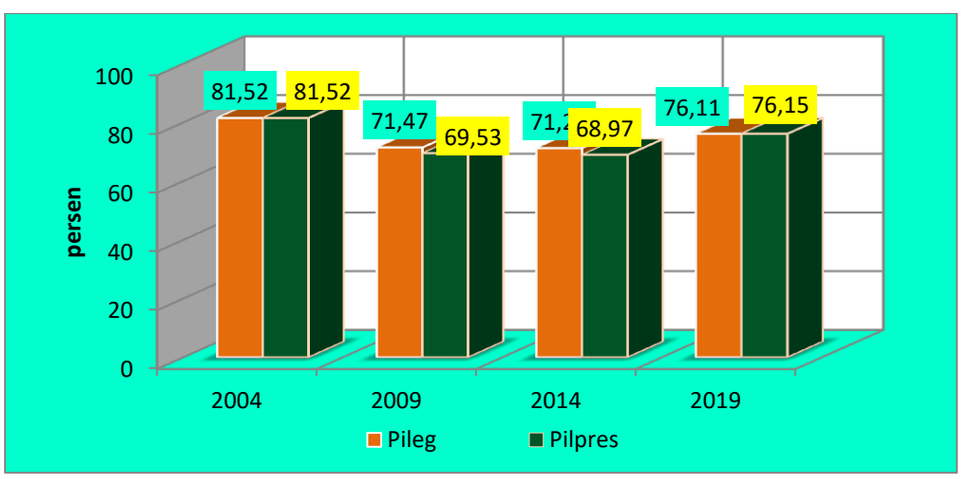

Sumber : Data Bakesbangpol Kab. Banjarnegara, 2020

Berdasarkan Grafik diatas menunjukan bahwa prosentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu Legislatif maupun Presiden pada periode-periode sebelumnya (tahun 2004, 2009, 2014 dan 2019), sebagai berikut :

a. Prosentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu untuk Pilpres pada Tahun 2004 menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat tinggi karena merupakan Pemilu lansung yang pertama, sehingga lebih menarik orang untuk hadir di tempat pemungutan suara, sedangkan pemilu tahun 2009, 2014 sampai dengan 2019 cenderung fluktuatif sebagaiaman tersebut dalam grafik diatas.
b. Prosentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu untuk Pileg dari tahun 2004, partisipasi masyarakat tinggi merupakan Pemilu langsung pertama sedangkan tahun 2009, 2014 sampai dengan 2019 cenderung fluktuatif.

Adapun faktor yang mendukung peningkatan partisipasi pemilih antara lain:

1. Adanya pendidikan politik dan demokrasi dengan sasaran kepada pemilih pemula dan masyarakat yang dilaksanakan oleh KPU, Panwas dan Bakesbangpoli untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu;
2. Koordinasi yang baik antar lembaga pelaksana pemilu;
3. Pelaksanaan Pemilu ditetapkan sebagai hari libur nasional sehingga memberi kesempatan kepada pemilih untuk menggunakan hak pilihnya.
4. Melakukan sosialisasi tentang penguatan kepada masyarakat terutama pemilih pemula untuk meningkatkan kesadaran terhadap nilai kehidupan bermasyarakat dan berdemokrasi.

Sasaran 4	**:**	**Meningkatnya Penghargaan Masyarakat Terhadap Nilai Nilai Kebudayaan dan Kearifan Lokal**

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja. Adapun pencapaian target dari masing-masing sub indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel II.26.
Capaian Indikator Kinerja Sasaran 4 Tahun 2023

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Keterangan
		Target	Realisasi	Capaian (%)	
Indeks Kebudayaan	Angka	65	59,01	90,78	Tinggi

Hasil pengukuran indikator kinerja Sasaran 4 yaitu Indeks Kebudayaan tahun 2023 dari target 65 terealisasi 59,01 dengan capaian kinerja sebesar 90,78% sebagaimana ditampilkan pada tabel diatas.

Adapun capaian indikator kinerja Sasaran 4 pada tahun 2023 apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel II.27.
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 4
Tahun 2023 dengan Tahun 2022

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Keterangan
		2022	2023	Tingkat Kemajuan (%)	
Indeks Kebudayaan	Angka	83	59,01	28,9	Turun

Hasil pengukuran indikator kinerja Sasaran 4 yaitu Indeks Kebudayaan apabila diperbandingkan antara capaian indikator kinerja tahun 2023 dengan 2022 maka capaian indikator kinerja Sasaran 4 turun sebesar 28,9%.

Apabila capaian indikator kinerja Sasaran 4 Indeks Kebudayaan diperbandingan antara capaian tahun 2023 dengan target akhir tahun RPD 2026, maka dapat ditampilkan sebagaimana tabel berikut :

Tabel II.28.
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 4
Tahun 2023 dengan Target Akhir RPD Tahun 2026

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Keterangan
		2023	Target akhir RPD Tahun 2026	Capaian (%)	
Indeks Kebudayaan	Angka	59,01	71	83,11	Belum Tercapai

Capaian indikator kinerja Sasaran 4 Indeks Kebudayaan pada tahun 2023 apabila dibandingkan dengan dari target akhir tahun RPD tahun 2026, maka realisasi kinerja baru tercapai 83,11% dari target yang ditetapkan.

Indeks Kebudayaan diukur dengan menggunakan 4 parameter yaitu persentase peningkatan even kesenian atau budaya, persentase cagar budaya yang terpelihara, persentase gedung kesenian yang aktif, persentase peningkatan jumlah riset unggulan daerah inovasi yang terjaring.

Komponen dari indeks kebudayaan yang berkontribusi cukup signifikan terhadap pencapaian tahun 2023 adalah pada komponen persentase peningkatan jumlah riset unggulan daerah inovasi yang terjaring. Pada tahun 2022 jumlah riset unggulan daerah, inovasi yang terjaring adalah 29 riset atau inovasi, sedangkan pada tahun 2023 jumlah riset atau inovasi yang terjaring adalah 60 riset atau inovasi.

Komponen peningkatan even kesenian atau budaya yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah maupun yang diselenggarakan oleh masyarakat pada tahun 2023 sejumlah 35 even kesenian atau meningkat 1 even penyelenggaraan dari tahun 2022.

Komponen prosentase cagar budaya yang terpelihara sebesar 54,55 % dan prosentase gedung kesenian yang terpeliharan sebesar 100% pada tahun 2023. Kondisi ini masih sama dari kodisi tahun 2022 yaitu pada tahun 2023 terdapat 99 benda cagar budaya di Kabupaten Banjarengara yang terpelihara dengan baik. Dari 99 Benda cagar budaya, 54 benda cagar budaya telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Nomor 430/041/parbud/2021 tentang Data Cagar Budaya Kabupaten Banjarnegara, sedangkan 45 cagar budaya masih dalam proses usulan dari masyarakat untuk ditetapkan menjadi cagar budaya Kabupaten Banjarnegara. Adapun pemeliharaan cagar budaya yang ada dengan melibatkan peran serta masyarakat. Sedangkan gedung kedung kesenian yang pada saat ini Kabupaten Banjarnegara baru memiliki 1 gedung kesenian yang aktif.

Kabupaten Banjarnegara sebagai salah satu kabupaten yang memiliki tradisi kebudayaan dan kesenian yang banyak telah berusaha untuk melestarikan warisan budaya tersebut melalui peningkatan even kesenian dan budaya dari tahun ke tahun. Hal ini bertujuan agar

kesenian dan budaya yang berkembang di masyarakat dapat semakin berkembang dan dikenal luas baik di lingkung Kabupaten Banjarnegara maupun di luar, sehingga kesenian dan kebudayaan yang berasal dari nilai-nilai adi luhung yang ada di masyarakat Banjarnegara bisa dilestarikan.

Apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, realisasi capaian indikator kinerja diperoleh gambaran sebagai berikut:

Grafik II.8.
Indeks Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2018 - 2013

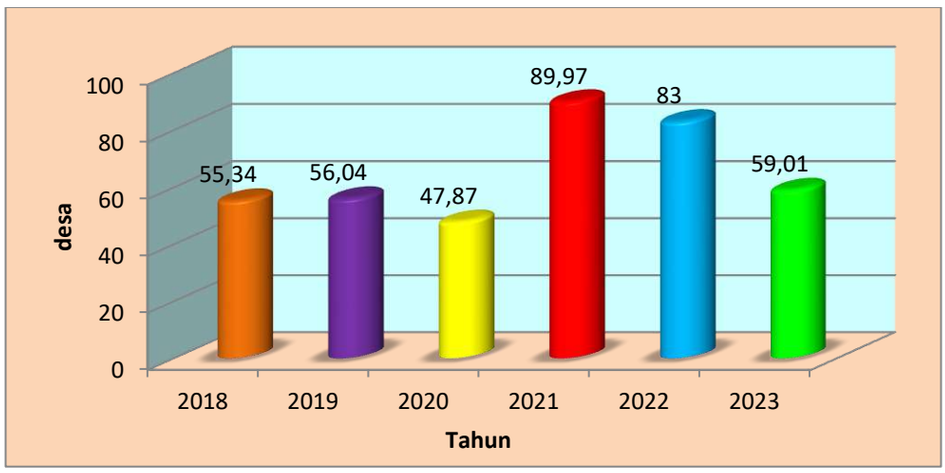

Sumber : Data Disparbud Kab. Banjarnegara, 2024

Berdasarkan grafik diatas dapat diketahui bahwa capaian indikator kinerja sasaran 4 Indek Kebudayaan secara kuantitatif, terdapat kecenderungan (trend) yang fluktuatif.

Adapun untuk mencapai indeks kebudayaan adalah sebagai berikut:

Pemeliharaan cagar budaya di seluruh Kabupaten Banjarnegara dimana sampai dengan saat ini cagar budaya yang terpelihara sejumlah 99 cagar budaya.

Keberadaan gedung budaya dimaksimalkan pemanfaatannya dengan menyelenggarakan berbagai even budaya, terutama untuk meningkatkan daya tarik wisata di Banjarnegara.

Melakukan pembinaan pada kelompok-kelompok kesenian secara kontinyu dan mendorong untuk menyelenggarakan event secara mandiri.

Mendorong Perangkat Daerah untuk melakukan inovasi-inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik

Melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi dalam melakukan riset yang berdampak pada masyarakat Banjarnegara.

Sasaran 5	**:**	**Meningkatnya Peran Serta Perempuan Dalam Pembangunan dengan memperhatikan Hak-hak Anak**

Hasil pengukuran capaian kinerja Sasaran 5 “Meningkatnya Peran Perempuan dalam Pembangunan Dengan Memperhatikan Hak-hak Anak” dengan 1 (satu) indikator kinerja sebagaimana berikut :

Tabel II.29.
Capaian Indikator Kinerja Sasaran 5 Tahun 2023

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Keterangan
		Target	Realisasi	Capaian (%)	
Indeks Pemberdayaan Gender	Angka	73,70	73,80*	100,14	Sangat Tinggi

** Data Capaian Tahun 2022*

Capaian indikator kinerja Sasaran 5, yaitu Indeks Pemberdayaan Gender tahun 2023 dari target 73,70 terealisasi 73,80 dengan capaian kinerja 100,14% ditampilkan dalam tabel diatas.

Adapun capaian indikator kinerja Sasaran 5 pada tahun 2023 apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel II.30.
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 5
Tahun 2023 dengan Tahun 2022

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Keterangan
		2022	2023	Tingkat Kemajuan (%)	
Indeks Pemberdayaan Gender	Angka	73,80	73,80*	100	Sama

** Data Capaian Tahun 2022*

Hasil pengukuran tingkat kemajuan indikator kinerja Sasaran 5 yaitu Indeks Pemberdayaan Gender apabila diperbandingkan antara capaian indikator kinerja tahun 2023 dengan 2022 maka capaian indikator kinerja Sasaran 5 sama.

Sedangkan apabila capain indikator kinerja Sasaran 5 tahun 2023 apabila dibandingkan dengan target tahun terakhir Rencana Pembangunan Daerah atau tahun 2026 , maka dapat ditampilkan sebagaimana tabel berikut :

Tabel II.31.
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 5 Tahun 2023 dengan Target Akhir RPD Tahun 2026

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Keterangan
		2023	Target akhir RPD Tahun 2026	Capaian (%)	
Indeks Pemberdayaan Gender	Angka	73,80*	75,20	98,14	Belum tercapai

* *Data Capaian Tahun 2022*

Capaian indikator kinerja Sasaran 5 Indeks Pemberdayaan Gender pada tahun 2023 sebesar 73,80 apabila dibandingkan dengan dari target akhir tahun RPD tahun 2026 s sebesar 75,20, maka realisasi kinerja baru tercapai 98,14% dari target yang ditetapkan.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menggambarkan besarnya peranan gender dalam bidang politik, ekonomi, dan pengambilan keputusan. Pada tahun 2023 ditargetkan 73,70 terealisasi sebesar 73,80 (2022) dengan ketercapaian 100,14%. Bila dibandingkan dengan capaian Provinsi Jawa Tegah maka IDG Kabupaten Banjarnegara diatas IDG provinsi Jawa Tengah yaitu 73,78 (2022) dan nasional sebesar 76,59 (2022).

Apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya maka dapat dilihat sebagai berikut:

Grafik II.9.
Perbandingan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018 – 2022

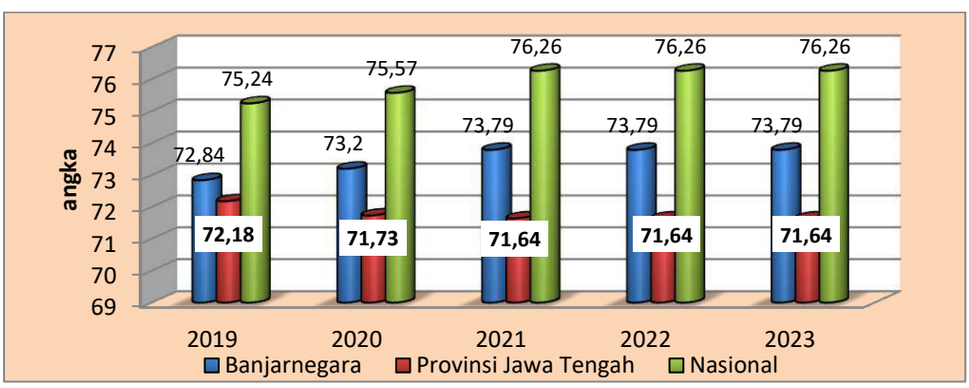

Sumber : Data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah,2024

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui, bahwa IDG Kabupaten Banjarnegara mengalami perkembangan yang cenderung meningkat, diatas IDG Provinsi dan dibawah IGD Nasional.

Untuk mengkaji lebih jauh peranan perempuan dalam pengambilan keputusan, peran dalam politik dan ekonomi, maka dapat digunakan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IDG diukur berdasarkan tiga komponen yang ada, yaitu:

1. Keterwakilan perempuan dalam parlemen

   Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 245 diamanatkan bahwa keterwakilan perempuan di parlemen sebesar 30% dari jumlah keseluruhan anggota. Pada proses pendaftaran calon legislatif perempuan sudah memenuhi kuota 30%. Kepercayaan masyarakat untuk memilih calon legislatif perempuan ada peningkatan hal ini terbukti dengan keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Banjarnegara naik sebesar 8,22 % yaitu pada tahun 2014 keterwakilan perempuan di DPRD sebesar 17,78 % atau 9 orang naik menjadi 26 % atau 12 orang pada tahun 2019 dari total anggota parlemen sejumlah 50 orang.

2. Perempuan sebagai tenaga profesional.

   Pesentase perempuan yang bekerja sebagai tenaga profesioanal di Kabupaten Banjarnegara tahun 2022 sebesar 47,46% atau turun sebesar 2,46% dari 2021 sebesar 49,92 %. Hal ini menggabarkan bahwa perempuan mulai mampu bekerja pada bidang kerja yang membutuhkan keahlian khusus sebagai tenaga profesional.

3. Sumbangan pendapatan perempuan dalam pemenuhan ekonomi keluarga..

   Sumbangan pendapatan perempuan dalam pemenuhan ekonomi keluarga di Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2022 sebesar 28,33% atau turun sebesar 1,18% dari 2021 sebesar 29,40%. Hal ini menggambarkan bahwa kendali ekonomi keluarga masih dipegang oleh laki-laki.

   Laki-laki memang bertanggungjawab dengan roda perekonomian keluarga, sehingga peranan perempuan dalam mencari nafkah atau membantu perekonomian keluarga kurang diakui, meskipun tidak dipungkiri perempuan ada yang bekerja dengan penghasilan melebihi kaum pria.

Permasalahan yang terjadi pada pencapaian indikator Indeks Pemberdayaan Gender di Kabupaten Banjarnegara, antara lain:

1. Kurangnya pengetahuan mengenai perlindungan pekerja perempuan bagi perusahaan swasta.
2. Motivasi perempuan di bidang peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik masih rendah.

Untuk mengatasi permasalahan kesetaraan gender beberapa upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara adalah :

1. Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai pembangunan yang dilakukan melalui strategi :
   a. Peningkatan pemahaman dan komitmen para pelaku pembangunan tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam berbagai tahapan, proses, dan bidang pembangunan, di tingkat nasional maupun daerah;
   b. Penerapan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di berbagai bidang pembangunan, di tingkat nasional dan daerah; dan
   c. Peningkatan pemahaman masyarakat dan dunia usaha tentang kesetaraan gender.
2. Meningkatkan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), yang dilakukan melalui strategi :
   a. Peningkatan pemahaman penyelenggara negara termasuk aparat penegak hukum dan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha tentang tindak kekerasan terhadap perempuan serta nilai-nilai sosial dan budaya yang melindungi perempuan dari berbagai tindak kekerasan;
   b. Perlindungan hukum dan pengawasan pelaksanaan penegakan hukum terkait kekerasan terhadap perempuan; serta
   c. Peningkatan efektivitas pelayanan bagi perempuan korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial.
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak

kekerasan. Strategi untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan antara lain untuk :

a. Penyempurnaan proses pembentukan peraturan perundang-undangan dan kebijakan agar selalu mendapatkan masukan dari perspektif gender;
b. Pelaksanaan *reviu* dan harmonisasi seluruh peraturan perundang-undangan agar berspektif gender;
c. Peningkatan kapasitas SDM untuk dapat memfasilitasi kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam menerapkan pengarusutamaan gender;
d. Penguatan mekanisme koordinasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, dunia usaha dalam penerapan pengarusutamaan gender;
e. Penguatan lembaga/jejaring pengarusutamaan gender di pusat dan daerah, termasuk perguruan tinggi, pusat studi wanita/gender, dan organisasi masyarakat;
f. Penguatan sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data terpilah;
g. Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil pengarusutamaan gender.

Misi 2	**:**	**Mewujudkan perekonomian rakyat yang maju dengan mengembangkan serta memperkuat perekonomian daerah melalui sektor pertanian yang berorientasi pada pasar dengan senantiasa menjaga kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan dalam pengelolaannya melalui regulasi yang tepat dalam mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif dalam rangka menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman dan damai**

Tujuan 2	**:**	**Meningkatnya Kinerja Perekonomian Daerah**

Untuk mencapai Tujuan 2 ”Meningkatnya Kinerja Perekonomian Daerah”, diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu 1) Laju

Pertumbuhan Ekonomi, 2) PDRB Perkapita, 3) Nilai Tukar Petani. Adapun pencapaian target dari indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel II.32.
Capaian Indikator Kinerja Tujuan 2 Tahun 2023

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Keterangan
		Target	Realisasi	Capaian (%)	
1. Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,50 - 5,50	4,98	100	Sangat Tinggi
2. PDRB Perkapita	Juta Rupiah	> 22,40	25,9	115,62	Sangat Tinggi
3. Nilai Tukar Petani	%	103 - 106	107,49*	101,41	Sangat Tinggi
Rata-rata Capaian Kinerja				105,67	Sangat Tinggi

** Data Capaian Tahun 2022*

Capaian indikator kinerja Tujuan 2, yaitu 1) Laju Pertumbuhan Ekonomi tahun 2023 dari target 4,50 - 5,50% terealisasi 4,98% dengan capaian kinerja 100%, 2) PDRB Perkapita dari target > Rp.22,4 Juta terealisasi Rp.25,9 Juta dengan capaian kinerja 115,62%, 3) Nilai Tukar Petani dari target 103 - 106% terealisasi 107,49 % (2022) dengan capaian kinerja 101,41%. Sedangkan rata-rata capaian kinerja indikator Tujuan 2 sebesar 105,67%, seperti yang ditampilkan dalam tabel diatas.

Adapun capaian indikator kinerja Sasaran 5 pada tahun 2023 apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel II.33.
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tujuan 2
Tahun 2023 dengan Tahun 2022

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Keterangan
		2022	2023	Tingkat Kemajuan (%)	
1. Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,29	4,98	94,13	Menurun
2. PDRB Perkapita	Juta Rupiah	24,34	25,9	106,40	Meningkat
3. Nilai Tukar Petani	%	107,49	107,49*	100	Sama

** Data Capaian Tahun 2022*

Hasil pengukuran tingkat kemajauan capaian indikator kinerja Tujuan 2 dari tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2023, yaitu 1) Laju Pertumbuhan Ekonomi tahun 2023 % terealisasi 4,98%

sedangkan realisasi tahun 2022 sebesar 5,29% dengan tingkat penurunan capaian kinerja sebesar 94,13%, 2) Indikator kinerja PDRB Perkapita capaian realisasi tahun 2023 sebesar Rp. 25,9 juta dibandikan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp.24,9 Juta dengan tingkat kemajuan capaian kinerja sebesar 106,40%, dan 3) Indikator kinerja Nilai Tukar Petani reaalisasi tahun 2023 sebesar 107,49% dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar 107,49%, maka tingkat kemajuan capaian indikator sama.

Capain indikator kinerja Tujuan 2 tahun 2023 apabila dibandingkan dengan target tahun terakhir Rencana Pembangunan Daerah atau tahun 2026, maka dapat ditampilkan sebagaimana tabel berikut :

Tabel II.34.
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tujuan 2
Tahun 2023 dengan Target Akhir RPD Tahun 2026

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Keterangan
		2023	Target akhir RPD Tahun 2026	Capaian (%)	
1. Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,98	4,50 – 5,50	100	Sudah Tercapai
2. PDRB Perkapita	Juta Rupiah	25,9	> 23	112,60	Sudah Tercapai
3. Nilai Tukar Petani	%	107,49 *	103 - 106	101,41	Sudah Tercapai

** Data Capaian Tahun 2022*

Capaian indikator kinerja Tujuan 2 pada tahun 2023 apabila dibandingkan dengan dari target akhir tahun RPD tahun 2026, maka realisasi kinerja sudah tercapai.

Laju Pertumbuhan Ekonomi yang ditunjukkan melalui pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga konstan menurut Lapangan Usaha berdasarkan selama lima tahun terakhir cukup baik dengan angka capaian di atas 5%. Pertumbuhan ekonomi sempat terkoreksi atau turun dari 5,67% pada tahun 2018 menjadi 5,60% pada tahun 2019 dan turun lagi menjadi minus 1,32% pada tahun 2020, namun naik menjadi 3,26% pada tahun 2021 dan naik lagi menjadi 5,29% pada tahun 2022, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banjarnegara yang dirilis 28 Februari 2023. Setelah terkontraksi pada hampir semua lapangan usaha dalam

struktur perekonomian daerah, perekonomian mulai tumbuh. Meski begitu, pertumbuhan ekonomi ditengarai masih merupakan efek bounce back, hal ini diindikasikan dengan masih rendahnya realisasi investasi di daerah. Dengan nilai Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Kabupaten Banjarnegara yang hanya sebesar 4,71, tentunya dibutuhkan investasi yang besar untuk menggerakkan perekonomian daerah. Sedangkan capain laju pertumbuhan ekonomi masih dibahwa capaian pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional.

Dengan adanya upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia diharapkan ada transformasi kegiatan ekonomi dari sektor ekstraktif (pertanian dan pertambangan) ke sektor manufaktur maupun tersier. Oleh karena itu, diperlukan revitalisasi sector-sektor potensial seperti industri, pariwisata, perdagangan, serta jasa dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi sektor-sektor unggulan, mendorong pertumbuhan penanaman modal, meningkatkan rasio kemandirian fiskal dengan memberbesar rasio pendapatan asli daerah, didukung dengan perbaikan pengelolaan keuangan daerah dan aset, serta menjaga kondusivitas wilayah.

Kualitas belanja yang baik adalah semakin besarnya porsi belanja modal terhadap belanja daerah. Belanja Modal memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah selain dari sektor swasta, rumah tangga, dan luar negeri. Belanja modal yang besar akan memberikan dampak yang positif bagi pertumbuhan ekonomi di daerah.

Grafik II.10.
Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekomoni Kabupaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021 – 2023

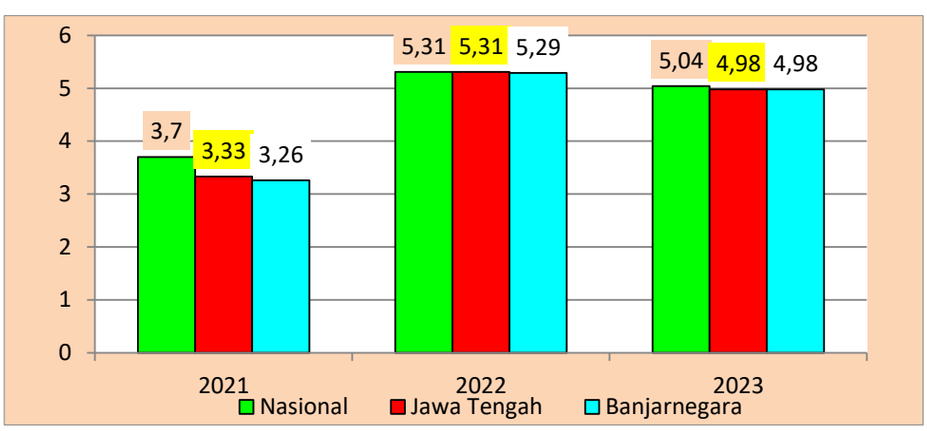

Sumber : Data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah,2024

Tabel II.35.
Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021 – 2023

Kategori Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Banjarnegara (%)		
	2021	2022	2023
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0.99	3.86	0,59
B. Pertambangan dan Penggalian	4.02	-6.27	2,14
C. Industri Pengolahan	4.56	4.68	7,67
D. Pengadaan Listrik dan Gas	5.54	3.81	7,12
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5.65	1.18	4,40
F. Konstruksi	7.58	1.81	8,31
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.09	4.07	4,98
H. Transportasi dan Pergudangan	3.04	64.74	7,83
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6.05	14.69	13,28
J. Informasi dan Komunikasi	6.00	2.38	11,24
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	1.40	0.46	2,34
L. Real Estate	2.13	4.46	6,84
M,N. Jasa Perusahaan	3.08	5.95	7,05
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-0.72	1.67	4,46
P. Jasa Pendidikan	0.04	1.70	6,61
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.12	2.42	5,91
R,S,T,U. Jasa Lainnya	0.62	11.19	7,48
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	3.26	5.29	4,98
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS	3.26	5.29	4,98

Sumber : Data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah,2024

PDRB perkapita penduduk Kabupaten Banjarnegara dapat menggambarkan secara relatif tingkat kesejahteraan masyarakat. Besarnya PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Banjarnegara Berdasarkan rilis BPS Jawa Tengah tanggal 28 Februari 2024 dalam kurun tiga tahun menunjukkan peningkatan dari sebesar Rp. 22,8 juta pada tahun 2021 menjadi sebesar Rp. 24,9 juta pada tahun 2022 dan meningkat menjadi 24,1 juta di tahun 2023.. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa perkembangan PDRB Perkapita di Kabupaten Banjarnegara

cukup baik. Indikator PDRB Per Kapita dari target 2023 sebesar >22,4 juta terealisasi sebesar 25,9 juta.

Tabel II.36.
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021 – 2023

Kategori Lapangan Usaha	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Banjarnegara (Juta Rupiah)		
	2021	2022	2023
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6.820.726,72	7.401.617.41	7.782.905,46
B. Pertambangan dan Penggalian	1.369.122,36	1.321.381,44	1.387.692,38
C. Industri Pengolahan	3.552.554,81	3.931.621,07	4.460.446,50
D. Pengadaan Listrik dan Gas	7.407,60	7.728,40	8.361,98
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9.413.40	9.662,32	10,194,52
F. Konstruksi	1.740.833,57	1.894.945.72	2.136.679,80
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.388.299,65	3.675.468,69	3.979.383,53
H. Transportasi dan Pergudangan	628.890,34	1.097.318,97	1.276.777,77
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	437.511,24	522.297,91	586.161,54
J. Informasi dan Komunikasi	744.064,30	763.134,05	850.272,36
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	672.127,18	734.153,11	767.435,36
L. Real Estate	342.573,82	363.855,93	392.728,97
M,N. Jasa Perusahaan	89.601,75	98.987,49	110.081,41
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	720.393,47	756.447,11	808.563,41
P. Jasa Pendidikan	1.497.093,93	1.534.556,89	1.650.475,71
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	323.720,35	335.191,37	362.209,63
R,S,T,U. Jasa Lainnya	483.552,81	559.713,86	620.457,48
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	22.827.887,30	24.996.481,74	27.190.827,81
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS	22.827.887,30	24.996.481,74	27.190.827,81

Sumber : Data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah,2024

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di perdesaan.NTP juga menunjukkan daya tukar (*terms of trade*) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP, secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli petani.

Nilai Tukar Petani (NTP) di Kabupaten Banjarnegara tahun 2023 sebesar 107,49% (2022) yang disesuaikan dengan tahun dasar 2018. Nilai tukar petani ditentukan oleh Indeks Diterima (IT) sebesar 122,39% dan Indeks Dibayar (IB) sebesar 113,86%. NTP lebih dari 100 karena IT lebih besar dari IB pada tahun 2022, yang mengindikasikan peningkatan indeks diterima lebih besar dibandingkan peningkatan indeks bayar. Sebagai gambaran dari survey resmi dan rutin bulanan yang pernah dilakukan Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara selama kurun waktu 2019-2020 (2019=100) diperoleh peningkatan NTP dari Desember 2019 sebesar 99,23 menjadi 103,79 pada Desember 2020 atau peningkatannya sebesar 4,59 %. Hal ini menggambarkan tingkat pendapatan petani di Kabupaten Banjarnegara mengalami surplus. Dimana biaya produksi lebih rendah dari nilai jual produknya sehingga pendapatan petani lebih besar dari pengeluarannya.

Realisasi NTP per sub sektor sebagai berikut :

Tabel II.37.
NTP Per Sub Sektor Tahun 2022

No	Sub Sektor	Indeks Diterima (IT) %	Indeks Dibayar (IB) %	NTP Sub Sektor (%)
1	Tanaman Pangan seperti: padi, palawija	123,97	115,28	107,54
2.	Hortikultura seperti : Sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman hias & tanaman obat-obatan	134,26	115,39	116,35
3.	Tanaman Perkebunan Rakyat (TPR) seperti: kelapa, kopi robusta, cengkeh, tembakau, dan kapuk odolan	117,49	114,90	102,26
4.	Peternakan seperti : ternak besar (sapi, kerbau), ternak kecil (kambing, domba, babi, dll), unggas (ayam, itik, dll), hasil-hasil ternak (susu sapi, telur, dll)	110,67	113,04	97,90
5.	Perikanan, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya	122,55	114,28	107,24

Sumber : Data Dintankan KP Kab. Banjarnegara, 2024

Secara keseluruhan, Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Banjarnegara mengalami kenaikan dari tahun 2021 ke tahun 2022. Kenaikan NTP tersebut karena kenaikan Indek Diterima (IT) melebihi kenaikan Indeks Bayar (IB) oleh petani. Kenaikan NTP di Kabupaten Banjarnegara seiring dengan kenaikan NTP Provinsi Jawa Tengah, dimana kenaikan NTP Kabupaten Banjarnegara sedikit lebih tinggi dibandingkjan kenaikan NTP Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 107,27% dan Nasional 107,33%.

Adapun untuk meningkatkan produksi komoditas tanaman pangan yang telah dilakukan antara lain :

1. Mengupayakan kepada kelompok tani untuk menggunakan bibit unggul dan tahan hama penyakit tanaman khususnya padi dan pemupukan berimbang.
2. Menggunakan mekanisasi pertanian seperti traktor untuk pengolahan tanah, alat tanam, alat panen untuk percepatan produksi dan meningkatkan indeks pertanaman.
3. Rehabilitasi jaringan irigasi tersier dan pengelolaan sumber-sumber air seperti air, embung, dam parit dan *long storage*.
4. Melakukan pendampingan oleh petugas pertanian kepada kelompok tani untuk melaksanakan budidaya tanaman pangan yang baik dan benar.
5. Melakukan sosialisasi kepada kelompok tani agar tetap membudidayakan tanaman pangan khususnya padi, jagung dan palawija serta membantu informasi pasar.
6. Melakukan budidaya tanaman tumpangsari untuk menekan kerugian dari salah satu komoditas baik apabila harganya jatuh. Tumpang sari tanaman pangan dapat dilakukan seperti padi gogo dengan ubi kayu, padi dengan jagung, padi dengan kedelai, jagung dengan ubi kayu, jagung dengan kedelai, kedelai dengan ubi kayu.
7. Mengembangkan sistem informasi bagi instnasi terkait dalam menyediakan informasi harga, ketersediaan barang, ketersediaan lahan dan jumlah produksi dan sebagainya.

Apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya NTP Kabupaten Banjarnegara dengan NTP Provinsi Jawa Tengah dan Nasional dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik II.11.
Perbandingan NTP Kabupaten Banjarnegara,
Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022

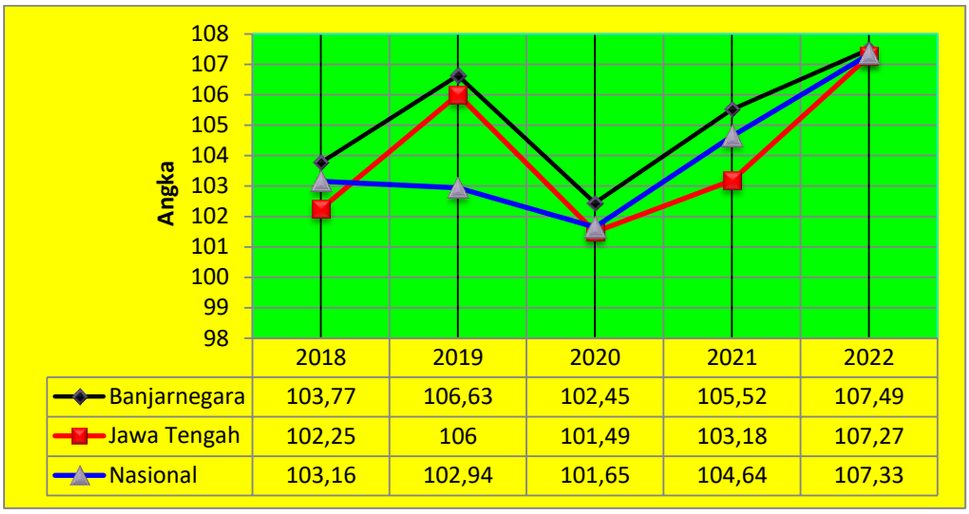

Sumber : Data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2024

Sasaran 6	:	Meningkatnya Kesempatan Lapangan Berusaha

Hasil pengukuran capaian kinerja Sasaran 6 "Meningkatnya Kesempatan Lapangan Berusaha" dengan 1 (satu) indikator kinerja sebagaimana berikut :

Tabel II.38.
Capaian Indikator Kinerja Sasaran 6 Tahun 2023

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Keterangan
		Target	Realisasi	Capaian (%)	
Persentase Peningkatan Nilai Investasi	%	1	14,77	1.477	Sangat Tinggi

Capaian indikator kinerja Sasaran 6, yaitu Persentase Peningkatan Nilai Investasi tahun 2023 dari target 1% terealisasi 14,77% dengan capaian kinerja 1.477% ditampilkan dalam tabel diatas.

Adapun capaian indikator kinerja Sasaran 6 pada tahun 2023 apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel II.39.
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 6
Tahun 2023 dengan Tahun 2022

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Keterangan
		2022	2023	Tingkat Kemajuan (%)	
Persentase Peningkatan Nilai Investasi	%	45,79	14,77	32,26	Menurun

Hasil pengukuran tingkat kemajuan indikator kinerja Sasaran 6 yaitu Persentase Peningkatan Nilai Investasi apabila diperbandingkan antara realisasi indikator kinerja tahun 2023 sebesar 14,77% dengan 2022 sebesar 45,79%, maka capaian indikator kinerja Sasaran 6 menurun sebesar 32,26%.

Sedangkan apabila capain indikator kinerja Sasaran 6 tahun 2023 apabila dibandingkan dengan target tahun terakhir Rencana Pembangunan Daerah atau tahun 2026, maka dapat ditampilkan sebagaimana tabel berikut :

Tabel II.40.
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 6
Tahun 2023 dengan Target Akhir RPD Tahun 2026

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Keterangan
		2023	Target akhir RPD Tahun 2026	Capaian (%)	
Persentase Peningkatan Nilai Investasi	%	14,77	4	369,25	Tercapai

Capaian indikator kinerja Sasaran 6 Persentase Peningkatan Nilai Investasi pada tahun 2023 apabila dibandingkan dengan dari target akhir tahun RPD tahun 2026, maka realisasi kinerja telah tercapai 369,25% dari target yang ditetapkan.

Indikator Kinerja Utama Persentase Peningkatan Nilai Investasi pada tahun 2023 telah memanuhi target kinerja, dimana pada tahun 2023 persentase peningkatan nilai investasi ditargetkan 1% terealisasi 14,77% atau capaiannya 1477%. Walaupun nilai investasi pada tahun 2023 sebesar Rp. 837.473.768.941,00 mengalami kenaikan dari tahun

2022 sebesar Rp. 637.428.927.023,00 atau 31,38%. Namun realisasi peningkatan persentase peningkatan nilai investasi tahun 2023sebesar 14% lebih rendah dari realisasi persentase peningkatan nilai investasi tahun 2022 sebesar 45,79%.

Nilai investasi tahun 2023 sebesar Rp.837.473.768.941,00 yang mengalami kenaikan sebesar 31,38% dari tahun 2022 dengan komposisi untuk nilai investasi berskala besar Rp.419.695.840.439,00 atau naik sebesar 68,31%, nilai investasi berskala menengah Rp.50.896.195.591,00 atau naik 19,68%, nilai investasi berskala kecil Rp.116.0112.421.385,00 mengalami penurunan 4,22 %, sedangkan nilai investasi mikro Rp. 250.869.311.526 naik sebesar 11,79% dari tahun 2022.

Dari nilai investasi pada tahun 2023 sebesar Rp.837.473.768.941,00 telah menyerap tenaga kerja 31.064 orang, naik sebesar 13.391 orang dari tahun 2022 sejumlah 17.673 orang dengan jumlah total usaha sejumlah 16.279 usaha yang terdiri dari usaha mikro sejumlah 15.933 usaha, menyerap tenaga kerja sebanyak 30.364 orang, usaha kecil sejumlah 61 usaha, menyerap tenaga kerja 573 orang, usaha menengah sejumlah 193 usaha dengan, menyerap tenaga kerja sebanyak 127 orang dan usaha besar sejumlah 92 usaha tetapi tidak ada penambahan tenaga kerja.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Resiko dan dan Perka BKPM Nomor 5 tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, menjelaskan bahwa besaran skala usaha berubah yang semula modal usaha kategori usaha menengah adalah > Rp 500.000.000,00 berubah menjadi >Rp. 5 Milyar, sehingga menyebabkan nilai investasi >Rp. 500 juta tidak masuk dalm kategori investasi skala nasional.

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, nilai investasi di Kabupaten Banjarnegara dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Grafik II.12.
Nilai Investasi Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018-2023

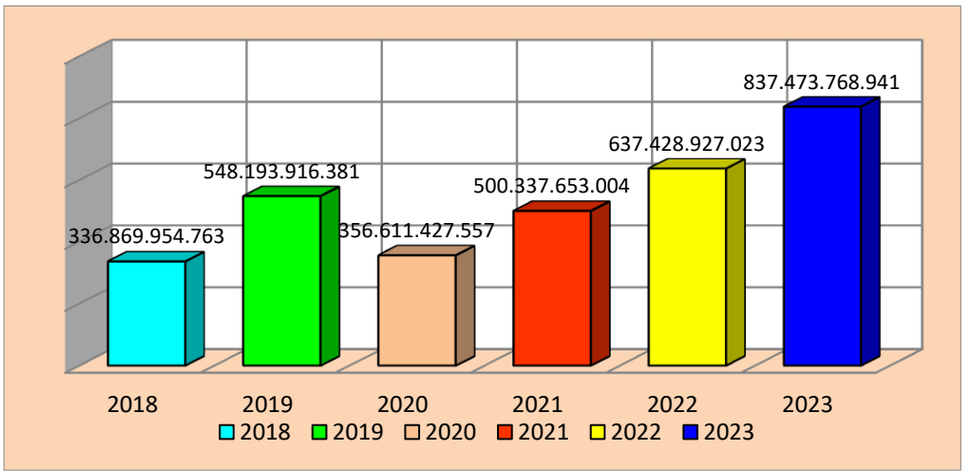

Sumber : Data Disnaker PMPTSP Kabupaten Banjarnegara, 2024

Dalam kurun waktu tahun 2018 - 2023 nilai investasi di Kabupaten Banjarnegara cenderung fluktuatif dimana pada periode tahun 2018-2019 nilai investasi terdapat peningkatan, tetapi tahun 2020 terjadi penurunan nilai investasi. Adapun penurun nilai investasi tahun 2020 salah satu faktornya adalah karena dampak pandemik covid-19 dimana para investor/calon investor menahan investasinya untuk membuka usaha atau mengembangkan usahanya di Kabupaten Banjarnegara, kemudian pada tahun 2021 seiring dengan penguatan ekonomi selama pandemi dan kebijakan penanganan pandemi yang pro terhadap pengembangan dunia usaha, maka tahun 2021 mulai ada peningkatan nilai investasi.

Apabila target dan realisasi investasi di Kabupaten Banjarnergara dibanding dengan Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah, maka persentase capaian investasi di Kabupaten Banjarnegara dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel II.41.
Realisasi Investasi Provinsi Jawa Tenah Dan Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah Tahun 2023

No	Provinsi/Kabupaten/ Kota	Target 2023 (Juta Rp)	Realisasi s.d (Juta Rp)	Persentase Capaian (%)
	JAWA TENGAH	65.700.000,00	56.126.397.69	85,43
1	**Kabupaten Banjarnegara**	**600.000,00**	**519.279,48**	**86,55**
2	Kabupaten Banyumas	1.000.000,00	1.234.921,40	123,49
3	Kabupaten Batang	9.000.000,00	4.557.641,29	50,64

4	Kabupaten Blora	80.000,00	139.746,72	174,68
5	Kabupaten Boyolali	2.300.000,00	1.227.856,98	53,39
6	Kabupaten Brebes	1.800.000,00	1.348.417,37	74.91
7	Kabupaten Cilacap	850.000,00	1.800.848,20	211,86
8	Kabupaten Demak	3.200.000,00	3.512.084,67	109,75
9	Kabupaten Grobogan	800.000,00	612.604,86	76.58
10	Kabupaten Jepara	7.000.000	1.752.976,47	25,04
11	Kabupaten Karanganyar	1.250.000,00	1.325.383,73	106,03
12	Kabupaten Kebumen	150.000,00	263.238,71	175,49
13	Kabupaten Kendal	5.800.000,00	6.398.934,15	110,33
14	Kabupaten Klaten	2.500.000,00	3.329.362,98	133,17
15	Kabupaten Kudus	800.000,00	1.694.670,44	211.83
16	Kabupaten Magelang	1.000.000,00	1.184.218,48	118,42
17	Kabupaten Pati	1.800.000,00	708.553,56	39,36
18	Kabupaten Pekalongan	250.000,00	1.590.209,94	636,08
19	Kabupaten Pemalang	1.000.000,00	1.415.739,58	141,57
20	Kabupaten Purbalingga	600.000,00	312.316,21	52,05
21	Kabupaten Purworejo	100.000,00	139.204,70	139,20
22	Kabupaten Rembang	1.100.000,00	396.204,20	36,02
23	Kabupaten Semarang	3.000.000,00	3.112.797,00	103.76
24	Kabupaten Sragen	900.000,00	699.851,72	77.76
25	Kabupaten Sukoharjo	2.000.000,00	1.460.604,48	73,03
26	Kabupaten Tegal	1.600.000,00	1.883.964,02	117,75
27	Kabupaten Temanggung	500.000,00	301.820,79	60,36
28	Kabupaten Wonogiri	350.000,00	124.257,31	25,50
29	Kabupaten Wonosobo	200.000,00	295.382,39	147,69
30	Kota Magelang	150.000,00	242.069,44	161,38
31	Kota Pekalongan	110.000,00	536.720,89	487,93
32	Kota Salatiga	1.500.000,00	593.922,65	39,59
33	Kota Semarang	11.660.000,00	10.244.110,80	87,86
34	Kota Surakarta	600.000,00	917.758,93	152.96
35	Kota Tegal	150.000,00	251.823,14	167,88

Sumber : Data Disnaker PMPTSP Kabupaten Banjarnegara, 2024

Adapun sumbangan investasi di Kabupaten Banjarnegara sebesar Rp. 837.473.768.941 terhadap realisasi investasi Provinsi Jawa Tengah sebesar 1,49%, dimana seluruh realisasi investasi di Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 56.129.397.690.000,00.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian indikator adalah sebagai berikut:

a. terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan usaha kecil menengah melalui kegiatan temu kemitraan.
b. potensi sumber daya yang terkait dengan investasi.
c. promosi investasi melalui website dan media sosial.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator adalah:

a. pelaku usaha lebih memilih berinvestasi di kawasan aglomerasi perkotaan sehingga realisasi investor masih timpang antara kawasan Aglomerasi Perkotaan dan Non Aglomerasi Perkotaan.
b. belum efektifnya kegiatan promosi dan kerjasama yang dilakukan Disnaker PMPTSP sebagai upaya menarik minat calon investor baik tingkat lokal, domestik, maupun mancanegara guna meningkatkan investasi.
c. proyek-proyek investasi yang ada belum dipromosikan secara optimal.
d. Belum optimalnya sarpras, seperti jalan, serta mahalnya harga tanah.

Strategi yang telah ditempuh dalam rangka meminimalisasi hambatan dalam pencapaian indikator sebagai berikut:

a. Penysunan Naskah Akademik (NA) tentang Pemberian Intensif dan kemudahan berusaha di darah
b. Menetapkan Perda Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah untuk memberi kemudiahan berinvestasi;
c. Intensifikasi promosi investasi melalui media cetak (leaflet, booklet, majalah, dan koran), elektronik (website dan media sosial), investor gathering dan pameran.
d. Menyediakan peta potensi investasi (SIMPETIN),
e. Penyusunan FS (Feasibility Study/Studi kelayakan),
f. Mendorong perusahaan besar untuk bermitra dengan UMKM,
g. Pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (OSS RBA) melalui n ruang Mall Pelayanan Publik (MPP),
h. Mengoptimalkan aplikasi lokal (JITU),
i. Sosialisasi/Bimtek perizinan berusaha berbasis elektronik (OSS RBA) dan LKPM,
j. Penyelenggaraan forum bisnis investasi, Penyusunan dokumen PKS penyelenggaraan penanamn modal dengan kabupaten eks Karesidenan Banyumas ditambah dengan kab Purworejo, Temanggung dan Wonosobo.

Sasaran 7	:	Meningkatnya Kesempatan Kerja

Hasil pengukuran capaian kinerja Sasaran 7 “Meningkatnya Kesempatan Kerja” dengan 1 (satu) indikator kinerja sebagaimana berikut :

Tabel II.42.
Capaian Indikator Kinerja Sasaran 7 Tahun 2023

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Keterangan
		Target	Realisasi	Capaian (%)	
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	<5	6,26	74,8	Sedang

Capaian indikator kinerja Sasaran 7, yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2023 dari target <5% terealisasi 6,26% dengan capaian kinerja 74,8% ditampilkan dalam tabel diatas.

Adapun capaian indikator kinerja Sasaran 7 pada tahun 2023 apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel II.43.
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 7
Tahun 2023 dengan Tahun 2022

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Keterangan
		2022	2023	Tingkat Kemajuan (%)	
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,38	6,26	1,88	Meningkat

Hasil pengukuran tingkat kemajuan indikator kinerja Sasaran 7 yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka apabila diperbandingkan antara realisasi indikator kinerja tahun 2023 sebesar 6,26% dengan realisasi tahun 2022 maka sebesar 6,38% capaian indikator kinerja Sasaran 7 meningkat.

Sedangkan apabila capain indikator kinerja Sasaran 7 tahun 2023 apabila dibandingkan dengan target tahun terakhir Rencana Pembangunan Daerah atau tahun 2026, maka dapat ditampilkan sebagaimana tabel berikut :

Tabel II.44.
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 7
Tahun 2023 dengan Target Akhir RPD Tahun 2026

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Keterangan
		2023	Target akhir RPD Tahun 2026	Capaian (%)	
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,26	<4,25	52,71	Belum Tercapai

Capaian indikator kinerja Sasaran 7 Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun 2023 sebesar 6,23% apabila dibandingkan dengan dari target akhir tahun RPD tahun 2026 sebesar <4,25%, maka realisasi kinerja telah tercapai 52,71% dari target yang ditetapkan atau belum tercapai.

Tingkat pengangguran terbuka menggambarkan perbandingan antara jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Tahun 2023 Kabupaten Banjarnegara mengalami peningkatan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari target < 5 % terealisasi 6,26 % atau capaian kinerjanya 74,8 %. Angka Pengangguran Terbuka tahun 2023 sebesar 36.549 orang meningkat 30.301 orang dari tahun 2022 sebesar 33.248 orang. Sedangkan Angkatan kerja tahun 2023 sejumlah 583.820 orang meningkat sejumlah 62.858 orang dari tahun 2022 sejumlah 520.962 orang.

Adapun upaya yang telah dilakukan dalam rangka mengurangi tingkat pengangguran terbuka adalah sebagai sebagai berikut :

1. Adanya kerjasama dengan perusahaan yang memiliki lowongan kerja;
2. Semakin banyaknya publikasi lowongan kerja melalui media online yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat;
3. Adanya perbaikan tata kelola program penanganan tingkat pengangguran terbuka;
4. Adanya komunikasi, kemitraan, publikasi dengan stakeholder melalui optimalisasi sarana dan prasarana serta teknologi informasi.
5. Kerja sama dengan lembaga pelatihan atau balai latihan kerja pusat, provinsi dan swasta

Apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, realisasi (capaian) indikator kinerja diperoleh gambaran sebagai berikut :

Grafik II.13.
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2018 – 2023

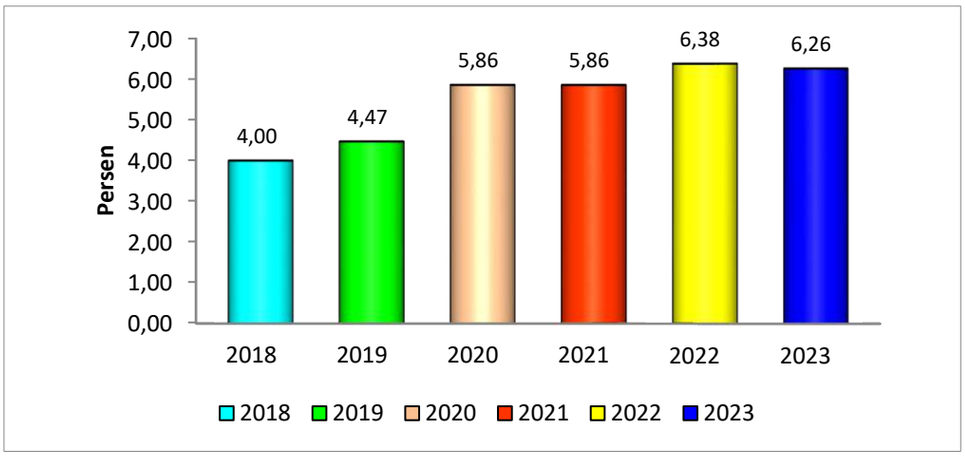

Sumber : Data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2024

Secara kuantitatif, capaian indikator kinerja cenderung fluktuatif, dimana dalam kurun waktu tahun 2018 – 2022 tingkat pengangguran terbuka mengalami penigkatan, namun tahun 2023 terjadi penurunan tingkat pengangguran terbuka yang sebesar 0,12 %.

Apabila dibandingkan target RPD tahun 2026 capaian kinerjanya sebesar 52,71 %. Pencapaian ini mengindikasikan trend negatif terhadap upaya untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka, sehingga program kegiatan yang berkaitan langsung dalam upaya penurunan tingkat pengangguran terbuka harus terus didukung dengan kebijakan disemua lini.

Apabila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Grafik II.14.
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka
Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional
Tahun 2018 – 2023

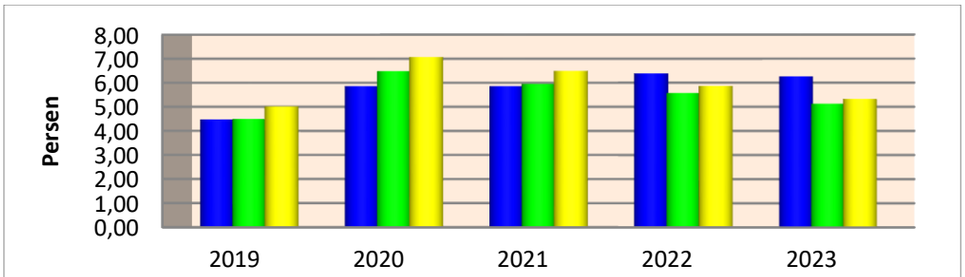

	2019	2020	2021	2022	2023
Banjarnegara	4,47	5,86	5,86	6,38	6,26
Jawa Tengah	4,49	6,48	5,95	5,57	5,13
Nasional	5,01	7,07	6,49	5,86	5,32

Sumber : Data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2024

Grafik II.15.
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah Tahun 2023

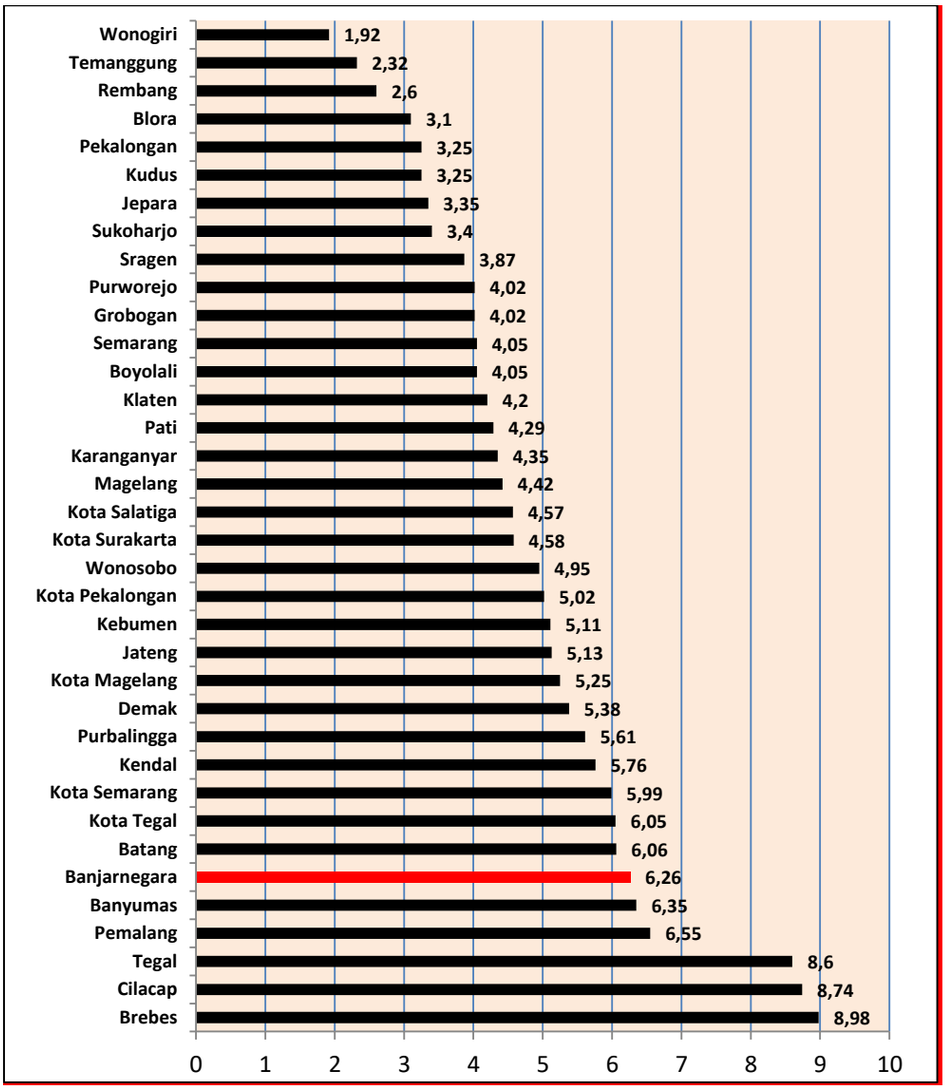

Sumber : Data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2024

Dari Grafik diatas dapat dilihat bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Banjarnegara tahun 2023 diatas TPT tingkat Provinsi Jawa Tengah dan TPT Nasional. Apabila dibandingkan dengan Nasional maka tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Banjarnegara lebih tinggi 0,94%, dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tenggah maka Kabupaten Banjarnegara lebih tinggi 1,13%. Apabila TPT Kabupaten Banjarnegara dibandingkan dengan Kabupaten/Kota se Jawa Tengah, maka TPT Kabupaten Banjarnegara masih relatif tinggi.

Menurunnya tingkat pengangguran terbuka ini tidak terlepas dari faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka antara lain:

a. membaiknya ekonomi masyarakat pada masa pemulihan pandemi COVID-19 yang berakibat pada penyerapan tenaga kerja baik formal dan informal yang meningkat;
b. pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja baik oleh Balai Latihan Kerja dan Lembaga Pelatihan Swasta berbasis kompetensi, sehingga kurikulum yang diajarkan sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan untuk wirausaha mandiri atau bekerja di dunia industri;
c. fasilitasi layanan penempatan kerja, dari job canvasing, penyediaan informasi lowongan kerja, fasilitasi rekruitmen tenaga kerja, pendampingan Bursa Kerja Khusus untuk memudahkan calon tenaga kerja mendapatkan pekerjaan;
d. koordinasi Tripartit, deteksi dini, layanan mediasi hubungan industrial yang diberikan meminimalkan kejadian perselisihan hubungan industrial dan Pemutusan Hubungan Kerja.

Seiring dengan penurunan tingkat pengangguran terbuka, masih terdapat kendala yang dihadapi antara lain:

a. sebagian kualitas dan daya saing calon tenaga kerja belum sesuai kebutuhan pasar kerja;
b. karakter calon tenaga kerja yang terlalu memilih jenis pekerjaan;
c. masih berkembangnya “local minded” pada sebagian pencari kerja, sehingga kurang tertarik untuk bekerja di luar daerah

Alternatif solusi yang terus diupayakan antara lain:

a. memperluas cakupan penyelenggaraan pelatihan yang dilaksanakan oleh BLK dan kerjasama dengan LPK Swasta;
b. melakukan pendampingan peserta pasca pelatihan;
c. menjalin koordinasi dan kerjasama lintas perangkat daerah;
d. melakukan pendampingan dan monitoring peserta pasca pelatihan dan pembentukan Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dan Dunia Industri;
e. melakukan job canvasing dalam rangka memperluas penempatan kerja;
f. menentukan kriteria pekerja kegiatan padat karya sehingga upah harian tepat sasaran; dan
g. melakukan pembinaan dan deteksi dini perselisihan hubungan industrial.

Sasaran 8	:	Meningkatnya Pemerataan Pembangunan

Hasil pengukuran capaian kinerja Sasaran 8 “Meningkatnya Pemerataan Pembangunan” dengan 2 (dua) indikator kinerja sebagaimana berikut :

Tabel II.45.
Capaian Indikator Kinerja Sasaran 8 Tahun 2023

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Keterangan
		Target	Realisasi	Capaian (%)	
Indeks Gini	Angka	0,36	0,376	95,56	Sangat Tinggi
Indeks Ketimpangan Williamson	Angka	0,42	0,6*	57,14	Rendah
Rata-rata Capaian Kinerja				76,35	Tinggi

**Capaian tahun 2022*

Capaian indikator kinerja Sasaran 8, yaitu Indeks Gini tahun 2023 dari target 0,36 terealisasi 0,376 dengan capaian kinerja 95,56%, sedangkan capaian indikator Ketimpangan Williamson tahun 2023 target 0,42 teralisasi 0,6 (2022) dengan capaian kinerja 57,14%, Adapun rata-rata capaian kinerja Sasaran 8 sebesar 76,35 % atau kategori tinggi seperti ditampilkan dalam tabel diatas.

Adapun capaian indikator kinerja Sasaran 8 pada tahun 2023 apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel II.46.
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 8
Tahun 2023 dengan Tahun 2022

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Keterangan
		2022	2023	Tingkat Kemajuan (%)	
Indeks Gini	Angka	0,365	0,376	3,01	menurun
Indeks Ketimpangan Williamson	Angka	0,6	0,6*	0	sama

Hasil pengukuran tingkat kemajuan indikator kinerja Sasaran 8 yaitu Indeks Gini apabila diperbandingkan antara realisasi indikator kinerja tahun 2023 sebesar 0,375 dengan 2022 sebesar 0,365, maka capaian indikator kinerja Indeks Gini mengalami penurunan sebesar 3,01%. Sedangkan Indikator Indeks Ketimpangan Williamson apabila diperbandingan antara realisasi tahun 2023 dibandingan realisasi 2022 tingkat kemajuannya sama.

Capain indikator kinerja Sasaran 8 tahun 2023 apabila dibandingkan dengan target tahun terakhir Rencana Pembangunan Daerah atau tahun 2026, maka dapat ditampilkan sebagaimana tabel berikut :

Tabel II.47.
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 8
Tahun 2023 dengan Target Akhir RPD Tahun 2026

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Keterangan
		2023	Target akhir RPD Tahun 2026	Capaian (%)	
Indeks Gini	Angka	0,376	0,35	92,57	Belum Tercapai
Indeks Ketimpangan Williamson	Angka	0,6*	0,35	28,57	Belum Tercapai

**Capaian tahun 2022*

Capaian indikator kinerja Sasaran 8 Persentase Indeks Gini pada tahun 2023 apabila dibandingkan dengan dari target akhir tahun RPD tahun 2026, maka capaian kinerja telah tercapai 92,57%, sedangkan indikator Indeks Ketimpangan Williamson apabila dibandingkan dengan dari target akhir tahun RPD tahun 2026 maka capaian kinerjanya baru mencapai 28,57% atau target kinerja yang telah ditetapkan belum tercapai.

Indeks Gini merupakan tolok ukur untuk menghitung tingkat pemerataan pendapatan dengan kriteria G<0,30 berati ketimpangan rendah; 030≤G≤0,50 berarti ketimpangan sedang dan G>0,50 berarti ketimpangan tinggi. Nilai Indeks Gini berkisar 0 hingga 1. Jika mendekati 1 maka ketimpangan pendapatan penduduk makin lebar. Jika mendekati 0, maka distribusi pendapatan makin merata. Realisasi Indeks Gini tersebut menunjukkan tingkat pemerataan pendapatan

masyarakat Kabupaten Banjarnegara berada pada kriteria ketimpangan sedang/moderat.

Angka realisasi Indeks Gini atau Gini Ratio 2023 Kabupaten Banjarnegara yang dipublikasi oleh Badan Pusat Statistik Jawa Tengah tanggal 26 Januari 2024 sebesar 0,376 dari target tahun 2023 sebesar 0,36 sehingga capaiannya adalah sebesar 95%. Realisasi Indeks Gini tersebut mengalami peningkatan sebesar 0,011 poin dibanding dengan Indeks Gini tahun 2022 sebesar 0,365. Hal ini menunjukkan naiknya ketimpangan pendapatan penduduk di Kabupaten Banjarnegara.

Capaian ini dibawah capaian Indiks Gini Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 sebesar 0,369 atau baik 0,007 poin, namun penurunan ketimpangan pendapatan penduduk di Kabupaten Banjarnegraa ini masih lebih rendah 0,012 poin dibandingkan dengan Indeks Gini Nasional sebesar 0,388 pada Maret 2023 (BPS :17 Juli 2023). Realisasi indikator kinerja Sasaran 8 Kabupaten Banjarnegara dibandingkan terhadap kinerja nasional dan Provinssi Jawa Tengah disajikan dalam grafik berikut ini:

Grafik II.16.
Indeks Gini Kabupaten Banjarnegara,
Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021 - 2023

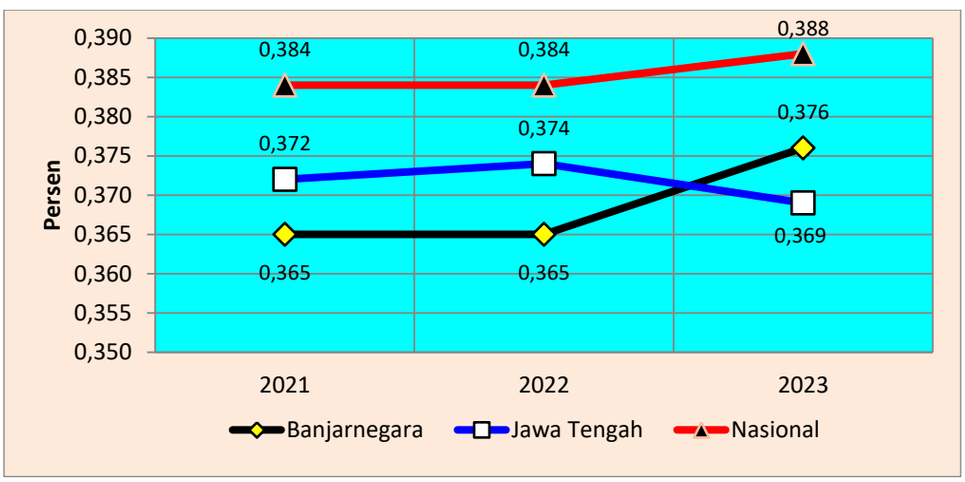

Sumber : Data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2024

Indeks Williamson Merupakan angka ketimpangan pendapatan antar wilayah kecamatan, semakin kecil indeksnya berati semakin bagus karena relatif tidak terlalu jauh perbedaan pendapatan kecamatan. Data diperoleh dari perhitungan dan pengumpulan data melalui pihak ketiga. release paling cepat bulan Mei tahun N+1.

Indeks Williamson Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2022 sebesar 0,6 mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan Indeks Willimsons pada tahun 2021 sebesar 0,565. Hal ini menunjukkan bahwa dampak pandemi Covid-19 menimbulkan peningkatan ketimpangan wilayah di Kabupaten Banjarnegara. Hasil analisis tipologi Klassen dengan menggunakan data tahun 2022 menunjukkan bahwa Kabupaten Banjarnegara merupakan daerah dengan kategori berkembang, yang memiliki tingkat pertumbuhan tinggi tetapi tingkat pendapatan perkapita lebih rendah dibanding rata-rata kabupaten/kota. Ketimpangan meningkat Kembali dimungkinkan karena adanya inflasi tinggi. Untuk mengurangi ketimpangan wilayah maka prioritas pembangunan dan investasi diarahkan pada pengembangan daerah tertinggal melalui perbaikan akses dan infrastruktur yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan ekonomi di wilayah cepat maju dan tumbuh. Kecamatan yang masuk kategori tertinggal yaitu Banjarmangu, Rakit, Pagentan, Wanayasa, Kalibening, dan Pananarum.

Grafik II.17.
Indeks Williamson Kabupaten Banjarnegara
dan Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2018 - 2022

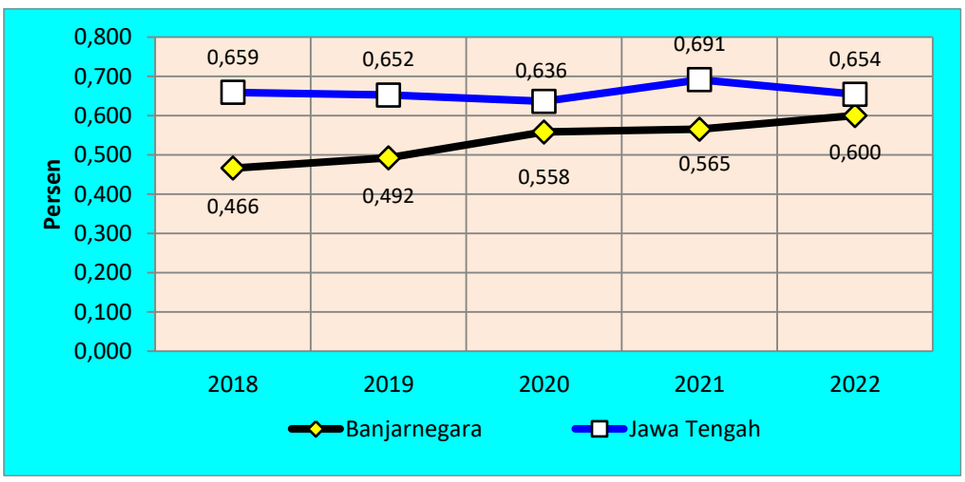

Sumber : Data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2024

Sasaran 9	:	Meningkatnya Stabilitas Harga

Hasil pengukuran capaian kinerja Sasaran 9 “Meningkatnya Stabilitas Harga” dengan 1 (satu) indikator kinerja sebagaimana berikut:

Tabel II.48.
Capaian Indikator Kinerja Sasaran 9 Tahun 2023

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Keterangan
		Target	Realisasi	Capaian (%)	
Laju Inflasi	%	3±1	2,61	113	Sangat Tinggi

Capaian indikator kinerja Sasaran 9, yaitu Laju Inflasi tahun 2023 dari target 3±1% terealisasi 2,61% dengan capaian kinerja 113% ditampilkan dalam tabel diatas.

Adapun capaian indikator kinerja Sasaran 9 pada tahun 2023 apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel II.49.
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 9
Tahun 2023 dengan Tahun 2022

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Keterangan
		2022	2023	Tingkat Kemajuan (%)	
Laju Inflasi	%	6,49	2,61	118,77	Meningkat

Hasil pengukuran tingkat kemajuan indikator kinerja Sasaran 9 yaitu Laju Inflasi apabila diperbandingkan antara capaian indikator kinerja tahun 2023 sebesar 2,61% dengan 2022 sebesar 6,49% maka capaian indikator kinerja Sasaran 9 meningkat sebesar 59,78%.

Sedangkan apabila capain indikator kinerja Sasaran 9 tahun 2023 apabila dibandingkan dengan target tahun terakhir Rencana Pembangunan Daerah atau tahun 2026, maka dapat ditampilkan sebagaimana tabel berikut :

Tabel II.50.
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 9
Tahun 2023 dengan Target Akhir RPD Tahun 2026

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Keterangan
		2023	Target akhir RPD Tahun 2026	Capaian (%)	
Laju Inflasi	%	2,61	3±1	113%	Tercapai

Capaian indikator kinerja Sasaran 9 Laju Inflasi pada tahun 2023 apabila dibandingkan dengan dari target akhir tahun RPD tahun 2026, maka realisasi kinerja telah tercapai 113% dari target yang ditetapkan atau sudah tercapai.

Inflasi mengambil data Purwokerto sebagai sister city penghitungan inflasi, maka ditetapkan Inflasi di Kabupaten Banjarnegara tahun 2023 sebesar 2,61%. Dilihat dari target laju inflasi yang telah ditetapkan pada tahun 2023 sebesar 3±1% terealisasi 2,61%, maka capaian kinerja sasaran 9 sebesar 113% atau kategori sangat tinggi.

Sedangkan Inflasi tahun 2023 sebesar 2,61% apabila dibandingkan dengan inflasi tahun 2022 sebesar 6,49% (yoy), maka capaian kinerja sasaran 9 mengalami peningkatan sebesar 118,77% berdasarkan data yang dirilis BPS Jawa Tengah tanggal 2 Januari 2024. Sedangkan inflasi tahun 2023 tingkat Nasional 2,61% turun dari tahun 2022 sebesar 5,51% (yoy) dan tingkat Propinsi Jawa Tengah sebesar 2,89% turun tahun 2022 sebesar 5,63 % (yoy). Inflasi tinggi sama-sama dialami oleh inflasi Tingkat Nasional dan Tingkat Propinsi yang dipicu oleh inflasi global karena mengingkatnya harga-harga energi global.

Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Banyumas yang telah dirilis 3 Januari 2024 berkaitan inflasi menurut Kelompok Pengeluaran di Purwokerto ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel II.51.
Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran (YoY) Tahun 2023

Kelompok Pengeluaran(2018)	Tingkat Inflasi Tahun ke Tahun (%)	Andil Inflasi Tahun ke Tahun (%)
Umum	2.61	2.61
Makanan, Minuman dan Tembakau	7.19	2.06
Pakaian dan Alas Kaki	0.99	0.05
Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Lainnya	0.09	0.01
Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	0.51	0.03
Kesehatan	2.13	0.06
Transportasi	0.64	0.09
Informasi, komunikasi, dan Jasa Keuangan	0.18	0.01
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	-1.19	-0.03
Pendidikan	1.04	0.05
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	0.70	0.06
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	3.39	0.20

Inflasi terjadi karena adanya kenaikan indeks harga pada beberapa kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,34 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,05 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,03 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,04 persen; kelompok transportasi sebesar 0,18 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,07 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,64 persen. Kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga menjadi satu-satunya kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi yaitu sebesar 0,05 persen. Sedangkan 3 kelompok pengeluaran lainnya tidak mengalami inflasi/deflasi, yaitu kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya; kelompok pendidikan; dan kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran.

Penyebab utama inflasi di Kota Purwokerto pada bulan Desember 2023 adalah kenaikan harga bawang merah, tarif kereta api, emas perhiasan, gula pasir, bawang putih, cabai merah, minyak goreng, sawi putih/pecay/pitsai, daun bawang, angkutan antar kota, tomat, jeruk, biaya pulsa ponsel, sabun mandi cair, dan pembalut wanita. Sedangkan komoditas yang menahan inflasi Kota purwokerto yaitu

cabai rawit, daging ayam ras, bahan bakar rumah tangga, tarif kendaraan roda 2 online, dan bensin.

Beberapa upaya penangan inflasi di Kabupaten Banyumas dalam rangka ketahanan pangan yaitu :

1) Bantuan pangan kepada KPM (Kelompok Penerima Manfaat)
2) Yaitu keluarga yang termasuk dalam data kategori kurang/miskin) berupa beras, daging ayam dan telur di Kabupaten Banjarnegara yang sudah disalurkan.
3) Melibatkan berbagai stakeholder dalam penyaluran bantuan, yaitu
   a. Dinas Pertanian berperan membantu mengkoordinasikan dan monitoring pelaksanaan penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat penerima;
   b. Bulog : menyiapkan beras untuk disalurkan kepada CPM sesuai dengan jumlah dan kualitas yang ditugaskan dari Kepala Bapanas;
   c. Transporter : bertugas melaksanakan pengiriman beras sampai dengan titik bagi di desa/kelurahan sesuai dengan jadwal yang sudah direncanakan;
   d. Dinas Sosial PPA : membantu verifikasi data CPM sehingga tidak ada CPM yang terlewat;
   e. Kodim dan Polres membantu pengamanan dilapang pada saat penyaluran bantuan pangan ke masyarakat;
   f. Kepala Bagian Perekonomian membantu mengkoordinasikan pelaksanaan penyaluran bantuan pangan;
   g. Camat : melaksanakan koordinasi dan verifikasi data CPM di tingkat kecamatan masing-masing
   h. Kepala Desa/Lurah : melaksanakan koordinasi dan verifikasi data CPM di tingkat Desa/Kelurahan masing-masing, sehingga jelas dan clear By Name By Address calon penerima kegiatan tersebut.
   i. Koordinator BPP melaksanakan monitoring dan koordinasi agar penyaluran beras berjalan lancar dan sesuai dengan target dan sasaran yang telah ditentukan.
4) Pelaksanaan gerakan tanam cabai kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan cabai dimayarakat.

5) Menyelenggarakan pasar ramadhan, gerakan pangan murah, pasar tani, operasi pasar buloq di pasar 20 kecamatan untuk komoditas beras ditambah minyak goreng dan gula pasir.

Adapun perkembangan laju inflasi kalender Kota Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional mulai tahun 2018 sampai dengan 2023 terlihat pada grafik berikut:

Grafik II.18.
Inflasi Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2023

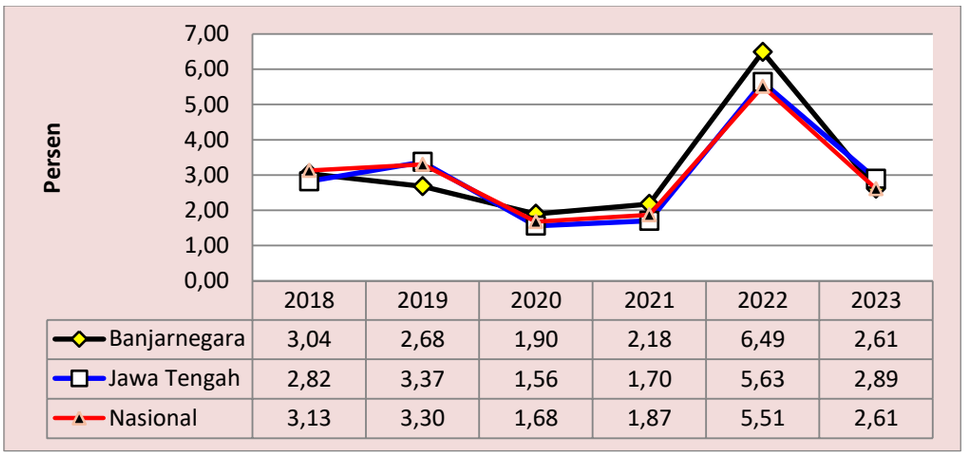

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Banjarnegara	3,04	2,68	1,90	2,18	6,49	2,61
Jawa Tengah	2,82	3,37	1,56	1,70	5,63	2,89
Nasional	3,13	3,30	1,68	1,87	5,51	2,61

Sumber : Data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2024

Sasaran 10	**:**	**Meningkatnya Daya Saing Daerah**

Hasil pengukuran capaian kinerja Sasaran 10 “Meningkatnya Daya Saing Daerah” dengan 1 (satu) indikator kinerja sebagaimana berikut :

Tabel II.52.
Capaian Indikator Kinerja Sasaran 10 Tahun 2023

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Keterangan
		Target	Realisasi	Capaian (%)	
Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3	3,05	101,67	Sangat Tinggi

Capaian indikator kinerja Sasaran 10, yaitu Indeks Daya Saing Daerah tahun 2023 dari target 3 terealisasi 3,05% dengan capaian kinerja 101,67% ditampilkan dalam tabel diatas.

Adapun capaian indikator kinerja Sasaran 10 pada tahun 2023 apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel II.53.
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 10
Tahun 2023 dengan Tahun 2022

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Keterangan
		2022	2023	Tingkat Kemajuan (%)	
Indeks Daya Saing Daerah	Angka	2,83	3,05	7,77	Meningkat

Hasil pengukuran tingkat kemajauan indikator kinerja Sasaran 10 yaitu Indeks Daya Saing Daerah apabila diperbandingkan antara realisasi indikator kinerja tahun 2023 sebesar 3,05 dengan 2022 sebesar 2,83 maka capaian indikator kinerja Sasaran 10 meningkat sebesar 7,77%.

Sedangkan apabila capain indikator kinerja Sasaran 10 tahun 2023 apabila dibandingkan dengan target tahun terakhir Rencana Pembangunan Daerah atau tahun 2026, maka dapat ditampilkan sebagaimana tabel berikut :

Tabel II.54.
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 10
Tahun 2023 dengan Target Akhir RPD Tahun 2026

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Keterangan
		2023	Target akhir RPD Tahun 2026	Capaian (%)	
Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3,05	3,30	92,42%	Tercapai

Capaian indikator kinerja Sasaran 10 Laju Inflasi pada tahun 2023 apabila dibandingkan dengan dari target akhir tahun RPD tahun 2026, maka realisasi kinerja telah tercapai 92,42% dari target yang ditetapkan atau belum tercapai.

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk dapatmerefleksikan tingkat produktivitas daerah. Pengukuran pada IDSD 2023 ini mengadopsi kerangka konseptualyang sama

dengan *Global Competitiveness Index (GCI)* dari *World Economic Forumatau WEF (Schwab, 2019).*

IDSD 2023 terdiri dari empat komponen pembentuk daya saing yang diterjemahkan ke dalam 12 pilar daya saing seperti pada gambar di bawah ini.Kerangka ini secara umum tidak ada perubahan dengan IDSD 2022. Setiap pilar daya saing diukur dengan menggunakan indikator pembentuk daya saing. Indikator-indikator ini diklasterisasi berdasarkan dimensi tertentu yang sifatnya hanya sebagai pengelompokkan konseptual dan tidak dipertimbangkan dalam penghitungan indeks. Komponen dan pilar dalam IDSD adalah sebagai berikut :

1. Komponen Lingkungan Pendukung, meliputi 4 (empat) pilar, yaitu :
   a. Intitusi yang mengukur seberapa jauh iklim sosial, politik, hukum dan aspek kemanan mempengaruhi secara positif aktivitas perekonomian daerah.
   b. Infrastruktur yang dapat mendukung aktivitas perekonomian daerah yang bernilai tambah.
   c. Adopsi TIK yang merupakan faktor determinan kemajuan Industri 4.0.
   d. Stabilitas ekonomi makro yang meliputi penciptaan nilai tambah, akumulasi kapital, tingkat konsumsi, kinerja perekonomian, serta tingkat biaya hidup
2. Komponen Sumber Daya Manusia, meliputi 2 (dua) pilar, yaitu :
   a. Pasar produk yang mendorong efisiensi di dalam sistem produksi.
   b. Pasar tenaga kerja yang mampu menekan angka pengangguran dengan merangsang terciptanya kesempatan kerja.
   c. Sistem keuangan yang merefleksikan kemampuan sistem finansial perbankan dan non-perbankan di daerah untuk memediasi aktivitas perekonomian.
   d. Ukuran pasar yang menguatkan struktur industri dalam menghasilkan nilai tambah hasil dari perkembangan iptek.
3. Komponen Pasar, meliputi 4 (empat) pilar, yaitu :
   a. Kesehatan yang merepresentasikan kualitas hidup manusia yang diukur dari angka harapan hidup.

b. Keterampilan yang erat keterkaitannya dengan penciptaan tenaga kerja produktif yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha.

4. Komponen Ekosistem Inovasi, meliputi 2 (dua) pilar, yaitu :
   a. Dinamisme bisnis yang menggambarkan kemudahan entitas bisnis memulai usaha untuk penciptaan dan perluasan lapangan kerja.
   b. Kapabilitas inovasi yang mengukur kemampuan daerah dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penerapannya dalam aktivitas ekonomi bernilai tambah.

Tabel II.55.
Skor IDSD Kab. Banjarnegara Tahun 2023

Komponen	Pilar	Skor
I. Lingkungan Pendukung	1. Intitusi	4,38
	2. Infrastruktur	1,79
	2. Adopsi TIK	4,25
	3. Stabilitas ekonomi makro	3,01
II. Sumber Daya Manusia	1. Pasar produk	4,18
	2. Pasar tenaga kerja	3,01
	3. Sistem keuangan	2,84
	4. Ukuran pasar	2,74
III. Komponen Pasar	1. Kesehatan	2,03
	2. Keterampilan	4,32
IV. Ekosistem Inovasi	1. Dinamisme bisnis	2,72
	5. Kapabilitas inovasi	1,35
	SKOR IDSD	**3,05**

Sumber : Data Brin

Tabel II.56.
Skor IDSD Kab. Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2023

Komponen	Pilar	Banjarnegara	Jawa Tengah	Nasional
I. Lingkungan Pendukung	1. Intitusi	4,38	4,49	4,30
	2. Infrastruktur	1,79	4,14	2,71
	3. Adopsi TIK	4,25	3,80	3,58
	4. Stabilitas ekonomi makro	3,01	3,63	3,54
II. Sumber	1. Pasar produk	4,18	4,14	3,79

Komponen	Pilar	Banjarnegara	Jawa Tengah	Nasional
Daya Manusia	2. Pasar tenaga kerja	3,01	3,52	3,77
	3. Sistem keuangan	2,84	2,15	2,64
	4. Ukuran pasar	2,74	3,39	3,85
III. Komponen Pasar	1. Kesehatan	2,03	3,44	2,53
	2. Keterampilan	4,32	5,00	4,36
IV. Ekosistem Inovasi	1. Dinamisme bisnis	2,72	4,47	3,22
	2. Kapabilitas inovasi	1,35	4,51	3,03
	SKOR IDSD	**3,05**	**3,89**	**3,44**

Sumber : Data Brin

Tujuan 4	**:**	**Meningkatnya Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan**

Sasaran 11	**:**	**Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Meliputi Kualitas Udara, Kualitas Air Sungai, dan Tutupan Lahan**

Untuk mencapai tujuan 4 Meningkatnya Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan dan Sasaran 11 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Meliputi Kualitas Udara, Kualitas Air Sungai, dan Tutupan Lahan, diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Adapun pencapaian target dari indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel II.57.
Capaian Indikator Kinerja Tujuan 4 dan Sasaran 11 Tahun 2023

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Keterangan
		Target	Realisasi	Capaian (%)	
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	67,5	61,52	91,14	Sangat Tinngi

Hasil pengukuran indikator kinerja Tujuan 4 dan Sasaran 11 ditargetkan 67,5 realisasi 61,52 dengan capaian kinerja 91,14%, kategori sangat tinggi ditampilkan dalam tabel diatas.

Adapun capaian indikator kinerja Tujuan 2 dan Sasaran 3 pada tahun 2023 apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel II.58.
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tujuan 4 dan Sasaran 11 Tahun 2023 dengan Tahun 2022

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Keterangan
		2022	2023	Tingkat Kemajuan (%)	
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	64,08	61,52	4%	Menurun

Hasil pengukuran tingkat kemajuan indikator kinerja Tujuan 4 dan Sasaran 11 yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup apabila diperbandingkan antara realisasi indikator kinerja tahun 2023 sebesar 61,52 dengan realisasi 2022 sebesar 64,08 maka capaian indikator kinerja Tujuan 4 dan Sasaran 11 menurun sebesar 4%.

Sedangkan apabila capaian indikator kinerja Tujuan 4 dan Sasaran 11 tahun 2023 apabila dibandingkan dengan target tahun terakhir Rencana Pembangunan Daerah atau tahun 2026, maka dapat ditampilkan sebagaimana tabel berikut :

Tabel II.59.
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tujuan 4 dan Sasaran 11 Tahun 2023 dengan Target Akhir RPD Tahun 2026

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Keterangan
		2023	Target akhir RPD Tahun 2026	Capaian (%)	
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	61,52	69	89,16	Belum Tercapai

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada tahun 2023 apabila dibandingkan dengan dari target akhir tahun RPD tahun 2026, maka realisasi kinerja belum tercapai, yaitu dengan capaian kinerja 89,16%

Sesuai RPJMN 2020-2024, untuk tingkat Kabupaten/Kota, IKLH dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$IKLH = 0,405\ x\ IKU + 0,376\ x\ IKA + 0,219\ IKL$$

Keterangan:

IKLH : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

IKA : Indeks Kualitas Air IKU : Indeks Kualitas Udara

IKL : Indeks Kualitas Lahan

Kategori nilai IKLH 2020-2024 sebagaimana tabel berikut :

Tabel II.60.
Kategori Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

SKOR	KRITERIA
90 – 100	Sangat Baik
70 – 89,9	Baik
50 – 69,9	Sedang
25 – 49,9	Buruk
0 – 24,9	Sangat Buruk

Penghitungan IKLH dengan menggunakan tiga parameter meliputi Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Tutupan Lahan.

Realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2023 sebesar 61,52 kategori sedang, apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 turun 2,57 poin. Turunnya IKLH disebabkan karena capaian Indeks Kualitas Air (IKA) mengalami penurunan, yaitu dari 52,86 pada tahun 2022 turun menjadi 42,68. Penurunan IKA disebabkan karena terdapat perubahan pareameter penghitungan IKA, yaitu pada tahun 2022 penghitungan IKA menggunakan 6 (enam) parameter, yaitu TSS, DO, BOD, COD, Fosfat, dan pH, sedangkan tahun 2023 penhitngan IKA dihitung berdasarkan pengukuran 9 (sembilan) parameter seperti TSS, DO, BOD, COD, Fosfat, dan pH, NO, Fecal Coli dan Total Coliform, dengan penambahan parameter ini diharapkan pengukuran terhadap air kualitas lebih berkualitas dan akurat.

Selain itu, faktor lain yang menyebabkan turunnya nilai IKA secara drastis yaitu verifikasi data oleh sistem di website IKLH yang tidak mencapai 100% sehingga nilai yang ada saat ini belum sepenuhnya representatif dan masih terdapat badan usaha yang membuang air limbahnya langsung ke sungai.

Penghitungan Indeks Kualitas Air (IKA) telah diatur pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2013 Sedangkan pengukuran kualitas air di Kabupaten Banjarnegara dilakukan pada 8 sungai (Sungai Pekacangan, Sungai Ligung, Sungai Sapi, Sungai Dolog, Sungai Blimbing, Sungai Palet, Sungai Urang, dan Sungai Merawu) dengan menggunakan 36 lokasi titik sampling dan dilakukan secara periodik dua kali setahun agar mendapatkan angka indeks yang mewakili kualitas air Kabupaten Banjarnegara secara keseluruhan.

Capaian Indeks Kualitas Udara (IKU) terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu dari 87,91 tahun 2022 menjadi 89,36 pada tahun 2023 atau naik 1,45 poin masuk kategori baik. Dalam upaya pengendalian pencemaran udara, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup melakukan pemantauan kualitas udara yaitu pemantauan kualitas udara ambien yang mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999, pemantauan kualitas udara melalui metode Passive Sampler dilakukan di 4 titik lokasi tetap yang mewakili wilayah pemukiman, industri, padat lalu lintas dan perkantoran. Dalam satu tahun umumnya dilakukan 2 (dua) kali periode pemantauan dengan durasi pemantauan masing-masing 2 minggu. Secara umum kualitas udara di Kabupaten Banjarnegara utamanya sangat dipengaruhi oleh kegiatan transportasi.

Adapun capaian Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) tahun 2023 sebesar 42,39 mengalami kenaikan dari tahun 2022 yaitu 39,30 kategori rendah. Nilai ini mencerminkan perbandingan luas tutupan vegetasi baik hutan dan non hutan dengan luas wilayah. Nilai tersebut tergolong kategori rendah, disebabkan oleh belum lengkapnya data tutupan vegetasi sehingga perlu adanya penelitian serta perhitungan lebih lanjut sehingga didapatkan nilai yang lebih representatif. Parameter lain yang belum dipertimbangkan antara lain seperti tutupan belukar dan belukar rawa karena hingga saat ini belum tersedia data yang valid dan akurat. Kabupaten Banjarnegara juga mempunyai lahan kritis 8.769,26 Ha, selain lahan kritis Kabupaten Banjarnegara juga sering mengalami erosi lahan. Berdasarkan data Tingkat Bahaya Erosi (TBE) di wilayah Kabupaten Banjarnegara, dapat diketahui bahwa seluruh kecamatan di Banjarnegara mengalami erosi dengan

tingkat sangat ringan, ringan, sedang, berat dan sangat berat dengan persentase tertinggi yaitu erosi ringan sebesar 38,15%.

Realisasi kinerja IKLH, IKA, IKU dan IKTL tahun 2018 sampai dengan 2023 dapat digambarkan sebagai berikut:

Grafik II.19.
Inflasi Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2023

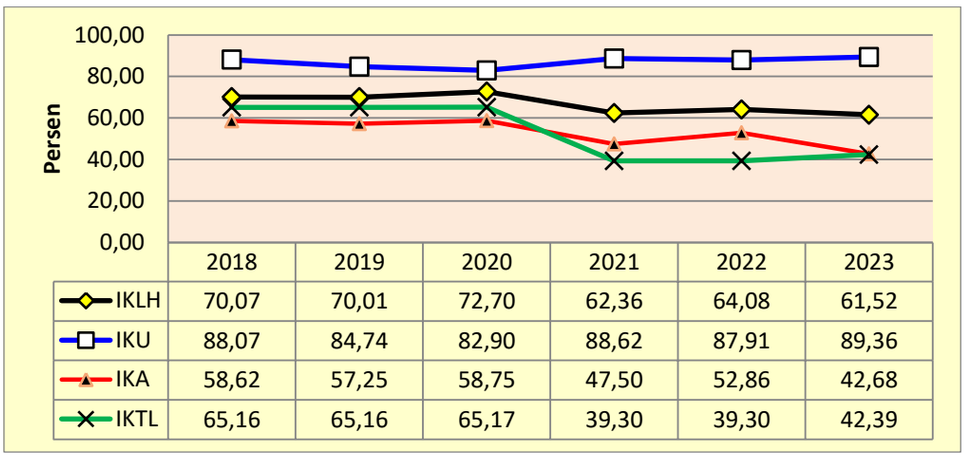

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
IKLH	70,07	70,01	72,70	62,36	64,08	61,52
IKU	88,07	84,74	82,90	88,62	87,91	89,36
IKA	58,62	57,25	58,75	47,50	52,86	42,68
IKTL	65,16	65,16	65,17	39,30	39,30	42,39

Sumber : DPKP LH Kabupaten banjarnegara , 2024

Secara kuantitatif, capaian IKLH Kabupaten Banjarnegara mengalami dalam *trend* fluktuatif, pada kurun waktu tahun 2018 sampai dengan 2020 mengalami peningkatan, kemudian pada tahun 2021 mengalami penurunan yang sangat signifikan tahun 2022 dan turun lagi pada tahun 2023.

Permasalahan/kendala yang dihadapi sebagai berikut :

1. Masih banyak masyarakat/pelaku industri yang membuang sampah maupun air limbah tanpa pengolahan ke sungai sehingga dapat mempengaruhi kualitas air sungai;
2. Dalam penghitungan indeks tutupan lahan, selain data luas hutan, baru tersedia data ruang terbuka hijau dan tutupan lahan di wilayah perkotaan. Perlu dilakukan inventarisasi data tutupan lahan yang ada di luar wilayah perkotaan;
3. Regulasi dibidang lingkungan hidup di Kabupaten Banjarnegara belum lengkap;
4. Perubahan iklim;
5. Menurunnya kualitas udara terutama akibat pertambahan industri dan sarana transportasi kendaraan bermotor, dan aktivitas manusia

seperti pembakaran sampah, asap rokok, dan kegiatan rumah tangga lainnya;

6. Kabupaten Banjarnegara menjadi salah satu daerah rawan bencana alam tanah longsor.

Upaya yang telah dilaksanakan dalam pemecahan masalah terkait dengan Lingkungan Hidup:

1. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), sampai dengan tahun 2023 telah terbangun 858 IPAL Komunal;
2. Pemantauan dan pembinaan terhadap masyarakat serta pelaku industri tentang pengelolaan limbah sampai tahun 2023 melakukan pengawasan terhadap 33 pelaku usaha;
3. Sosialisasi perilaku hidup berseh dan sehat;
4. Memberikan bantuan jamban sehat kepada masyarakat;
5. Melakukan inventarisasi data tutupan lahan/vegetasi yang ada diluar wilayah perkotaan;
6. Menyusun regulasi yang menjadi dasar untuk penegakan hukum di bidang lingkungan hidup;
7. Kegiatan penyuluhan, sosialisasi dan pembinaan terhadap generasi muda melalui wadah saka kalpataru dan pendidikan di sekolah untuk lebih peduli dan berbudaya lingkungan;
8. Pembinaan pada kampung iklim yang berorientasi pada mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
9. Penanaman pohon di kanan kiri ruas jalan atau yang lebih dikenal sebagai turus jalan merupakan salah satu upaya untuk menyerap polutan di udara.
10. Program car free day di pusat kota juga digalakan setiap hari minggu untuk mengurangi polusi udara
11. Perlu adanya pemasangan papan himbauan dan papan peringatan di lokasi yang strategis dengan tujuan menyadarkan masyarakat untuk menjaga keseimbangan lingkungan.
12. Untuk mengatasi masalah tata guna lahan diantaranya sosialisasi penggunaan lahan sesuai peruntukannya, masyarakat diajak untuk memanfaatkan lahan di kemiringan terutama yang lerengnya curam untuk kegiatan konservasi dengan menanam tanaman berakar kuat dan minim pengolahan tanah agar wilayah seperti ini tetap terjaga dari risiko erosi dan longsor.

13. Pembuatan demonstrasi plot (*demplot*) penggunaan lahan sesuai peruntukannya Masyarakat diberikan contoh tentang cara ataupun teknik memanfaatkan lahan di kemiringan terutama yang lerengnya curam untuk kegiatan konservasi dengan menanam tanaman penguat lereng berupa jenis rumput-rumputan sebagai sumber pakan ternak, dan tanaman tahunan yang produktif contohnya Kopi Arabika di Desa Pegundungan Kecamatan Pejawaran.
14. Peninjauan ulang RTRW dan pelaksanaan penghijauan dibeberapa wilayah di Kabupaten Banjarnegara diantaranya penanaman pohon kacang Macadamia di Desa Pegundungan, Kecamatan Pejawaran, penanaman pohon aren di Desa Lebakwangi, Kecamatan Pagedongan, penanaman pohon Albasia di Desa Mojotengah, Kecamatan Banjarmangu.

Misi 3	**:**	**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*) Dalam Kehidupan Politik Yang Demokratis Dan Bertanggung Jawab**

Tujuan 5	**:**	**Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**

Untuk mencapai Tujuan 5 ”Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah”, diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Indeks Reformasi Birokrasi. Adapun pencapaian target dari indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel II.61.
Capaian Indikator Kinerja Tujuan 5 Tahun 2023

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Keterangan
		Target	Realisasi	Capaian (%)	
Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	64	62,41	97,51	Sangat Tinggi

Capaian indikator kinerja Tujuan 5 “Meningkatnya Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah” yaitu indeks Reformasi Birokrasi tahun 2023 sebesar 62,41 dari target 64 dengan capaian kinerja 97,51%, sebagaimana ditampilkan dalam tabel diatas.

Capaian indikator kinerja Tujuan 5 pada tahun 2023 apabila dibandingkan dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel II.62.
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tujuan 5
Tahun 2023 dengan Tahun 2022

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Keterangan
		2022	2023	Tingkat Kemajuan (%)	
Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	61,66	62,41	0,75	Meningkat

Hasil pengukuran tingkat kemajuan indikator kinerja indeks reformasi birokrasit apabila diperbandingkan antara realisasi tahun 2023 sebesar 62,41 dengan realisasi tahun 2022 sebesar 61,66, maka realisasi indikator kinerja Tujuan 5 mengalami kenaikan dari tahun 2022 sebesar 0,75%

Capain indikator kinerja Tujuan 5 tahun 2023 apabila dibandingkan dengan target tahun terakhir Rencana Pembangunan Daerah atau tahun 2026, maka dapat ditampilkan sebagaimana tabel berikut :

Tabel II.63.
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tujuan 5
Tahun 2023 dengan Target Akhir RPD Tahun 2026

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Keterangan
		2023	Target akhir RPD Tahun 2026	Capaian (%)	
Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	62,41	93,15	74,71	Belum tercapai

Capaian indikator kinerja indeks ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat pada tahun 2023 apabila dibandingkan dengan dari target akhir tahun RPD tahun 2026 sebesar 74,71%, maka realisasi kinerja belum tercapai atau masih dibawah target yang telah ditetapkan.

Good governance diartikan sebagai perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik. Wujud dari tata kelola pemerintahan yang baik adalah dengan ditandai adanya pemerintahan yang demokratis.

Pemerintahan yang demokratis merupakan pemerintahan yang bersifat terbuka terhadap kritik dan kontrol sepenuhnya ada pada rakyat. Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dapat dilaksanakan melalui Reformasi Birokrasi. Tata kelola (governance) tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sebagai unsur utama. Dalam rangka perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, dilaksanakan reformasi birokrasi sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati Banjarnegara nomor 061/515 Tahun 2023 tentang Penetapan Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2023-2024 dan tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 dimana Misi ketiga yaitu “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam kehidupan politik yang demokratis dan bertanggung jawab”. Pada tahun 2023 telah dilakukan evaluasi atas implementasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Banjarnegara oleh tim dari Kemenpan dan RB, lebih rinci realisasi capaian indeks reformasi birokrasi adalah sebagai berikut :

Tabel II.64.
Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023

No.	Komponen	Nilai
1.	RB General	57,01
2.	RB Tematik	5,4
	Indeks RB	**62,41**

Sumber : Data Bagian Organisasi Setda Kabupaten Banjarnegara ,2024

Hasil evaluasi atas implementasi Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Banjarnegara mengalami peningkatan pada tahun 2022 sebesar 61,66, di tahun 2023 mengalami kenaikan menjadi sebesar 62,41 pada kategor B.

Adapun hasil evaluasi atas implementasi Reformasi Birokrasi dari tahun 2021 sampai dengan 2023 Kabupaten Banjarnegara mengalami kenaikan yang ditampilkan dalam grafik berikut :

Grafik II.20.
Perkembangan Indek Reformasi Biorkrasi Tahun 2021 - 2023

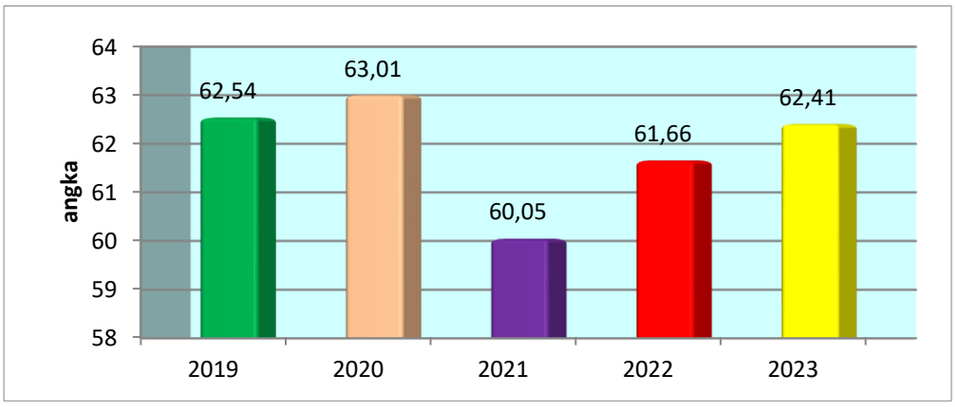

Sumber : Data Bagian Organisasi Setda Kabupaten Banjarnegara ,2024

Adapun capaian hasil evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi Kabupaten/Kota se Jawa Tengah tahun 2023, Kabupaten Banjarnegara ditampilkan sebagai berikut :

Grafik II.21.
Indek Reformasi Biorkrasi Kabupaten/Kota dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 - 2023

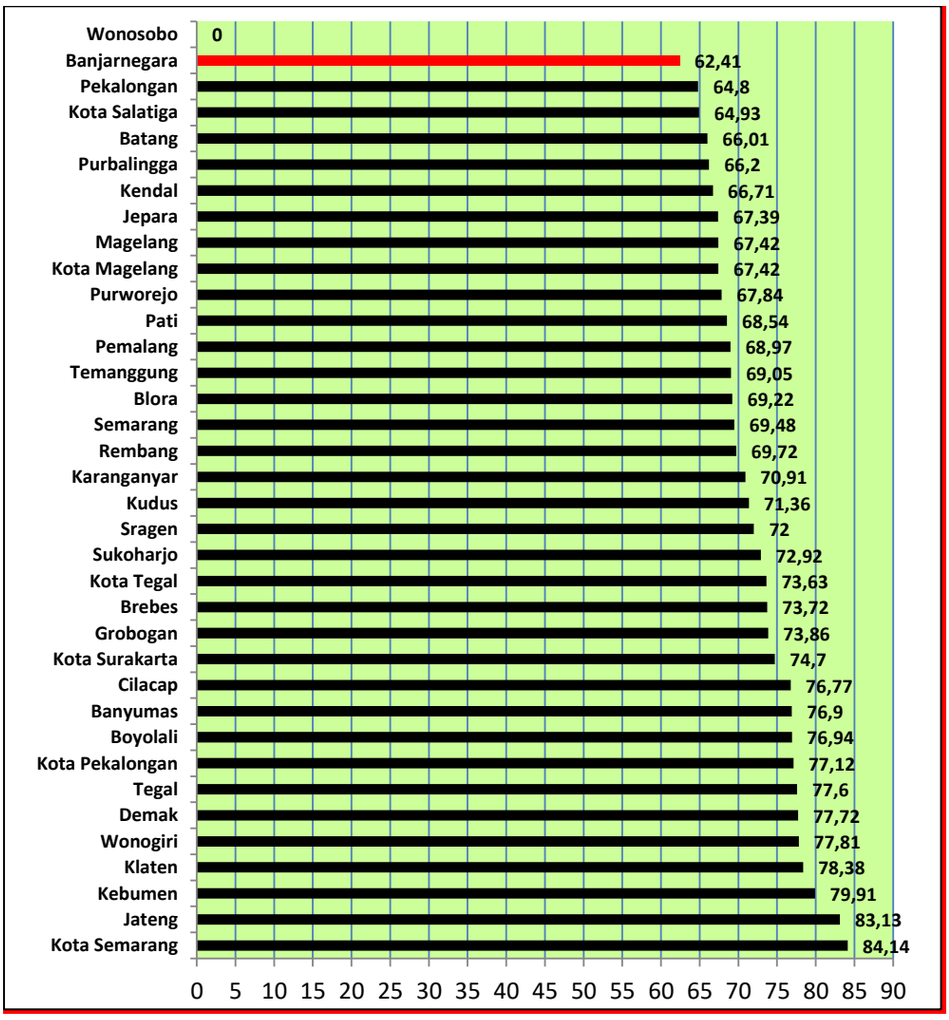

Sumber : Data Biro Organisasi, Setda Provinsi Jawa Tengah, 2024

Pemerintah Kabupaten Banjarnegara telah berkomitmen untuk melaksanakan implementasi reformasi birokrasi sampai dengan perangkat daerah. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur serta mendorong implementasi reformasi birokrasi yang berdampak.

Upaya peningkatan ini tidak lepas dari beberapa faktor pendorong, diantaranya adalah :

1. Adanya komitmen Pejabat Bupati Banjarneagra dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarneagra dengan menetapkan Indeks Reformasi Birokrasi sebagai salah satu Indikator Kinerja Utama pada RPD Kabupaten Banjarnegara;
2. Menyusun Roadmap dan Rencana Aksi RB General dan RB Tematik Tahun 2023-2024 berdasarkan PermenpanRB Nomor 3 Tahun 2023;
3. Membentuk Tim Reformasi Birokrasi General dan Tematik yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banjarnegara nomor 061/516 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi General dan Tematik Tahun 2023 – 2024;
4. Membangun koordinasi antar Perangkat Daerah dalam implementasi RB General dan tematik.

Sasaran 12	**:**	**Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan pemerintahan Daerah**

Hasil pengukuran capaian kinerja Sasaran 12 “Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan pemerintahan Daerah” dengan 2 (dua) indikator kinerja sebagaimana berikut :

Tabel II.65.
Capaian Indikator Kinerja Sasaran 12 Tahun 2023

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Keterangan
		Target	Realisasi	Capaian (%)	
Nilai Sakip	Nilai	B	B	100	Sangat Tinggi
Opini BPK	Opini	WTP	WTP*	100	Sangat Tinggi

Rata – Rata Capaian Kinerja				100	Sangat Tinggi

**Capaian tahun 2022*

Capaian indikator kinerja Sasaran 12, yaitu Nilai SAKIP pada tahun 2023 ditergetkan B terealisasi B dengan capaian kinerja 100% dan Inidikator Opini BPK tahun 2023 ditargetkan WTP tereailsasi WTP (2022) dengan capaian kinerja 100%, ditampilkan dalam tabel diatas.

Adapun capaian indikator kinerja Sasaran 12 pada tahun 2023 apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel II.66.
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 12
Tahun 2023 dengan Tahun 2022

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Keterangan
		2022	2023	Tingkat Kemajuan (%)	
Nilai Sakip	Nilai	B	B	100	Sama
Opini BPK	Opini	WTP	WTP	100	Sama

Hasil pengukuran tingkat kemajuan indikator kinerja Sasaran 12 apabila realisasi kinerja tahun 2023 dan 2022 diperbandingkan, yaitu Nilai SAKIP mendapat predikat B dan Opini BPK mendapat predikat WTP tahun 2023 sedangkan pada tahun 2022 nilai SAKIP mendapat predikat B dan opini BPK mendapat predikat WTP, maka realisasi indikator kinerja Sasaran 12 pada tahun 2023 dan 2022 sama.

Sedangkan apabila capain indikator kinerja Sasaran 12 tahun 2023 apabila dibandingkan dengan target tahun terakhir Rencana Pembangunan Daerah atau tahun 2026, maka dapat ditampilkan sebagaimana tabel berikut :

Tabel II.67.
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 12
Tahun 2023 dengan Target Akhir RPD Tahun 2026

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Keterangan
		2023	Target akhir RPD Tahun 2026	Capaian (%)	
Nilai Sakip	Nilai	B	B	100	Tercapai
Opini BPK	Opini	WTP	WTP	100	Tercapai

Realisasi indikator kinerja Sasaran 12 yaitu Nilai SAKIP dan Opini BPK pada tahun 2023 apabila dibandingkan dengan dari target akhir tahun RPD tahun 2026, maka realisasi kinerja telah tercapai 100 % dari target yang ditetapkan atau tercapai.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporean Kinerja dan Tata Cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia telah melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.

Hasil evaluasi SAKIP dari Kementerian PAN dan RB Tahun 2023 pada kategori B dengan nilai 65,23. Dari data sebagaimana dijabarkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa realisasi atas target yang telah ditetapkan capaiannya adalah 100%. Pencapaian nilai B ini menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya sudah cukup memadai serta kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintah yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kabupaten Banjarnegara sudah menunjukkan hasil yang baik. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.68.
Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 – 2023

No	Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai 2019	Nilai 2020	Nilai 2021	Bobot	Nilai 2022	Nilai 2023
1.	Perencanaan Kinerja	35	21,64	22	22,08	30	22,20	22,20
2.	Pengkuran Kinerja	20	16,17	16,76	15,76	30	18,45	18,45
3.	Pelaporan Kinerja	15	10,56	10,73	9,57	15	10,48	10,48
4.	Evaluasi Kinerja	10	6,37	6,53	5,50	25	13,95	13,95
5.	Capaian Kinerja	20	11,91	12,03	10,12			
Nilai Hasil Evaluasi		**100**	**66,65**	**68,04**	**63,03**		**65,08**	**65,08**
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			**B**	**B**	**B**		**B**	**B**

Sumber : Data Bagian Organisasi Setda Kab. Banjarnegara, 2024

Dari data diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penilaian atas implementasi SAKIP Kabupaten Banjarnegara dari tahun 2019 sampai dengan 2023 mengalami fluktuasi hasil penilaian, yaitu pada tahun 2021 mengalami penurunan yang sangat signifikan pada tahun sebesar 5,01 poin, kemudian mengalami kenaikan lagi pada tahun 2022 menjadi 65,08 dan 2023 menjadi 65,23 dengan kategori B.

Komponen SAKIP yang dievaluasi terjadi perubahan dimana komponen yang dievaluasi tahun 2017 sampai dengan 2021 komponen yang dievaluasi adalah 5 (lima) komponen, yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja. Namun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 88 tahun 2021 tentang pedoman evaluasi AKIP, maka hanya ada 4 (empat) komponen yang dievaluasi yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Banjarnegara sebagai berikut :

1. Melakukan reviu dan perbaikan dokumen perencanaan pada Sebagian Perangkat Daerah dengan memastikan bahwa tujuan dan sasaran strategis yang dikawal oleh setiap Perangkat Daerah telah beorientasi hasil dan memiliki kualitas indicator kinerja SMART-C dan tepat level pengampu kinerjanya.
2. Melakukan reviu dan perbaikan dokumen penjenjangan kinerja baik di level Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan *logical framework* dan *Critical Succes Faktor* (CSF) atas pencapaian kinerja sesuai dengan prinsip-prinsip penyusunan penjenjangan kinerja dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Melakukan identifikasi dan pemetaan pada *cascading* kinerja yang dimiliki untuk melihat adanya potensi *crosscutting* kinerja dengan tugas dan fungsi dari Perangkat Daerah lain yang memiliki keterkaitan dalam mencapai kinerja.
4. Memanfaatkan hasil perbaikan cascading kinerja untuk memilah program dan kegiatan apa saja yang tidak relevan dengan sasaran strategis yang ingin dicapai dan menimbulkan potensi inefisiensi

dan inefektivitas dalam mencapai kinerja organisasi.

5. Menyusun IKU terbaru sebagai dasar RPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 dan melengkapi dengan definisi operasional, formulasi pengukuran dan sumber data, serta memanfaatkannya sebagai dasar untuk perencanaan dan pengukuran kinerja.
6. Melakukan pengukuran kinerja secara berkala dan memantau juga kinerja di level *outcome,* tidak hanya kinerja di level output program, kegiatan dan anggaran.
7. Melakukan optimalisasi pemanfaatan aplikasi *e-sakip* dan memantau kepatuhan pengisian seluruh Perangkat Daerah di aplikasi tersebut tersebut sebagai bagian dari proses pengumpulan data dan pengukuran kinerjanya secara *real time*, sehingga ketercapaian dan keandalan data kinerja dapat terjaga dengan baik.
8. Menjadikan capaian indicator kinerja baik yang masih berada dibawah 75 persen maupun yang sudah berada diatas ktegori tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan target kinerja mendatang.
9. Menyempurnakan kualitas laporan kinerja di level Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah dengan menyajikan analisis efisiensi penggunaan sumber daya dibandingkan dengan kinerja. Selain itu kinerja di level Perangkat Daerah dengan perbandingan data kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya, target jangka menengah dan nasional.
10. Memanfaatkan informasi dalam laporan kinerja sebagai dasar bagi penetapan target pada tahun berikutnya, sehingga target bisa lebih menantang dan *achievable*.
11. Menetapkan pedoman evaluasi AKIP internal dan mengunakan sebagai dasar evaluasi internal pada seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.
12. Memastikan bahwa temuan dan rekomendasi yang diberikan saat evaluasi akuntabilitas kinerja internal agar menggambarkan hal yang menjadi kekurangan dan solusi yang perlu dilakukan guna meningkatkan kualitas implementasi SAKIP di setiap Perangkat Daerah
13. Menyampaikan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP Internal Pernagkat Daerah Tahun 2022 kepada Kementerian PANRB

melalui laman esr.menpan.go.id, serta memantau tindak lanjut rekomendasi yang diberikan kepada Perangkat Daerah sebagai dasar perbaikan SAKIP ke depan.

Sedangkan upaya untuk memperbaiki implementasi SAKIP di Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan reviu atas dokumen perencanaan dengan merumuskan pohon kinerja, cascading dan indikator kinerja sesuai dengan levelnya, sehingga dapat selaras dengan antara Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah dengan Tujuan dan Sasaran Strategis Perangkat Daerah.
2. Menyempurnakan pohon kinerja dan cascading kinerja beserta indicator kinerjanya dengan memperhatikan logical framework dan Critical Succes Faktor (CSF) dari level Pemerintah Daerah Sampai dengan Perangkat Daerah sesuai dengan PermenPANRB nomor 89 tahun 2021. Serta mengidentifikasikan kemungkinan *crosscutting* kinerja antara Perangkat Daerah.
3. Menentukan program/kegiatan yang mendukung langsung dan yang tidak mendukung kinerja berdasarkan pohon kinerja dan cascading kinerja.
4. Telah disusun IKU Terbaru berdasarkan RPD tahun 2023-2026.
5. Setiap triwulan telah dilakukan pengukuran kinerja mulai dari Sasaran strategis sampai dengan Sub kegiatan.
6. Menyempurnakan aplikasi *esakip* dengan mengintegrasikan dalam aplikasi satudata dan perencanaan, penganggaran dan pelaporan.
7. Menyempurnakan laporan kinerja sesau dengan PermenPANRB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan an Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.
8. Pentapan Pedoman evaluasi AKIP Internal melalui Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 44 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah
9. Menyempurnakan penjabaran kinerja yang dimanfaatkan dalam penyusunan perjanjian kinerja dari tingkat penanggung jawab sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan sehingga tercipta keselarasan pengukuran kinerja individu pegawai dengan organisasi sebagai dasar pemberian *reward* dan *punisment.*
10. Menyelaraskan kinerja organisasi dengan kinerja individu melalui penyusunan SKP.

11. Menyelenggarakan Bimbingan Teknis tentang penyusunan Pohon kinerja dan Cascading kinerja, serta pengembangan aplikasi esakip..
12. Melaksanakan desk pra evaluasi SAKIP dan .
13. Mengunggah data dukung implementasi SAKIP ke esr.menpan.go.id

Apabila bila disandingkan dengan nilai SAKIP Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dapat digambarkan sebagai berikut :

Grafik II.22.
Nilai SAKIP Kabupaten/Kota dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

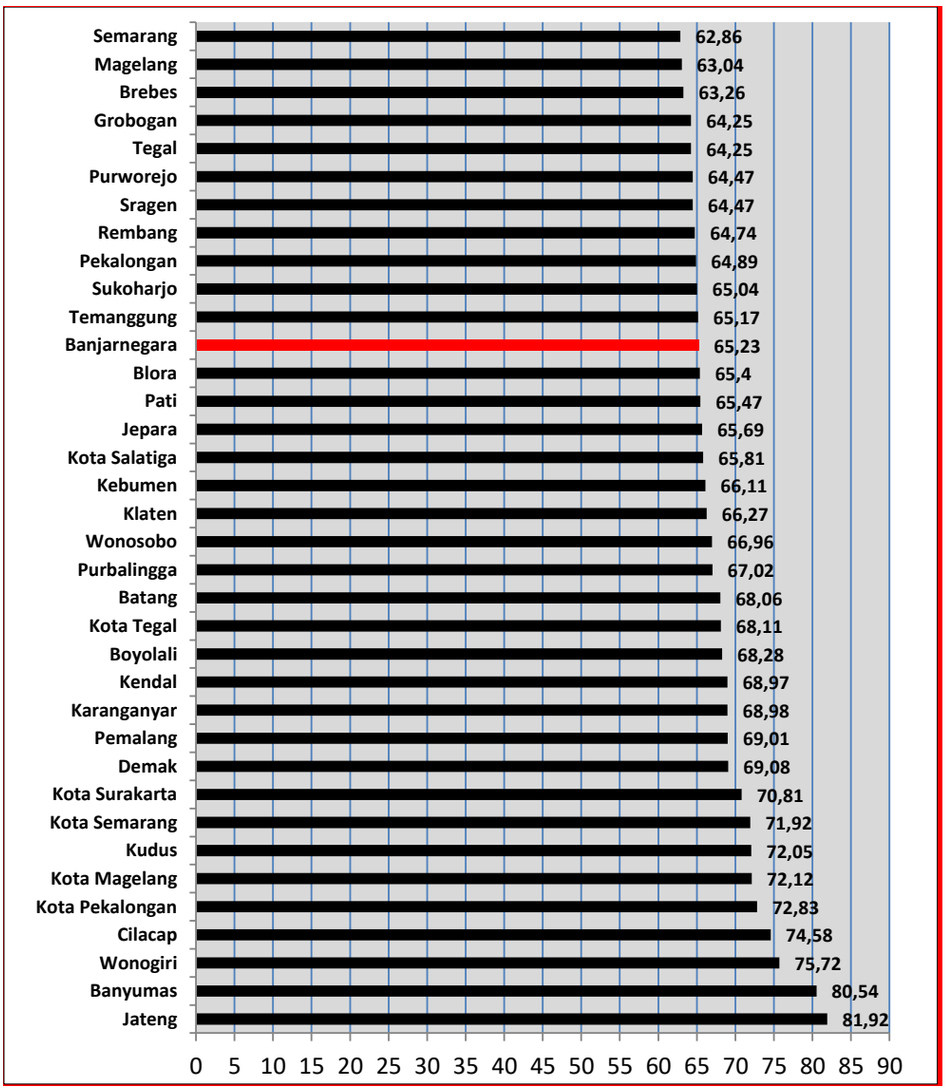

Sumber : Data Biro Organisasi, Setda Provinsi Jawa Tengah, 2024

Adapun nilai hasil evaluasi kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yaitu tahun 2017 BB, 2018 BB, 2019 A, 2020 A, 2021 A (80,25), 2022 A (81,13), 2023 A

(81,92). Sementara Kabupaten/Kota di wilayah Jawa Tengah sudah mulai ke nilai BB sebanyak 7 (tujuh) kabupaten yaitu Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap, Kota Pekalongan dan Kabupaten Wonogiri, , Kabupaten Kudus, Kota Magelang, Kota Semarang dan Kota Surakarta sedangkan Kabupaten yang mendapatkan penilaian A atas impelementasi SAKIPnya adalah Kabupaten Banyumas, adapaun untuk Kabupaten Banjarnegara bersama 24 (dua puluh empat) Kabupaten/Kota mendapatkan nilai B.

Adapun indikator kinerja kedua dari Sasaran 12 yaitu Opini BPK pada tahun 2023 Kabupaten Banjarnegara dari target WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) terealisasi WTP (2022). Realisasi atas target kinerja yang ditetapkan selama sembilan tahun berturut turut tercapai sesuai yang diharapkan, mulai tahun 2013 atas audit LKD tahun 2012 sampai dengan tahun 2023 atas audit LKD tahun 2022. Adapun tahun 2024 atas audit LKD tahun 2023 sampai dengan laporan ini disusun masih dalam proses pelaksanaan audit pendahuluan dan akan dilanjutkan sampai dengan bulan April, sehingga capaian yang disajikan menggunakan data tahun sebelumnya dan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara optimis dapat mempertahankan opini WTP. Sampai dengan tahun 2023, Kabupaten Banjarnegara meraih Opini BPK berupa WTP sebanyak 10 kali berturut-turut sejak tahun 2013.

Sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah salah satu indikatornya dapat dilihat dari hasil penilaian atas laporan keuanganyang dilakukan oleh pihak eksternal yang dalam hal ini dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penilaian oleh lembaga eksternal ini menjadi komponen penting untuk mengukur sejauh mana akuntabilitas dankinerja pemerintah daerah terutama dari aspek pengelolaan keuangan.

Pemeriksaan yang dilakukan secara periodik setiap tahunnya ini mencakup pemeriksaan terhadap neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Opini yang dihasilkan atas pemeriksaan ini secara bertingkat terdiri dari Tidak Wajar (TW), Tidak Memberi Pendapat (TMP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan yang terbaik adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Beberapa strategi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Banjarnegara yang dilakukan untuk mengoptimalkan kinerja rangka mempertahankan opini WTP adalah sebagai berikut :

1. Kesesuaian dengan Standar Akutansi Pemerintah (SAP)
   a. Penyajian laporan keuangan telah sesuai dengan Standar Akutansi Pemerintah (SAP), tidak ada lagi salah saji material dan telah diungkakap secara memadai;
   b. Standar Akutansi Pemerintah (SAP) diterapkan secara konsisten
2. Kecukupan Pengungkapan
   a. Seluruh transaksi pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban dan ekuitas, diungkapkan secara memadai dalam laporam keuangan dan disertai bukti-bukti yang sah;
   b. Seluruh transaksi pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban dan ekuitas, disertai dengan dasar hukum yang sah;
3. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan:
   a. Berusaha meminimumkan temuan administrasi dengan cara melengkapi administrasi dan melakukan belanja sesuai ketentuan;
   b. Melengkapi pertanggungjawaban fisik dan keuangan atas seluruh pendapatan dan belanja daerah;
   c. Penyusunan dan penyampaian APBD dan laporan keuangan tepat waktu.
4. Efektifitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
   a. Memformalkan implementasi SPIP melalui peraturan kepala daerah;
   b. Pengawasan dan evaluasi atas implementasi SPIP oleh apparat terkait
5. Faktor pendukung penting lainnya
   a. Adanya komitmen dari aparatur dan pemangku kepentingan;
   b. Kesiapan SDM dan kelembagaan /organisasi;
   c. Pemanfaatan Sisten Informasi Keuangan;
   d. Kelengkapan regulasi daerah;
   e. Pelaksanaan tindaklanjut hasil pemeriksaan tahun lalu dan menjadikan tindak lanjut tersebut sebagai bahan evaluasi agar temuan yang sama atau yang terkait tidak terulang kembali;

f. Memberikan pelayanan yang memadai kepada Tim Auditor BPK RI dalam hal penyediaan data, pemeriksaan lapangan maupun hal lain yang dibutuhkan saat pemeriksaan

Walaupun Pemerintah Kabupaten Banjarnegara berhasil mempertahankan Opini WTP selama 10 (sepuluh) tahun berturut-turut, namun masih ada kendala yang dihadapi yaitu :

1. Kurangnya sarana dan prasarana dalam mendukung terciptanya laporan yang cepat, tepat dan akurat.
2. Masih dibutuhkannya peningkatan kemampuan / pengetahuan / keahlian dari Sumber Daya Manusia dalam menjalankan fungsi akuntansi / penyusunan Laporan Keuangan.

Dalam rangka mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :

1. Melakukan kegiatan inventarisasi serta pencatatan terhadap aset-aset yang ada.
2. Mengoptimalkan Sistim Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMDA Barang), Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD) melalui Peningkatan Kapasitas dan Kemampuan Sumber Daya Manusia di semua Perangkat Daerah.
3. Meningkatkan koordinasi atau melakukan sosialisasi kepada pihak-pihak terkait dengan pengelolaan APBD baik dalam hal penerimaan maupun pengeluaran.
4. Meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan melalui bintek/diklat.

Tujuan 6 : Meningkatnya Kualitas Layanan Publik

Untuk mencapai Tujuan 6 ”Meningkatnya Kualitas Layanan Publik”, diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Indeks Inovasi Daerah. Adapun pencapaian target dari indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel II.69.
Capaian Indikator Kinerja Tujuan 6 Tahun 2023

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Keterangan
		Target	Realisasi	Capaian (%)	
Indeks Inovasi Daerah	Angka	45	42,90	95,33	Tinggi

Capaian indikator kinerja Tujuan 6 “Meningkatnya Kualitas Layanan Publik” yaitu Indeks Inovasi Daerah tahun 2023 sebesar 42,90 dari target 45 dengan capaian kinerja 95,90%, sebagaimana ditampilkan dalam tabel diatas.

Capaian indikator kinerja Tujuan 6 pada tahun 2023 apabila dibandingkan dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel II.70.
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tujuan 6
Tahun 2023 dengan Tahun 2022

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Keterangan
		2022	2023	Tingkat Kemajuan (%)	
Indeks Inovasi Daerah	Angka	41,77	42,90	2,71	meningkat

Hasil pengukuran tingkat kemajuan kinerja Indeks Inovasi Daerah apabila diperbandingkan antara realisasi tahun 2023 sebesar 42,90 dengan tahun 2022 sebesar 41,77, maka realisasi indikator kinerja Tujuan 6 mengalami peningkatan dari tahun 2022 sebesar 2,71%.

Capain indikator kinerja Tujuan 6 tahun 2023 apabila dibandingkan dengan target tahun terakhir Rencana Pembangunan Daerah atau tahun 2026, maka dapat ditampilkan sebagaimana tabel berikut :

Tabel II.71.
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tujuan 6
Tahun 2023 dengan Target Akhir RPD Tahun 2026

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Keterangan
		2023	Target akhir RPD Tahun 2026	Capaian (%)	
Indeks Inovasi Daerah	Angka	42,90	60	71,5	Belum tercapai

Capaian indikator kinerja Indeks Inovasi Daera pada tahun 2023 apabila dibandingkan dengan dari target akhir tahun RPD tahun 2026 sebesar 71,5%, maka realisasi kinerja belum tercapai atau masih dibawah target yang telah ditetapkan.

Indeks Inovasi Daerah (IID) adalah sistem pengukuran dan penilaian terhadap penerapan pembaharuan penyelenggaraan

pemerintahan daerah yang telah dilaporkan kepada menteri dalam negeri sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah.

Penilaian Inovasi Daerah adalah proses penilaian terhadap semua bentuk Inovasi Daerah menggunakan indikator indeks Inovasi Daerah. Data Indeks Inovasi Daerah merupakan dokumen yang memberikan informasi dan data terkait pelaksanaan Inovasi Daerah yang telah berhasil dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah paling sedikit 2 (dua) tahun dan berdampak/bermanfaat bagi daerah dan masyarakat yang bersifat berkelanjutan.

Sampai tahun 2023 jumlah riset dan inovasi unggulan daerah 60 riset/inovasi, sebagai berikut :

Tabel II.72.
Riset dan Inovasi Unggulan Daerah Sampai Dengan Tahun 2023

No.	Jenis Riset / Inovasi
1	Beradaptasi Dengan Pandemi; Membangun Akuntabilitas Dan Transparansi Anggaran Melalui Virtual Budget Office (VBO) Di Kabupaten Banjarnegara
2	Sinergitas Layanan Terpadu Melalui Sistem Informasi Kesehatan Berbasis Digital (Si Kebal) Di Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara
3	Sipedas Untuk Mengoptimalkan Kinerja Pengawas Sekolah Pada Sekolah Binaan Di Kabupaten Banjarnegara
4	Simudik Satu Data Guna Mewujudkan Pendidikan Berkualitas Di Banjarnegara
5	Sipinter Apik (Sistem Informasi Perdagangan Terintegrasi Akurat Praktis Informatif Kekinian) Guna Peningkatan Kinerja Disperindagkopukm Kabupaten Banjarnegara
6	Digitalisasi Transaksi Belanja Guna Akselerasi Pelayanan Perbendaharaan Yang Efektif, Efisien Dan Akuntabel Di Kabupaten Banjarnegara
7	Si Perjaka Bae” Untuk Optimalisasi Penanganan Jalan Di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Banjarnegara
8	Sinergitas Pengelolaan Informasi Potensi Desa Di Kabupaten Banjarnegara (Sidara)
9	Digitalisasi “Badeg” Di Kecamatan Bawang Kab. Banjarnegara
10	Optimalisasi Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Dengan “Sipapi Wuger Loji” (Sigaluh Panjang-Apunjung Pasir Wukir Gemah Ripah Loh Jinawi) Melalui Agroeduwisata Kampung Buah Di Kabupaten Banjarnegara
11	Implementasi Inovasi Teknologi Pertanian Modern Untuk Peningkatan Pendapatan Petani Kentang Di Kabupaten Banjarnegara
12	Keandalan Bangunan Gedung Melalui “Siyaps Bang” Di Kabupaten Banjarnegara
13	Kolaborasi Percepatan Tata Kelola Pengamanan Dan Penatausahaan Aset Tanah Dan Bangunan Melalui Gugus Tugas Aset Daerah “Gustada“ Di Kabupaten Banjarnegara
14	Optimalisasi Peran Desa Dan Kelurahan Dalam Pemeliharaan Sarana Prasarana Sanitasi Dan Air Bersih Di Kabupaten Banjarnegara
15	Ekonomi Kreatif Berbasis Kerakyatan Di Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara
16	Transparansi Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa Melalui

No.	Jenis Riset / Inovasi
	Digitalisasi Kematangan Ukpbj Di Kabupaten Banjarnegara
17	Sinergi Dan Transformasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Pada Inspektorat Kabupaten Banjarnegara
18	Ketaatan Prosedur Pemulasaran Dan Pemakaman Jenazah Covid-19 Sesuai Prokes Di Banjarnegara
19	Membangun Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Melalui “Tapel Kuda ” Pada Pemerintah Kabupaten Banjarnegara
20	Optimalisasi Pengembangan Destinasi Pariwisata Melalui “Tampomas On The Wheel” Di Kabupaten Banjarnegara
21	'Spatial Data Center' Sebagai Pusat Layanan Dan Konsultasi Data Dan Informasi Tata Ruang Kabupaten Banjarnegara
22	Digitalisasi Pelayanan Metrologi Legal Melalui Duta Tertib Ukuran Takaran Timbangan (D’Tutti) Di Kabupaten Banjarnegara
23	Model Budidaya Perikanan Berbasis Kemitraan Untuk Meningkatkan Pendapatan Pelaku Perikanan Di Kabupaten Banjarnegara
24	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Pencemaran Air Sungai Di Kabupaten Banjarnegara
25	Sinergitas Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Melalui Forum Pemulihan Pasca Bencana Di Kabupaten Banjarnegara
26	One Managemen Agriculture Irrigation (Om Air) Dinas Pupr Kabupeten Banjarnegara Sebagai Peningkatan Kinerja Pertanian Beririgasi Di Kabupaten Banjarnegara
27	Program Penanganan Stunting Pada Kampung Kb Sebagai Upaya Meningkatkan Peran Kampung Kb Dalam Menurunkan Prevalensi Stunting (“Penatus Kampung Kb”) Di Banjarnegara
28	Penerapan Digitalisasi Data Dan Dokumen Berbasis Web Untuk Peningkatan Potensi Desa Di Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara
29	Sinergitas Pengelolaan Pendapatan Guna Meningkatkan Efisiensi Kinerja Bidang Keuangan Di Rsud Hj Anna Lasmanah Kabupaten Banjarnegara
30	Penanganan Stunting Melalui Gerakan “Sewa Kos” (Sehatkan Wanita Dan Anak Dengan Konvergensi Stunting) Di Kabupaten Banjarnegara
31	Sinergi Dan Integrasi Perencanaan Pembangunan Daerah Untuk Akselerasi Dan Harmonisasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Di Kabupaten Banjarnegara
32	Pembentukan Gugus Tugas Daerah Terintegrasi, Terpadu Dan Kolaborasi Untuk Optimalisasi Pengawasan Dan Penanganan Penyakit Hewan Menular Strategis (Phms) Di Kabupaten Banjarnegara
33	Joki Naker “Pojok Konsultasi Dan Informasi Ketenagakerjaan” Untuk Mengoptimalkan Pengelolaan Ketenagakerjaan Di Kabupaten Banjarnegara
34	“Opera Edukasi Terintegrasi” Optimalisasi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Produktif Dan Pelayanan Pendidikan Desa Terpencil Di Wilayah Kecamatan Pandanarum Kabupaten Banjarnegara
35	Ngasah Bakat Melalui Aksi Raga (Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Melalui Aksi Sedekah Sampah) Untuk Optimalisasi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara
36	Optimalisasi Promosi Dan Pemasaran Pariwisata Berbasis Media Digital Terintegrasi Melalui Smart Wisata Bara
37	“Sip Rai Umikembar” (Sistem Informasi Pelayanan Gerai Usaha Mikro, Kecil, Menengah Banjarnegara) Untuk Meningkatkan Daya Saing Produk Umkm Di Kabupaten Banjarnegara
38	Si Pepes Koi “Sinergitas Pencegahan Dan Penanganan Stunting Kolaborasi Lintas Sektor” Di Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara
39	Optimalisasi Pengelolaan Galeri Interaktif Masyarakat Berbasis Digital

No.	Jenis Riset / Inovasi
	Kolaboratif Terintegrasi Di Kecamatan Banjarnegara (Si-Ulan Garimas)
40	Pembuatan Fitur Riset Daerah Idea Pada Portal Resmi Baperlitbang Guna Peningkatan Diseminasi Hasil Riset Daerah Di Kabupaten Banjarnegara
41	Optimalisasi Peran Satlinmas Desa/Kelurahan Melalui Pembentukan Satgas Linmas Di Kabupaten Banjarnegara
42	Kolaborasi Sisutan-Asn Penyusunan Kebutuhan Asn Untuk Efektivitas Perencanaan Asn Di Kabupaten Banjarnegara
43	Pemetaan Populasi Kunci Dalam Rangka Pencegahan Infeksi Baru Hiv / Aids Di Banjarnegara
44	Sinergisitas Forkom Germas Untuk Mendukung Akselerasi Phbs Di Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara
45	Si Erah (Sistem Informasi Elektronik Resep Anna Lasmanah) Di Rsud Hj Anna Lasmanah Kabupaten Banjarnegara
46	Bergas (Bebarengan Rembug Goal Stunting) Untuk Optimalisasi Penanganan Stunting Di Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara
47	Klinik Lkpm Sebagai Pusat Layanan, Konsultasi Dan Informasi Investasi Di Kabupaten Banjarnegara
48	Simpan Kabar (Sistem Informasi Manajemen Pengetahuan) Untuk Akselerasi Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Di Kabupaten Banjarnegara
49	Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Potensi Agroedu Wisata Seakong Desa Wanadadi Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara
50	Meningkatkan Pemahaman Pelaku Pbj Melalui Lakon Pbj (Layanan Konsultasi Online Pengadaan Barang/Jasa) Di Kabupaten Banjarnegara
51	Fasilitasi Usulan Pelatihan Sumber Daya Manusia Bagi Penyandang Disabilitas Di Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara
52	Integrasi Sistem Informasi Kecamatan Dan Sistem Informasi Desa Dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Publik Di Kec. Pejawaran Kab. Banjarnegara
53	Optimalisasi Pengelolaan Pasar Rakyat Daerah Di Kabupaten Banjarnegara Pada Era Digitalisasi
54	“Siulan Master” (Sistem Informasi Usulan Layanan Sosial Masyarakat Terpadu) Untuk Peningkatan Layanan Sosial Masyarakat Miskin Dan Rentan Pada Puskesos Dinsos Pppa Kabupaten Banjarnegara
55	Penanggulangan Bencana Bersama Foris Cantix (Forum Pengurangan Risiko Bencana Pentahelix) Di Kabupaten Banjarnegara
56	Pandusaluring (Pelayanan Administrasi Kependudukan Dari Desa Dan Kelurahan Secara Daring)
57	Digitalisasi Visite Dokter Guna Meningkatkan Mutu Pelayanan Di Rsud Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara
58	Sinergitas Dalam Mendukung Open Defecation Free (ODF) Stop Buang Air Besar Sembarangan Di Kecamatan Batur
59	Warkom Makaryo (Warung Komunikasi Makaryo) Untuk Meningkatkan Prosentase Pencari Kerja Mendapatkan Pekerjaan Di Kabupaten Banjarnegara
60	Sistem Informasi Data Perencanaan Ekonomi Kreatif Terintegrasi Untuk Sinergitas Perencanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif Kabupaten Banjarnegara

Capaian Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Banjarnegara tahun 2021 sampai dengan 2023 adalah sebagai berikut :

Grafik II.23.
Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2021 - 2023

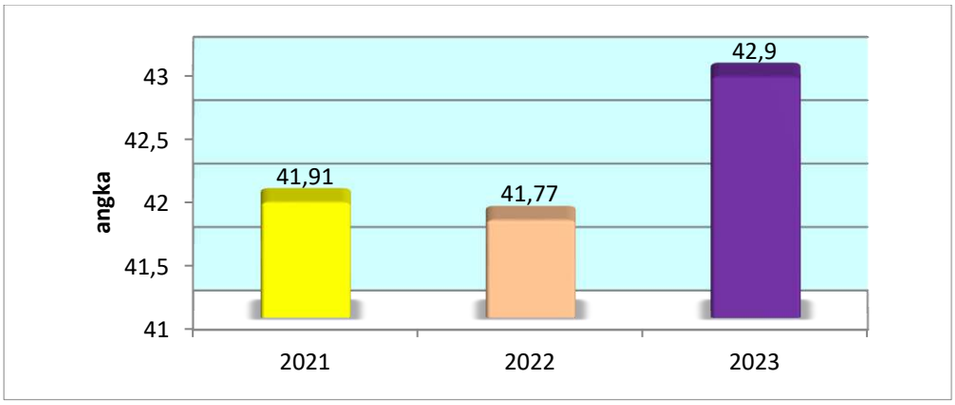

Sumber : Data Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara ,2024

Apabila capaian Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Banjarnegara dibandingkan dengan Kabupaten/Kota dan Provinsi Jawa Tengah ditampilkan dibawah ini:

Grafik II.24.
Indeks Inovasi Daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi Jawa Tengah

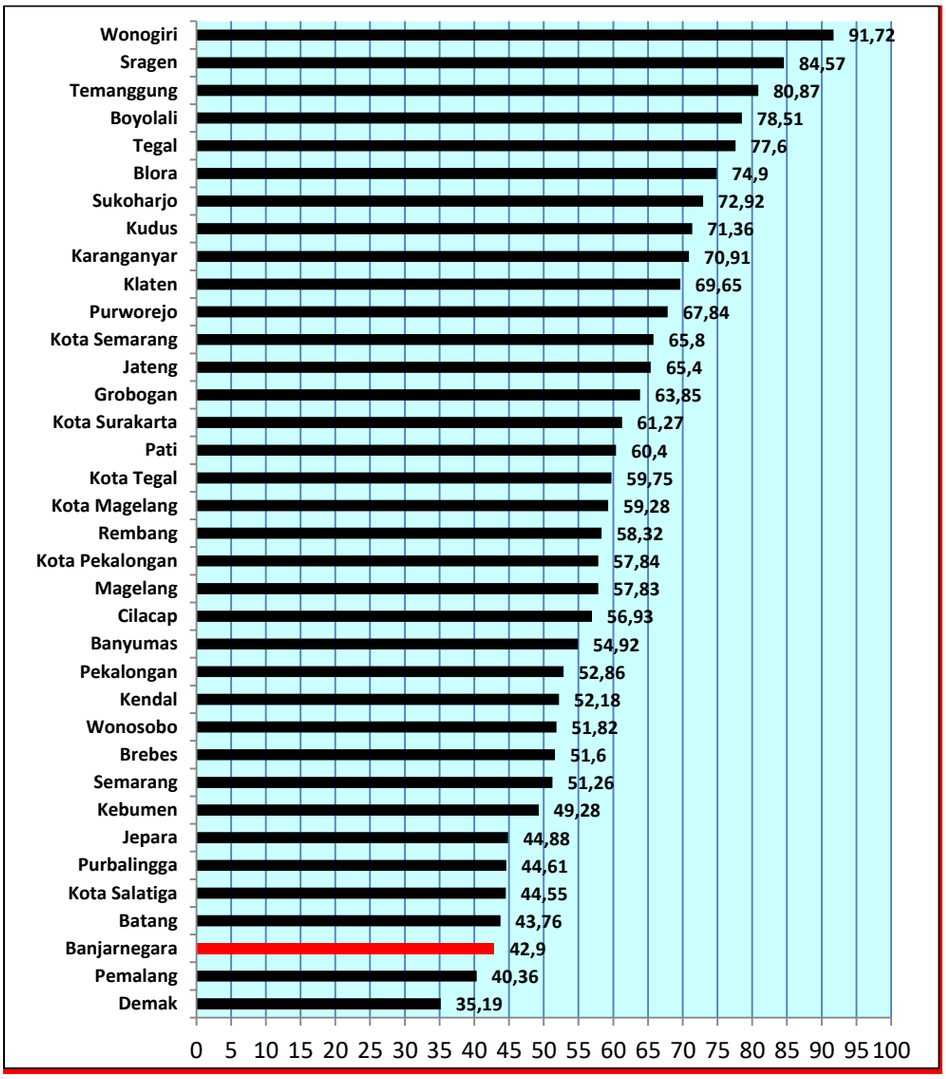

Sumber : Data Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara ,2024

Indeks Inovasi Kabupaten Banjarnegara tahun 2023 menempati posisi 33 dari 35 Kabupaten Kota Se Jawa Tengah dengan skor 42,90 kategori inovatif.

Hambatan yang dihadapi dalam mencapai keberhasailan :

1. Masih kurang inovasi sebagai budaya kerja dan wujud dukungan pelaksanaan reformasi birokrasi pada seluruh perangkat daerah dalam konteks penyelenggara pelayanan publik.
2. Tingkat kematangan inovasi yang masih rendah
3. Kontribusi sektor swasta terhadap riset di Kabupaten Banjarnegara masih renda

Strategi yang dilakukan dalam menghadapi hambatan :

1. Mendorong perangkat daerah untuk selalu mempunyai inovasi, disertai dengan sosialisasi program inovasi daerah, baik dalam bentuk inovasi budaya kerja, tempat kerja, maupun layanan masyarat. Upaya ini dalam rangka mewujudkan budaya aparatur yang memiliki jiwa sebagai pelayan masyarakat dan memberikan layanan prima. Inovasi dalam hal ini menjadi salah satu indikator dalam penilaian kinerja perangkat daerah.
2. Mengikutsertakan inovasi dari Perangkat Daerah kedalam kompetisi inovasi pelayanan publik dan kompetisi-kompetisi yang lain yang relevan.

Sasaran 13	**:**	**Meningkatnya Efektivitas Dan Transparansi Layanan Publik**

Untuk mencapai Sasaran 13 ”Meningkatnya Kualitas Layanan Publik”, diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Survey Kepuasan Masyarakat. Adapun pencapaian target dari indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel II.73.
Capaian Indikator Kinerja Sasaran 13 Tahun 2023

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Keterangan
		Target	Realisasi	Capaian (%)	
Survey Kepuasan Masyarakat	Angka	84,34	84,05	99,66	Sangat Tinggi

Capaian indikator kinerja Sasaran 13 “Meningkatnya Efektifitas dan Transparansi Layanan Publik” yaitu Survey Kepuasan Masyarakat tahun 2023 sebesar 84,05 dari target 84,34 dengan capaian kinerja 99,66%, sebagaimana ditampilkan dalam tabel diatas.

Capaian indikator kinerja Sasaran 13 pada tahun 2023 apabila dibandingkan dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel II.74.
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 13
Tahun 2023 dengan Tahun 2022

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Keterangan
		2022	2023	Tingkat Kemajuan (%)	
Survey Kepuasan Masyarakat	Angka	82,75	84,05	1,21	Meningkat

Hasil Pengukuran tingkat kemajuan indikator kinerja Survey Kepuasan Masyarakat apabila diperbandingkan antara realisasi tahun 2023 sebesar 84,05 dengan realisasi tahun 2022 sebesar 82,75 maka realisasi indikator kinerja Sasaran 13 mengalami peningkatan dari tahun 2022 sebesar 1,21%.

Capain indikator kinerja Sasaran 13 tahun 2023 apabila dibandingkan dengan target tahun terakhir Rencana Pembangunan Daerah atau tahun 2026, maka dapat ditampilkan sebagaimana tabel berikut :

Tabel II.75.
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 13
Tahun 2023 dengan Target Akhir RPD Tahun 2026

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Keterangan
		2023	Target akhir RPD Tahun 2026	Capaian (%)	
Survey Kepuasan Masyarakat	Angka	84,05	86,00	97,73	Belum tercapai

Capaian indikator kinerja Survey Kepuasan Masyarakat pada tahun 2023 apabila dibandingkan dengan dari target akhir tahun RPD tahun 2026 sebesar 97,73%, maka realisasi kinerja belum tercapai atau masih dibawah target yang telah ditetapkan.

Berdasar Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman

Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara sudah melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat pada Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang ada di semua Perangkat Daerah. Adapun hasil pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat tahun 2021 - 2023 dalah sebagai berikut :

Tabel II.76.
Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
Tahun 2021 – 2023

No	Komponen	Nilai Rata-rata Tahun 2021	Nilai Rata-rata Tahun 2022	Nilai Rata-rata Tahun 2023
1	Persyaratan	3,216	3,228	3,288
2	Prosedur	3,197	3,204	3,259
3	Waktu	3,148	3,163	3,209
4	Biaya/Tarif	3,751	3,760	3,776
5	Produk Layanan	3,201	3,219	3,278
6	Kompetensi Pelaksanaan	3,245	3,260	3,339
7	Perilaku Pelaksanan	3,317	3,307	3,363
8	Sarana Prasarana	3,234	3,233	3,287
9	Penanganan Pengaduan	3,383	3,496	3,529

Sumber : Data Bagian Organisasi Setda Kab. Banjarnegara, 2024

Dari 9 (sembilan) komponen Survey Kepuasan Masyarakat pada tahun 2023 nilai paling rendah adalah komponen waktu dengan nilai 3,209. Hal ini disebabkan karena :

Kurangnya pemahaman pengguna layanan terhadap prosedur pelayanan dari proses pelayanan yang diberikan, sehingga menganggap pelayanan yang diterima rumit/ sulit;

Belum semua aparatur di perangkat daerah yang memberikan pelayanan menerapkan pelayanan sesuai dengan SOP pelayanan. Hal ini disebabkan karena belum ada evaluasi atas SOP maupun prosedur pelayanan di unit kerjanya secara berkala.

Sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik belum seluruhnya memenuhi standar;

Apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, realisasi (capaian) indikator kinerja diperoleh gambaran sebagai berikut:

Grafik II.25.
Nilai SAKIP Kabupaten/Kota dan Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2023

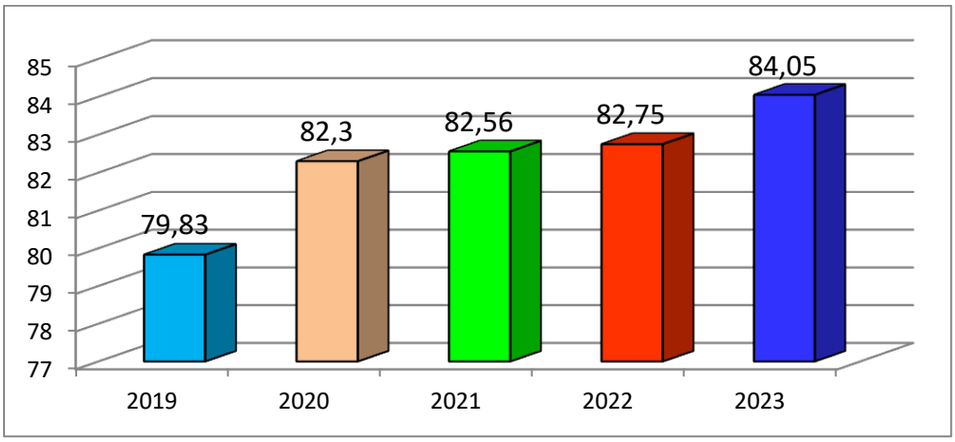

Sumber : Data Bagian Organisasi Setda Kab. Banjarnegara, 2024

Secara kuantitatif maka terdapat kecenderungan (*trend*) yang meningkat dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 Capaian yang memuaskan tersebut didukung oleh :

1. Semakin baiknya layanan yang diberikan oleh Unit Penyelenggaran Pelayanan Publik (UPP);
2. Unit Penyelenggara Pelayanan Publik semakin aktif melaksanakan Survey dan menjadikan dokumem hasil Survey Kepuasan Masyarakat sebagai bahan evaluasi dalam memperbaiki layanannya.

Untuk mencapai hasil yang lebih baik lagi ada beberapa upaya yang dilaksanakan antara lain :

1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan publik;
2. Unit Penyelenggara Pelayanan Publik melaksanakan publikasi standar pelayanan kepada pengguna layanan sehingga pengguna layanan dapat memahami standar pelayanan untuk masing-masing jenis layanan
3. Mempermudah pengguna layanan untuk mengajukan keluhan/pengaduan atas pelayanan yang diterima;
4. Peningkatan kinerja petugas pelayanan;
5. Optimalisasi fungsi sarana dan prasarana penunjang layanan.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan survey kepuasan masyarakat antara lain pelaksanaan survey masih dilakukan secara manual sehingga responden masih bisa dipengaruhi oleh pihak lain.

Terhadap kendala tersebut langkah dan strategi yang akan dilakukan adalah dengan membangun aplikasi survey kepuasan masyarakat, menjadikan hasil survey sebagai dasar penganggaran.

Misi 4	**:**	**Mewujudkan Kuantitas Dan Kualitas Sarana Dan Prasarana Dasar**

Tujuan 7	**:**	**Meningkatnya Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Dan Layanan Dasar Yang Berkualitas**

Untuk mencapai Tujuan 7 " Meningkatnya cakupan pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar yang berkualitas", diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja, yaitu Indeks Pembangunan Manusia dan Persentase penduduk miskin. Adapun pencapaian target dari indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel II.77.
Capaian Indikator Kinerja Tujuan 7 Tahun 2023

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Keterangan
		Target	Realisasi	Capaian (%)	
Indeks Pembangunan Manusia	Angka	68	69,14	101,68	Sangat Tinggi
Persentase penduduk miskin	%	15,64-14,46	14,90	100	Sangat Tinggi
Rata-rata Capaian Kinerja				100,84	Sangat Tinggi

Capaian indikator kinerja Tujuan 7 "Meningkatnya Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Dan Layanan Dasar Yang Berkualitas" yaitu Indeks Pembangunan Manusia tahun 2023 sebesar 69,14 dari target 68 dengan capaian kinerja 101,14% dan Persentase Penduduk Miskin sebesar 14,90% dari target 15,64-14,46% dengan capaian kinerja 100%, sedangkan rata-rata capaian kinerja Tujuan 7 sebesar 100,84%, sebagaimana ditampilkan dalam tabel diatas.

Capaian indikator kinerja Tujuan 7 pada tahun 2023 apabila dibandingkan dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel II.78.
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tujuan 7
Tahun 2023 dengan Tahun 2022

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Keterangan
		2022	2023	Tingkat Kemajuan (%)	
Indeks Pembangunan Manusia	Angka	68,61	69,14	0,77	Meningkat
Persentase Penduduk Miskin	%	15,20	14,90	1,97	Meningkat

Hasil pengukuran tingkat kemajuan indikator kinerja Indeks Pebangunan Manusia apabila diperbandingkan antara realisasi tahun 2023 sebesar 69,14 dengan tahun 2022 sebesar 68,61 maka realisasi indikator kinerja Indeks Pembangunan Manusia mengalami peningkatan dari tahun 2022 sebesar 0,77%, sedangkan indikator Presentase Penduduk Miskin juga mengalami peningkatan sebesar 1,97%, yaitu dari 15,20% tahun 2022 menjadi 14,90% tahun 2023.

Capain indikator kinerja Indeks Pembangunan Manusia dan Presentase Penduduk Miskin tahun 2023 dan apabila dibandingkan dengan target tahun terakhir Rencana Pembangunan Daerah atau tahun 2026, maka dapat ditampilkan sebagaimana tabel berikut :

Tabel II.79.
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tujuan 7
Tahun 2023 dengan Target Akhir RPD Tahun 2026

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Keterangan
		2023	Target akhir RPD Tahun 2026	Capaian (%)	
Indeks Pembangunan Manusia	Angka	69,14	68,75	100,57	Tercapai
Persentase Penduduk Miskin	%	14,90	12,46-11,64	80,42	Belum Tercapai

Capaian indikator kinerja Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2023 apabila dibandingkan dengan dari target akhir tahun RPD tahun 2026 telah tercapai sebesar 100,57% sedangkan indikator Presentase Penduduk Miskin, realisasi kinerja sebesar 80,42% belum tercapai atau masih dibawah target yang telah ditetapkan.

Menurut United Nations Development Programme (UNDP), IPM didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*a process of enlarging the choice of people*). IPM mengukur pencapaian hasil pembangunan dari suatu daerah/wilayah dalam tiga dimensi dasar pembangunan yaitu: lamanya hidup, pengetahuan/tingkat pendidikan dan standard hidup layak. Angka IPM memberikan gambaran komprehensip mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakuan oleh suatu negara/daerah. Semakin tinggi nilai IPM suatu negara/daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik.

Pembangunan manusia menurut standar United Nations Development Program (UNDP), terdiri dari 4 kriteria, yakni kategori rendah (0 ≤ IPM < 60), kategori sedang (60 ≤ IPM < 70), kategori tinggi (70 ≤ IPM < 80) dan kategori sangat tinggi (80 ≤ IPM ≤ 100).

Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Banjarnegara tahun 2023 sebesar 69,14% dalam kategori sedang. Adapun perkembangan IPM Kabupaten Banjarnegara dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik II.26.
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2019-2023

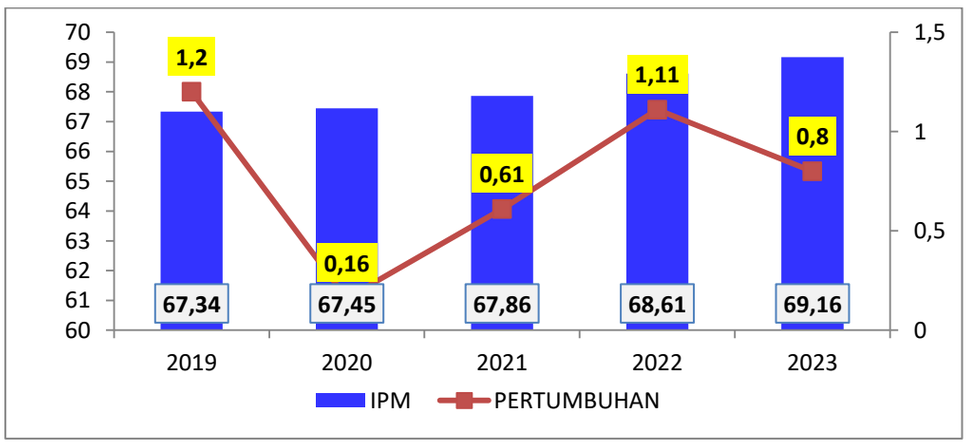

Sumber : Data Badan Pusat Statistik Banjarnegara Tahun 2024

Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa IPM Kabupaten Banjarnegara dalam kurun waktu 2019 sampai dengan 2023 dalam tren positif atau mengalami pertumbuhan rata-rata 0,45 % dengan kategori sedang berdasarkan kategori dari UNDP.

Sedangkan capaian IPM Kabupaten Banjarnegara tahun 2023 diperbandingkan dengan capaian IPM dengan Kabupaten/Kota dan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional sisajikan sebagai berikut :

Grafik II.27.
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023

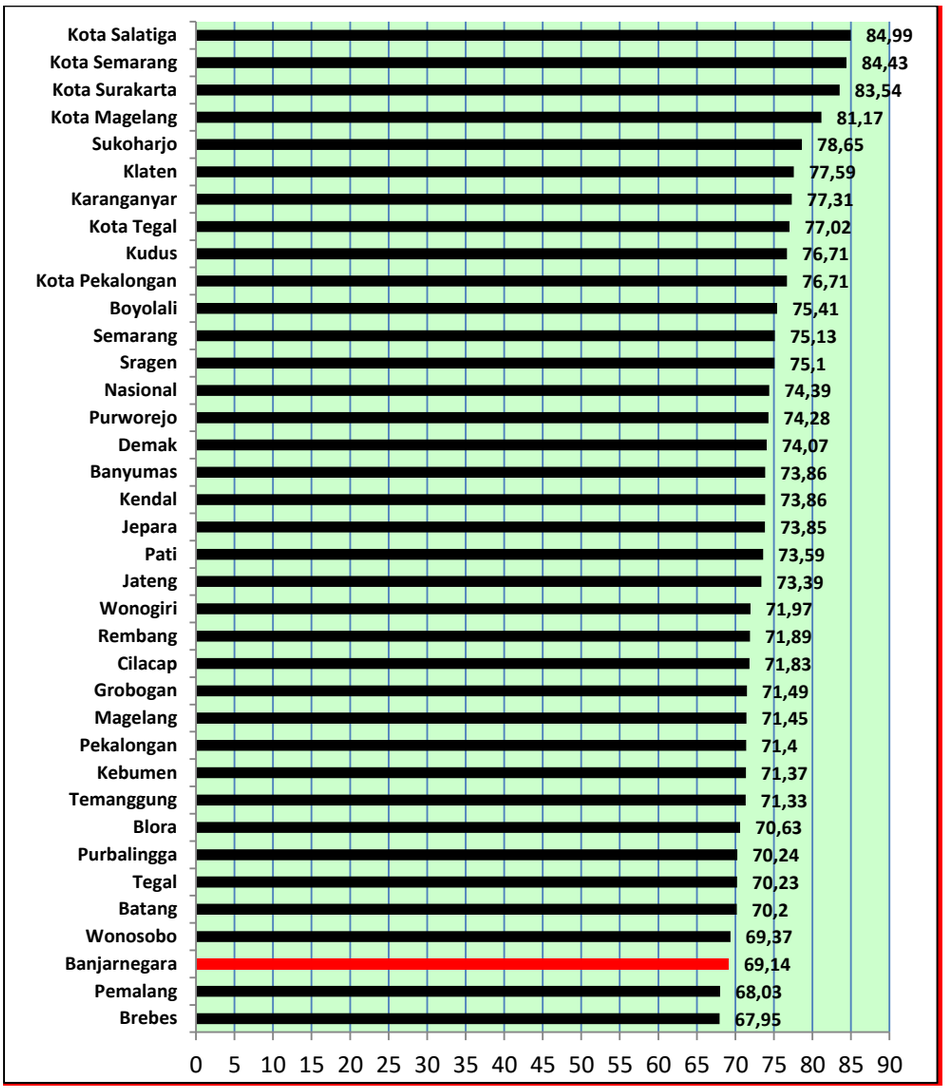

Sumber : Data Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara ,2024

Dari Grafik diatas dapat dilihat bahwa IPM Kabupaten Banjarnegara dibawah Provinsi Jawa Tengah (73,39) dan Nasional (74,39), sedangkan dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya, IPM Kabupaten Banjarnegara dibawah 32 Kabupaten/kota lainnya tetapi diatas IPM Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Brebes.

Realisasi indikator Persentase Penurunan Kemiskinan tahun 2023 sebesar 14,90 % berdasarkan data BPS Provinsi Jawa Tengah yang dirilis tanggal 10 November 2023 menurun sebesar 0,3% dari tahun 2022 sebesar 15,20%, dimana pada tahun 2023 tercatat penduduk miskin sejumlah 138.990 jiwa.

Perkembangan persentase tingkat kemiskinan Kabupaten Banjarnegara selama lima tahun terakhir 2019-2023 dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik II.28.
Pesentase Penduduk Miskin Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023

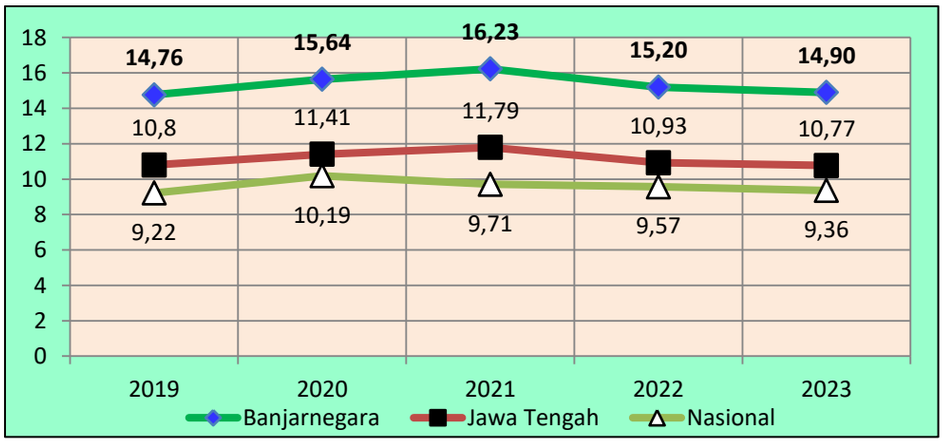

Sumber : Data Badan Pusat Statistik Prov. Jawa Tengah Tahun 2024

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir angka kemiskinan Kabupaten Banjarnegara mengalami fluktuasi. Pada kurun waktu tahun 2019 sampai dengan 2021 angka kemiskinan di Kabupaten Banjarnegara menunjukkan *trend* meningkat rata-rata sebesar 0,735/tahun. Kenaikan ini terjadi salah satu faktornya adalah karena dampak pandemi c*ovid-19* dalam kurun waktu 2020 -2021*.* Kebijakan pemerintah dalam penanganan *covid-19* berdampak langsung pada sektor ekonomi dan sosial di masyarakat, dimana terjadi penurunan pendapatan masyarakat karena adanya pembatasan akses dalam skala besar yang mengakibatkan sebagian masyarakat mengalami penurunan penghasilan bahkan kehilangan pekerjaan.

Pada tahun 2022 dengan semakin meredanya penyebaran virus *covid-19* berdampak besar pada menurunnya angka kemiskinan, hal ini disebabkan karena adanya peningkatan mobilitas masyarakat serta mulai pulihnya aktifitas perekonomian masyarakat sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan mempengaruhi angka kemiskinan, kondisi ini ditandai dengan pertumbuhan ekonomi Banjarnegara tahun 2022 yang mencapai 5, 29% naik mengalami kenaikan dari tahun 2021 sebesar 3,26% dan penurunan persentase penduduk miskin Kabupaten Banjarnegara dari 16,23 tahun 2021 turun menjadi 14,90% tahun 2023.

Apabila persentase penduduk miskin Kabupaten Banjarnegara tahun 2023 dibandingkan dengan Kabupaten/Kota se Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, maka persentase penduduk miskin Kabupaten Banjarnegara diatas Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Sedangkan capaian presentase penduduk miskin Kabupaten Banjarnegara tahun 2023 dibandingkan dengan Kabupaten/Kota se Jawa Tengah, maka posisi persentase penduduk miskin Kabupaten Banjarnegara menempati urutan ke 30 diatas Kabupaten Kebumen, Brebes Wonosobo, Pemalang dan Purbalingga, seperti dalam grafik berikut ini :

Grafik II.29.
Pesentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2023

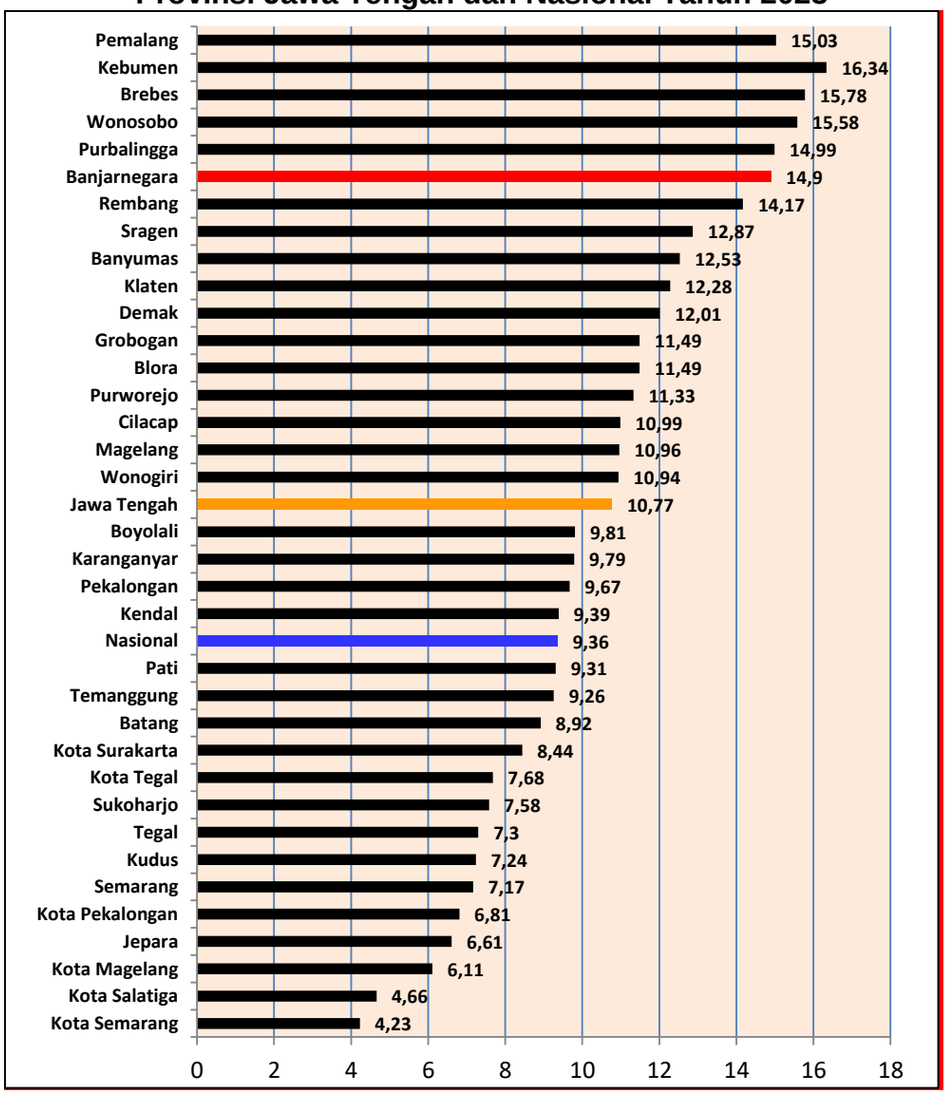

Sumber : Data Badan Pusat Statistik Prov. Jawa Tengah Tahun 2024

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian Tujuan 7 antara lain :

1. Terlaksananya kebijakan peningkatan usia harapan hidup, harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta standar hidup layak.
2. Terlaksananya kebijakan penyediaan infrastruktur dan layanan kesehatan dasar yang murah, berkualitas, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan penduduk.
3. Terlaksananya kebijakan penyediaan infrastruktur pendidikan tingkat menengah dan tinggi yang cukup representatif, berkualitas dan mudah diakses oleh seluruh lapisan penduduk.
4. Terlaksananya kebijakan kemudahan berusaha bagi masyarakat, sehingga meningkatkan level kesejahteraan penduduk.
5. Terlaksananya program-program *pro-poor* yang dialokasikan dari berbagai stakeholder.
6. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan akses cakupan pelayanan dasar masyarakat miskin;
7. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
8. Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil:

Sasaran 14	:	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Untuk mencapai Sasaran 14 ” Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat”, diukur dengan 5 (lima) indikator kinerja, yaitu Menurunnya Angka Kematian Neonatal, Angka Harapan Hidup, Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan Prevalensi Stunting. Adapun pencapaian target dari indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel II.80.
Capaian Indikator Kinerja Sasaran 14 Tahun 2023

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Keterangan
		Target	Realisasi	Capaian (%)	
Menurunnya Angka Kematian Neonatal,	Per 1000 KH	8,5	10,2	76,47	Tinggi
Angka Harapan Hidup	Tahun	74,48	74,47	99,99	Sangat Timggi
Angka Kematian Ibu	Per 100.000 KH	210	125,6	140,19	Sangat Timggi

Angka Kematian Bayi	Per 1000 KH	12,5	13,1	95,2	Sangat Timggi
Prevalensi Stunting	%	19	17,46	108,11	Sangat Timggi
Rata-rata Capaian Kinerja				103,99	

Capaian indikator kinerja Sasaran 14 “Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat”, yaitu Menurunnya angka kematian neonatal dari target 8,5 kematian neonatal terealisasi 10,2 kematian neonatal per 1000 KH sehingga capaian kinerja sebesar 76,47%, indikator Angka Harapan Hidup, dari target 74,48 tahun terealisasi 74,47 tahun sehingga capaian kinerja sebesar 99,99%, indikator Angka Kematian Ibu dari target 210 kematian ibu per 100.000 KH terealisasi 125,6 kematian ibu per 100.000 KH sehingga capaian kinerja sebesar 140,19%, indikator Angka Kematian Bayi dari target 12,5 kematian per 1000 KH terealisasi 13,1 kematian per 1000 KH sehingga capaian kinerja sebesar 95,2%, indikator Prevalensi Stunting dari target 19% terealisasi 17,46% dengan capaian kinerja 108,11%, sehingga rata rata capaian kinerja Sasaran 14 sebesar 103,99% sebagaimana ditampilkan dalam tabel diatas.

Capaian indikator kinerja Sasaran 14 pada tahun 2023 apabila dibandingkan dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel II.81.
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 14
Tahun 2023 dengan Tahun 2022

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Keterangan
		2022	2023	Tingkat Kemajuan (%)	
Menurunnya Angka Kematian Neonatal,	Per 1000 KH	7,7	10,2	32,47	Menurun
Angka Harapan Hidup	Tahun	74,37	74,47	0,13	Meningkat
Angka Kematian Ibu	Per 100.000 KH	130,83	125,6	4	Meningkat
Angka Kematian Bayi	Per 1000 KH	13,01	13,1	0,69	Menurun
Prevalensi Stunting	%	18,27	17,46	4,43	Meningkat

Capaian indikator kinerja Sasaran 14 “Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat”, yaitu Menurunnya angka kematian neonatal

realisasi tahun 2022 sebesar 7,7 kematian neonatal per 1000 KH dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar 10,2 kematian neonatal per 1000 KH mengalami penurunan kinerja sebesar 32,47%, indikator Angka Harapan Hidup, realisasi tahun 2022 sebesar 74,37 dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar 74,47 tahun mengalami kenaikan kinerja sebesar 0,13%, indikator Angka Kematian Ibu realisasi tahun 2022 sebesar 130,83 kematian ibu per 100.000 KH dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar 125,6 kematian ibu per 100.000 KH mengalami peningkatan kinerja 4%, indikator Angka Kematian Bayi realisasi tahun 2022 sebesar 13,01 dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar 13,1 kematian per 1000 KH mengalami penurunan kinerja sebesar sebesar 0,69% dan indikator Prevalensi Stunting realisasi tahun 2022 sebesar 18,27% dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar 17,46% mengalami kenaikan kinerja sebesar 4,43%. sebagaimana ditampilkan dalam tabel diatas.

Capain indikator kinerja Sasaran 14 tahun 2023 apabila dibandingkan dengan target tahun terakhir Rencana Pembangunan Daerah atau tahun 2026, maka dapat ditampilkan sebagaimana tabel berikut :

Tabel II.82.
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 14
Tahun 2023 dengan Target Akhir RPD Tahun 2026

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Keterangan
		2023	Target akhir RPD Tahun 2026	Capaian (%)	
Menurunnya Angka Kematian Neonatal,	Per 1000 KH	10,2	7	54,29%	Beum Tercapai
Angka Harapan Hidup	Tahun	74,47	75,08	99,19	Belum Tercapai
Angka Kematian Ibu	Per 100.000 KH	125,6	150	116,27	Tercapai
Angka Kematian Bayi	Per 1000 KH	13,1	11,9	89,92	Beum Tercapai
Prevalensi Stunting	%	17,46	16	90,88	Beum Tercapai

Capaian indikator kinerja Sasaran 14 “Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat”, yaitu Menurunnya angka kematian neonatal realisasi tahun 2023 sebesar 10,2 kematian neonatal per 1000 KH

dibandingkan dengan target akhir tahun RPD tahun 2026 sebesar 7 kematian neonatal per 1000 KH sehingga capaian kinerja sebesar 54,29%, maka capaian kinerja belum tercapai, indikator Angka Harapan Hidup realisasi tahun 2023 sebesar 74,47 tahun dibandingkan dengan target akhir tahun RPD tahun 2026 sebesar 75,08 tahun sehingga capaian kinerja sebesar 99,19% maka capaian kinerja belum tercapai, indikator Angka Kematian Ibu realisasi tahun 2023 sebesar 125,6 kematian ibu per 100.000 KH dibandingkan dengan target akhir tahun RPD tahun 2026 sebesar 150 kematian ibu per 100.000 KH sehingga capaian kinerja sebesar 116,27% maka capaian kinerja tercapai, indikator Angka Kematian Bayi realisasi tahun 2023 sebesar 13,1 kematian per 1000 KH dibandingkan dengan target akhir tahun RPD tahun 2026 sebesar 11,9 kematian per 1000 KH sehingga capaian kinerja sebesar 89,92% maka capaian kinerja belum tercapai dan indikator Prevalensi Stunting realisasi tahun 2023 sebesar 17,46% dibandingkan dengan target akhir tahun RPD tahun 2026 sebesar 16 % sehingga capaian kinerja sebesar 90,88% maka capaian kinerja belum tercapai, sebagaimana ditampilkan dalam tabel diatas.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga, menyebutkan bahwa pembangunan keluarga dilakukan dalam upaya untuk mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat. Selain lingkungan yang sehat, kondisi kesehatan dari tiap anggota keluarga sendiri juga merupakan salah satu syarat dari keluarga yang berkualitas.

Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dalam mewujudkan kesehatan masyarakat yang berkualitas mencantukan dalam Rencana Pembangunan Daerah 2023 dalam Sasaran 14 yaitu Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat dengan 5 (lima) indikator kinerja yaitu Menurunnya Angka Kematian Neonatal, Angka Harapan Hidup, Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan Prevalensi Stunting.

Realisasi kinerja Indikator kinerja Menurunnya Angka Kematian Neonatal dalam kurun waktu lima tahun dari tahun 2019 sampai dengan 2023 sebagai berikut :

Grafik II.30.
Angka Kematian Neonatal
di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019-2023

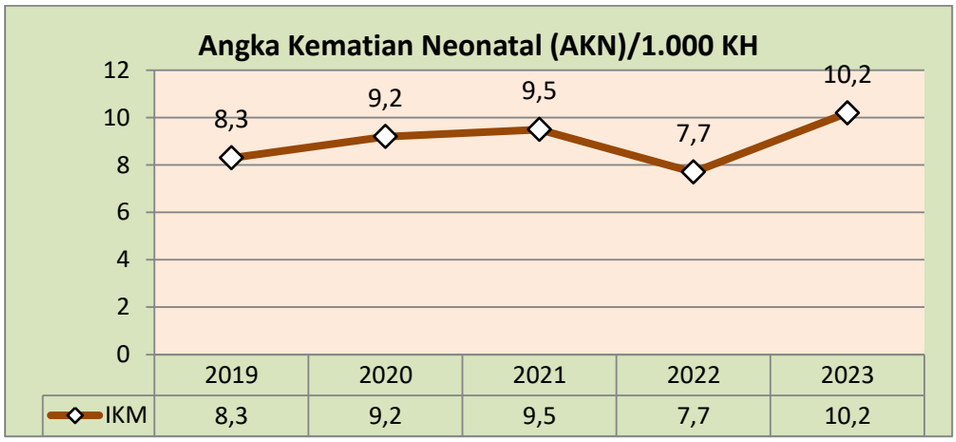

Sumber : Data Dinas Kesehatan Kab. Banjarnegara, 2024

Penyebab kematian bayi tahun 2023 rentang usia neonatal (0-28 hari) yaitu BBLR dan prematuritas 49 kasus, asfiksia 26 kasus, kelainan kongenital 31 kasus, infeksi 7 kasus, dan lain lain 9 kasus. Penyebab kematian post neonatal (29 hari-11 bulan) yaitu pneumonia 6, diare 3, penyakit syaraf 1 kasus, dan lain-lain 26 kasus. Penyebab lain-lain yaitu aspirasi, hipotermia, gagal nafas, RSDS, pneumonia, Cardiac Arrst, Ensefalitis, KDK, suspec auto imun, hipetermia, gagal nafas, kecelakaan lalu lintas, meningitis, suspect ileus, perdarahan otak.

Kejadian Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) merupakan penyebab kematian bayi tertinggi di Kabupaten Banjarnegara. Bayi berat lahir rendah (BBLR) adalah bayi baru lahir dengan berat badan lahir kurang dari 2500 gram tanpa memandang masa kehamilan. Berat Lahir adalah berat badan bayi baru lahir yang ditimbang sejak 0-24 jam setelah kelahiran. Adanya persalinan perterm (belum cukup kehamilan), persalinan gemelli (kembar) menyebabkan bayi lahir dengan berat kurang dari 2500gr.

Bayi baru lahir yang berat badannya kurang atau sama dengan 2500 gram disebut low birth weight infant (BBLR), BBLR mempunyai resiko mengalami kematian neonatal sebanyak 2 kali dibandingkan dengan bayi yang tidak mengalami BBLR. Faktor yang berpengaruh terhadap kejadian BBLR antara lain status gizi ibu seperti KEK dan anemia, penyakit yang menyertai ibu selama hamil seperti malaria, infeksi menular seksual, hipertensi, HIV/AIDS, TORCH, penyakit jantung, usia ibu saat hamil masih terlalu muda kurang dari 20 tahun,

jarak kehamilan terlalu dekat, ibu dengan riwayat melahirkan BBLR, aktivitas ibu hamil yang berlebihan BBLR memerlukan perawatan khusus karena mempunyai permasalahan yang banyak sekali pada sistem tubuhnya disebabkan kondisi tubuh yang belum stabil, hal ini membutuhkan sarana dan prasarana yang lengkap dan petugas yang kompeten untuk perawatan BBLR.

Pemenuhan sarana prasarana untuk perawatan BBLR baik ditingkat Puskesmas maupun Rumah Sakit masih diperlukan, seperti perawatan BBLR saat bayi baru lahir, stabilsasi untuk pra rujukan dan perawatan ditingkat rujukan. Perawatan BBLR selain dengan pemenuhan sarana prasarana juga dapat menggunakan Perawatan dengan Metode Kanguru, PMK merupakan cara yang efektif untuk memenuhi kebutuhan bayi yang paling mendasar yaitu kehangatan, air susu ibu, perlindungan dari infeksi, stimulasi, keselamatan dan kasih sayang. Metode ini merupakan salah satu teknologi tepat guna yang sederhana, murah dan sangat dianjurkan untuk perawatan BBLR. Metode kanguru tidak hanya sekedar menggantikan peran inkubator, namun juga memberikan berbagai keuntungan yang tidak dapat diberikan inkubator, terbukti dapat menurunkan kejadian infeksi, penyakit berat, masalah menyusuidan ketidakpuasan ibu serta meningkatkan hubungan antara ibu dengan bayi.

Keberhasilan upaya kesehatan ibu, diantaranya dapat dilihat dari indikator Angka Kematian Ibu (AKI). AKI adalah jumlah kematian ibu selama masa kehamilan, persalinan, dan nifas yang disebabkan oleh kehamilan, persalinan, dan nifas atau pengelolaannya tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan, terjatuh, dan lain-lain disetiap 100.000 kelahiran hidup.

Angka Kematian Ibu (AKI) dihitung dari banyaknya wanita yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100. 000 kelahiran hidup. Angka kematian ibu merupakan jumlah kematian ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas dibagi dengan jumlah kelahiran hidup kali 100.000 KH dan hal ini dapat diberlakukan ditingkat nasional dan provinsi. Jika di tingkat Kabupaten menggunakan proporsi kematian ibu dikarenakan jumlah kelahiran

hidup di Kabupaten Banjarnegara tidak pernah mencapapi 100.000KH/tahun.

Kematian ibu biasanya terjadi karena tidak mempunyai akses ke pelayanan kesehatan ibu yang berkualitas, terutama pelayanan kegawatdaruratan tepat waktu yang dilatarbelakangi oleh terlambat mengenal tanda bahaya dan mengambil keputusan, terlambat mencapai fasilitas kesehatan, serta terlambat mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan. Selain itu penyebab kematian maternal juga tidak terlepas dari kondisi ibu itu sendiri dan merupakan salah satu dari kriteria 4 “terlalu”, yaitu terlalu tua pada saat melahirkan (>35 tahun), terlalu muda pada saat melahirkan (4 anak), terlalu rapat jarak kelahiran/paritas (<20 tahun), terlalu banyak anak (>4 anak), terlalu rapat jarak kelahiran/paritas.

Data selama lima tahun terakhir mengalami kanaikan kasus yang sangat tinggi yaitu pada tahun 2021 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dimana penyebab kematian tertinggi dikarenakan covid, dari jumlah kasus kematian ibu 41 atau secara proporsi kematian ibu 287,1/100.000 KH 26 kasus disebabkan karena covid 19.

Tahun 2023 secara jumlah kasus kematian ibu maupun secara proporsi kematian ibu menurun, namun pada Tahun 2022 jumlah kasus kematian ibu yang disebabkan bukan sebanyak 17 kasus dengan proporsi kematian ibu 130,8/100.000 KH dan pada Tahun 2023 jumlah kasus kematian ibu 15 kasus dan proporsi kematian ibu 125,6/100.000 KH.

Adapaun perkembangan Angka Kematian Ibu (AKI) selama enam tahun dari tahun 2018 sampai dengan 2023 ditampilkan pada grafik berikut :

Grafik II.31.
Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018-2023

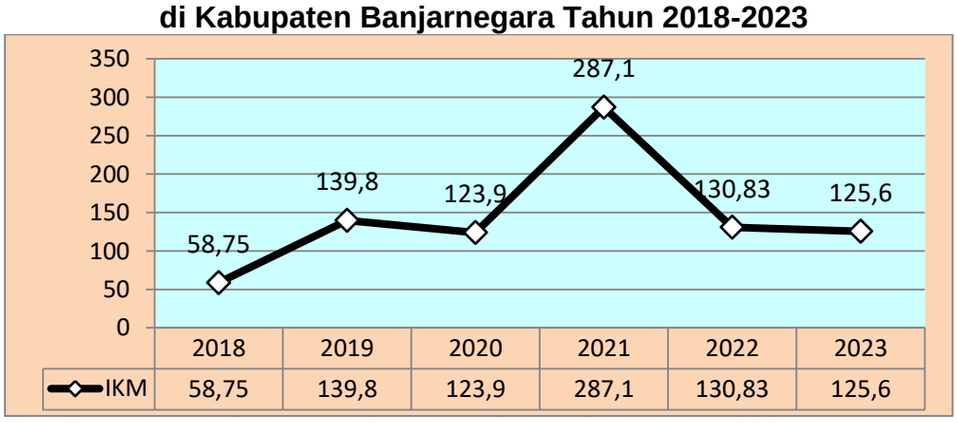

Sumber : Data Dinas Kesehatan Kab. Banjarnegara, 2024

Kematian ibu dengan jumlah 15 kasus, 3 kasus merupakan titipan KTP dimana ibu sudah lama tidak tinggal di Kabupaten Banjarnegara namun belum mengurus surat pindah. Penentuan kematian ibu sesuai dengan Maternal Perinatal Death Notification (MPDN) adalah berdasarkan KTP ibu, selama ibu belum ada surat pindah domisili maka kematian ibu akan menjadi milik daerah sesuai alamat KTP ibu. Masyarakat Kabupaten Banjarnegara merupakan masyarakat dengan mobilitas tinggi namun masih lemah dalam ketertiban administrasi kependudukan.

Penyebab kematian ibu pada tahun 2023 disebabkan karena penyebab langsung sebanyak 6 kasus yaitu perdarahan 3 kasus, *eklamsia* 2 kasus, infeksi 1 kasus dan kasus kematian ibu dengan penyebab tidak langsung sebanyak 9 kasus yaitu gangguan metabolik 1 kasus, covid 1 kasus dan lain-lain 7 kasus, adapun penyebab kematian lain-lain yaitu *enchephalitis, hepatitis*, penyakit jantung, SLE, *Pneumonia*, gagal ginjal, *malignan neoplasma of glottis*.

Jika dibandingkan dengan target tahun 2023 yaitu sebesar 210/100.000 KH maka capaian Angka Kematian Ibu sudah tercapai, dimana Angka Kematian Ibu merupakan target negatif dengan capaian kinerja 140%.

Kematian ibu dengan penyebab langsung karena perdarahan sebanyak 3 kasus terjadi pada masa nifas yaitu dua meninggal di Rumah Sakit dan satu meinggal di Rumah pasien, masa nifas 2 kasus dan saat bersalin 1 kasus. Perdarahan postpartum merupakan penyebab utama kematian ibu pasca persalinan. Semua wanita yang melahirkan dengan usia kehamilan lebih dari 20 minggu beresiko untuk mengalami perdarahan post partum dan gejala sisanya. Perdarahan *postpartum* didefinisikan sebagai kehilangan darah lebih dari 500 mL setelah persalinan vaginal atau lebih dari 1000 mL setelah sesar. Perdarahan *postpartum primer* terjadi dalam 24 jam pertama setelah persalinan, sementara perdarahan postpartum sekunder adalah perdarahan pervaginam yang lebih banyak dari normal antara 24 jam hingga 12 minggu setelah persalinan. Penyebab perdarahan postpartum yang paling sering adalah uterus tidak dapat berkontraksi dengan baik untuk menghentikan perdarahan dari bekas insersi plasenta (tone), trauma jalan lahir (trauma), sisa plasenta atau bekuan darah yang menghalangi kontraksi uterus yang adekuat (tissue), dan

gangguan pembekuan darah (*thrombin*). Pada praktiknya, jumlah perdarahan post partum jarang sekali diukur secara objektif. Selain itu, beberapa pasien mungkin saja membutuhkan intervensi yang lebih walaupun jumlah perdarahan yang dialaminya lebih sedikit apabila pasien tersebut berada dalam kondisi anemis.

Tingginya kasus perdarahan sebagai penyebab tertinggi pada kematian ibu juga dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya yaitu perdarahan post partum sebelumnya, pre eklamsia, kehamilan ganda, kala 3 memanjang, kala 2 memanjang, fase aktif memanjang, usia ibu >35 tahun, anastesia umum, kegemukan, *multiparitas, Secsio Sesaria* sebelumnya, bayi besar, demam> 38◦C, induksi persalinan, status gizi ibu hamil seperti anemia dan KEK dan juga kompetensi dari petugas dalam melaksanakan deteksi dini faktor resiko serta penatalaksanaan kegawatdaruratan kasus perdarahan.

Pada kasus perdarahan diperlukan deteksi dini faktor resiko yang lebih maksimal dari langkah anamnesa, penegakkan diagnosa dan pengambilan keputusan klink yang tepat. Pada saat penanganan kasus persalinan awal pasien datang, petugas banyak yang melewatkan langkah konsul dokter puskesmas ataupun dokter penanggungjawab serta dokter konsulen diwilayah kerjanya, sehingga ditemukan kasus beresiko namun belum tepat dalam penatalaksanaannya. Pada kasus perdarahan post partum ini juga dipengaruhi faktor sosial dimana ibu hamil merupakan kehamilan yang tidak diinginkan sehingga kehamilan disembunyikan dan tidak pernah kontak dengan tenaga kesehatan sampai ibu melahirkan dan sampai ibu meninggal dirumah. Ibu hamil masih merupakan remaja dimana usia ibu hamil masih dibawah 20 tahun dan tidak pernah mendapatkan sosialisasi kesehatan reproduksi remaja.

Kasus kematian yang disebabkan oleh pre eklamsia juga disebabkan keterlambatan dalam melakukan deteksi dini sehingga terlambat dalam pengambilan keputusan klinik dan juga penatalaksanaan yang terlambat.

Kasus kematian ibu sebanyak 15 kasus jika dilihat dari status pendidikan yaitu dengan tingkat pendidikan SD 13,3%, SMP 33,3%, SMA 40% dan 6,6%. Jika dilihat dari segi pendidikan ibu, didominasi dengan pendidikan SMA artinya pendidikan ibu sudah meningkat dibandingkan tahun sebelumnya dengan persentase pendidikan ibu yang meninggal didominasi dengan pendidikan SD.

Selain masalah diatas belum semua ibu hamil memiliki jaminan pembiayaan, adanya masalah gizi pada remaja putri serta ibu hamil dan masih tingginya kasus pernikahan dini (kehamilan < 17 tahun) yaitu sebanyak 369 kasus dan persalinan sebanyak 307 kasus di tingkat masyarakat. Keterbatasan tenaga, sarana dan prasarana yang tersedia baik di Puskesmas PONED maupun puskesmas Non PONED. Kabupaten Banjarnegara baru memiliki 2 Rumah Sakit PONEK.

Masalah lain yang juga mempunyai pengaruh terhadap tingginya kematian ibu antara lain adalah masih adanya petugas kesehatan yang belum maksimal melakukan deteksi risiko tinggi pada ibu hamil dan pada masa nifas, belum semua Puskesmas memberikan Pelayanan ANC teringrasi secara optimal, keterlibatan dokter dalam memberikan pelayanan KIA belum optimal, dimana sesuai kebijakan program kemenkes semua ibu hamil harus kontak dengan dokter dalam satu periode kehamilan minimal 2 kail dan diberikan layanan USG yaitu pada umur kehamilan trimester 1 dan 3. Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan dalam penanganan kegawatdaruratan *maternal* dan *neonatal* masih diperlukan. Belum semua tenaga kesehatan pemberi pelayanan KIA patuh dalam penggunaan buku KIA sesuai juknis dan belum memanfaatkan secara maksimal. Buku KIA merupakan alat pantau status kesehatan ibu hamil sejak awal kehamilan, persalinan, ibu nifas, bayi dan balita. Kemenkes menetapkan buku KIA sebagai alat pencatatan kesehatan ibu dan anak di tingkat keluarga. Selain sebagai media pencatatan, buku KIA juga digunakan sebagai media Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) bagi ibu hamil dan balita untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan anak secara rutin. Selain itu, di tengah keterbatasan tenaga kesehatan di Puskesmas, terdapat beberapa tenaga bidan, baik bidan Puskesmas maupun bidan di desa yang diberikan tugas tambahan untuk memegang beberapa program sehingga hal ini berpengaruh terhadap kinerja bidan menjadi kurang maksimal.

Upaya yang sudah dilakukan pada tahun 2023, sebagai berikut :

1. Orientasi buku KIA bagi kader Posyandu
2. Orientasi pemantauan pertumbuhan dan perkembangan bagi kader posyandu
3. Pelaksanaan kelas ibu hamil, ibu menyusui dan kelas ibu balita dengan dana BOK
4. Pelaksanaan posyandu Balita, Remaja dan Lansia
5. Pemantapan P4K bagi linsek, kader dan ibu hamil

6. Advokasi kedesa saat Musrenbang tentang alokasi dana untuk pelaksanaan kelas dan posyandu
7. Sweeping ibu hamil risti dan yang tidak melakukan pemeriksaan (ANC)
8. AMP sosial
9. Orientasi Skrining Layak hamil bagi kader posyandu dan Lintas Sektor
10. Pemenuhan USG untuk semua Puskesmas dengan bersumber dana DAK Fisik Kemenkes
11. Peningkatan Kapasitas tenaga kesehatan melalui Pelatihan ANC dan USG bagi dokter
12. Orientasi Penatalaksanaan Kegawatdaruratan Maternal Neonatal
13. Penguatan Jejaring dalam Penurunan AKI dan AKB
14. TOT Kegawatdaruratan Maternal Neonatal
15. Antisipasi budaya permisif di masyarakat dg penguatan agama dan hindari pengaruh media yg negatif

Upaya yang akan di laksanakan di tahun 2024 dan 2025, sebagai berikut :

1. Evaluasi ANC terintegrasi di 35 Puskesmas
2. Sosilaisasi AMP SR
3. AMP
4. AMP Sosial
5. Pertemuan Teknis Pengelola Remaja terintegrasi dengan petugas UKS
6. Usulan Pemberian TTD Rematri dijadikan indikator kinerja Dindikpora
7. Pendampingan Spesialis Anak dan Obsgyn di 35 Puskesmas
8. Pertemuan peningkatan nakes tentang capaian KB Pasca Salin
9. Kalakarya MTBM di 35 Puskesmas
10. Kalakarya MTBS di 35 Puskesmas
11. Peningkatan kapasitas nakes, pemenuhan sarana dan pra sarana, perbaikan sistem rujukan sudah dilakukan meskipun harus tetap dilakukan evaluasi.

Angka Kematian Bayi (AKB) dihitung dari jumlah kematian bayi 0≤12 bulan per 1000 kelahiran hidup di suatu wilayah dalam satu tahun. Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Banjarnegara tahun 2023 adalah 13,1/1000 kelahiran hidup dimana secara absolut dihitung dari jumlah kematian bayi sebesar 157 dengan kelahiran hidup sebesar 11.940. Angka Kematian Bayi (AKB) tahun 2023 meningkat

dibanding tahun 2022 yang sebesar 13,01/1000 kelahiran hidup dengan jumlah kematian 169 kasus dari 12.994 kelahiran hidup. Peningkatan Angka Kematian Bayi ini secara perhitungan disebabkan karena adanya penurunan jumlah kelahiran hidup dibanding tahun sebelumnya meskipun kasus kematian yang lebih sedikit. Angka AKB di Kabupaten Banjarnegara tahun 2019 sampai dengan 2023 ditampilkan pada grafik berikut :

Grafik II.32.
Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019-2023

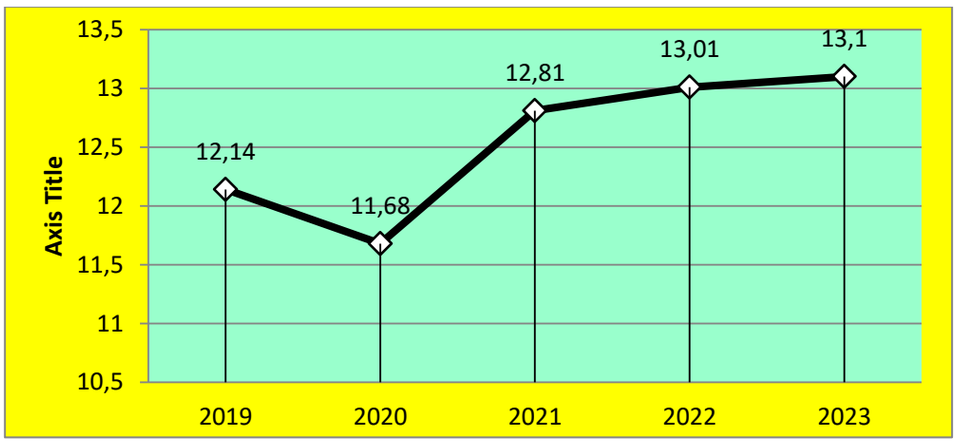

Sumber : Data Dinas Kesehatan Kab. Banjarnegara, 2024

Penyebab kematian bayi tahun 2023 rentang usia neonatal (0-28 hari) yaitu BBLR dan prematuritas 49 kasus, asfiksia 26 kasus, kelainan kongenital 31 kasus, infeksi 7 kasus, dan lain lain 9 kasus. Penyebab kematian post neonatal (29 hari-11 bulan) yaitu pneumonia 6, diare 3, penyakit syaraf 1 kasus, dan lain-lain 26 kasus. Penyebab lain-lain yaitu aspirasi, hipotermia, gagal nafas, RSDS, pneumonia, Cardiac Arrst, Ensefalitis, KDK, suspec auto imun, hipetermia, gagal nafas, kecelakaan lalu lintas, meningitis, suspect ileus, perdarahan otak.

Kejadian Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) merupakan penyebab kematian bayi tertinggi di Kabupaten Banjarnegara. Bayi berat lahir rendah (BBLR) adalah bayi baru lahir dengan berat badan lahir kurang dari 2500 gram tanpa memandang masa kehamilan. Berat Lahir adalah berat badan bayi baru lahir yang ditimbang sejak 0-24 jam setelah kelahiran. Adanya persalinan perterm (belumcukup kehamilan), persalinan gemelli (kembar) menyebabkan bayi lahir dengan berat kurang dari 2500gr.

Bayi baru lahir yang berat badannya kurang atau sama dengan 2500 gram disebut low birth weight infant (BBLR), BBLR mempunyai resiko mengalami kematian neonatal sebanyak 2 kali dibandingkan dengan bayi yang tidak mengalami BBLR. Faktor yang berpengaruh terhadap kejadian BBLR antara lain status gizi ibu seperti KEK dan anemia, penyakit yang menyertai ibu selama hamil seperti malaria, infeksi menular seksual, hipertensi, HIV/AIDS, TORCH, penyakit jantung, usia ibu saat hamil masih terlalu muda kurang dari 20 tahun, jarak kehamilan terlalu dekat, ibu dengan riwayat melahirkan BBLR, aktivitas ibu hamil yang berlebihan BBLR memerlukan perawatan khusus karena mempunyai permasalahan yang banyak sekali pada sistem tubuhnya disebabkan kondisi tubuh yang belum stabil, hal ini membutuhkan sarana dan prasarana yang lengkap dan petugas yang kompeten untuk perawatan BBLR.

Pemenuhan sarana prasarana untuk perawatan BBLR baik ditingkat Puskesmas maupun Rumah Sakit masih diperlukan, seperti perawatan BBLR saat bayi baru lahir, stabilsasi untuk pra rujukan dan perawatan ditingkat rujukan. Perawatan BBLR selain dengan pemenuhan sarana prasarana juga dapat menggunakan Perawatan dengan Metode Kanguru, PMK merupakan cara yang efektif untuk memenuhi kebutuhan bayi yang paling mendasar yaitu kehangatan, air susu ibu, perlindungan dari infeksi, stimulasi, keselamatan dan kasih sayang. Metode ini merupakan salah satu teknologi tepat guna yang sederhana, murah dan sangat dianjurkan untuk perawatan BBLR. Metode kanguru tidak hanya sekedar menggantikan peran inkubator, namun juga memberikan berbagai keuntungan yang tidak dapat diberikan inkubator, terbukti dapat menurunkan kejadian infeksi, penyakit berat, masalah menyusuidan ketidakpuasan ibu serta meningkatkan hubungan antara ibu dengan bayi.

Upaya yang sudah dilakukan sebagai berikut :

1. Orientasi buku KIA bagi kader Posyandu
2. Orientasi pemantauan pertumbuhan dan perkembangan bagi kader posyandu
3. Pelaksanaan kelas ibu hamil, ibu menyusui dan kelas ibu balita dengan dana BOK
4. Pelaksanaan posyandu Balita, Remaja dan Lansia
5. Pemantapan P4K bagi linsek, kader dan ibu hamil

6. Advokasi kedesa saat Musrenbang tentang alokasi dana untuk pelaksanaan kelas dan posyandu
7. Sweeping ibu hamil risti dan yang tidak melakukan pemeriksaan (ANC)
8. Orientasi Skrining Layak hamil bagi kader posyandu dan Lintas Sektor
9. Antisipasi budaya permisif di masyarakat dg penguatan agama dan hindari pengaruh media yg negatif
10. Kalakarya MTBS
11. Penguatan ANC terintegrasi untuk nutrisionis dan pengelola jiwa
12. Pertemuan Orientasi SDIDTK bagi guru PAUD
13. Pelatihan PJB dan SHK
14. Manajemen orientasi BBLR dan Neonatal Esensial
15. Orientasi Kegawatdaruratan Maternal Neonatal
16. Manajemen Asfiksia
17. Pendampingan Spesialis ke Puskesmas
18. Pemenuhan sarpras yaitu infant warmer, pulse oksimetri, CPAP

Upaya yang akan di laksanakan di tahun 2024 dan 2026, sebagai berikut

1. Evaluasi Pemanfaatan buku KIA melalui evaluasi ANC terintegrasi
2. Peningkatan kapasitas nakes dalam pelayanan KN dengan menggunakan MTBM melalui kegiatan kalakarya MTBM
3. Pendampingan dan pengelolaan ibu hamil dengan status gizi kurang maupun buruk secara terintegrasi
4. Pemberian Rematri pada anak sekolah
5. Sosilisasi tentang screening PJB kritis pada bayi baru lahir
6. Sosialisasi AMP SR
7. AMP Medis dan Sosial
8. Pengelolaan ibu hamil dengan paparan asap rokok dengan penempelan stiker dilarang merokok dirumah ibu hamil
9. Edukasi tentang kehamilan yang aman dan sehat
10. Pengelolaan Bayi dengan Berat Bayi Lahir Rendah dengan menjaga kehangatan bayi tersebut dengan menggunakan alat penghangat seperti inkubator saat bayi dirawat dirumah

Adapun perkembangan penanganan stunting di Kabupaten Banjarnegara dari tahun 2019 sampai dengan 2023 ditampilkan pada grafik berikut :

Grafik II.33.
Prevalensi Stunting (%)
di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018-2023

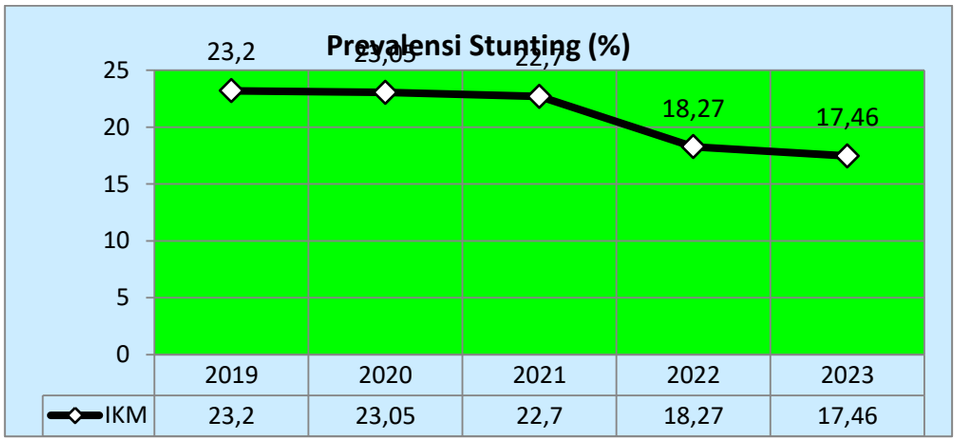

Sumber : Data Dinas Kesehatan Kab. Banjarnegara, 2024

Berdasarkan grafik di atas maka Persentase balita stunting di Kabupaten Banjarnegara mengalami penurunan sebesar 0,81% dibandingkan tahun 2022. Jika dibandingkan dengan target akhir renstra tahun 2023 persentase balita stunting 19%, maka dengan capaian tahun 2023 sebesar 17,46 % persentase balita stunting sudah tercapai.

Berdasarkan hasil review Renstra Tahun 2021 ada perubahan penentuan indikator sasaran strategis, dimana sebelumnya dalam renstra Dinas Kesehatan Tahun 2017-2022, indikator persentase balita stunting berada sebagai indikator kegiatan. Kemudian adanya kebijakan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, sesuai arahan presiden bahwa persentase balita stunting wajib menjadi indikator strategis OPD agar menjadi perhatian dan keselarasan antara pusat dan daerah.

Berbagai upaya percepatan penurunan stunting telah dilakukan dengan sinergi multisektoral yang tergabung dalam Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Banjarnegara. Dalam upaya penurunanan stunting Dinas Kesehatan berperan terutama dalam melaksanakan intervensi spesifik.

Upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan pada tahun 2023 adalah dengan melakukan intervensi spesifik seperti pemberian suplemen gizi untuk balita gizi buruk berupa formula 100 dan pangan kepentingan medis khusus (PKMK), susu untuk ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK), pemberian tablet tambah darah untuk ibu hamil dan remaja putri, skrining anemia pada remaja putri kelas 7 dan 10,

pemberian vitamin A dua kali setahun untuk bayi dan balita, pelatihan Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) pada kader, surveylans gizi, pemantauan pertumbuhan dan perkembangan di Posyandu. Pemenuhan alat antropometri kit untuk seluruh Posyandu juga telah dilakukan sehingga pemantauan pertumbuhan dapat dilakukan dengan lebih akurat.

Upaya yang akan dilaksanakan dalam rangka percepatan penurunan stunting di Kabupaten Banjarnegara terutama dalam pencapaian target Nasional Pada Tahun 2024 sebesar 14% adalah pemberian makanan tambahan lokal untuk balita dengan masalah gizi dan ibu hamil KEK; tata laksana bagi balita gizi buruk dengan formula 100; meningkatkan surveylans gizi melalui e-ppgbm; kampanye gizi pada remaja; pemberian tablet tambah darah untuk ibu hamil, remaja dan calon pengantin; sosialisasi PMBA kepada kader, ibu hamil dan ibu balita; peningkatan pemanfaatan buku KIA; pelatihan PMBA; peningkatan pelayanan balita sesuai standar.

Target Prevalensi Stunting (%) di RPD Kabupaten Banjarnegara tahun 2024 adalah sebesar 18%. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan yaitu:

1. Perlunya mendorong masyarakat untuk membawa balita ke Posyandu secara rutin setiap bulan agar pemantauan pertumbuhan dan perkembangan dapat dilakukan sebagai deteksi dini gangguan pertumbuhan dan perkembangan.
2. Perlunya monitoring kegiatan remaja putri minum tablet tambah darah seminggu sekali di sekolah.
3. Pemberian makanan tambahan lokal sesuai sasaran yang telah ditetapkan yaitu balita tidak naik berat badan (weightfaltering), balita bawah garis merah (BGM), balita gizi kurang dan ibu hamil KEK perlu pemantauan dan pendampingan secara rutin.
4. Sinergitas dengan intervensi sensitif terkait pemenuhan air bersih, akses pangan bergizi dan peningkatan ekonomi masyarakat perlu terus ditingkatkan oleh pemerintah daerah.

Sedangkan Indikator Angka Harapan Hidup Berdasarkan data yang dirilis BPS Provinsi Jawa Tengah tanggal 1 Desember 2023 Angka Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Banjarnegara sebesar 74,47 Tahun.

Perkembangan Indikator Angka Harapan Hidup Kabupaten Banjarnegara dari tahun 2021 sampai tahun 2023 ditampikan pada grafik berikut :

Grafik II.34.
Angka Harapan Hidup di Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2021-2023

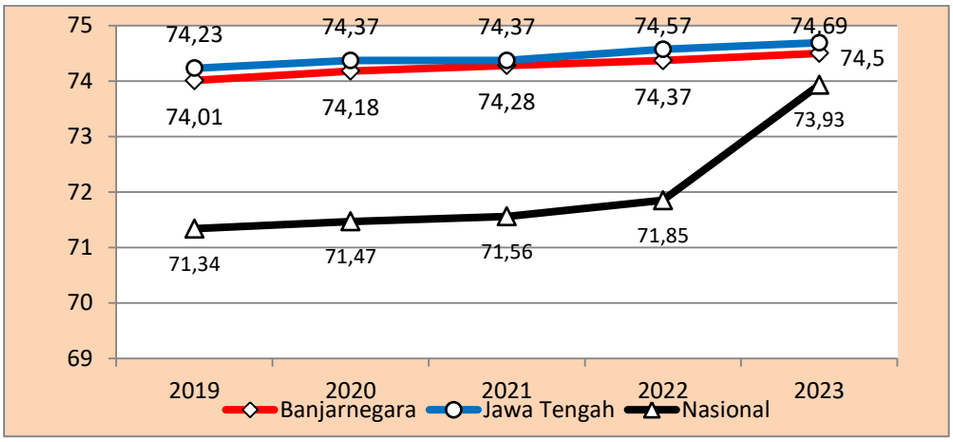

Sumber : Data Dinas Kesehatan Kab. Banjarnegara, 2024

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan salah satu indikator penyusun Indeks Pembangunan Manusia. Usia Harapan Hidup mengindikasikan peluang bayi yang baru lahir akan mencapai usia harapan hidup sekian tahun.

Konsep Definisi Usia Harapan Hidup adalah Rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang *yang* telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Dalam perumusannya idealnya usia harapan hidup dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (Age Spesific Death Rate/ASDR) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun – tahun. Capaian Usia Harapan Hidup menggambarkan rata-rata lama waktu hidup seseorang dalam suatu populasi. Semakin tinggi angka harapan suatu wilayah, menandakan semakin baik pula derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat didalamnya.

Usia Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

Sasaran 15	:	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan

Untuk mencapai Sasaran 15 ” Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan”, diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja, yaitu Angka Harapan Lama Sekolah dan Angka Rata-rata Lama Sekolah. Adapun pencapaian target dari indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel II.83.
Capaian Indikator Kinerja Sasaran 15 Tahun 2023

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Keterangan
		Target	Realisasi	Capaian (%)	
Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	11,65	11,82	101,46	Sangat Tinggi
Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	6,75	6,86	101,63	Sangat Tinggi
Rata-rata Capaian Kinerja				101,55	Sangat Tinggi

Capaian indikator kinerja Sasaran 15 “Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan”, yaitu Angka Harapan Lama Sekolah dari target 11,65 tahun terealisasi 11,82 tahun sehingga capaian kinerja sebesar 101,46%, sedangkan indikator Angka Rata-rata Lama Sekolah, dari target 6,75 tahun terealisasi 6,86 tahun sehingga capaian kinerja sebesar 101,63%, sehingga rata rata capaian kinerja Sasaran 15 sebesar 101,55% sebagaimana ditampilkan dalam tabel diatas.

Capaian indikator kinerja Sasaran 15 pada tahun 2023 apabila dibandingkan dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel II.84.
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 14
Tahun 2023 dengan Tahun 2022

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Keterangan
		2022	2023	Tingkat Kemajuan (%)	
Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	11,81	11,82	0,08	Meningkat
Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	6,84	6,86	0,29	Meningkat

Hasil pengukuran tingkat kemajuan indikator kinerja Sasaran 15 “Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan”, yaitu

Angka Harapan Lama Sekolah realisasi tahun 2022 sebesar 11,81 tahun dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar 11,82 tahun mengalami peningkatan kinerja sebesar 0,08%, sedangkan indikator Angka Rata-rata Lama Sekolah, realisasi tahun 2022 sebesar 6,84 dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar 6,86 tahun mengalami kenaikan kinerja sebesar 0,29%, sebagaimana ditampilkan dalam tabel diatas.

Capain indikator kinerja Sasaran 15 tahun 2023 apabila dibandingkan dengan target tahun terakhir Rencana Pembangunan Daerah atau tahun 2026, maka dapat ditampilkan sebagaimana tabel berikut :

Tabel II.85.
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 15
Tahun 2023 dengan Target Akhir RPD Tahun 2026

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Keterangan
		2023	Target akhir RPD Tahun 2026	Capaian (%)	
Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	11,81	11,82	0,08	Meningkat
Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	6,84	6,86	0,29	Meningkat

Capaian indikator kinerja Sasaran 15 “Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan”, yaitu yaitu Angka Harapan Lama Sekolah dari realisasi tahun 2023 sebesar 11,82 tahun dibandingkan dengan target akhir tahun RPD tahun 2026 sebesar 11,69 tahun sehingga capaian kinerja sebesar 101,11%, maka capaian kinerja telah tercapai sedangkan indikator Angka Rata-rata Lama Sekolah realisasi tahun 2023 sebesar 6,86 tahun dibandingkan dengan target akhir tahun RPD tahun 2026 sebesar 7,01 tahun sehingga capaian kinerja sebesar 97,86% maka capaian kinerja belum tercapai, sebagaimana ditampilkan dalam tabel diatas.

Rata-rata lama sekolah (RLS) adalah angka yang menggambarkan lamanya (tahun) masa sekolah yang dialami penduduk usia 25 tahun ke atas. Harapan lama sekolah (HLS) adalah angka yang menggambarkan lamanya (tahun) masa sekolah yang diharapkan dapat dialami penduduk usia 7 tahun ke atas di masa yang akan datang. RLS dapat digunakan untuk mengetahui tingkat dan

kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah, sedangkan HLS didefenisikan sebagai lamanya sekolah (tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal pada waktu tertentu, dan dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang.

Berdasarkan data dari BPS Provinsi Jawa Tengah yang dirilis pada tanggal 1 Desember 2023. Bahwa Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Rata-rata Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Banjarnegara tahun 2023 mengalami kenaikan dari tahun 2022, dimana angka rata-rata lama sekolah pada tahun 2022 sebesar 6,84 tahun naik menjadi 6,86 tahun pada tahun 2023. Hal ini diartikan bahwa rata rata penduduk di Kabupaten Banjarnegara yang usia 25 tahun ke atas baru bisa mengenyam pendidikan setara dengan jenjang SMP kelas satu semester satu. Sedangkan Angka Rata-rata Harapan Lama Sekolah (HLS) juga mengalami kenaikan dari 11,81 tahun pada tahun 2022 menjadi 11,82 tahun pada tahun 2023. Hal ini diartikan bahwa anak-anak usia 7 tahun berpeluang menempuh pendidikan hingga SMA/sederajat sampai kelas 2.

Grafik berikut ini akan menyajikan data Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Banjarnegara mulai dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.

Grafik II.35.
Perkembangan Angka Rata-rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019-2023

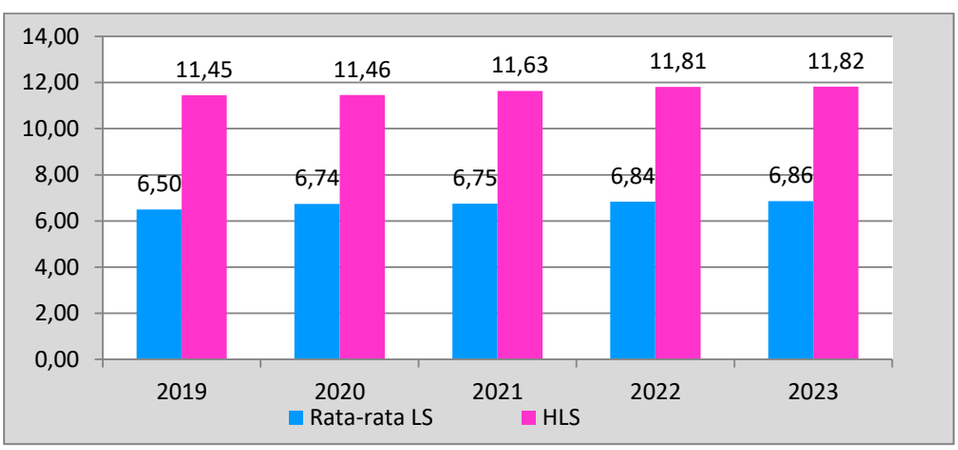

Sumber : Data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2024

Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa rata – rata lama sekolah di Kabupaten Banjarnegara setiap tahunnya selalu mengalami

peningkatan. Selama enam tahun terakhir atau 2019 sampai dengan 2023 rata-rata lama sekolah di Kabupaten Banjarnegara mengalami peningkatan sebesar 0,37 tahun atau rata-rata peningkatan per tahun sebesar 0,09 tahun. Hal ini menunjukkan kinerja dan usaha yang konsisten dari pemangku kepentingan untuk meningkatkan lama sekolah dalam rangka meningkatkan kualitsa sumber daya manusia.

Apabila realisasi indikator Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Banjarnegara tahun 2022 dibandingkan dengan realisasi Provinsi Jawa Tengah, maka realisasi indikator ini lebih rendah 1 tahun, dimana capaian relisasi indikator Angka Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 sebesar 7,93. Sedangkan Perbandingan data capaian Kabupaten/Kota yang ada di eks Karisidenan Banyumas dan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Banjarnegara dapat disajikan pada grafik sebagai berikut.

Grafik II.36.
Perbandingan Posisi Angka RLS Kabupaten Banjarnegara Dengan Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2023

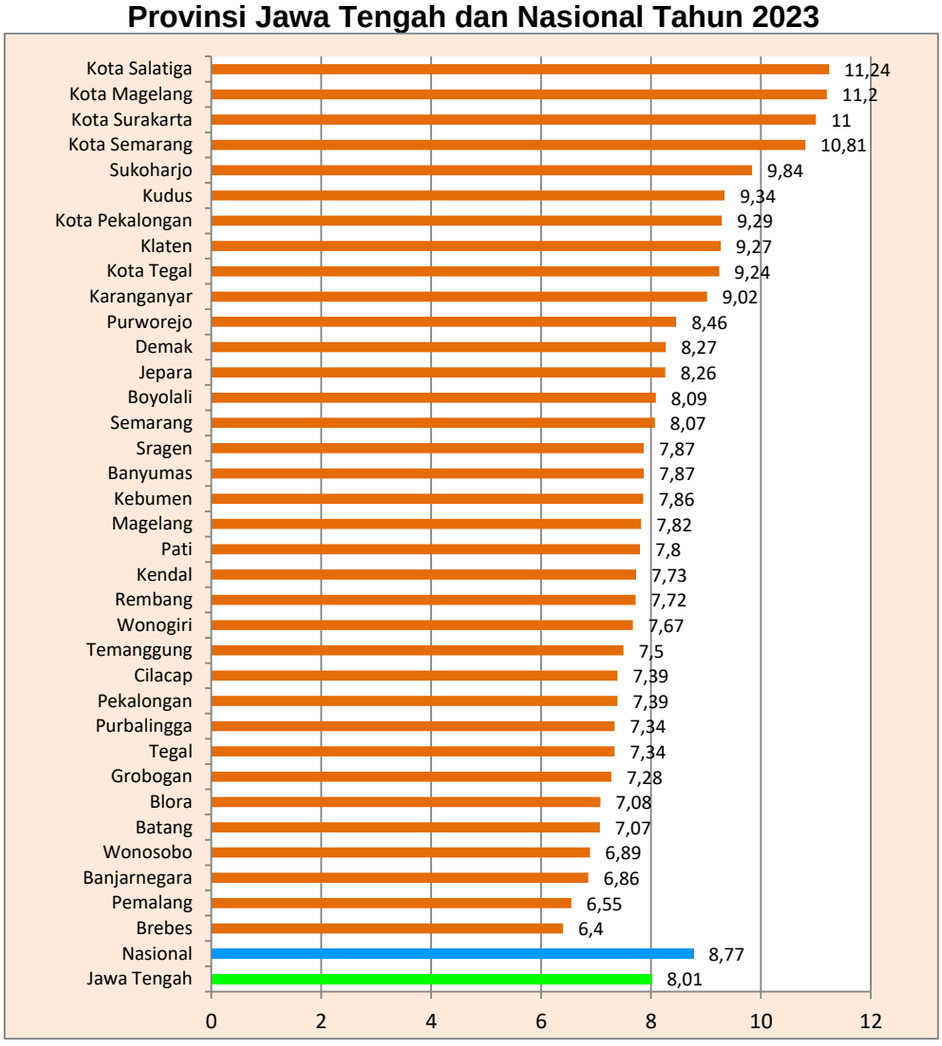

Sumber : Data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2024

Berdasarkan grafik diatas dapat diketahui bahwa capaian indikator Angka Rata-rata Sekolah Kabupaten Banjarnegara menempati urutan ke-33 se Jawa Tengah serta dibawah capaian RLS Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.

Ketercapaian Angka Rata-rata Lama Sekolah tahun 2023 tidak lepas dari peranan Pendidikan kesetaraan yang semakin baik, yaitu dengan mendorong penduduk usia diatas 25 tahun untuk menempuh jalur Pendidikan kesetaraan (Paket A, B dan C). Selain itu, pendidikan vokasi melalui program keaksaraan dan kewirausahaan desa juga diarahkan agar masyarakat bisa mengenyam Pendidikan yang dipadukan dengan ketrampilan kerja/life skill. Dalam rangka mendukung ketercapaian RLS di Kabupaten Banjarnegara, kebutuhan fasilitas pendidikan formal secara bertahap tiap tahunnya telah dipenuhi. Di samping itu, berbagai program pemerintah dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Banjarnegara turut berperan dalam meningkatkan kesadaran generasi penerus terutama anak-anak untuk menempuh pendidikan yang lebih baik. Program Bantuan Operasional Siswa (BOS) dirasakan sangat membantu siswa dalam hal pembiayaan pendidikan utamanya pendidikan formal, karena dengan adanya program tersebut siswa terutama dari sekolah negeri dibebaskan dari biaya bulanan sekolah. Disamping itu, Program Indonesia Pintar (PIP) yang merupakan program pemerintah secara nasional berperan dalam membantu siswa dari keluarga kurang mampu untuk tetap melanjutkan pendidikannya terutama pada pendidikan formal sehingga dapat terhindar dari putus sekolah. Sasaran PIP ditujukan untuk membantu kebutuhan pribadi siswa dalam menunjang kegiatan sekolah antara lain untuk pembelian seragam sekolah, sepatu sekolah dan biaya transportasi sekolah.

Selain hal tersebut, Program Pendidikan Nonformal / Kesetaraan merupakan strategi Pemerintah Kabupaten Banjarnegara untuk meningkatkan angka Rata-rata Lama Sekolah. Dengan pemberdayaan satuan Pendidikan kesetaraan, masyarakat usia 25 tahun keatas yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar dan mengengah kita fasilitasi dengan Pendidikan kesetaraan, yaitu melalui penyelenggaraan pembelajaran pada Kelompok Belajar (Pokjar) Paket A setara SD, Paket B setara SMP, Paket C setara SMA. Gerakan ayo belajar untuk

semua umur yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar dan menengah.

Melalui Program Guru Penggerak, Program Induksi Guru Pemula (PIGP), maka diperlukan adanya peningkatan kompetensi, kreativitas, inovasi guru dalam pembelajaran, sehingga siswa akan tertarik untuk belajar di sekolah, di tambah pula dengan sarana dan prasarana tercukupi sehingga akan mendukung pembelajaran yang menarik. Selain hal tersebut masih perlu di tingkatkan upaya gotong royong untuk memotivasi agar anak anak usia sekolah kembali sekolah dengan Gerakan Ayo Sekolah.

Kreativitas dan inovasi guru dalam pembelajaran perlu ditingkatkan sehingga siswa akan tertarik untuk belajar di sekolah, selain itu sarana dan prasarana tercukupi sehingga akan mendukung pembelajaran yang menarik.

Sedangkan angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Banjarnegara berdasarkan data dari BPS rilis pada tanggal 1 Desember 2023, Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2023 dengan capaian sebesar 11,82 tahun mengalami kenaikan sebanyak 0,01 tahun dari tahun 2022 yaitu sebesar 11,81 Tahun.

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar.

Perbandingan capaian Angka Harapan Lama Sekolah HLS Kabupaten Banjarnegara dengan HLS Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional dapat ditampilkan dalam grafik berikut :

Grafik II.37.
Perbandingan Posisi Angka HLS Kabupaten Banjarnegara Dengan Kab/Kota Se Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2023

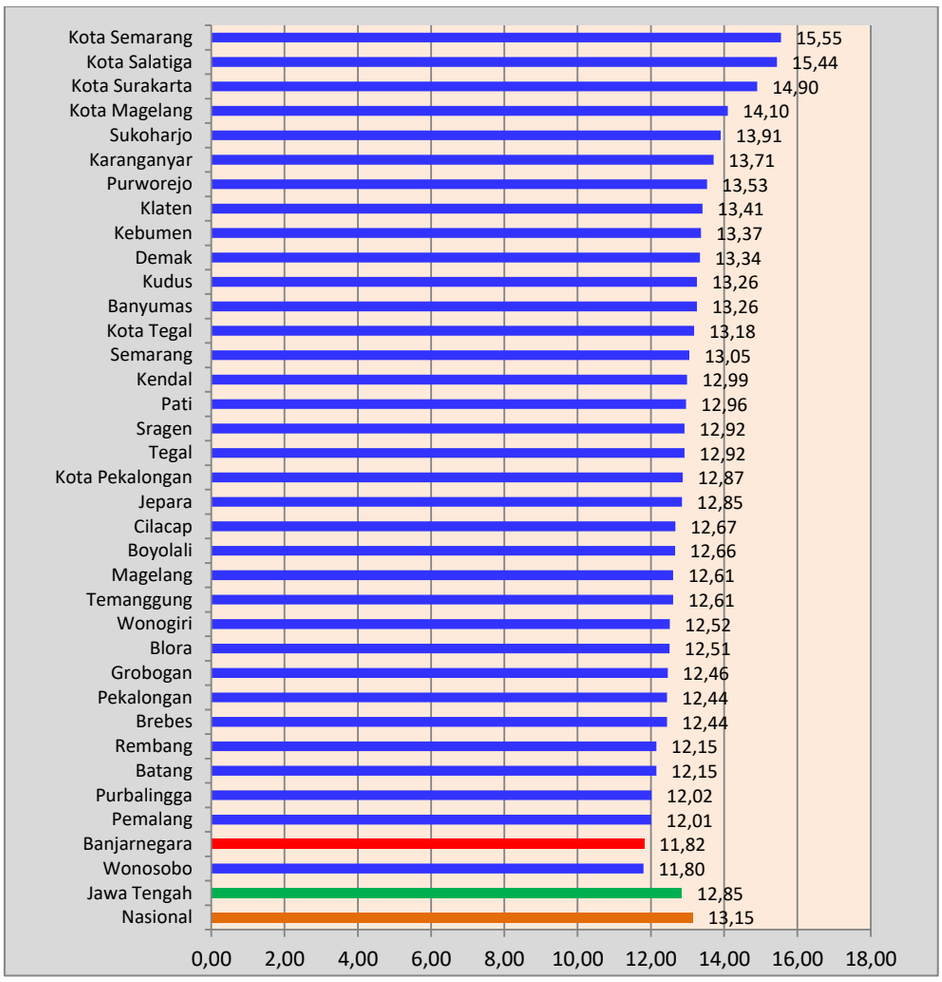

Sumber : Data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2024

Berdasarkan grafik diatas dapat diketahui bahwa capaian indikator Angka Rata-rata Sekolah Kabupaten Banjarnegara menempati urutan ke-34 se Jawa Tengah serta dibawah capaian HLS Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.

Angka harapan lama sekolah (HLS) didefisinikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu (7 tahun ke atas) dimasa mendatang. Intervensi kebijakan pembangunan pendidikan pada sekarang ini akan dapat berpengaruh pada angka capaian HLS. Hasil dari capaian tersebut dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Secara umum, kendala pelaksanaan kegiatan pelayanan pendidikan di Kabupaten Banjarnegara, yaitu terkait dengan tingginya

Anak Tidak Sekolah, dikarenakan Drop Out / Keluar, ataupun LTM (Lulus Tidak Melanjutkan). Kondisi ini tentunya menunjukkan adanya kendala dan permasalahan pada sektor pendidikan di Kabupaten Banjarnegara karena masih adanya anak tidak sekolah atau anak putus sekolah yang cukup tinggi karena berbagai faktor seperti faktor ekonomi, sosial budaya dan geografis (aksesibilitas rumah tinggal menuju sekolah).

Permasalahan yang menyebabkan masih rendahnya RLS dan HLS di Kabupaten Banjarnegara disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

1) Antusiasme masyarakat terutama yang putus sekolah untuk meneruskan / melanjutkan pendidikan melalui pendidikan non formal masih kurang
2) Biaya Operasional penyelenggaraan pendidikan Non Formal hanya dari dana BOP yang mana dana ini tidak diberikan untuk semua warga belajar. Hanya sekitar 80% untuk anak usia sekolah (7-18 tahun). Bantuan BOPDA hanya untuk mengkoordinir Anak Usia diatas 18 Tahun dengan BOPDA Kesetaraan dengan total Rp.1,5 M.
3) Budaya masyarakat pedesaan yang belum mengutamakan pendidikan sebagai kebutuhan, menyebabkan banyak anak yang putus sekolah demi mencari nafkah / pekerjaan yang dapat menghasilkan uang untuk mencukupi kebutuhan ekonomi.
4) Masih sering terjadi pernikahan dini di Banjarnegara.
5) Pemerintah Kabupaten hanya memiliki kewenangan menangani jenjang pendidikan SMP (usia 13 s.d. 15 tahun) adapun penduduk usia 16 tahun keatas merupakan usia pada jenjang sekolah menengah (SMA/SMK) yang merupakan kewenangan pemerintah Provinsi berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah Kabupaten hanya memiliki kewenangan pada urusan Pendidikan Dasar (jenjang SD dan SMP) dimana batasan usia adalah 7-15 Tahun.

Strategi yang sudah ditepuh untuk meningkatkan taraf pendidikan masyarakat antara lain :

1. Dengna Program Ternak Panda Lima (Nganter Anak PAUD dapat Ijazah SMA) merupakan program yang digulirka, program ini mencakup langkah2 konkret yaitu : Meningkatkan akses dan

kesempatan pendidikan, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil, terisolir, atau jauh dari lembaga pendidikan formal serta Meningkatkan kesadaran dan motivasi masyarakat akan pentingnya pendidikan melalui sosialisasi dan advokasi.

2. Penambahan jumlah PKBM untuk menampung anak putus sekolah dan anak tidak sekolah dalam pendidikan non formal.
3. Pembelajaran dilakukan secara blandet yaitu menggabungkan antara tatap muka dan daring untuk efisiensi dana operasional.
4. Rapat koordinasi dengan Camat dan perangkat desa dalam upaya mengedukasi masyarakat tentang pentingnya sekolah.
5. Melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk sosialisasi pentingnya pendidikan.

Sasaran 16	:	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah

Peningkatan infrastruktur menjadi prioritas Pembangunan di Kabupaten Banjarnegara, dengan harapan akan tercipta peningkatan perekonomian kabupaten melalui *multiplier* efek yang timbul dari berbagai aspek karena adanya peningkatan infrastruktur daerah.

Sasaran 16 “Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah, diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja dengan pencapaian sebagai berikut:

Tabel II.86.
Capaian Indikator Kinerja Sasaran 16 Tahun 2023

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Keterangan
		Target	Realisasi	Capaian (%)	
Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)	%	92,50	98,54	93,47	Sangat Tinggi

Capaian indikator kinerja Sasaran 16 “Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah”, yaitu Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) dari target 92,50 % terealisasi 98,54% sehingga capaian kinerja sebesar 93,47% sebagaimana ditampilkan dalam tabel diatas.

Capaian indikator kinerja Sasaran 16 pada tahun 2023 apabila dibandingkan dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel II.87.
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 16
Tahun 2023 dengan Tahun 2022

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Keterangan
		2022	2023	Tingkat Kemajuan (%)	
Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)	%	99,46	98,54	0,93	meningkat

Hasil pengukuran tingkat kemajuan indikator kinerja Sasaran 16 “Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah”, yaitu Indeks Kemahalan Konstruksi realisasi tahun 2022 sebesar 99,46% dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar 98,54% mengalami peningkatan kinerja sebesar 0,92%, sebagaimana ditampilkan dalam tabel diatas.

Capain indikator kinerja Sasaran 16 tahun 2023 apabila dibandingkan dengan target tahun terakhir Rencana Pembangunan Daerah atau tahun 2026, maka dapat ditampilkan sebagaimana tabel berikut :

Tabel II.88.
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 16
Tahun 2023 dengan Target Akhir RPD Tahun 2026

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Keterangan
		2023	Target akhir RPD Tahun 2026	Capaian (%)	
Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)	%	98,54	91,00	91,71	Belum Tercapai

Capaian indikator kinerja Sasaran 16 “Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah”, yaitu Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)dari realisasi tahun 2023 sebesar 98,52 % dibandingkan dengan target akhir tahun RPD tahun 2026 sebesar 91% sehingga capaian kinerja sebesar 91,71%, maka capaian kinerja belum tercapai, sebagaimana ditampilkan dalam tabel diatas.

Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) digunakan sebagai proxy untuk mengukur tingkat kemahalan bangunan konstruksi suatu daerah, semakin tinggi angka IKK di suatu daerah maka semakin tinggi pula biaya yang diperlukan untuk mendirikan sebuah bangunan di daerah tersebut.

Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Tahun 2023 adalah indeks harga yang menggambarkan tingkat kemahalan konstruksi suatu kabupaten/kota dibandingkan dengan kota acuan yaitu Kota Makassar. Kota acuan dipilih dengan mempertimbangkan nilai indeks suatu kota yang mendekati indeks rata-rata nasional, kelengkapan data, dan posisi kota dalam jalur perdagangan.

IKK tahun 2023 menggunakan data harga komoditas konstruksi, sewa alat berat dan upah jasa konstruksi yang dikumpulkan dalam 4 periode pencacahan yaitu Juli 2022, Oktober 2022, Januari 2023, dan April 2023. Seperti halnya IKK sebelumnya, IKK tahun 2023 menggunakan 4 periode pencacahan dikarenakan periode tersebut mencakup masa perencanaan dan pembangunan suatu proyek konstruksi. Sedangkan IKK tahun 2023 menggunakan penimbang yang lebih lengkap dan up to date yaitu menggunakan updating BoQ tahun 2022.

Dalam proses penghitungan IKK menggunakan 3 (tiga) penimbang yaitu w1, w2, dan w3. Penimbang pertama (w1) yakni Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pembentukan Barang Modal Bangunan yang digunakan untuk menghitung IKK dari (*Purchasing Power Parity*) PPP Proyek. Penimbang kedua (w2) yakni data dari *Bill of Quantity* (BoQ) kegiatan proyek yang sudah selesai (bukan RAB). Penimbang ini digunakan untuk menghitung PPP Jenis Bangunan dari PPP Sistem. Penimbang ketiga (w3) yakni data dari Buku Analisa Harga Satuan Pekerjaan Kementerian PUPR berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 1 Tahun 2022 (perubahan atas Peraturan Menteri Tahun 2016) yang digunakan untuk menghitung nilai komponen dari harga material dan upah jasa konstruksi.

Adapun Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten Banjarnegara tahun 2023 berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BPS tanggal 4 Oktober 2023 sebesar 98,54 %. Apabila diperbandingkan antara IKK tahun 2022 dengan tahun 2023, IKK tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 0,92% artinya bawa penyelnggaraan konstruksi tahun 2022 lebih mahal daripada penyelenggaraan konstruksi di tahun 2023. Perkembgnan IKK tahun 2020 sampai dengan 2023 disajikan sebagai berikut:

Grafik II.38.
Perkembangan IKK Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020 - 2023

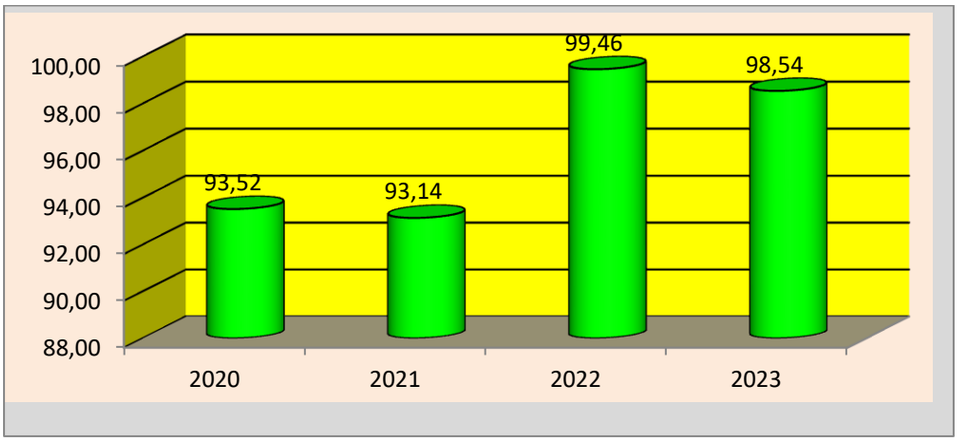

Sumber : Data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2024

Sedangkan Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/Kota se Provinsi Jawa Tengah ditampilkan pada grafik berikut ini;

Grafik II.39.
Perbandingan IKK Kabupaten Banjarnegara Dengan Kab/Kota Se Jawa Tengah, Tahun 2023

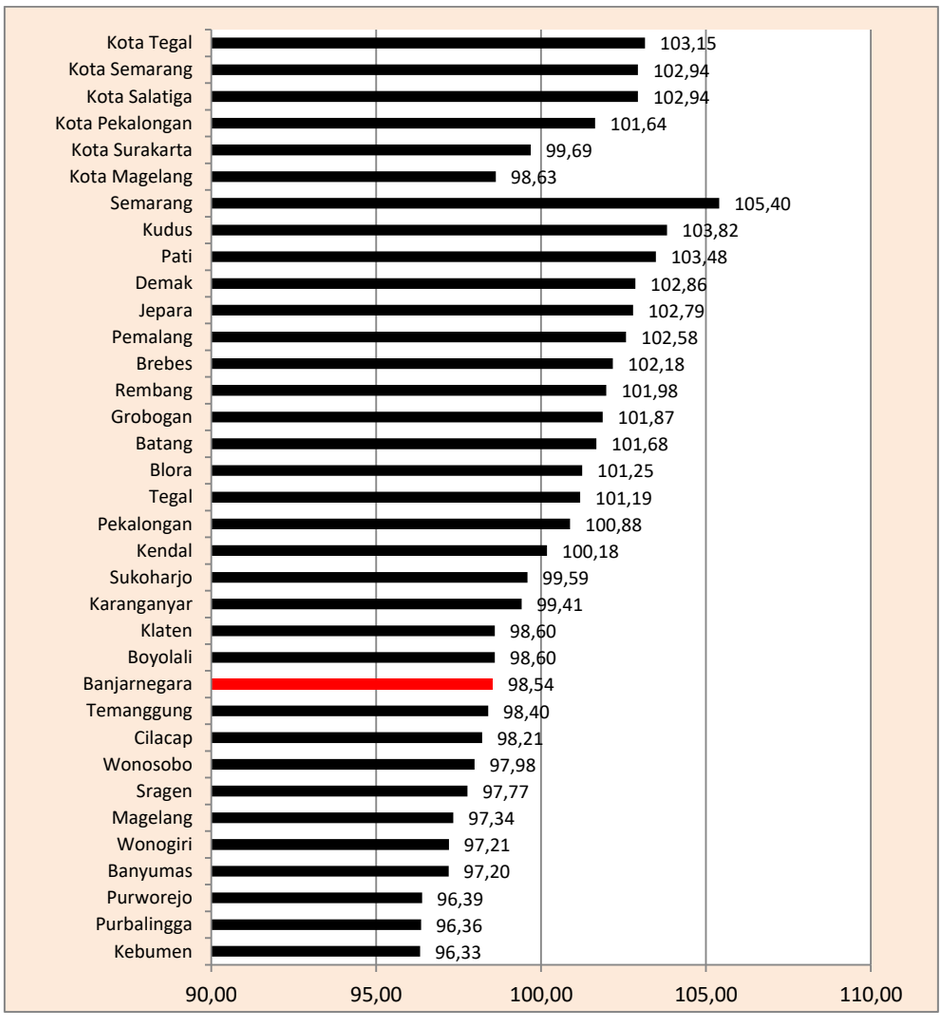

Sumber : Data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2024

Berdasarkan grafik diatas dapat diketahui bahwa capaian indikator IKK Kabupaten Banjarnegara menempati urutan ke-12 se Jawa Tengah.

Sasaran 17	:	Meningkatnya Cakupan Rumah Layak Huni

Upaya penanggulangan kemiskinan telah dilakukan pemerintah pusat maupun daerah. Berbagai strategi, kebijakan, program dan kegiatan pengentasan kemiskinan telah dirancang dan dilaksanakan. Demikian halnya di Kabupaten Banjarnegara pengentasan kemiskinan menjadi salah satu isu trategis dari perencanaan pembangunan. Salah satu sasaran strategis RPD adalah meningkatnya cakupan rumah layak huni dengan indikator Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni.

Adapun capaian indikator tersebut pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel II.89.
Capaian Indikator Kinerja Sasaran 17 Tahun 2023

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Keterangan
		Target	Realisasi	Capaian (%)	
Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	%	82	88	107,32	Sangat Tinggi

Capaian indikator kinerja Sasaran 17 “Meningkatnya Cakupan Rumah Layak Huni”, yaitu Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni dari target 82% terealisasi 88% sehingga capaian kinerja sebesar 107,32% sebagaimana ditampilkan dalam tabel diatas.

Capaian indikator kinerja Sasaran 17 pada tahun 2023 apabila dibandingkan dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel II.90.
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 17
Tahun 2023 dengan Tahun 2022

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Keterangan
		2022	2023	Tingkat Kemajuan (%)	

Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	%	87,12	88	1,01	meningkat

Hasil pengukuran tingkat kemajuan indikator kinerja Sasaran 17 “Meningkatnya Cakupan Rumah Layak Huni”, yaitu Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni realisasi tahun 2022 sebesar 87,12% dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar 88% mengalami peningkatan kinerja sebesar 1,01%, sebagaimana ditampilkan dalam tabel diatas.

Capain indikator kinerja Sasaran 17 tahun 2023 apabila dibandingkan dengan target tahun terakhir Rencana Pembangunan Daerah atau tahun 2026, maka dapat ditampilkan sebagaimana tabel berikut :

Tabel II.91.
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 17
Tahun 2023 dengan Target Akhir RPD Tahun 2026

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Keterangan
		2023	Target akhir RPD Tahun 2026	Capaian (%)	
Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	%	88	88	100	Tercapai

Capaian indikator kinerja Sasaran 17 “Meningkatnya Cakupan Rumah Layak Huni”, yaitu Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni dari realisasi tahun 2023 sebesar 88 % dibandingkan dengan target akhir tahun RPD tahun 2026 sebesar 88% sehingga capaian kinerja sebesar 100%, maka capaian kinerja telah tercapai, sebagaimana ditampilkan dalam tabel diatas.

Berdasarkan data BDT tahun 2015, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara telah berusaha untuk mengurangi rumah tidak layak huni yang di huni oleh masyarakat berpenghasilan rendah yang direncanakan dalam RPD Tahun 2023-2026 dengan indikator Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni. Sehingga diharapkan semua masyarakat di Kabupaten Banjarnegara mampu menempati ruma layak huni.

Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan kategori pendapatan pada kelompok desil I sampai IV sesuai data BDT tahun 2015 sebanyak 106.197 jiwa. Anggota masyarakat tersebut menempati

rumah baik yang layak huni maupun tidak layak huni. Jumlah Rumah Tidak Layak Huni menurut data BDT (Basis Data Terpadu) tahun 2015 sejumlah 52.921 unit dan jumlah Rumah Layak Huni sebanyak 53.276 unit. Dengan demikian, rasio MBR yang menghuni Rumah Layak Huni sesuai data BDT (Basis Data Terpadu) tahun 2015 adalah 50,17, sampai dengan tahun 2023 jumlah MBR yang menghuni RTLH sebanyak 11.339 jiwa sedangkan jumlah MBR yang menghuni rumah layak huni (RLH) mencapai 94.858 jiwa atau tingkat ketercapaian 89,32% mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu 87,12% yang dapat dilihat pada grafik berikut ;

Grafik II.40.
Persentase MBR Yang Menghuni Rumah Layak Huni
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015-2023
Berdasarkan BDT Tahun 2015

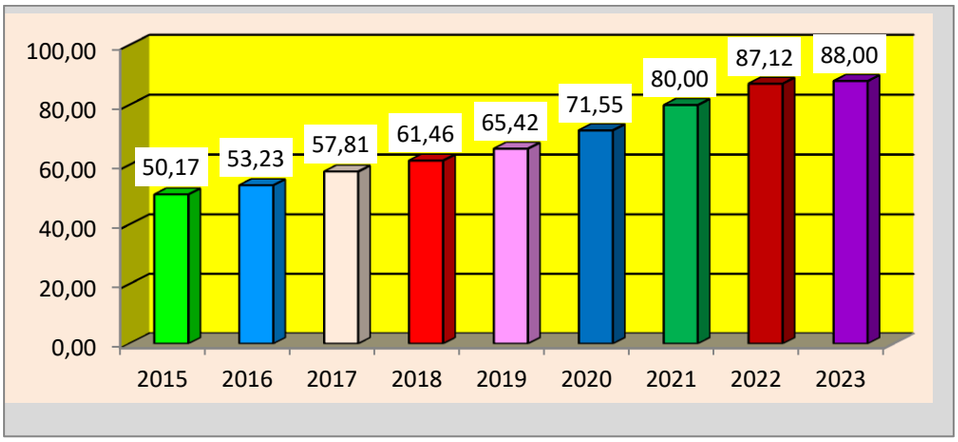

Sumber : Data DPKP LH Kabupaten Banjarnegara, 2024

Dari Grafik diatas maka secara kuantitatif ada kecenderungan (*trend*) meningkat dari 2015 sampai dengan 2023. Adapun perkembangan pencapaian Sasaran 17 Meningkatnya Cakupan Rumah Layak Huni dengan indikator Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni sebagai berikut :

Tabel II.92.
Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Tahun 2015 -2023
Berdasarkan BDT Tahun 2015

Tahun	MBR yang menghuni RTLH	MBR yang menghuni RLH	Persentase
2015*	52.921	53.276	50,17
2016	49.666	56.531	53,23
2017	43.956	61.389	57.81

Tahun	MBR yang menghuni RTLH	MBR yang menghuni RLH	Persentase
2018	41.157	65.270	61.46
2019	36,950	69.477	65.42
2020	34.249	71.538	71,55
2021	21.239	84.958	80
2022	16.679	92.197	87,12
2023	11.339	94.858	89,32

**) MBR Tahun 2015 sejumlah 106.197*

Peningkatan capaian MBR yang menghuni RLH didukung oleh anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi, BSPS maupun anggaran CSR (*Corparate Social Responsibility*) dari Perusahaaan, Perbankan, Baznas, Komunitas dan Perorangan**.**

Tabel II.93.
Realisasi Pelaksanaan RTLH di Kabupaten Banjarnegara
Dari Berbagai Sumber Anggaran Tahun 2023

No	Sumber Dana	Realisasi
1	APBD Kabupaten	253
2	APBD Provinsi	727
3	BSPS	1,316
4	CSR	44
	Jumlah Total	2.340

Sumber : Data DPKP LH Kabupaten Banjarnegara, 2024

Sasaran 18	**:**	**Menurunnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial**

Upaya menurunkan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial telah dilakukan pemerintah pusat maupun daerah. Berbagai strategi, kebijakan, program dan kegiatan penurunan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial telah dirancang dan dilaksanakan. Demikian halnya di Kabupaten Banjarnegara, penurunan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial menjadi salah satu isu trategis dari perencanaan pembangunan. Salah satu sasaran strategis RPD adalah persentase penurunan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial/ Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Adapun capaian indikator tersebut pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel II.94.
Capaian Indikator Kinerja Sasaran 18 Tahun 2023

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Keterangan
		Target	Realisasi	Capaian (%)	
Persentase penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial/ Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	%	0,2	8,33	4.165	Sangat Tinggi

Capaian indikator kinerja Sasaran 18 “Menurunnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial”, yaitu Persentase penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial/ Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dari target 0,2% terealisasi 8,33% sehingga capaian kinerja sebesar 4165% sebagaimana ditampilkan dalam tabel diatas.

Capaian indikator kinerja Sasaran 18 pada tahun 2023 apabila dibandingkan dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel II.95.
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 18
Tahun 2023 dengan Tahun 2022

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Keterangan
		2022	2023	Tingkat Kemajuan (%)	
Persentase penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial/ Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	%	5,64	8,33	47,70	meningkat

Hasil Pengukuran tingkat kemajuan indikator kinerja Sasaran 18 “Menurunnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial”, yaitu Persentase penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial/ Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial realisasi tahun 2022 sebesar 5,64% dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar 8,33%

mengalami peningkatan kinerja sebesar 47,70%, sebagaimana ditampilkan dalam tabel diatas.

Capain indikator kinerja Sasaran 18 tahun 2023 apabila dibandingkan dengan target tahun terakhir Rencana Pembangunan Daerah atau tahun 2026, maka dapat ditampilkan sebagaimana tabel berikut :

Tabel II.96.
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 18 Tahun 2023 dengan Target Akhir RPD Tahun 2026

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Keterangan
		2023	Target akhir RPD Tahun 2026	Capaian (%)	
Persentase penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial/ Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	%	8,33	0,2	4.165	Tercapai

Capaian indikator kinerja Sasaran 18 “Menurunnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial”, yaitu Persentase penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial/ Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dari realisasi tahun 2023 sebesar 8,33 % dibandingkan dengan target akhir tahun RPD tahun 2026 sebesar 0,2% sehingga capaian kinerja sebesar 4.165%, maka capaian kinerja telah tercapai, sebagaimana ditampilkan dalam tabel diatas.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012, jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) meliputi : Anak balita terlantar, anak terlantar, anak yang berhadapan dengan hukum (ANH), anak jalanan, anak dengan kedisabilitasan (ADK), anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah, anak yang memerlukan perlindungnan khusus, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas, tuna susila, gelandangan, pengemis, pemulung, kelompok minoritas, Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP), orang dengan HIV/AIDS (ODHA), korban penyalahgunaan NAPZA, korban *trafficking*, korban tindak kekerasan, pekerja migran bermasalah sosial (PMBS), korban bencana alam,

korban bencana sosial, perempuan rawan sosial ekonomi, fakir miskin, keluarga bermasalah sosial psikologis, komoditas adat terpencil.

Persentase Penurunan PMKS tahun 2023 ditargetkan sebesar 0,2 % dari 92.160 jiwa, terealisasi sebesar 8,33% atau turun sebesar 7.680 PMKS sehingga menjadi 84.480 PMKS pada tahun 2023 dengan capaian kinerja 4.165%.. Menurunnya fakir miskin dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu :

a. Graduasi PKH;
b. Pentidaklayakan penerima bansos melalui musyawarah desa;
c. Meninggal dunia;
d. Pindah tempat tinggal.

Penanganan PMKS merupakan program yag dilaksanakan baik dari Kementerian Sosial, Dinas Sosial Provinsi maupun Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjarnegara. PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat. Pada tahun 2023, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebanyak 47.466, sedangkan di tahun 2022, KPM sebanyak 51.730. Hal ini berarti terjadi penurunan jumlah KPM yang menjadi tanda bahwa keluarga miskin yang memerlukan bantuan semakin berkurang. Adapun komponen PKH terdiri dari komponen Kesehatan, Pendidikan, kesejahteraan sosial yang terdiri dari Penyandang disabilitas dan Lanjut usia. Program BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) BPNT adalah bantuan pangan dari pemerintah. Jumlah BPNT 2023, besaran BPNT dan KPM BPNT.

Salah satu penanganan PMKS yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selain terhadap fakir miskin yaitu penanganan anak terlantar dan balita terlantar. Penanganan anak dan balita terlantar dilaksanakan dengan melibatkan Pekerja Sosial (PEKSOS) Perlindungan Anak untuk melakukan pendampingan, intervensi sampai dengan tahap terminasi. Hasil dari intervensi apabila diperlukan rujukan ke panti rehabilitasi sosial maka akan difasilitasi oleh Dinas Sosial menggunakan mobil layanan sosial.

Mobil layanan sosial juga dapat melayani eks psikotik, lanjut usia, anak dan balita tarlantar, anak nakal, anak putus sekolah serta

penyandang disabilitas untuk mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial di Panti Rehabilitasi Sosial.

Fasilitas lainnya yang membantu dalam penanganan PMKS adalah sudah tersedianya Rumah Singgah DINSOS PPPA Kabupaten Banjarnegara. Rumah Singgah merupakan tempat sementara bagi disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, anak terlantar, gelandangan pengemis sebelum dilakukan reunifikasi keluarga atau rujukan ke balai rehabilitasi sosail sesuai dengan hasil assesmen yang telah dilakukan.

Selain itu, meningkatnya peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial juga mempengaruhi penurunan jumlah PMKS. Masyarakat baik secara perseorangan, lembaga atau komunitas turut serta melakukan penanganan PMKS. Penanganan berupa pendampingan, pemberian informasi atau akses yang digunakan oleh PMKS atau berupa bantuan langsung kepada PMKS.

Semakin meningkatnya kemampuan manajerial lembaga-lembaga kesejahteraan sosial serta meningkatnya kapasitas PSKS perorangan seperti TKSK, Pekerja Sosial Masyarakat, Penyuluh Sosial, Pekerja Sosial Perlindungan anak, TAGANA juga mendorong penanganan kesejahteraan sosial semakin luas. Akses informasi dan edukasi bagi PMKS juga akan semakin meningkat kuantitas maupun kualitasnya

Cakupan program penanganan PMKS yang bersumber dari Anggaran di Dinsos PPPA masih jauh dibandingkan dengan jumlah PMKS yang seharusnya mendapatkan penanganan. Sebagian besar program penanganan PMKS bersumber dari anggaran Kementerian Sosial berupa Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non Tunai.

Penanganan PMKS di Kabupaten Banjarnegara, dari tahun ke tahun sudah mengalami kemajuan, yaitu sudah melibatkan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial yang berpengaruh pada penurunan jumlah PMKS. Masyarakat baik secara perseorangan, lembaga atau komunitas turut serta melakukan penanganan PMKS. Penanganan berupa pendampingan, pemberian informasi atau akses yang digunakan oleh PMKS atau berupa bantuan langsung kepada PMKS.

Semakin meningkatnya kemampuan manajerial lembaga lembaga kesejahteraan sosial serta meningkatnya kapasitas Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) perorangan seperti Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat, Penyuluh Sosial, Pekerja Sosial Perlindungan anak, TAGANA (Taruna Siaga Bencana) juga mendorong penanganan kesejahteraan sosial semakin luas. Akses informasi dan edukasi bagi PMKS juga akan semakin meningkat kuantitas maupun kualitasnya.

Sejak tahun 2017 sampai dengan 2019 penanganan PMKS sudah baik, dimana setiap tahunnya mengalami penurunan, tetapi di tahun 2020 dan 2021 dengan adanya pandemi c*ovid-19* jumlah PMKS kembali mengalami kenaikan yang signifikan. Hal tersebut dapat dilihat pada grafik sebagai berikut :

Grafik II.41.
Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019-2023

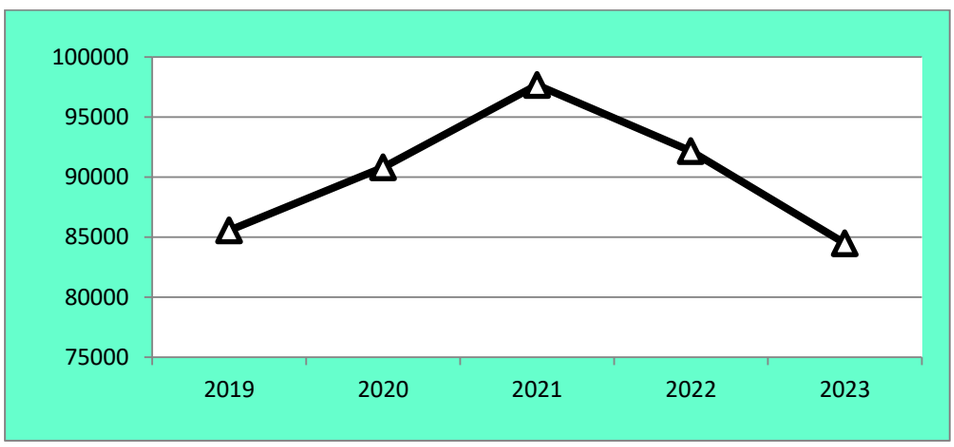

Sumber : Data Dinas Sosial PPPA Kabupaten Banjarnegara, 2024

Faktor pendukung ketercapaian indikator Persentase Penurunan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) diantaranya:

1. Kesiapan pemerintah daerah dalam menjalankan program peningkatan kesejahteraan sosial baik dalam bidang perlindungan sosial, rehabilitasi sosial ataupun dalam bidang penanggulangan kemiskinan. Kesiapan pemerintah daerah dilakukan dengan koordinasi dengan Kementerian Sosial dalam menjalankan program nasional.
2. Koordinasi dengan stakeholder lainnya seperti OPD terkait, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan Kabupatan Banjarnegara, Lembaga

Kesejahteraan Sosial, TAGANA, Kecamatan dan Kelurahan/Desa dalam mempersiapkan, melaksanakan serta mengevaluasi program Dinas Sosial.

3. Peningkatan kapasitas SDM Dinas Sosial maupun SDM penunjang lainnya seperti Pendamping PKH, TKSK, Pekerja Sosial maupun penyuluh sosial baik yang dilakukan oleh Kementerian Sosial melalui Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Regional III Yogyakarta, Dinas Sosial Provinsi melalui Badan Diklat Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Tengah serta yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Banjarnegara melalui Bimbingan Teknis, Rapat Koordinasi serta agenda lainnya.

Permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target yaitu :

1. Program penanganan PMKS yang dilakukan oleh pemerintah daerah sangat terbatas baik dari anggaran maupun cakupan PMKS jika dibandingkan dengan jumlah PMKS yang ada.
2. Belum optimalnya peran aktif PSKS dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial.

Solusi dari permasalahan :

1. Meningkatkan cakupan penanganan PMKS dengan meningkatkan koordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dan Kementerian Sosial dalam melaksanakan program-program nasional baik dari perlindungan sosial, rehabilitasi sosial maupun penanganan kemiskinan.
2. Meningkatkan kapasitas PSKS baik dari segi manajemen kelembagaan maupun kapasitas SDM .
3. Meningkatkan koordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah serta Kementerian Sosial RI

Tabel II.97.
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA			ANGGARAN			EFISIENSI ANGGARAN (%)
					TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN KINERJA(%)	PAGU 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	CAPAIAN KINERJA(%)	
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11=(100-(10))*
Misi 1 :	**Mewujudkan masyarakat madani yang agamis, dengan menciptakan masyarakat Banjarnegara yang berkualitas, sehat, cerdas, produktif, kompetitif, kreatif, inovatif dan berakhlak mulia, serta menghargai dan menerapkan nilai-nilai luhur agama dan budaya masyarakat.**										
Tujuan :											
1	Meningkatkan kondusivitas wilayah	1	Indeks ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan mayarakat	Angka	76	57,15	75,20	1.341.541.000,-	1.335.989.449,-	96,21	3,79
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai kehidupan bermasyarakat dan berdemokrasi	1	Persentase penggunaan hak pilih Pilkades	%	0	0	0				
		2	Persentase penggunaan hak pilih Pilgub	%	0	0	0				
		3	Persentase penggunaan hak pilih Pilbup	%	0	0	0				
		4	Persentase penggunaan hak pilih Pileg	%	0	76,11*	100	19.045.440.800,-	19.044.686.200,-	99,99	0,01
		5	Persentase penggunaan hak pilih pilpres	%	0	76,15*	100				
Sasaran :											

1	Tertanganinya kejadian konflik antar kelompok masyarakat, suku dan agama	1	Persentase penanganan konflik sosial	%	100	100	100	16.420.912.200,-	16.242.558.700,-	97,76	2,24
2	Meningkatnya Kualitas Kesiapsiagaan Dalam Ketanggapdaruratan Bencana	1	Persentase desa tangguh bencana	%	40	50,76	126,9	2.843.647.100,-	2.649.923.753,-	95,53	4,47
3	Meningkatnya partisipasi politik masyarakat	1	Persentase penggunaan hak pilih Pilkades	%	0	0	0				
		2	Persentase penggunaan hak pilih Pilgub	%	0	0	0				
		3	Persentase penggunaan hak pilih Pilbup	%	0	0	0				
		4	Persentase penggunaan hak pilih Pileg	%	0	76,11*	100	19.045.440.800,-	19.044.686.200,-	99,99	0,01
		5	Persentase penggunaan hak pilih pilpres	%	0	76,15*	100				
4	Meningkatnya penghargaan masyarakat terhadap nilai-nilai kebudayaan dan kearifan lokal	8	Indeks kebudayaan	Angka	65	59,01	90,78	21.170.829.620,-	19.450.351.915,-	96,67	3,33
5	Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan dengan memperhatikan hak-hak anak	9	Indeks Pemberdayaan Gender	Angka	73,70	73,80*	100,14	344.596.900,00	332.515.975,00	96,80	3,20
Misi 2 : Mewujudkan perekonomian rakyat yang maju dengan mengembangkan serta memperkuat perekonomian daerah melalui sektor pertanian yang berorientasi pada pasar dengan senantiasa menjaga kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan dalam pengelolaannya melalui regulasi yang tepat											

dalam mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif dalam rangka menciptakan kehidupan masyarakat yang											
Tujuan :											
3	Meningkatnya kinerja perekonomian daerah	1	Laju pertumbuhan ekonomi	%	4,50 – 5,50	5,29*	100	79.563.816.393,-	70.322.115.794,-	92,25	7,75
		2	PDRB per kapita	Juta Rupiah	>22,40	24,9*	108,67				
		3	Nilai Tukar Petani	%	103 – 106	107,49*	101,41				
4	Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	67,5	61,52	91,14	5.272.049.100,-	4.904.861.559,-	92,02	7,98
Sasaran :											
6	Meningkatnya kesempatan lapangan berusaha	1	Persentase peningkatan nilai investasi	%	1	14,77	1.477	2.148.557.600,-	1.917.898.900,-	94,18	5,82
7	Meningkatnya kesempatan kerja	1	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	< 5	6,26	74,8	3.572.305.200,-	3.184.978.350,-	88,82	11,18
8	Meningkatnya pemerataan pembangunan	1	Indeks Gini	Angka	0,36	0,376	95,56	56.726.221.976,-	52.906.890.934,-	95,26	4,74
		2	Indeks Ketimpangan Williamson	Angka	0,42	0,6*	57,14				
9	Meningkatnya stabilitas harga	1	Laju inflasi	%	3 ± 1	2,61	113	1.334.992.200,-	1.203.348.936,-	96,28	3,72
10	Meningkatnya daya saing daerah	1	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3,00	3,05	101,67	350.552.340.930,-	328.693.608.219,-	95,42	4,58

11	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang meliputi kualitas udara, kualitas air sungai, dan tutupan lahan	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	67,5	61,52	91,14	5.272.049.100,-	4.904.861.559,-	92,02	7,98
Misi 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam kehidupan politik yang demokratis dan bertanggung jawab											
Tujuan :											
5	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	1	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	64,00	62,41	97,51	1.511.358.779.920,-	1.439.382.119.312,-	94,79	5,21
6	Meningkatnya kualitas layanan publik	1	Indeks Inovasi Daerah	Angka	45	42,90	95,33	2.646.653.600,-	2.564.832.638,-	98,32	1,68
Sasaran :											
12	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	1	Nilai SAKIP	Nilai	B	B	100	1.651.139.598.192,-	1.596.681.642.715,-	96,05	3,95
		2	Opini BPK	Opini	WTP	WTP*	100				
13	Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik	1	Survey Kepuasan Masyarakat	Angka	84,34	84,05	99,66	1.236.097.328.659,-	1.181.121.926.955,-	95,89	4,11
Misi 4 : Mewujudkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dasar											
Tujuan :											
7	Meningkatnya cakupan pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar yang berkualitas	1	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	68	69,14	101,68	859.118.898.343,-	828.574.683.906,-	94,69	5,31
		2	Persentase penduduk miskin	%	15,64 – 14,46	14,90	100				

Sasaran :											
14	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1	Menurunnya angka kematian neonatal	Per 1000 KH	8,5	10,2	76,47	119.622.495.273,-	105.001.140.345,-	87,77	12,23
		2	Angka Harapan Hidup	Tahun	74,48	74,47	99,99				
		3	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 KH	210	125,6	140,19				
		4	Angka Kematian Bayi	Per 1000 KH	12,5	13,1	95,2				
		5	Prevalensi stunting	%	19	17,46	108,11				
15	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan	1	Angka harapan lama sekolah	Tahun	11,65	11,82	101,46	199.326.320.700,-	192.852.516.944,-	97,15	2,85
		2	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	6,80	6,86	101,63				
16	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	1	Indeks Kemahalan Konstruksi	%	92,50	98,54	93,47	27.220.205.100,-	27.016.371.756,-	99,25	0,75
17	Meningkatnya cakupan rumah layak huni	1	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	82	88	107,32	8.646.847.100,-	8.213.357.352,-	93,85	6,15
18	Menurunnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	1	Persentase penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial/ Penyandang Masalah esejahteraan Sosial	%	0,2	8,33	4.165	1.785.090.900,-	1.723.750.600,-	96,99	3,01

Sumber : Data Bagian Organisasi Setda Kab. Banjarnegara, 2024

f. Analisis Program Dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja

Untuk mencapai kinerja Tujuan 1 “Meningkatnya Kondusivitas Wilayah” didukung dengan anggaran sebesar Rp.1.341.541.000,00 terealisasi sebesar Rp.1.335.989.449,00 atau 96,21%. Realisasi anggaran sebesar 96,21% lebih tinggi dibandingkan dengan capaian kinerja Tujuan 1 “Meningkatnya Kodusivitas Wilayah” dengan indikator indeks ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebesar 75,20%, menunjukkan penggunaan sumber daya yang tidak efisien dalam mencapai Tujuan 1 ”Meningkatnya Kondusivitas Wilayah”.

Program dan Anggaran Pendukung Tujuan 1 sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel II.98.
Program dan Anggaran Pendukung Tujuan 1

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum.	1.331.141.000,00	1.326.341.049,00	99,64
2.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	10.400.000,00	9.648.400,00	92,77
	Total Anggaran	1.341.541.000,00	1.335.989.449,00	96,21

Untuk mencapai kinerja Sasaran 1 Tertanganinya Kejadian Konflik Antar Kelompok Masyarakat, Suku dan Agama didukung dengan anggaran sebesar Rp.16.420.912.200,00 terealisasi sebesar Rp.16.242.558.700,00 atau 97,76%. Realisasi anggaran sebesar 97,76 % lebih rendah dibandingkan dengan capaian kinerja Sasaran 1 sebesar 100%, menunjukkan penggunaan sumber daya yang efisien dalam mencapai Sasaran 1 Tertanganinya Kejadian Konflik Antar Kelompok Masyarakat, Suku dan Agama dengan indikator Persentase Penanganan Konflik Sosial.

Program dan anggaran yang mendukung capaian Sasaran 1 ”Tertanganinya Kejadian Konflik Antar Kelompok Masyarakat, Suku dan Agama” sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut :

Tabel II.99.
Program dan Anggaran Pendukung Sasaran 1

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	360.943.500,00	355.843.550,00	98,59
2.	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	136.150.700,00	128.218.150,00	94,17
3.	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	15.580.090.000,00	15.417.090.000,00	98,95
4.	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	343.728.000,00	341.407.000,00	99,32
	Total Anggaran	16.420.912.200,00	16.242.558.700,00	97,76

Untuk mencapai kinerja Sasaran 2 Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana didukung dengan anggaran sebesar Rp. 2.843.647.100,00 terealisasi sebesar Rp. 2.649.923.753,00 atau 95,53%. Realisasi anggaran sebesar 95,536 % lebih rendah dibandingkan dengan capaian kinerja Sasaran 1 sebesar 126,9%, menunjukkan penggunaan sumber daya yang yang efisie**n** dalam mencapai Sasaran 2.

Program dan anggaran yang mendukung capaian Sasaran 2 sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut :

Tabel II.100.
Program dan Anggaran Pendukung Sasaran 2

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Penanggulangan Bencana.	2.775.416.600,00	2.583.066.003,00	93,07
2.	Program Penanganan Bencana	68.230.500,00	66.857.750,00	97,99
	Total Anggaran	2.843.647.100,00	2.649.923.753,00	95,53

Untuk mencapai kinerja Tujuan 2 Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Nilai-nilai Kehidupan Bermasyarakat dan Berdemokrasi dan Sasaran 3 Meningkatnya Partisipasi Politik Masyarakat sebesar Rp. 19.045.440.800,00,00 terealisasi sebesar Rp. 19.044.686.200,00 atau 99,99%. Realisasi anggaran sebesar 99,99 % lebih rendah dibandingkan dengan capaian kinerja Tujuan 2 dan Sasaran 3 sebesar 100%, menunjukkan penggunaan sumber daya yang yang efisien dalam mencapai Tujuan 2 dan Sasaran 3.

Program dan anggaran yang mendukung capaian Tujuan 2 dan Sasaran 3 sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut :

Tabel II.101.
Program dan Anggaran Pendukung Tujuan 2 Sasaran 3

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	19.045.440.800,00	19.044.686.200,00	99,99
	Total Anggaran	19.045.440.800,00	19.044.686.200,00	99,99

Untuk mencapai kinerja Sasaran 4 Meningkatnya Penghargaan Masyarakat Terhadap Nilai-nilai Kebudayaan dan Kearifan Lokal didukung dengan anggaran sebesar Rp. 21.170.829.620,00 terealisasi sebesar Rp. 19.450.351.915,00 atau 96,67% Realisasi anggaran sebesar 96,67% lebih tinggi dibandingkan dengan capaian kinerja Sasaran 4 sebesar 90,78%, menunjukkan penggunaan sumber daya yang tidak efisien dalam mencapai Sasaran 4.

Program dan anggaran yang mendukung capaian Sasaran 4 sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut :

Tabel II.102.
Program dan Anggaran Pendukung Sasaran 4

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Pengembangan Kebudayaan.	6.467.297.500,00	6.314.042.022,00	97,630
2.	Program Pelestarian dan Pengelolaan	155.127.500,00	154.497.713,00	99,59

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Cagar Budaya			
3.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	9.610.538.900,00	8.132.731.566,00	84,62
4.	Program Pemasaran Pariwisata	1.009.637.800,00	1.005.715.628,00	99,61
5.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1.254.694.100,00	1.252.043.708,00	99,79
6..	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.	2.646.653.600,00	2.564.832.638,00	96,91
7.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.	26.880.220,00	26.488.640,00	98,54
	Total Anggaran	21.170.829.620,00	19.450.351.915,00	96,67

Untuk mencapai kinerja sasaran 5: Meningkatnya Peran Perempuan Dalam Pembangunan Dengan Memperhatikan Hak-hak Anak dengan anggaran sebesar Rp.344.596.900,00 terealisasi Rp.332.515.975,00 atau 96,80%. Realisasi anggaran 96,80% lebih rendah dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran 5 sebesar 100,14%, menunjukkan penggunaan sumber daya yang efektif dalam mencapai sasaran 5.

Program dan anggaran yang mendukung capaian Sasaran 5 sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel II.103.
Program dan Anggaran Pendukung Sasaran 5

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Pengarusutmaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	172.378.000,00	166.070.400,00	96,34
2.	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	12.398.000,00	12.392.000,00	99,95
3.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	33.590.900,00	31.808.800,00	94,69
4.	Program Perlindungan	31.950.500,00	31.793.175,00	99,51

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Perempuan			
5.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	30.351.500,00	28.225.400,00	93,00
6.	Program Perlindungan Khusus Anak	63.928.000,00	62.226.200,00	97,34
	Total Anggaran	344.596.900,00	332.515.975,00	96,80

Untuk mencapai kinerja Tujuan 3 Meningkatnya Kinerja Perekonomian Daerah dengan dengan 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu 1) Laju Pertumbuhan Ekonomi, 2) PDRB Perkapita, 3) Nilai Tukar Petani dan anggaran sebesar Rp.79.563.816.393,00 terealisasi70.322.115.794,00 atau 92,25%. Realisasi anggaran 92,25% lebih rendah dibandingkan dengan capaian kinerja Tujuan 2 sebesar 103,36%, menunjukkan penggunaan sumber daya yang efektif dalam mencapai Tujuan 3.

Program dan anggaran yang mendukung capaian Tujuan 3 sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel II.104.
Program dan Anggaran Pendukung Tujuan 2

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	351.457.500,00	326.616.900,00	92,93
2.	Program Peningkatan Diservikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.031.023.500,00	975.382.485,00	94,60
3.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	100.000.000,00	96.814.925,00	96,81
4.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	90.000.000,00	54.720.300,00	60,80
5.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1.641.691.215,00	1.576.821.235,00	96,05
6.	Program Pengawasan Sumber Daya	203.255.000,00	188.325.000,00	92,65

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Kelautan Dan Perikanan			
7.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	3.952.560.600,00	3.505.873.542,00	88,70
8.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	27.457.355.594,00	24.196.599.722,00	88,12
9.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	156.825.100,00	150.321.850,00	95,85
10.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	27.457.355.594,00	24.196.599.722,00	88,12
11.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	645.349.000,00	426.278.120,00	66,05
12.	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	65.390.770,00	65.061.720,00	99,50
13.	Program Penyuluhan Pertanian	427.221.720,00	411.794.250,00	96,39
14.	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	124.083.400,00	108.744.146,00	87,64
15.	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	23.902.500,00	22.917.450,00	95,88
16.	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	328.400,00	325.600,00	99,15
17.	Program Hubungan Industrial	213.259.400,00	198.679.750,00	93,16
18.	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	31.262.500,00	31.045.000,00	99,30
19.	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	386.301.200,00	386.301.200,00	100,00
20.	Program Peningkatan Sarana	1.156.436.000,00	1.068.189.025,00	92,37

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Distribusi Perdagangan			
21.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	49.231.500,00	49.231.500,00	100,00
22.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	9.610.538.900,00	8.132.731.566,00	84,62
23.	Program Pemasaran Pariwisata	1.009.637.800,00	1.005.715.628,00	99,61
24.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	1.254.694.100,00	1.252.043.708,00	99,79
25.	Program Pelayanan Penanaman Modal	1.623.099.000,00	1.412.395.100,00	87,02
26.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	381.220.900,00	367.644.300,00	96,44
27.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	51.047.800,00	49.741.550,00	97,44
28.	Program Promosi Penanaman Modal	69.287.400,00	65.200.500,00	94,10
	Total Anggaran	79.563.816.393,00	70.322.115.794,00	92,25

Untuk mencapai kinerja Sasaran 6 Meningkatnya Kesempatan Lapangan Berusaha dengan indikator kinerja Persentase Peningkatan Nilai Investasi dan anggaran sebesar Rp. 2.148.557.600,00 terealisasi 1.917.898.900,00 atau 94,18%. Realisasi anggaran 94,18% lebih rendah dibandingkan dengan capaian kinerja Sasaran 6 sebesar 1.477%, menunjukkan penggunaan sumber daya yang efektif dalam mencapai Sasaran 6.

Program dan anggaran yang mendukung capaian Sasaran 6 sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut :

Tabel II.105.
Program dan Anggaran Pendukung Sasaran 6

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Pengendalian	381.220.900,00	367.644.300,00	96,44

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Pelaksanaan Penanaman Modal			
2.	Program Pelayanan Penanaman Modal	1.623.099.000,00	1.412.395.100,00	87,02
3.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	51.047.800,00	49.741.550,00	97,44
4.	Program Promosi Penanaman Modal	69.287.400,00	65.200.500,00	94,10
5.	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	23.902.500,00	22.917.450,00	95,88
	Total Anggaran	2.148.557.600,00	1.917.898.900,00	94,18

Untuk mencapai kinerja Sasaran 7 Meningkatnya Kesempatan Kerja dengan indikator kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka dan anggaran sebesar Rp.3.572.305.200,00 terealisasi Rp.3.184.978.350,00 atau 88,82%. Realisasi anggaran 88,82% lebih tinggi dibandingkan dengan capaian kinerja Sasaran 7 sebesar 74,8%, menunjukkan penggunaan sumber daya yang tidak efektif dalam mencapai Sasaran 7.

Program dan anggaran yang mendukung capaian Sasaran 7 sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut :

Tabel II.106.
Program dan Anggaran Pendukung Sasaran 7

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.573.149.200,00	1.403.931.770,00	89,24
2.	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.573.149.200,00	1.403.931.770,00	89,24
3.	Program Penempatan Tenaga Kerja	407.683.000,00	360.941.010,00	88,53
4.	Program Perencanaan Tenaga Kerja	18.323.800,00	16.173.800,00	88,27
	Total Anggaran	3.572.305.200,00	3.184.978.350,00	88,82

Untuk mencapai kinerja Sasaran 8 Meningkatnya pemerataan pembangunan dengan indikator kinerja Indeks Gini dan Indeks Williamson dan anggaran sebesar Rp. 56.726.221.976,00 terealisasi 52.906.890.934,00 atau 95,26%. Realisasi anggaran 95,26% lebih tinggi dibandingkan dengan capaian kinerja Sasaran 8 sebesar 76,35%, menunjukkan penggunaan sumber daya yang tidak efektif dalam mencapai Sasaran 8.

Program dan anggaran yang mendukung capaian Sasaran 8 sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut :

Tabel II.107.
Program dan Anggaran Pendukung Sasaran 8

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Rehabilitasi Sosial	879.437.600,00	852.617.650,00	96,95
2.	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	837.422.800,00	804.275.200,00	96,04
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	7.526.026.806,00	6.926.808.680,00	92,04
4.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	1.316.355.000,00	1.305.203.150,00	99,15
5.	Program Pengembangan UMKM	231.580.000,00	228.005.670,00	98,46
6.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	311.567.500,00	311.401.880,00	99,95
7.	Program Perekonomian Dan Pembangunan	1.254.498.200,00	1.123.072.436,00	89,52
8.	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.573.149.200,00	1.403.931.770,00	89,24
9.	Program Penyelenggaraan Jalan	42.388.635.770,00	39.552.349.598,00	93,31
10.	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi	407.549.100,00	399.224.90,000	97,96

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Pembangunan Daerah			
	Total Anggaran	56.726.221.976,00	52.906.890.934,00	95,26

Untuk mencapai kinerja Sasaran 9 Meningkatnya Stabilitas Harga dengan indikator Laju Inflasi dan anggaran sebesar Rp.1.334.992.200,00 terealisasi Rp.1.203.348.936,00 atau 96,28%. Realisasi anggaran 96,28% lebih rendah dibandingkan dengan capaian kinerja Sasaran 9 sebesar 96,28%, menunjukkan penggunaan sumber daya yang efektif dalam mencapai Sasaran 9.

Program dan anggaran yang mendukung capaian Sasaran 9 sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut :

Tabel II.108.
Program dan Anggaran Pendukung Sasaran 9

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	31.262.500,00	31.045.000,00	99,30
2.	Program Perekonomian dan Pembangunan.	1.254.498.200,00	1.123.072.436,00	89,52
3.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	49.231.500,00	49.231.500,00	100,00
	Total Anggaran	1.334.992.200,00	1.203.348.936,00	96,28

Untuk mencapai kinerja Sasaran 10 Meningkatnya Daya Saing Daerah dengan indikator Indeks Daya Saing Daerah dan anggaran sebesar Rp. 350.552.340.930,00 terealisasi 328.693.608.219,00 atau 95,42%. Realisasi anggaran 95,42% lebih rendah dibandingkan dengan capaian kinerja Sasaran 10 sebesar 101,67%, menunjukkan penggunaan sumber daya yang efektif dalam mencapai Sasaran 10.

Program dan anggaran yang mendukung capaian Sasaran 10 sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut :

Tabel II.109.
Program dan Anggaran Pendukung Sasaran 10

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	2.646.653.600,00	2.564.832.638,00	96,91
2.	Program Pengelolaan Pendidikan	168.371.474.672,00	163.894.626.062,00	97,34
3.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	112.994.335.988,00	99.001.169.050,00	87,62
4.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	16.856.335.000,00	16.815.315.959,00	99,76
5.	Program Penyelenggaraan Jalan	42.388.635.770,00	39.552.349.598,00	93,31
6.	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	1.331.141.000,00	1.326.341.049,00	99,64
7.	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.573.149.200,00	1.403.931.770,00	89,24
8.	Program Hubungan Industrial	213.259.400,00	198.679.750,00	93,16
9.	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	172.378.000,00	166.070.400,00	96,34
10.	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.600.000.000,00	1.439.152.970,00	89,95
11.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	2.073.119.000,00	2.004.160.253,00	96,67
12.	Program Pengembangan UMKM	231.580.000,00	228.005.670,00	98,46
13.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	51.047.800,00	49.741.550,00	97,44
14.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	49.231.500,00	49.231.500,00	100,00
	Total Anggaran	350.552.340.930,00	328.693.608.219,00	95,42

Untuk mencapai kinerja Tujuan 4 “Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan” dan Sasaran 11 “Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang meliputi kualitas udara, kualitas air sungai, dan tutupan lahan” dan anggaran sebesar Rp.

5.272.049.100,00 terealisasi 4.904.861.559,00 atau 92,02%. Realisasi anggaran 92,02% lebih tinggi dibandingkan dengan capaian kinerja Tujuan 4 dan Sasaran 11 sebesar 91,14%, menunjukkan penggunaan sumber daya yang tidak efektif dalam mencapai Tujuan 4 dan Sasaran 11.

Program dan anggaran yang mendukung capaian Tujuan 4 dan Sasaran 11 sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut :

Tabel II.110.
Program dan Anggaran Pendukung Tujuan 4 dan Sasaran 11

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Pengelolaan Persampahan.	3.178.475.000,00	3.052.032.889,00	96,02
2.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.	1.600.000.000,00	1.439.152.970,00	89,95
3.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat.	250.470.400,00	197.094.300,00	78,69
4.	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).	11.149.100,00	11.117.200,00	99,71
5.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup.	218.792.600,00	192.319.000,00	87,90
6.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	13.162.000,00	13.145.200,00	99,87
	Total Anggaran	5.272.049.100,00	4.904.861.559,00	92,02

Untuk mencapai kinerja Tujuan 5 “Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah” dan anggaran sebesar Rp.1.511.358.779.920,00 terealisasi Rp.1.439.382.119.312,00 atau 94,79%. Realisasi anggaran 94,79% lebih rendah dibandingkan dengan capaian kinerja Tujuan 5 sebesar 97,51%, menunjukkan penggunaan sumber daya yang efektif dalam mencapai Tujuan 5.

Program dan anggaran yang mendukung capaian Tujuan 5 sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut :

Tabel II.111.
Program dan Anggaran Pendukung Tujuan 5

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.205.002.143.919,00	1.153.053.468.795,00	95,69
2.	Program Perekonomian Dan Pembangunan	1.254.498.200,00	1.123.072.436,00	89,52
3.	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	3.979.440.740,00	3.491.523.395,00	87,74
4.	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	537.105.600,00	516.487.690,00	96,16
5.	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	2.646.653.600,00	2.564.832.638,00	96,91
6.	Program Kepegawaian Daerah	946.718.700,00	884.223.365,00	93,40
7.	Program Pengelolaan Pendidikan	168.371.474.672,00	163.894.626.062,00	97,34
8.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	112.994.335.988,00	99.001.169.050,00	87,62
9.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	3.880.763.361,00	3.454.829.100,00	89,02
10.	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	5.480.540.000,00	5.344.655.200,00	97,52
11.	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	1.206.473.000,00	1.143.462.421,00	94,78
12.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	72.883.800,00	68.324.200,00	93,74
13.	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	70.726.900,00	69.022.000,00	97,59
14.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha	311.567.500,00	311.401.880,00	99,95

	Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)			
15.	Program Pengelolaan Arsip	74.585.100,00	69.941.800,00	93,77
16.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	951.049.000,00	889.558.250,00	93,53
17.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	749.202.500,00	714.707.900,00	95,40
18.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	49.231.500,00	49.231.500,00	100,00
19.	Program Rehabilitasi Sosial	879.437.600,00	852.617.650,00	96,95
20.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1.899.948.240,00	1.884.963.980,00	99,21
	Total Anggaran	1.511.358.779.920,00	1.439.382.119.312,00	94,79

Untuk mencapai kinerja Sasaran 12 “Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah” dan anggaran sebesar Rp. 1.651.139.598.192,00 terealisasi 1.596.681.642.715,00 atau 96,05%. Realisasi anggaran 96,05% lebih rendah dibandingkan dengan capaian kinerja Sasaran 12 sebesar 100%, menunjukkan penggunaan sumber daya yang **efektif** dalam mencapai Sasaran 12.

Program dan anggaran yang mendukung capaian Sasaran 12 sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut :

Tabel II.112.
Program dan Anggaran Pendukung Sasaran 12

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.205.002.143.919,00	1.153.053.468.795,00	95,69
2.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah.	445.154.510.473,00	442.714.027.835,00	99,45
3.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	982.943.800,00	914.146.085,00	93,00
	Total Anggaran	c	1.596.681.642.715,00	96,05

Untuk mencapai kinerja Tujuan 6 “Meningkatnya kualitas layanan publik” dan anggaran sebesar Rp.2.646.653.600,00 terealisasi Rp.2.564.832.638,00 atau 98,32%. Realisasi anggaran 98,32% lebih tinggi dibandingkan dengan capaian kinerja Tujuan 6 sebesar 95,33%, menunjukkan penggunaan sumber daya yang **tidak efektif** dalam mencapai Tujuan 6.

Program dan anggaran yang mendukung capaian Sasaran 12 sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut :

Tabel II.113.
Program dan Anggaran Pendukung Tujuan 6

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	2.646.653.600,00	2.564.832.638,00	98,32
	Total Anggaran	2.646.653.600,00	2.564.832.638,00	98,32

Untuk mencapai kinerja Sasaran13 “Meningkatnya Efektivitas dan Transparansi Layanan Publik” dan anggaran sebesar Rp.1.236.097.328.659,00 terealisasi Rp.1.181.121.926.955,00 atau 95,89%. Realisasi anggaran 95,89% lebih rendah dibandingkan dengan capaian kinerja Sasaran 13 sebesar 99,66%, menunjukkan penggunaan sumber daya yang **efektif** dalam mencapai Sasaran 13.

Program dan anggaran yang mendukung capaian Sasaran 13 sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut :

Tabel II.114.
Program dan Anggaran Pendukung Sasaran 13

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.205.002.143.919,00	1.153.053.468.795,00	95,69
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1.899.948.240,00	1.884.963.980,00	99,21
3.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.513.073.800,00	2.429.996.750,00	96,69
4.	Program Pendaftaran Penduduk	812.716.900,00	809.745.400,00	99,63

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
5.	Program Pencatatan Sipil	93.070.000,00	92.217.000,00	99,08
6.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	7.026.500,00	6.897.800,00	98,17
7.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	54.065.100,00	51.474.900,00	95,21
8.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	13.480.157.200,00	11.864.813.377,00	88,02
9.	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	29.000.000,00	28.771.100,00	99,21
10.	Program Pembinaan Perpustakaan	9.987.696.000,00	8.756.453.800,00	87,67
11.	Program Pengelolaan Arsip	74.585.100,00	69.941.800,00	93,77
12.	Program Aplikasi Informatika	2.073.119.000,00	2.004.160.253,00	96,67
13.	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	70.726.900,00	69.022.000,00	97,59
	Total Anggaran	1.236.097.328.659,00	1.181.121.926.955,00	95,89

Untuk mencapai kinerja Tujuan 7 “Meningkatnya cakupan pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar yang berkualitas” dan anggaran sebesar Rp.859.118.898.343,00 terealisasi Rp.828.574.683.906,00 atau 94,69%. Realisasi anggaran 94,69% lebih rendah dibandingkan dengan capaian kinerja Tujuan 7 sebesar 100,84%, menunjukkan penggunaan sumber daya yang **efektif** dalam mencapai Tujuan 7.

Program dan anggaran yang mendukung capaian Tujuan 7 sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut :

Tabel II.115.
Program dan Anggaran Pendukung Tujuan 7

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Pengelolaan Pendidikan	168.371.474.672,00	163.894.626.062,00	97,34
2.	Program Pemenuhan	112.994.335.988,00	99.001.169.050,00	87,62

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat			
3.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	16.856.335.000,00	16.815.315.959,00	99,76
4.	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.573.149.200,00	1.403.931.770,00	89,24
5.	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	172.378.000,00	166.070.400,00	96,34
6.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.600.000.000,00	1.439.152.970,00	89,95
7.	Program Pengembangan UMKM	231.580.000,00	228.005.670,00	98,46
8.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	51.047.800,00	49.741.550,00	97,44
9.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	49.231.500,00	49.231.500,00	100,00
10.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1.340.237.500,00	1.304.485.200,00	97,33
11.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	3.880.763.361,00	3.454.829.100,00	89,02
12.	Program Penempatan Tenaga Kerja	407.683.000,00	360.941.010,00	88,53
13.	Program Hubungan Industrial	213.259.400,00	198.679.750,00	93,16
14.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	311.567.500,00	311.401.880,00	99,95
15.	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	386.301.200,00	386.301.200,00	100,00
16.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1.156.436.000,00	1.068.189.025,00	92,37
17.	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	124.083.400,00	108.744.146,00	87,64
18.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	7.486.667.000,00	7.467.087.480,00	99,74
19.	Program Kawasan Permukiman	6.030.555.000,00	5.974.523.457,00	99,07
20.	Program Rehabilitasi Sosial	879.437.600,00	852.617.650,00	96,95
21.	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	837.422.800,00	804.275.200,00	96,04

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
22.	Program Penanganan Bencana	68.230.500,00	66.857.750,00	97,99
23.	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan pangan Masyarakat	1.031.023.500,00	975.382.485,00	94,60
24.	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	351.457.500,00	326.616.900,00	92,93
25.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	100.000.000,00	96.814.925,00	96,81
26.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	27.457.355.594,00	24.196.599.722,00	88,12
27.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	3.952.560.600,00	3.505.873.542,00	88,70
28.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1.641.691.215,00	1.576.821.235,00	96,05
29.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	156.825.100,00	150.321.850,00	95,85
30.	Program Penataan Desa	103.827.000,00	88.780.300,00	85,51
31.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	1.316.355.000,00	1.305.203.150,00	99,15
32.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	4.712.040.000,00	4.665.599.264,00	99,01
33.	Program Peningkatan Kerjasama Desa	33.000.000,00	31.108.900,00	94,27
34.	Program Pengendalian Penduduk	419.800.000,00	399.885.467,00	95,26
35.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	6.462.865.400,00	5.727.086.052,00	88,62
36.	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	5.480.540.000,00	5.344.655.200,00	97,52
37.	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	1.206.473.000,00	1.143.462.421,00	94,78
38.	Program Pembinaan Perpustakaan	9.987.696.000,00	8.756.453.800,00	87,67
39.	Program Pendaftaran Penduduk	812.716.900,00	809.745.400,00	99,63
40.	Program Pencatatan Sipil	93.070.000,00	92.217.000,00	99,08
41.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	7.026.500,00	6.897.800,00	98,17
42.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	1.617.565.000,00	1.548.718.983,00	94,17
43.	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	407.549.100,00	399.224.900,00	94,37

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
44.	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	537.105.600,00	516.487.690,00	95,32
45.	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	2.646.653.600,00	2.564.832.638,00	94,75
46.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	1.254.694.100,00	1.252.043.708,00	94,63
47.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	9.610.538.900,00	8.132.731.566,00	94,89
48.	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	3.979.440.740,00	3.491.523.395,00	95,59
49.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	445.154.510.473,00	442.714.027.835,00	95,48
50.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	33.590.900	31.808.800	95,37
51.	Program Perlindungan Khusus Anak	63.928.000	62.226.200	95,22
52.	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	12.398.000	12.392.000	95,01
53.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	552.924.200	551.152.850	95,31
54.	Program Penanggulangan Bencana	2.775.416.600	2.583.066.003	95,94
55.	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	124.083.400	108.744.146	95,56
	Total Anggaran	859.118.898.343,00	828.574.683.906,00	94,69

Untuk mencapai kinerja Sasaran 14 “Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat” dan anggaran sebesar Rp. 119.622.495.273,00 terealisasi 105.001.140.345,00 atau 87,67%. Realisasi anggaran 87,67% lebih rendah dibandingkan dengan capaian kinerja Sasaran 14 sebesar 103,99%, menunjukkan penggunaan sumber daya yang **efektif** dalam mencapai Sasaran 14.

Program dan anggaran yang mendukung capaian Sasaran 14 sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut :

Tabel II.116.
Program dan Anggaran Pendukung Sasaran 14

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	112.994.335.988,00	99.001.169.050,00	87,62
2.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	2.670.382.724,00	2.482.721.945,00	92,97
3.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	77.013.200,00	62.420.250,00	81,05
4.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	3.880.763.361,00	3.454.829.100,00	89,02
	Total Anggaran	119.622.495.273,00	105.001.140.345,00	87,67

Untuk mencapai kinerja Sasaran 15 “Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan” dan anggaran sebesar Rp. 199.326.320.700,00 terealisasi 192.852.516.944,00 atau 97,15%. Realisasi anggaran 97,15% lebih rendah dibandingkan dengan capaian kinerja Sasaran 15 sebesar 101,55%, menunjukkan penggunaan sumber daya yang efektif dalam mencapai Sasaran 15.

Program dan anggaran yang mendukung capaian Sasaran 15 sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut :

Tabel II.117.
Program dan Anggaran Pendukung Sasaran 15

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Pengelolaan Pendidikan	168.371.474.672,00	163.894.626.062,00	97,34
2.	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	18.432.368.528,00	16.545.578.669,00	89,76
3.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1.340.237.500,00	1.304.485.200,00	97,33
4.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	10.093.260.000,00	10.023.605.513,00	99,31
5.	Program Pengembangan	470.000.000,00	468.247.300,00	99,63

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Kapasitas Kepramukaan			
6.	Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	618.980.000,00	615.974.200,00	99,51
	Total Anggaran	199.326.320.700,00	192.852.516.944,00	97,15

Untuk mencapai kinerja Sasaran 16 “Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah” dan anggaran sebesar Rp. 27.220.205.100,00 terealisasi Rp. 27.016.371.756,00 atau 78,06%. Realisasi anggaran 78,06% lebih rendah dibandingkan dengan capaian kinerja Sasaran 16 sebesar 98,47%, menunjukkan penggunaan sumber daya yang **efektif** dalam mencapai Sasaran 16.

Program dan anggaran yang mendukung capaian Sasaran 16 sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut :

Tabel II.118.
Program dan Anggaran Pendukung Sasaran 16

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	215.600.000,00	76.185.400,00	35,34
2.	Program Penataan Bangunan Gedung	25.255.200.100,00	25.207.614.080,00	99,81
3.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.749.405.000,00	1.732.572.276,00	99,04
	Total Anggaran	27.220.205.100,00	27.016.371.756,00	78,06

Untuk mencapai kinerja Sasaran 17 “Meningkatnya Cakupan Rumah Layak Huni” dan anggaran sebesar Rp. 8.646.847.100,00 terealisasi Rp. 8.213.357.352,00 atau 93,85%. Realisasi anggaran 93,85% lebih rendah dibandingkan dengan capaian kinerja Sasaran 17 sebesar 107,32%, menunjukkan penggunaan sumber daya yang **efektif** dalam mencapai Sasaran 17.

Program dan anggaran yang mendukung capaian Sasaran 17 sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut :

Tabel II.119.
Program dan Anggaran Pendukung Sasaran 17

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Pengembangan Perumahan	1.618.517.900,00	1.247.415.395,00	77,07
2.	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	994.552.000,00	988.200.000,00	99,36
3.	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan	3.222.200,00	3.218.500,00	99,89
4.	Program Kawasan Permukiman	6.030.555.000,00	5.974.523.457,00	99,07
	Total Anggaran	8.646.847.100,00	8.213.357.352,00	93,85

Untuk mencapai kinerja Sasaran 18 “Menurunnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial” dan anggaran sebesar Rp.1.785.090.900,00 terealisasi Rp.1.723.750.600,00 atau 96,99%. Realisasi anggaran 93,85% lebih rendah dibandingkan dengan capaian kinerja Sasaran 18 sebesar 4.165%, menunjukkan penggunaan sumber daya yang **efektif** dalam mencapai Sasaran 18.

Program dan anggaran yang mendukung capaian Sasaran 18 sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut :

Tabel II.120.
Program dan Anggaran Pendukung Sasaran 18

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Rehabilitasi Sosial	879.437.600,00	852.617.650,00	96,95
2.	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	837.422.800,00	804.275.200,00	96,04
3.	Program Penanganan Bencana	68.230.500,00	66.857.750,00	97,99
	Total Anggaran	1.785.090.900,00	1.723.750.600,00	96,99

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana Pasal 5 Ayat 4, bahwa Urusan Pemerintahan di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah pusat atau dari Pemerintah daerah provinsi kepada daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah Provinsi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, disebutkan bahwa tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau Desa, dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten atau kota dan/atau Desa serta dari Kabupaten atau Kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

Tugas Pembantuan sebagai salah satu asas penyelenggaraan pemerintahan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat didesentralisasikan dan diotonomkan kepada Daerah. Pemberian Tugas Pembantuan kepada Daerah dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan umum. Sedangkan tujuannya adalah untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta membangun penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan pembangunan daerah.

1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dana Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 85);
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
15. SP. DIPA 018.08.4.039160/2023 tanggal 2 November 2023 Satker Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
16. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Nomor 821.2/002/IX/2023 tentangperubahan atas Keputusan KPA Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Nomor 821.2/015/I/2023 tentang penetaan Pejabat Pengelola Keuangan Dana Tugas Pembantuan pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah
17. DIPA-018.10.3.418011/2023 tanggal 20-11-2022 dan SK Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah TA 2022 selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nomor 821.2/053/I/2023 tanggal 09-01-2023
18. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 100 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 100, tambahan Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 99.

2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Kabupaten

Pada Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara memperoleh alokasi anggaran Tugas Pembantuan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia melalui :

a. Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah.

b. Dinas Peternakan dan Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.

Bidang urusan yang ditugas pembantuankan melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah adalah urusan pertanian, yang diuraikan sebagai berikut :

1. Bidang Urusan Pertanian.

   Tugas pembantuan bidang urusan pertanian dialokasikan untuk penyelenggaraan:

   a. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas.

      Program ini dilaksanakan melalui 5 (lima) kegiatan yaitu :

      1) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi kegiatan lingkup alat dan mesin pertanian.
      2) Kegiatan Persiapan, pelaksanaan bimbingan teknis lingkup pupuk dan pestisida.
      3) Kegiatan Penerima Pupuk Bersubsidi yang diverifikasi dan divalidasi.
      4) Kegiatan Persiapan pelaksanaan kegiatan asuransi pertanian.
      5) Kegiatan Dukungan Manajemen dan dukungan teknis lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana pertanian.

Bidang urusan yang ditugas pembantuankan melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Provinsi Jawa Tengah adalah urusan pertanian dan peternakan, yang diuraikan sebagai berikut :

1. Bidang Urusan Pertanian dan Peternakan.

   a. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas.

      Program ini dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan yaitu :

      1) Kegiatan Fasilitasi Pembiayaan Pertanian.

3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota.

3.1.1 Target Kinerja

Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat khususnya Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Banjarnegara mempunyai target kinerja sebagai berikut :

1. Bidang Urusan Pertanian.

   Tugas pembantuan bidang urusan pertanian dialokasikan untuk penyelenggaraan:

   a. Program ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas.

      Program ini dilaksanakan melalui 5 (lima) kegiatan yaitu :

      1) Kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan lingkup alat dan mesin pertanian.

         Kegiatan ini mempunyai target keluaran (output) : belanja bahan sebanyak 1 paket, belanja honor output kegiatan sebanyak 12 OK, belanja perjalanan dinas biasa sebanyak 2 OP, dan belanja perjalanan dinas dalam kota sebanyak 24 OH.

      2) Kegiatan persiapan, pelaksanaan bimbingan teknis lingkup pupuk dan pestisida.

         Kegiatan ini mempunyai target keluaran (output) : belanja bahan sebanyak 2 paket dan belanja perjalanan dinas biasa sebanyak 6 OP, 44 OH.

      3) Kegiatan penerima pupuk bersubsidi yang diverifikasi dan divalidasi.

         Kegiatan ini mempunyai target keluaran (output) : belanja honor output sebanyak 40 OB dan verifikasi dan validasi penerima pupuk bersubsidi sebanyak 440 OB.

      4) Kegiatan Persiapan pelaksanaan kegiatan asuransi pertanian.

         Kegiatan ini mempunyai target keluaran (output) : Belanja Bahan sebanyak 50 orang, 1 kegiatan, Belanja Barang persediaan barang konsumsi sebanyak 1 tahun, Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebanyak 6 OP dan Belanja Perjalanan dlm kota sebanyak 55 OH.

      5) Kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian.

         Kegiatan ini mempunyai target keluaran (output) : belanja bahan sebanyak 200 OH 1 tahun, 1 kegiatan, dan belanja honor output kegiatan sebanyak 30 OB.

2. Bidang Urusan Pertanian dan Peternakan.

   Tugas pembantuan bidang urusan pertanian dialokasikan untuk penyelenggaraan:

   a. Program ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas.

Program ini dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan yaitu :

1) Kegiatan Fasilitasi Pembiayaan Pertanian.

   Kegiatan ini mempunyai target keluaran (output) : belanja jasa lainnya sebanyak 294 OB dan 12 paket, belanja perjalanan dinas dalam kota sebanyak 496 OB, 1 paket dan 1 tahun, belanja bahan sebanyak 1 paket, belanja Jasa Profesi sebanyak 1 tahun, belanja perjalanan dinas biasa sebanyak 1 paket dan 1 tahun, belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota sebanyak 4 paket, belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota sebanyak 4 paket, belanja barang untuk bantuan lainnya dengan karakteristik banpem sebanyak 11 paket.

3.1.2 Realisasi

Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat khususnya Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Banjarnegara mempunyai realisasi capaian kinerja sebagai berikut :

1. Bidang Urusan Pertanian.

   Tugas pembantuan bidang urusan pertanian dialokasikan untuk penyelenggaraan:

   a. Program ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas.

      Program ini dilaksanakan melalui 5 (lima) kegiatan yaitu :

      1) Kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan lingkup alat dan mesin pertanian.

         Kegiatan ini mempunyai realisasi keluaran (output) : belanja bahan sebanyak 1 paket, belanja honor output kegiatan sebanyak 12 OK, belanja perjalanan dinas biasa sebanyak 2 OP, dan belanja perjalanan dinas dalam kota sebanyak 24 OH.

      2) Kegiatan persiapan, pelaksanaan bimbingan teknis lingkup pupuk dan pestisida.

         Kegiatan ini mempunyai realisasi keluaran (output) : belanja bahan sebanyak 2 paket dan belanja perjalanan dinas biasa sebanyak 6 OP, 44 OH.

3) Kegiatan penerima pupuk bersubsidi yang diverifikasi dan divalidasi.

   Kegiatan ini mempunyai realisasi keluaran (output) : belanja honor output sebanyak 40 OB dan verifikasi dan validasi penerima pupuk bersubsidi sebanyak 440 OB.

4) Kegiatan Persiapan pelaksanaan kegiatan asuransi pertanian.

   Kegiatan ini mempunyai realisasi keluaran (output) : Belanja Bahan sebanyak 50 orang, 1 kegiatan, Belanja Barang persediaan barang konsumsi sebanyak 1 tahun, Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebanyak 6 OP dan Belanja Perjalanan dlm kota sebanyak 55 OH.

5) Kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian.

   Kegiatan ini mempunyai realisasi keluaran (output) : belanja bahan sebanyak 200 OH 1 tahun, 1 kegiatan, dan belanja honor output kegiatan sebanyak 30 OB.

2. Bidang Urusan Pertanian dan Peternakan.

   Tugas pembantuan bidang urusan pertanian dialokasikan untuk penyelenggaraan:

   b. Program ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas.

      Program ini dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan yaitu :

      2) Kegiatan Fasilitasi Pembiayaan Pertanian.

         Kegiatan ini mempunyai realisasi keluaran (output) : belanja jasa lainnya sebanyak 294 OB dan 12 paket, belanja perjalanan dinas dalam kota sebanyak 496 OB, 1 paket dan 1 tahun, belanja bahan sebanyak 1 paket, belanja Jasa Profesi sebanyak 1 tahun, belanja perjalanan dinas biasa sebanyak 1 paket dan 1 tahun, belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota sebanyak 4 paket, belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota sebanyak 4 paket, belanja barang untuk bantuan lainnya dengan karakteristik banpem sebanyak 11 paket.

Adapun matriks capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel III.1.
Matrik Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementrian Pertanian Tahun 2023

No.	Bidang Urusan	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program Kegiatan, Output Dan Rincian	Kab / Kota	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Realisasi Capaian kegiatan	%	Ket
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1	**Pertanian**	Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Nomor 821.2/002/IX/2023 tentangperubahan atas Keputusan KPA Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Nomor 821.2/015/I/2023 tentang penetaan Pejabat Pengelola Keuangan Dana Tugas Pembantuan pada Dinas	**Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas**	Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	**147.593.000**				**100**	
			Monitoring dan Evaluasi kegiatan lingkup alat dan mesin pertanian			**10.000.000**	**9.700.000**	**97**		100	
			- Belanja Bahan			1.000.000	1.000.000	100	**1 paket**	100	
			- Belanja honor output kegiatan			3.600.000	3.600.000	100	12 OK	100	
			- Belanja perjalanan dinas biasa			1.500.000	1.500.000	100	2 OP	100	
			- Belanja Perjalanan Dinas dalam kota			3.900.000	3.600.000	92,31	24 OH	100	
			Persiapan, pelaksanaan bimbingan teknis lingkup pupuk dan pestisida			**17.700.000**	**17.298.000**	**97,73**		100	
			- Belanja Bahan			6.200.000	6.198.000	99,97	2 Paket	100	
			- Belanja jasa lainnya			250.000	0	0		100	
			- Belanja perjalanan dinas biasa			11.250.000	11.100.000	98,67	6 OP, 44 OH	100	

No.	Bidang Urusan	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program Kegiatan, Output Dan Rincian	Kab / Kota	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Realisasi Capaian kegiatan	%	Ket
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
		Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah	**Penerima Pupuk Bersubsidi yang diverifikasi dan divalidasi**			**47.670.000**	**47.670.000**	**100**		100	
			- Belanja Honor Output			4.000.000	4.000.000	100	40 OB	100	
			- Verifikasi dan validasi penerima pupuk bersubsidi			43.670.000	43.670.000	100	440 OB	100	
			Persiapan pelaksanaan kegiatan asuransi pertanian			**16.048.000**	**16.048.000**	**100**		100	
			- Belanja Bahan			2.800.000	2.800.000	100	5O org, 1 Keg	100	
			- Belanja Barang persediaan barang konsumsi			498.000	498.000	100	1 tahun	100	
			- Belanja Perjalanan Dinas Biasa			4.500.000	4.500.000	100	6 OP	100	
			- Belanja Perjalanan dlm kota			8.250.000	8.250.000	100	55 OH	100	
			Dukungan Manajemen dan dukungan teknis lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana pertanian			**56.175.000**	**55.485.000**	**98,77**		100	
			- Belanja bahan			13.875.000	13.875.000	100	200 OH 1 tahun	100	
			- Belanja Honor Output Kegiatan			6.000.000	6.000.000	100	30 OB	100	

No.	Bidang Urusan	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program Kegiatan, Output Dan Rincian	Kab / Kota	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Realisasi Capaian kegiatan	%	Ket
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
			- Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi			2.550.000	2.550.000	100	1 tahun	100	
			- Belanja Perjalanan Dinas Biasa			12.750.000	12.750.000	100	17 OP	100	
			- Belanja Perjalanan dlm kota			13.500.000	13.200.000	97,78	88 OH	100	
			- Belanja perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			7.500.000	7.110.000	94,80	10 OP	100	

Sumber : Data Distankan KP Kabupaten Banjarnegara, 2024

Tabel III.2.
Matrik Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah
Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementrian Pertanian Tahun 2023

No.	Bidang Urusan	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program Kegiatan, Output Dan Rincian	Kab / Kota	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Realisasi Capaian kegiatan	%	Ket
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1.	Pertanian dan Peternakan	SP DIPA 018.08.4.039160/2023 tanggal 2 November 2023 SATKER DInas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah	**Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas**	Banjarnegara	Dinas Pertanian Perikanan dan ketahanan Pangan	**5.078.420.000**	**4.821.745.905**	**94,95**		**100**	
			Fasilitasi Pembiayaan Pertanian			**5.078.420.000**	**4.821.745.905**	**94,95**		**100**	
			Sumber Anggaran IsDB			1.316.160.000	1.251.360.000	95,08			
			Belanja Jasa Lainnya			1.224.000.000	1.164.000.000	95,10			
			Asisten Manager Fasilitator Desa			132.000.000	132.000.000	100,00	24 OB	100,00	
			Manager Fasilitator Desa			84.000.000	84.000.000	100,00	12 OB	100,00	
			Fasilitator Desa			1.008.000.000	948.000.000	94,05	234 OB	100,00	
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			92.160.000	87.360.000	94,79			
			Bantuan Transport Fasilitator Desa			80.640.000	75.840.000	94,05	234 OB	100,00	
			Bantuan Transport Asisten MFD			7.680.000	7.680.000	100,00	12 OB	100,00	
			Bantuan Transport Fasilitator Desa			3.840.000	3.840.000	100,00	24 OB	100,00	
			Sumber Anggaran IFAD			3.762.260.000	3.570.385.905	94,90			
			Belanja Bahan			468.540.000	466.210.200	99,50			
			Sosialisasi Kesadaran			230.000.000	229.465.000	99,77	1 paket	100,00	

No.	Bidang Urusan	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program Kegiatan, Output Dan Rincian	Kab / Kota	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Realisasi Capaian kegiatan	%	Ket
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
			Gizi								
			Spanduk			2.500.000	2.480.000	99,20	10 buah	100,00	
			Perlengkapan peserta dan Lapang			74.440.000	73.900.000	99,27	4 paket	100,00	
			Pelaporan			1.200.000	1.200.000	100,00	4 paket	100,00	
			Operasional Kendaraan kantor			30.000.000	30.000.000	100,00	1 tahun	100,00	
			Komunikasi			30.000.000	30.000.000	100,00	1 tahun	100,00	
			ATK, Fotokopi, Pengiriman			17.400.000	16.165.200	92,90	1 paket	100,00	
			Branding dan Sertifikasi Produk			10.000.000	10.000.000	100,00	3 paket	100,00	
			Konsumsi Rapat			50.500.000	50.500.000	100,00	1 tahun	100,00	
			Kampanye Kesehatan Hewan			22.500.000	22.500.000	100,00	1 paket	100,00	
			belanja Jasa Profesi			72.600.000	72.050.000	99,24			
			Honor Narasumber eselon II			15.000.000	14.800.000	98,67	1 tahun	100,00	
			Honor Narasumber Eselon III			57.600.000	57.250.000	99,39	1 tahun	100,00	
			Belanja Jasa Lainnya			1.366.100.000	1.319.006.781	96,55			
			Managemen Produksi Lahan			150.000.000	150.000.000	100,00	2 paket	100,00	
			Pengembangan kelembagaan petani			60.800.000	60.800.000	100,00	2 paket	100,00	
			Penguatan Hubungan dan Sistem Pemasaran			55.000.000	35.000.000	63,64	1 paket	100,00	
			Peningkatan Kapasitas			879.300.000	852.206.781	96,92	2 paket	100,00	

No.	Bidang Urusan	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program Kegiatan, Output Dan Rincian	Kab / Kota	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Realisasi Capaian kegiatan	%	Ket
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
			SDM								
			Petugas On Granting IFAD			48.000.000	48.000.000	100,00	12 ob	100,00	
			Petugas On Granting IsDB			48.000.000	48.000.000	100,00	12 OB	100,00	
			media Publikasi			125.000.000	125.000.000	100,00	5 paket	100,00	
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa			252.000.000	241.314.434	95,76			
			Penguatan Hubungan dan Sistem Pemasaran			92.000.000	91.805.000	99,79	1 paket	100,00	
			Perjalanan dalam rangka bimbingan dan koordinasi			40.000.000	37.758.806	94,40	1 tahun	100,00	
			Perjalanan dalam rangka Monitoring dan Evaluasi			40.000.000	31.990.280	79,98	1 tahun	100,00	
			Perjalanan dalam rangka Koordinasi ke Instansi terkait			80.000.000	79.760.348	99,70	1 tahun	100,00	
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			197.620.000	132.750.000	67,17			
			Bantuan Transport Penyuluh			88.320.000	72.320.000	81,88	226 OB	100,00	
			Bantuan Transport dan Perjalanan dalam rangka Kampanye Keswan			16.600.000	16.450.000	99,10	1 paket	100,00	
			Perjalanan dalam rangka monev			71.100.000	40.050.000	56,33	1 tahun	100,00	
			perjalanan OGO ke			21.600.000	3.930.000	18,19	1 tahun	100,00	

No.	Bidang Urusan	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program Kegiatan, Output Dan Rincian	Kab / Kota	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Realisasi Capaian kegiatan	%	Ket
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
			likaso kegiatan								
			belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam kota			254.800.000	250.100.000	98,16			
			Penguatan Hubungan dan Sistem Pemasaran			52.000.000	47.350.000	91,06	1 paket	100,00	
			Monitoring dan Evaluasi Kegiatan			202.800.000	202.750.000	99,98	3 paket	100,00	
			belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			400.600.000	338.954.490	84,61			
			Pengembangan kelembagaan petani			79.600.000	78.050.000	98,05	1 paket	100,00	
			Peningkatan Kapasitas SDM			321.000.000	260.904.490	81,28	3 paket	100,00	
			Belanja Barang untuk Bantuan lainnya dengan karakteristik banpem			750.000.000	750.000.000	100,00			
			demplot penerapan teknologi komoditas kopi			200.000.000	200.000.000	100,00	1 paket	100,00	
			demplot penerapan teknologi komoditas ternak			100.000.000	100.000.000	100,00	1 paket	100,00	
			demplot rumah pangan lestari			250.000.000	250.000.000	100,00	5 paket	100,00	
			demplot pemberdayaan wanita dan kesadaran gizi			200.000.000	200.000.000	100,00	4 paket	100,00	

Sumber : Data Distankan KP Kabupaten Banjarnegara, 2024

3.2 Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota

Pada tahun anggaran 2023 Pemerintah Kabupaten Banjarnegara tidak menerima Tugas Pembantuan Provinsi Sehingga target dan realisasinya tidak ada data.

3.3 Permasalahan dan Kendala

1. Tertundanya pelaksanaan kegiatan dikarenakan adanya revisi DIPA serta refocusing.
2. Belum keluarnya ijin dari negara pemberi hibah
3. Pada tahun 2023 banyak petugas penyuluh lapangan yang pesiun
4. Pengadaan alat pengolahan pangan yang tidak dilaksanakan karena harga yang tidak sesuai

3.4 Saran dan Tindak Lanjut

1. Meningkatkan intensitas koordinasi dan konsultasi ke Kementerian dan Provinsi.
2. Percepatan pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan di kabupaten/kota dengan melakukan koordinasi secara intensif dan lebih awal dalam memulai pelaksanaan pekerjaan untuk tahun anggaran berikutnya.

BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Berdasarkan amanat Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, penghitungan pencapaian SPM dilakukan dengan menggunakan indeks pencapaian SPM yang meliputi capaian mutu pelayanan dasar dan capaian penerima pelayanan dasar. Capaian mutu pelayanan dasar, merupakan capaian mutu minimal layanan dasar yang diperoleh dari rata–rata sub indikator kinerja pencapaian mutu minimal barang, jasa, dan SDM sesuai dengan standar teknis yang diberikan bobot sebesar 20%. Sementara capaian penerima pelayanan dasar merupakan capaian yang diperoleh melalui target dan indikator kinerja yang diberikan bobot 80%.

Penghitungan pencapaian SPM dilakukan dengan menggunakan indeks pencapaian SPM yang meliputi 2 aspek yaitu :

a. Pencapaian Penerima Layanan Dasar.
b. Pencapaian Mutu Layanan Dasar (barang, jasa dan sumber daya manusia)

Indeks Pencapaian SPM (IP_{SPM}) adalah nilai capaian SPM yang diperoleh melalui penghitungan rata–rata persentase indeks pencapaian mutu minimal layanan dasar dikalikan bobot mutu dengan persentase indeks penerima layanan dasar dikalikan dengan bobot penerima.

$$IP_{SPM} = \frac{(\text{Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar x BM})}{(\text{Persentase pencapaian penerima layanan dasar x BP})}$$

Keterangan :

IP_{SPM}	=	Indeks pencapaian SPM di masing–masing jenis SPM sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018.
Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar	=	Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar yang diperoleh dari rata–rata sub Indikator Kinerja Pencapaian mutu minimal barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan standar teknis
Persentase pencapaian penerima layanan dasar	=	Persentase pencapaian yang diperoleh melalui indikator dengan target yang ditetapkan di dalam lampiran Permendagri Nomor 59 Tahun 2021
BM	=	Bobot Mutu minimal layanan dasar sebesar 20
BP	=	Bobot Penerima layanan dasar sebesar 80

Dengan adanya indeks pencapaian ini, memberikan kategori terhadap pencapaian SPM, yaitu: Tuntas Paripurna, Tuntas Utama, Tuntas Madya, Tuntas Pratama, Tuntas Muda dan Belum Tuntas sesuai ketentuan mengenai penghitungan pencapaian SPM di daerah yang dijabarkan dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Kategori nilai indeks pencapaian SPM (IPSPM) terhadap capaian mutu minimal dan penerima layanan dasar adalah sebagai berikut :

Tabel IV.1.
Kategori Nilai Indeks Pencapaian SPM (IPSPM)

NO	NILAI	KATEGORI	DESKRIPSI
1	2	3	4
1.	100	Tuntas Paripurna	Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya sama dengan 100
2.	90 - 99	Tuntas Utama	Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya sama dengan 90 sampai dengan 99
3.	80 - 89	Tuntas Madya	Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya sama dengan 80 sampai dengan 89
4.	70 - 79	Tuntas Pratama	Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya sama dengan 70 sampai dengan 79
5.	60-69	Tuntas Muda	Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya sama dengan 60 sampai dengan 69
6.	< 60	Belum Tuntas	Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya lebih kecil dari 60

Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM

Pelayanan dasar Standar Pelayanan Minimal terdiri dari Bidang Urusan Pendidikan, Bidang Urusan Kesehatan, Bidang Urusan Pekerjaan Umum, Bidang Urusan Perumahan Rakyat, Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dan Bidang Urusan Sosial.

4.1 BIDANG URUSAN PENDIDIKAN

4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Penyelenggaran pelayanan dasar Bidang Urusan Pendidikan di Kabupaten Banjarnegara secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga. Pelayanan dasar di Bidang Urusan Pendidikan merupakan penjabaran target yang telah ditetapkan menjadi Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan Pendidikan yaitu:

1. Jenis Pelayanan Dasar;
2. Penerima Pelayanan Dasar;
3. Mutu Pelayanan Dasar.

4.1.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian SPM oleh daerah adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk penghitungan pembiayaannya sesuai dengan ketentuan. Berdasarkan Peraturan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan Pendidikan. Target pencapaian indikator SPM Bidang urusan Pendidikan di Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2023, sebagai berikut:

4.1.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Tabel IV.2.
Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Urusan Pendidikan
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian											Anggaran
		Penerima Layanan Dasar					Mutu Minimal Pelayanan Dasar						
		Indikator	Target			Batas Waktu Capaian	No	Indikator	Target			Batas Waktu Capaian	
			Jumlah Orang Yang harus Dilayanani (orang)	Jumlah Orang Yang Terlayani (orang)	(%)				Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang tersedia	(%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = (5: 4) x100*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12 = (11:10) x100*	*13*	*14*
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	49.308	49.308	100	TAHUN 2023	1	Angka Partisipasi Sekolah	100	100	100	TAHUN 2023	28.729.360.153
							2	Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	100	100	100		
							3	Pertumbuhan pendidik PAUD di S1/DIV	100	100	100		
							4	Rasio Pengawas Sekolah untuk PAUD	100	100	100		

							5	Kecukupan formasi guru ASN	100	100	100		
							6	Indeks distribusi guru	100	100	100		
							7	Proporsi PTK bersertiifikat	100	100	100		
							8	Proporsi PTK Penggerak	100	100	100		
							9	Pengalaman pelatihan guru	100	100	100		
2.	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	151.974	151.974	100	TAHUN 2023		SD :				TAHUN 2023	136.558.348.150
							1	Angka partisipasi kasar	100	100	100		
								Angka partisipasi sekolah	100	100	100		
							2	Angka partisipasi murni	100	100	100		
							3	Kemampuan literasi	1,83	1,83	100		
							4	Angka partisipasi kasar	100	100	100		
							5	Kemampuan numerasi	38	38	100		
							6	Perbedaan Skor Literasi	1,62	1,62	100		
							7	Perbedaan Skor Numerasi	2,67	2,67	100		

8	Indeks iklim keamanan	3,00	3,00	100
9	Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	692	692	100
10	Kecukupan formasi guru ASN	100	100	100
11	Indeks distribusi guru	100	100	100
12	Proporsi PTK bersertifikat	100	100	100
13	Proporsi PTK penggerak	100	100	100
14	Pengalaman pelatihan guru	100	100	100
	SMP :			
1	Angka partisipasi kasar	100	100	100
2	Angka partisipasi sekolah	100	100	100
3	Angka partisipasi murni	100	100	100
4	Kemampuan literasi	1,88	1,88	100
5	Kemampuan numerasi	1,73	1,73	100

							6	Perbedaan skor literasi	2,67	2,67	100		
							7	Perbedaan skor numerasi	3,00	3,00	100		
							8	Indeks iklim keamanan	2,47	2,47	100		
							9	Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	100	100	100		
							10	Kecukupan formasi guru ASN	100	100	100		
							11	Indeks distribusi guru	100	100	100		
							12	Proporsi PTK bersertifikat	100	100	100		
							13	Proporsi PTK penggerak	100	100	100		
							14	Pengalaman pelatihan guru	100	100	100		
3.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaiakan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesataraan	5.009	5.009	100	TAHUN 2023	1	Angka partisipasi kasar	100	100	100	TAHUN 2023	14.666.773.153
							2	Angka partisipasi sekolah	100	100	100		
							3	Angka partisipasi murni	100	100	100		
							4	Kemampuan literasi	1,88	1,88	100		
							5	Kemampuan numerasi	1,73	1,73	100		

							6	Perbedaan skor literasi	2,67	2,67	100		
							7	Perbedaan skor numerasi	3,00	3,00	100		
							8	Indeks iklim keamanan	2,50	2,50	100		
							9	Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	2,21	2,21	100		
							10	Kecukupan formasi guru ASN	100	100	100		
							11	Indeks distribusi guru	100	100	100		
							12	Proporsi PTK bersertifikat	100	100	100		
							13	Proporsi PTK Penggerak	100	100	100		
							14	Pengalaman pelatihan guru	100	100	100		

Sumber : Data Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kab. Banjarnegara,2024

4.1.3 Realisasi

Realisasi adalah target yang dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya. Berikut ini tabel realisasi capaian SPM Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2023 :

Tabel IV.3.
Realisasi Pencapaian Target SPM Bidang Urusan Pendidikan
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian											Capaian SPM (%) / Katergori
		Penerima Layanan Dasar					Mutu Minimal Pelayanan Dasar						
		Indikator	Realisasi			IP_{SPM} (%)	No	Indikator	Realisasi			IP_{SPM} (%)	
			Jumlah Orang Yang Akan Dilayani	Jumlah Orang Yang terlayani	(%)				Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang tersedia	(%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = (5: 4) x100*	*7 = 6 X 80%*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12 = (11:10) x100*	*13 = 12X 20%*	*14*
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	49.308	**36.901**	**74,84**	**59,87**	1	Angka Partisipasi Sekolah	100	93,25	93,25	18,65	
							2	Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	100	34,77	34,77	6,95	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian											Capaian SPM (%) / Katergori
		Penerima Layanan Dasar					Mutu Minimal Pelayanan Dasar						
		Indikator	Realisasi			IP_{SPM} (%)	No	Indikator	Realisasi			IP_{SPM} (%)	
			Jumlah Orang Yang Akan Dilayani	Jumlah Orang Yang terlayani	(%)				Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang tersedia	(%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = (5: 4) x100*	*7 = 6 X 80%*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12 = (11:10) x100*	*13 = 12X 20%*	*14*
							3	Pertumbuhan pendidik PAUD di S1/DIV	100	63,00	63,00	12,60	
							4	Rasio Pengawas Sekolah untuk PAUD	100	70,76	70,76	14,15	
							5	Kecukupan formasi guru ASN	100	4,86	4,86	0,97	
							6	Indeks distribusi guru	100	100,00	100,00	20,00	
							7	Proporsi PTK bersertiifikat	100	63,00	63,00	12,60	
							8	Proporsi PTK Penggerak	100	0,78	0,78	0,16	
							9	Pengalaman pelatihan guru	100	0,00	0,00	0,00	
					Rata-Rata	**59,87**					**Rata-Rata**	9,56	**69,44/ Tuntas Muda**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian											Capaian SPM (%) / Katergori
		Penerima Layanan Dasar					Mutu Minimal Pelayanan Dasar						
		Indikator	Realisasi			IP_{SPM} (%)	No	Indikator	Realisasi			IP_{SPM} (%)	
			Jumlah Orang Yang Akan Dilayani	Jumlah Orang Yang terlayani	(%)				Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang tersedia	(%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = (5: 4) x100*	*7 = 6 X 80%*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12 = (11:10) x100*	*13 = 12X 20%*	*14*
2.	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	151.974	143.968	94,73	75,79		SD :					
							1	Angka partisipasi kasar	100	92,61	92,61	18,52	
								Angka partisipasi sekolah	100	95,63	95,63	19,13	
							2	Angka partisipasi murni	100	87,92	87,92	17,58	
							3	Kemampuan literasi	1,83	1,83	100	20,00	
							4	Angka partisipasi kasar	100	1,62	100	20,00	
							5	Kemampuan numerasi	38	2,67	100	20,00	
							6	Perbedaan Skor Literasi	1,62	3,00	100	20,00	
							7	Perbedaan Skor Numerasi	2,67	671	96,97	19,39	
							8	Indeks iklim keamanan	3,00	100,00	100,00	20,00	
							9	Indeks iklim	692	70,89	70,89	14,18	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian											Capaian SPM (%) / Katergori
		Penerima Layanan Dasar					Mutu Minimal Pelayanan Dasar						
		Indikator	Realisasi			IP_{SPM} (%)	No	Indikator	Realisasi			IP_{SPM} (%)	
			Jumlah Orang Yang Akan Dilayani	Jumlah Orang Yang terlayani	(%)				Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang tersedia	(%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = (5: 4) x100*	*7 = 6 X 80%*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12 = (11:10) x100*	*13 = 12X 20%*	*14*
								kebinekaan dan inklusivitas					
							10	Kecukupan formasi guru ASN	100	86,94	86,94	17,39	
							11	Indeks distribusi guru	100	94,92	94,92	18,98	
							12	Proporsi PTK bersertifikat	100	3,26	3,26	0,65	
							13	Proporsi PTK penggerak	100	15,98	15,98	3,20	
							14	Pengalaman pelatihan guru	100	92,61	92,61	18,52	
								SMP :					
							1	Angka partisipasi kasar	100	87,03	87,03	17,41	
							2	Angka partisipasi sekolah	100	92,86	92,86	18,57	
							3	Angka partisipasi murni	100	71,08	71,08	14,22	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian											Capaian SPM (%) / Katergori
		Penerima Layanan Dasar					Mutu Minimal Pelayanan Dasar						
		Indikator	Realisasi			IP_{SPM} (%)	No	Indikator	Realisasi			IP_{SPM} (%)	
			Jumlah Orang Yang Akan Dilayani	Jumlah Orang Yang terlayani	(%)				Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang tersedia	(%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = (5: 4) x100*	*7 = 6 X 80%*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12 = (11:10) x100*	*13 = 12X 20%*	*14*
							4	Kemampuan literasi	1,88	1,88	100	20,00	
							5	Kemampuan numerasi	1,73	1,73	100	20,00	
							6	Perbedaan skor literasi	2,67	2,67	100	20,00	
							7	Perbedaan skor numerasi	3,00	3,00	100	20,00	
							8	Indeks iklim keamanan	2,47	2,47	100	20,00	
							9	Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	100	100,00	100	20,00	
							10	Kecukupan formasi guru ASN	100	70,48	70,48	14,10	
							11	Indeks distribusi guru	100	92,31	92,31	18,46	
							12	Proporsi PTK bersertifikat	100	65,82	65,82	13,16	
							13	Proporsi PTK penggerak	100	3,88	3,88	0,78	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian											Capaian SPM (%) / Katergori
		Penerima Layanan Dasar					Mutu Minimal Pelayanan Dasar						
		Indikator	Realisasi			IP_{SPM} (%)	No	Indikator	Realisasi			IP_{SPM} (%)	
			Jumlah Orang Yang Akan Dilayani	Jumlah Orang Yang terlayani	(%)				Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang tersedia	(%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = (5: 4) x100*	*7 = 6 X 80%*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12 = (11:10) x100*	*13 = 12X 20%*	*14*
							14	Pengalaman pelatihan guru	100	19,72	19,72	3,94	
						Rata-Rata	75,79					**Rata-Rata**	17,52	**91,84/ Tuntas Utama**
3.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaiakan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesataraan	5.009	**4.298**	**85,81**	**68,64**	1	Angka partisipasi kasar	100	85,81	85,81	17,16	
							2	Angka partisipasi sekolah	100	100,00	100	20,00	
							3	Angka partisipasi murni	100	85,81	85,81	17,16	
							4	Kemampuan literasi	1,88	1,88	100	20,00	
							5	Kemampuan numerasi	1,73	1,73	100	20,00	
							6	Perbedaan skor literasi	2,67	2,67	100	20,00	
							7	Perbedaan skor numerasi	3,00	3,00	100	20,00	
							8	Indeks iklim	2,50	2,50	100	20,00	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian											Capaian SPM (%) / Katergori
		Penerima Layanan Dasar					Mutu Minimal Pelayanan Dasar						
		Indikator	Realisasi			IP_{SPM} (%)	No	Indikator	Realisasi			IP_{SPM} (%)	
			Jumlah Orang Yang Akan Dilayani	Jumlah Orang Yang terlayani	(%)				Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang tersedia	(%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = (5: 4) x100*	*7 = 6 X 80%*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12 = (11:10) x100*	*13 = 12X 20%*	*14*
								keamanan					
							9	Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	2,21	2,21	100	20,00	
							10	Kecukupan formasi guru ASN	100	3,30	3,30	0,66	
							11	Indeks distribusi guru	100	100,00	100	20,00	
							12	Proporsi PTK bersertifikat	100	0	0,00	0,00	
							13	Proporsi PTK Penggerak	100	0	0,00	0,00	
							14	Pengalaman pelatihan guru	100	0	0,00	0,00	
Rata-Rata						**68,64**	**Rata-Rata**					**13,93**	**82,57/ Tuntas Madya**
BIDANG URUSAN PENDIDIKAN													**81,28/ Tuntas Madya**

Sumber : Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara, 2024

4.1.4 Alokasi Anggaran

Sumber anggaran untuk penerapan dan pencapaian indikator SPM bidang urusan Pendidikan berasal dari alokasi belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan ke dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023, dengan rincian alokasi anggaran per jenis pelayanan dasar sebagai berikut:

Tabel IV.4.
Alokasi Anggaran Untuk Pemenuhan SPM
Bidang Urusan Pendidikan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	ANGGARAN				JUMLAH
		APBD	APBN	DAK	Sumber Dana Lain yang Sah	
1	*2*	*3*	*4*	*6*	*7*	*8*
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	28.729.360.153	0	0	0	28.729.360.153
2.	Pendidikan Dasar	136.558.348.150	0	0	0	136.558.348.150
3.	Pendidikan Kesetaraan	14.666.773.153	0	0	0	14.666.773.153
Jumlah		**179.954.481.456**	0	0	0	**179.954.481.456**

Sumber : Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara, 2024

Jumlah total alokasi anggaran untuk pencapaian indikator SPM Bidang Urusan Pendidikan di Kabupaten Banjarnegara tahun 2023 sebesar Rp.179.954.481.456,00.

4.1.5 Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM. Dukungan personil yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM bidang urusan Pendidikan meliputi:

Tabel IV.5.
Dukungan Personil Penerapan SPM Bidang Urusan Pendidikan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023

NO	Jenis Pelayanan/Pendidikan	JUMLAH PERSONIL	KET
1	**Pendidikan Anak Usia Dini**		
	a. S2	0	
	b. S1/D-IV	1.084	
	c. D3	24	
	d. SMA	723	
	Jumlah	**1.831**	
2	**Pendidikan Dasar**		
	a. S2	138	
	b. S1/D-IV	5.817	
	c. D3	12	
	d. SMA	88	
	Jumlah	**6.055**	
3	**Pendidikan Kesetaraan**		
	a. S2	1	
	b. S1/D-IV	65	
	c. D3	4	
	d. SMA	35	
	Jumlah	**104**	
	Jumlah Total	**7.990**	

Sumber : Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara, 2024

Jumlah personil yang terlibat dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Pendidikan sebanyak 7.990 orang terdiri dari personil pada kantor Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara, Korwil Dindikpora Kecamatan, satuan pendidikan serta dukungan Pemerintah dan juga tak bisa lepas dari dukungan masyarakat.

4.1.6 Permasalahan dan Solusi

Penerapan dan pencapaian SPM bidang Urusan Pendidikan di Kabupaten Banjarnegara tidak terlepas dari permasalahan yang terjadi, baik permasalahan eksternal maupun internal. Permasalahan yang ada dan solusi yang dilakukan dalam pencapaian SPM diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel IV.6.
Permasalahan dan Solusi SPM Bidang Urusan Pendidikan
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023

No	Sumber	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4
1.	Internal	Belum meratanya akses layanan pendidikan jenjang PAUD karena jumlah satuan pendidikan PAUD belum merata di seluruh Kbupaten Banjarnegara, terutama untuk wilayah-wilayah yang sulit dijangkau oleh kendaraan umum.	Penambahan akses layanan PAUD dengan menambah jumlah layanan satuan pendidikan tertama pada wilayah-wilayah yang sulit dijangkau.
		Keterbatasan kemampuan anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara untuk peningkatan layanan pendidikan PAUD, karena revokusing anggaran Daerah yang bersumber dari APBD.	Perlunya keberpihakan anggaran Pemerintahan Daerah dalam upaya peningkatan layanan pendidikan PAUD
2.	Eksternal	Beberapa Lembaga PAUD ada yang tidak dapat beroperasi karena kurangnya dukungan dari warga masyarakat dan pemerintah desa setempat di beberapa wilayah kecamatan.	Menumbuhkan masyarakat peduli pendidikan sebagai mitra pemerintah daerah, diharapkan dapat berpartisispasi dan berkontribusi dalam penyelenggaraan layanan PAUD (selain pendidikan keluarga) di lingkungan perumahan perkotaan maupun pinggiran kota dan bahkan sampai ke pedesaan (daerah 3T) sesuai dengan potensi dan kemampuan daerah.
		Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anaknya yang berusia 5-6 tahun pada PAUD.	Bagi orangtua, khususnya para ibu rumah tangga perlu diberi motivasi agar tumbuh-kembang kesadaran untuk memberikan pendidikan kepada anaknya sejak usia dini. Pengetahuan tentang PAUD dapat dilakukan dengan cara penyuluhan dan sosialisasi maupun advokasi di berbagai tempat (Bina Keluarga Balita dan Posyandu) secara terjadwal.

Sumber : Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara, 2024

4.2 BIDANG URUSAN KESEHATAN

4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, SPM Kesehatan terdiri atas SPM Kesehatan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Jenis pelayanan dasar penerapan SPM Bidang Urusan Kesehatan Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil;
2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin;
3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir;
4. Pelayanan Kesehatan Balita;
5. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar;
6. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif;
7. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut;
8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi;
9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM);
10. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat;
11. Pelayanan Kesehatan Orang dengan terduga Tuberkulosis (TB);
12. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV;

4.2.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, pada lampiran huruf A nomor 2 (dua) mengenai target dan indikator kinerja pencapaian SPM Bidang Urusan Kesehatan, maka ditetapkan target pencapaian SPM oleh daerah adalah 100% setiap tahunnya untuk setiap jenis pelayanan dasar dan indikator pencapaiannya.

Berikut adalah tabel rencana target capaian SPM Bidang Urusan Kesehatan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023.

Tabel IV.7.
Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM
Bidang Urusan Kesehatan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian											Anggaran
		Penerima Layanan Dasar					Mutu Minimal Pelayanan Dasar						
		Indikator	Target			Batas Waktu Capaian	No	Indikator	Target			Batas Waktu Capaian	
			Jumlah Orang Yang harus Dilayanani (orang)	Jumlah Orang Yang Terlayani (orang)	(%)				Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang tersedia	(%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = (5: 4) x100*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12 = (11:10) x100*	*13*	*14*
1.	**Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil**	**Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan**	12.573	12.573	100	TAHUN 2023	1	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	12.573	12.573	100	TAHUN 2023	
							2	Tablet tambah darah	12.573	12.573	100		
							3	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan.	12.573	12.573	100		
							4	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	12.573	12.573	100		
							5	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	12.573	12.573	100		

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian											Anggaran
		Penerima Layanan Dasar					Mutu Minimal Pelayanan Dasar						
		Indikator	Target			Batas Waktu Capaian	No	Indikator	Target			Batas Waktu Capaian	
			Jumlah Orang Yang harus Dilayanani (orang)	Jumlah Orang Yang Terlayani (orang)	(%)				Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang tersedia	(%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = (5: 4) x100*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12 = (11:10) x100*	*13*	*14*
							6	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin	12.573	12.573	100		
							7	Kartu ibu/rekam medis ibu	12.573	12.573	100		
							8	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	12.573	12.573	100		
							9	Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis kebidanan	6	6	100		
							10	Tenaga kesehatan : Bidan	1.000	1.000	100		
							11	Tenaga kesehatan : Perawat	10.639	10.639	100		
							12	Kunjungan 4 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K4) (Satu kali pada trimester pertama,	12.573	12.573	100		

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian											Anggaran
		Penerima Layanan Dasar					Mutu Minimal Pelayanan Dasar						
		Indikator	Target			Batas Waktu Capaian	No	Indikator	Target			Batas Waktu Capaian	
			Jumlah Orang Yang harus Dilayanani (orang)	Jumlah Orang Yang Terlayani (orang)	(%)				Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang tersedia	(%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = (5: 4) x100*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12 = (11:10) x100*	*13*	*14*
								Satu kali pada trimester kedua, Dua kali pada trimester ketiga)					
2.	**Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin**	**Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan**	11.995	11.995	100	TAHUN 2023	1	Formulir Partograf	11.995	11.995	100	TAHUN 2023	
							2	Kartu ibu (rekam medis)	11.995	11.995	100		
							3	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	11.995	11.995	100		
							4	Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis Kebidanan dan Kandungan	6	6	100		
							5	Tenaga Kesehatan : Bidan	1.000	1.000	100		
							6	Tenaga Kesehatan: Perawat	1.053	1.053	100		

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian											Anggaran
		Penerima Layanan Dasar					Mutu Minimal Pelayanan Dasar						
		Indikator	Target			Batas Waktu Capaian	No	Indikator	Target			Batas Waktu Capaian	
			Jumlah Orang Yang harus Dilayanani (orang)	Jumlah Orang Yang Terlayani (orang)	(%)				Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang tersedia	(%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = (5: 4) x100*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12 = (11:10) x100*	*13*	*14*
3.	**Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir**	**Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan**	11.940	11.940	100	TAHUN 2023	1	Vaksin Hepatitis B0	11.940	11.940	100	TAHUN 2023	
							2	Vitamin K1 injeksi	11.940	11.940	100		
							3	Salep/tetes mata antibiotik	11.940	11.940	100		
							4	Formulir bayi baru lahir	11.940	11.940	100		
							5	Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	11.940	11.940	100		
							6	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	11.940	11.940	100		
							7	Dokter/dokter spesialis Anak	8	8	100		
							8	Tenaga kesehatan : Bidan	1.000	1.000	100		
							9	Tenaga kesehatan :	1.053	1.053	100		

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian											Anggaran
		Penerima Layanan Dasar					Mutu Minimal Pelayanan Dasar						
		Indikator	Target			Batas Waktu Capaian	No	Indikator	Target			Batas Waktu Capaian	
			Jumlah Orang Yang harus Dilayanani (orang)	Jumlah Orang Yang Terlayani (orang)	(%)				Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang tersedia	(%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = (5: 4) x100*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12 = (11:10) x100*	*13*	*14*
								Perawat					
4.	**Pelayanan kesehatan balita**	**Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan**	**60.645**	**60.645**	100	TAHUN 2023	1	Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	60.645	60.645	100	TAHUN 2023	
							2	Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	60.645	60.645	100		
							3	Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	60.645	60.645	100		
							4	Vitamin A Biru	60.645	60.645	100		
							5	Vitamin A Merah	60.645	60.645	100		

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian											Anggaran
		Penerima Layanan Dasar					Mutu Minimal Pelayanan Dasar						
		Indikator	Target			Batas Waktu Capaian	No	Indikator	Target			Batas Waktu Capaian	
			Jumlah Orang Yang harus Dilayanani (orang)	Jumlah Orang Yang Terlayani (orang)	(%)				Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang tersedia	(%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = (5: 4) x100*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12 = (11:10) x100*	*13*	*14*
							6	Vaksin imunisasi lanjutan: DPT -HB -Hib, Campak, Rubella	60.645	60.645	100		
							7	Vaksin imunisasi dasar: HBO, BCG, Polio, IPV, DPT -HB -Hib, Campak, Rubella	60.645	60.645	100		
							8	Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	60.645	60.645	100		
							9	Peralatan Anafilaktik	60.645	60.645	100		
							10	Tenaga kesehatan : Dokter	60.645	60.645	100		
							11	Tenaga kesehatan : Bidan	1.000	1.000	100		

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian											Anggaran
		Penerima Layanan Dasar					Mutu Minimal Pelayanan Dasar						
		Indikator	Target			Batas Waktu Capaian	No	Indikator	Target			Batas Waktu Capaian	
			Jumlah Orang Yang harus Dilayanani (orang)	Jumlah Orang Yang Terlayani (orang)	(%)				Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang tersedia	(%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = (5: 4) x100*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12 = (11:10) x100*	*13*	*14*
							12	Tenaga kesehatan : Perawat	1.053	1.053	100		
							13	Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	35	35	100		
							14	Tenaga kesehatan : kader kesehatan	789	789	100		
							15	Tenaga Non Kesehatan : Guru PAUD	214	214	100		
5.	**Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar**	**Jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan**	**134.465**	**134.465**	100	TAHUN 2023	1	Buku raport kesehatanku	134.465	134.465	100	TAHUN 2023	
							2	Buku pemantauan kesehatan	134.465	134.465	100		
							3	Kuesioner skrining kesehatan	134.465	134.465	100		
							4	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia	134.465	134.465	100		

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian											Anggaran
		Penerima Layanan Dasar					Mutu Minimal Pelayanan Dasar						
		Indikator	Target			Batas Waktu Capaian	No	Indikator	Target			Batas Waktu Capaian	
			Jumlah Orang Yang harus Dilayanani (orang)	Jumlah Orang Yang Terlayani (orang)	(%)				Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang tersedia	(%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = (5: 4) x100*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12 = (11:10) x100*	*13*	*14*
								sekolah dan remaja di dalam sekolah					
							5	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	134.465	134.465	100		
							6	Tenaga kesehatan : Dokter/Dokter gigi	68	68	100		
							7	Tenaga kesehatan : Bidan	1.000	1.000	100		
							8	Tenaga kesehatan : Perawat	1.053	1.053	100		
							9	Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	35	35	100		
							10	Tenaga Kesehatan : Masyarakat	35	35	100		
							11	Tenaga kesehatan :	13.446	13.446	100		

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian											Anggaran
		Penerima Layanan Dasar					Mutu Minimal Pelayanan Dasar						
		Indikator	Target			Batas Waktu Capaian	No	Indikator	Target			Batas Waktu Capaian	
			Jumlah Orang Yang harus Dilayanani (orang)	Jumlah Orang Yang Terlayani (orang)	(%)				Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang tersedia	(%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = (5: 4) x100*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12 = (11:10) x100*	*13*	*14*
								Kader Kesehatan					
							12	Tenaga Non kesehatan : Guru	1.031	1.031	100		
6.	**Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif**	**Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan**	467.440	467.440	100	TAHUN 2023	1	Strip uji pemeriksaan gula darah, kolesterol	398	398	100	TAHUN 2023	
							2	Alat ukur berat badan	398	398	100		
							3	Alat : Alat ukur tinggi badan	398	398	100		
							4	Alat : Alat ukur lingkar perut	398	398	100		
							5	Alat : Tensimeter	398	398	100		
							6	Alat : Glukometer	40	40	100		
							7	Alat : Tes strip gula darah	467.440	467.440	100		
							8	Alat : Lancet	467.440	467.440	100		
							9	Alat : Kapas alcohol	467.440	467.440	100		
							10	Alat : KIT IVA Tes	35	35	100		

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian											Anggaran
		Penerima Layanan Dasar					Mutu Minimal Pelayanan Dasar						
		Indikator	Target			Batas Waktu Capaian	No	Indikator	Target			Batas Waktu Capaian	
			Jumlah Orang Yang harus Dilayanani (orang)	Jumlah Orang Yang Terlayani (orang)	(%)				Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang tersedia	(%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = (5: 4) x100*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12 = (11:10) x100*	*13*	*14*
							11	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	278	278	100		
							12	Tenaga kesehatan : Dokter	35	35	100		
							13	BidanTenaga kesehatan : Bidan	35	35	100		
							14	Tenaga kesehatan : Perawat	35	35	100		
							15	Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	35	35	100		
							16	Tenaga Kesehatan Masyarakat	35	35	100		
							17	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	1.890	1.890	100		

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian											Anggaran
		Penerima Layanan Dasar					Mutu Minimal Pelayanan Dasar						
		Indikator	Target			Batas Waktu Capaian	No	Indikator	Target			Batas Waktu Capaian	
			Jumlah Orang Yang harus Dilayanani (orang)	Jumlah Orang Yang Terlayani (orang)	(%)				Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang tersedia	(%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = (5: 4) x100*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12 = (11:10) x100*	*13*	*14*
7.	**Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut**	**Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan**	137.217	137.217	100	TAHUN 2023	1	Strip uji pemeriksaan gula darah, kolesterol	137.217	137.217	100	TAHUN 2022	
							2	Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Intrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)	137.217	137.217	100		
							3	Buku kesehatan lansia	137.217	137.217	100		
							4	Dokter	70	70	100		

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian											Anggaran
		Penerima Layanan Dasar					Mutu Minimal Pelayanan Dasar						
		Indikator	Target			Batas Waktu Capaian	No	Indikator	Target			Batas Waktu Capaian	
			Jumlah Orang Yang harus Dilayanani (orang)	Jumlah Orang Yang Terlayani (orang)	(%)				Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang tersedia	(%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = (5: 4) x100*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12 = (11:10) x100*	*13*	*14*
							5	Bidan	278	278	100		
							6	Perawat	278	278	100		
							7	Ahli Gizi	70	70	100		
							8	TenagaKesehatan Masyarakat	70	70	100		
							9	Tenaga Non Kesehatan Terlatih	556	556	100		
8.	**Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi**	**Jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan**	**247.475**	**247.475**	100	TAHUN 2023	1	Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	398	398	100	TAHUN 2023	
							2	Tensimeter	398	398	100		
							3	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem	278	278	100		

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian											Anggaran
		Penerima Layanan Dasar					Mutu Minimal Pelayanan Dasar						
		Indikator	Target			Batas Waktu Capaian	No	Indikator	Target			Batas Waktu Capaian	
			Jumlah Orang Yang harus Dilayanani (orang)	Jumlah Orang Yang Terlayani (orang)	(%)				Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang tersedia	(%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = (5: 4) x100*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12 = (11:10) x100*	*13*	*14*
								Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)					
							4	Tenaga Kesehatan: Dokter	35	35	100		
							5	Tenaga Kesehatan: Bidan	35	35	100		
							6	Tenaga Kesehatan: Perawat	35	35	100		
							7	Tenaga Kesehatan Masyarakat	35	35	100		
							8	Obat Hipertensi	247.475	247.475	100		
9.	**Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)**	**Jumlah warga negara penderita diabetes melitus yang mendapatkan layanan**	15.765	15.765	100	TAHUN 2023	1	Alat : Glukometer	40	40	100	TAHUN 2023	
							2	Alat : Strip Tes Gula Darah	15.765	15.765	100		
							3	Alat : Kapas Alkohol	15.765	15.765	100		
							4	Alat : Lancet	15.765	15.765	100		
							5	Formulir pencatatan	278	278	100		

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian											Anggaran
		Penerima Layanan Dasar					Mutu Minimal Pelayanan Dasar						
		Indikator	Target			Batas Waktu Capaian	No	Indikator	Target			Batas Waktu Capaian	
			Jumlah Orang Yang harus Dilayanani (orang)	Jumlah Orang Yang Terlayani (orang)	(%)				Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang tersedia	(%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = (5: 4) x100*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12 = (11:10) x100*	*13*	*14*
		kesehatan						dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)					
							6	Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	398	398	100		
							7	Tenaga kesehatan : Dokter	35	35	100		
							8	Tenaga kesehatan : Bidan	35	35	100		
							9	Tenaga kesehatan : Perawat	35	35	100		
							10	Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	35	35	100		
							11	Tenaga Kesehatan Masyarakat	35	35	100		
							12	Obat Diabetes	15.765	15.765	100		

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian											Anggaran
		Penerima Layanan Dasar					Mutu Minimal Pelayanan Dasar						
		Indikator	Target			Batas Waktu Capaian	No	Indikator	Target			Batas Waktu Capaian	
			Jumlah Orang Yang harus Dilayanani (orang)	Jumlah Orang Yang Terlayani (orang)	(%)				Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang tersedia	(%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = (5: 4) x100*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12 = (11:10) x100*	*13*	*14*
								Melitus					
10.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	2.697	2.697	100	TAHUN 2023	1	Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	35	35	100	TAHUN 2022	
							2	Kit berisi 2 Alat Fiksasi)	70	70	100		
							3	Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan	2.697	2.697	100		

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian											Anggaran
		Penerima Layanan Dasar					Mutu Minimal Pelayanan Dasar						
		Indikator	Target			Batas Waktu Capaian	No	Indikator	Target			Batas Waktu Capaian	
			Jumlah Orang Yang harus Dilayanani (orang)	Jumlah Orang Yang Terlayani (orang)	(%)				Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang tersedia	(%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = (5: 4) x100*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12 = (11:10) x100*	*13*	*14*
							4	Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	35	35	100		
							5	Tenaga kesehatan : Dokter	35	35	100		
							6	Tenaga kesehatan : Perawat Terlatih Jiwa	35	35	100		
11.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan terduga Tuberkulosis (TB)	Jumlah warga negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	10.639	10.639	100	TAHUN 2023	1	Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	35	35	100	TAHUN 2023	
							2	Reagen Zn TB	35	35	100		
							3	Masker jenis rumah tangga dan Masker N95	3.500	3.500	100		
							4	Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi,	11.000	11.000	100		

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian											Anggaran
		Penerima Layanan Dasar					Mutu Minimal Pelayanan Dasar						
		Indikator	Target			Batas Waktu Capaian	No	Indikator	Target			Batas Waktu Capaian	
			Jumlah Orang Yang harus Dilayanani (orang)	Jumlah Orang Yang Terlayani (orang)	(%)				Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang tersedia	(%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = (5: 4) x100*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12 = (11:10) x100*	*13*	*14*
								Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering					
							5	Catridge tes cepat molekuler	11.000	11.000	100		
							6	Formulir pencatatan dan pelaporan	11.000	11.000	100		
							7	Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	12	12	100		
							8	Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru	4	4	100		
							9	Tenaga kesehatan : Perawat	35	35	100		
							10	Tenaga kesehatan : Analis Teknik	35	35	100		

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian											Anggaran
		Penerima Layanan Dasar					Mutu Minimal Pelayanan Dasar						
		Indikator	Target			Batas Waktu Capaian	No	Indikator	Target			Batas Waktu Capaian	
			Jumlah Orang Yang harus Dilayanani (orang)	Jumlah Orang Yang Terlayani (orang)	(%)				Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang tersedia	(%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = (5: 4) x100*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12 = (11:10) x100*	*13*	*14*
								Laboratorium Medik (ATLM)					
							11	Tenaga kesehatan : Penata Rontgen	10	10	100		
							12	Tenaga kesehatan masyarakat	35	35	100		
							13	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	35	35	100		
12.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan Tg ubuh Manusia (Human Immunodefici Ency Virus yang mendapatkan	21.265	21.265	100	TAHUN 2023	1	Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner)	22.000	22.000	100	TAHUN 2022	
							2	Tes cepat HIV (RDT) pertama	22.000	22.000	100		
							3	Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester,	22.000	22.000	100		

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian											Anggaran
		Penerima Layanan Dasar					Mutu Minimal Pelayanan Dasar						
		Indikator	Target			Batas Waktu Capaian	No	Indikator	Target			Batas Waktu Capaian	
			Jumlah Orang Yang harus Dilayanani (orang)	Jumlah Orang Yang Terlayani (orang)	(%)				Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang tersedia	(%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = (5: 4) x100*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12 = (11:10) x100*	*13*	*14*
		Layanan kesehatan						Lancet/Jarum Steril, Jarum Spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai					
							4	Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK	22.000	22.000	100		
							5	Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	4	4	100		
							6	Tenaga kesehatan : Perawat	39	39	100		

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian											Anggaran
		Penerima Layanan Dasar					Mutu Minimal Pelayanan Dasar						
		Indikator	Target			Batas Waktu Capaian	No	Indikator	Target			Batas Waktu Capaian	
			Jumlah Orang Yang harus Dilayanani (orang)	Jumlah Orang Yang Terlayani (orang)	(%)				Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang tersedia	(%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = (5: 4) x100*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12 = (11:10) x100*	*13*	*14*
							7	Tenaga kesehatan : Bidan	39	39	100		
							8	Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	39	39	100		
							9	Tenaga kesehatan masyarakat	35	35	100		
							10	Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu	71	71	100		

Sumber : Data Dinas Kesehatan Kab. Banjarnegara,2024

4.2.5 Realisasi (Capaian Hasil)

Realisasi adalah target yang dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya. Berikut ini tabel realisasi capaian SPM Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2022 :

Tabel IV.8.
Realisasi Capaian SPM Bidang Kesehatan
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian											Capaian SPM (%) / Katergori
		Penerima Layanan Dasar					Mutu Minimal Pelayanan Dasar						
		Indikator	Realisasi			IP_{SPM} (%)	No	Indikator	Realisasi			IP_{SPM} (%)	
			Jumlah Orang Yang Akan Dilayani	Jumlah Orang Yang terlayani	(%)				Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang tersedia	(%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = (5: 4) x100*	*7 = 6 X 80%*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12 = (11:10) x100*	*13 = 12X 20%*	*14*
1.	**Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil**	**Jumlah ibu hamil yang mendapatkan**	12.573	12.573	100	80,00	1	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	12.573	12.573	100,00	20,00	
							2	Tablet tambah darah	12.573	12.573	100,00	20,00	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian											Capaian SPM (%) / Katergori
		Penerima Layanan Dasar					Mutu Minimal Pelayanan Dasar						
		Indikator	Realisasi			IP_{SPM} (%)	No	Indikator	Realisasi			IP_{SPM} (%)	
			Jumlah Orang Yang Akan Dilayani	Jumlah Orang Yang terlayani	(%)				Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang tersedia	(%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = (5: 4) x100*	*7 = 6 X 80%*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12 = (11:10) x100*	*13 = 12X 20%*	*14*
		layanan kesehatan					3	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan.	12.573	12.573	100,00	20,00	
							4	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	12.573	12.573	100,00	20,00	
							5	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	12.573	12.573	100,00	20,00	
							6	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin	12.573	12.573	100,00	20,00	
							7	Kartu ibu/rekam medis ibu	12.573	12.573	100,00	20,00	
							8	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	12.573	12.573	100,00	20,00	
							9	Tenaga kesehatan : Dokter/dokter	6	6	100,00	20,00	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian											Capaian SPM (%) / Katergori
		Penerima Layanan Dasar					Mutu Minimal Pelayanan Dasar						
		Indikator	Realisasi			IP_{SPM} (%)	No	Indikator	Realisasi			IP_{SPM} (%)	
			Jumlah Orang Yang Akan Dilayani	Jumlah Orang Yang terlayani	(%)				Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang tersedia	(%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = (5: 4) x100*	*7 = 6 X 80%*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12 = (11:10) x100*	*13 = 12X 20%*	*14*
								spesialis kebidanan					
							10	Tenaga kesehatan : Bidan	1.000	1.000	100,00	20,00	
							11	Tenaga kesehatan : Perawat	10.639	1.053	100,00	20,00	
							12	Kunjungan 4 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K4) (Satu kali pada trimester pertama, Satu kali pada trimester kedua, Dua kali pada trimester ketiga)	12.573	11.369	90,42	18,08	
Rata-Rata						**80,00**	**Rata-Rata**					19,84	**99,84/ Tuntas Utama**
2.	**Pelayanan**	**Jumlah ibu**	11.995	11.995	100	20,00	1	Formulir Partograf	11.995	11.995	100,00	20,00	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian											Capaian SPM (%) / Katergori
		Penerima Layanan Dasar					Mutu Minimal Pelayanan Dasar						
		Indikator	Realisasi			IP_{SPM} (%)	No	Indikator	Realisasi			IP_{SPM} (%)	
			Jumlah Orang Yang Akan Dilayani	Jumlah Orang Yang terlayani	(%)				Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang tersedia	(%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = (5: 4) x100*	*7 = 6 X 80%*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12 = (11:10) x100*	*13 = 12X 20%*	*14*
	Kesehatan Ibu Bersalin	**bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan**					2	Kartu ibu (rekam medis)	11.995	11.995	100,00	20,00	
							3	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	11.995	11.995	100,00	20,00	
							4	Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis Kebidanan dan Kandungan	6	6	100,00	20,00	
							5	Tenaga Kesehatan : Bidan	1.000	1.000	100,00	20,00	
							6	Tenaga Kesehatan: Perawat	1.053	1.053	100,00	20,00	
Rata-Rata						**80,00**	**Rata-Rata**					20,00	**100,00/ Tuntas Paripurna**
3.	**Pelayanan Kesehatan**	**Jumlah bayi baru lahir yang**	11.940	11.940	100,00	80,00	1	Vaksin Hepatitis B0	11.940	11.940	100,00	20,00	
							2	Vitamin K1 injeksi	11.940	11.940	100,00	20,00	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian											Capaian SPM (%) / Katergori
		Penerima Layanan Dasar					Mutu Minimal Pelayanan Dasar						
		Indikator	Realisasi			IP_{SPM} (%)	No	Indikator	Realisasi			IP_{SPM} (%)	
			Jumlah Orang Yang Akan Dilayani	Jumlah Orang Yang terlayani	(%)				Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang tersedia	(%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = (5: 4) x100*	*7 = 6 X 80%*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12 = (11:10) x100*	*13 = 12X 20%*	*14*
	Bayi Baru Lahir	**mendapatkan layanan kesehatan**					3	Salep/tetes mata antibiotik	11.940	11.940	100,00	20,00	
							4	Formulir bayi baru lahir	11.940	11.940	100,00	20,00	
							5	Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	11.940	11.940	100,00	20,00	
							6	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	11.940	11.940	100,00	20,00	
							7	Dokter/dokter spesialis Anak	8	8	100,00	20,00	
							8	Tenaga kesehatan : Bidan	1.000	1.000	100,00	20,00	
							9	Tenaga kesehatan : Perawat	1.053	1.053	100,00	20,00	
Rata-Rata						**80,00**	**Rata-Rata**					20,00	**100,00/ Tuntas Paripurna**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian											Capaian SPM (%) / Katergori
		Penerima Layanan Dasar					Mutu Minimal Pelayanan Dasar						
		Indikator	Realisasi			IP_{SPM} (%)	No	Indikator	Realisasi			IP_{SPM} (%)	
			Jumlah Orang Yang Akan Dilayani	Jumlah Orang Yang terlayani	(%)				Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang tersedia	(%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = (5: 4) x100*	*7 = 6 X 80%*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12 = (11:10) x100*	*13 = 12X 20%*	*14*
4.	**Pelayanan kesehatan balita**	**Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan**	**60.645**	**60.559**	**99,86**	**79,89**	1	Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	60.645	60.559	99,86	19,97	
							2	Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	60.645	60.559	100,00	19,97	
							3	Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	60.645	60.559	100,00	19,97	
							4	Vitamin A Biru	60.645	60.559	100,00	19,97	
							5	Vitamin A Merah	60.645	60.559	100,00	19,97	
							6	Vaksin imunisasi lanjutan: DPT -HB	60.645	60.559	100,00	19,97	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian											Capaian SPM (%) / Katergori
		Penerima Layanan Dasar					Mutu Minimal Pelayanan Dasar						
		Indikator	Realisasi			IP_{SPM} (%)	No	Indikator	Realisasi			IP_{SPM} (%)	
			Jumlah Orang Yang Akan Dilayani	Jumlah Orang Yang terlayani	(%)				Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang tersedia	(%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = (5: 4) x100*	*7 = 6 X 80%*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12 = (11:10) x100*	*13 = 12X 20%*	*14*
								-Hib, Campak, Rubella					
							7	Vaksin imunisasi dasar: HBO, BCG, Polio, IPV, DPT - HB -Hib, Campak, Rubella	60.645	60.559	100,00	19,97	
							8	Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	60.645	60.559	100,00	19,97	
							9	Peralatan Anafilaktik	60.645	60.559	100,00	19,97	
							10	Tenaga kesehatan : Dokter	60.645	60.559	100,00	19,97	
							11	Tenaga kesehatan : Bidan	1.000	1.000	100,00	20,00	
							12	Tenaga kesehatan : Perawat	1.053	1.053	100,00	20.00	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian											Capaian SPM (%) / Katergori
		Penerima Layanan Dasar					Mutu Minimal Pelayanan Dasar						
		Indikator	Realisasi			IP_{SPM} (%)	No	Indikator	Realisasi			IP_{SPM} (%)	
			Jumlah Orang Yang Akan Dilayani	Jumlah Orang Yang terlayani	(%)				Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang tersedia	(%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = (5: 4) x100*	*7 = 6 X 80%*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12 = (11:10) x100*	*13 = 12X 20%*	*14*
							13	Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	35	35	100,00	20.00	
							14	Tenaga kesehatan : kader kesehatan	789	789	100,00	20,00	
							15	Tenaga Non Kesehatan : Guru PAUD	214	214	100,00	20,00	
					Rata-Rata	**79,89**					**Rata-Rata**	19,98	**99,86/ Tuntas Utama**
5.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	**134.465**	131.427	97,74	**78,19**	1	Buku raport kesehatanku	131.427	97,74	19,55	131.427	
							2	Buku pemantauan kesehatan	8.464	6,29	1,26	8.464	
							3	Kuesioner skrining kesehatan	131.427	97,74	19,55	131.427	
							4	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia	91.444	68,01	13,60	91.444	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian											Capaian SPM (%) / Katergori
		Penerima Layanan Dasar					Mutu Minimal Pelayanan Dasar						
		Indikator	Realisasi			IP_{SPM} (%)	No	Indikator	Realisasi			IP_{SPM} (%)	
			Jumlah Orang Yang Akan Dilayani	Jumlah Orang Yang terlayani	(%)				Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang tersedia	(%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = (5: 4) x100*	*7 = 6 X 80%*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12 = (11:10) x100*	*13 = 12X 20%*	*14*
								sekolah dan remaja di dalam sekolah					
							5	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	131.427	97,74	19,55	131.427	
							6	Tenaga kesehatan : Dokter/Dokter gigi	68	100,00	20,00	68	
							7	Tenaga kesehatan : Bidan	1.000	100,00	20,00	1.000	
							8	Tenaga kesehatan : Perawat	1.053	100,00	20,00	1.053	
							9	Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	35	100,00	20,00	35	
							10	Tenaga Kesehatan : Masyarakat	48	100,00	20,00	48	
							11	Tenaga kesehatan :	8.143	60,56	12,11	8.143	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian											Capaian SPM (%) / Katergori
		Penerima Layanan Dasar					Mutu Minimal Pelayanan Dasar						
		Indikator	Realisasi			IP_{SPM} (%)	No	Indikator	Realisasi			IP_{SPM} (%)	
			Jumlah Orang Yang Akan Dilayani	Jumlah Orang Yang terlayani	(%)				Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang tersedia	(%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = (5: 4) x100*	*7 = 6 X 80%*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12 = (11:10) x100*	*13 = 12X 20%*	*14*
								Kader Kesehatan					
							12	Tenaga Non kesehatan : Guru	1.031	100,00	20,00	1.031	
					Rata-Rata	**78,19**					**Rata-Rata**	**17,75**	**97,74 / Tuntas Utama**
6.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	467.440	**420.745**	**90,01**	**72,01**	1	Strip uji pemeriksaan gula darah, kolesterol	398	313	78,64	15,73	
							2	Alat ukur berat badan	398	313	78,64	15,73	
							3	Alat : Alat ukur tinggi badan	398	313	78,64	15,73	
							4	Alat : Alat ukur lingkar perut	398	313	78,64	15,73	
							5	Alat : Tensimeter	398	313	78,64	15,73	
							6	Alat : Glukometer	40	40	100,00	20,00	
							7	Alat : Tes strip gula darah	467.440	420.745	90,01	18,00	
							8	Alat : Lancet	467.440	420.745	90,01	18,00	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian											Capaian SPM (%) / Katergori
		Penerima Layanan Dasar					Mutu Minimal Pelayanan Dasar						
		Indikator	Realisasi			IP_{SPM} (%)	No	Indikator	Realisasi			IP_{SPM} (%)	
			Jumlah Orang Yang Akan Dilayani	Jumlah Orang Yang terlayani	(%)				Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang tersedia	(%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = (5: 4) x100*	*7 = 6 X 80%*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12 = (11:10) x100*	*13 = 12X 20%*	*14*
							9	Alat : Kapas alcohol	467.440	420.745	90,01	18,00	
							10	Alat : KIT IVA Tes	35	35	100,00	20,00	
							11	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	278	278	100,00	20,00	
							12	Tenaga kesehatan : Dokter	35	35	100,00	20,00	
							13	BidanTenaga kesehatan : Bidan	35	35	100,00	20,00	
							14	Tenaga kesehatan : Perawat	35	35	100,00	20,00	
							15	Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	35	35	100,00	20,00	
							16	Tenaga Kesehatan Masyarakat	35	35	100,00	20,00	
							17	Tenaga non kesehatan	1.890	1.560	82,54	16,51	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian											Capaian SPM (%) / Katergori
		Penerima Layanan Dasar					Mutu Minimal Pelayanan Dasar						
		Indikator	Realisasi			IP_{SPM} (%)	No	Indikator	Realisasi			IP_{SPM} (%)	
			Jumlah Orang Yang Akan Dilayani	Jumlah Orang Yang terlayani	(%)				Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang tersedia	(%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = (5: 4) x100*	*7 = 6 X 80%*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12 = (11:10) x100*	*13 = 12X 20%*	*14*
								Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu					
					Rata-Rata	**72,01**					**Rata-Rata**	18,19	**90,19/ Tuntas Utama**
7.	**Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut**	**Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan**	137.217	**131.459**	**95,80**	**76,64**	1	Strip uji pemeriksaan gula darah, kolesterol	137.217	100.000	72,88	14,58	
							2	Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Intrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian	137.217	100.000	72,88	14,58	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian										Capaian SPM (%) / Katergori
		Penerima Layanan Dasar					Mutu Minimal Pelayanan Dasar					
		Indikator	Realisasi			IP_{SPM} (%)	No	Indikator	Realisasi			IP_{SPM} (%)	
			Jumlah Orang Yang Akan Dilayani	Jumlah Orang Yang terlayani	(%)				Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang tersedia	(%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = (5: 4) x100*	*7 = 6 X 80%*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12 = (11:10) x100*	*13 = 12X 20%*	*14*
								Paripurna Pasien Geriatri (P3G)					
							3	Buku kesehatan lansia	137.217	70.000	51,01	10,20	
							4	Dokter	70	35	50,00	10,00	
							5	Bidan	278	266	95,68	19,14	
							6	Perawat	278	100	35,97	7,19	
							7	Ahli Gizi	70	35	50,00	10,00	
							8	TenagaKesehatan Masyarakat	70	35	50,00	10,00	
							9	Tenaga Non Kesehatan Terlatih	556	278	50,00	10,00	
					Rata-Rata	**76,64**					**Rata-Rata**	**11,74**	**88,39/ Tuntas Madya**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian										Capaian SPM (%) / Katergori
		Penerima Layanan Dasar					Mutu Minimal Pelayanan Dasar					
		Indikator	Realisasi			IP_{SPM} (%)	No	Indikator	Realisasi			IP_{SPM} (%)	
			Jumlah Orang Yang Akan Dilayani	Jumlah Orang Yang terlayani	(%)				Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang tersedia	(%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = (5: 4) x100*	*7 = 6 X 80%*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12 = (11:10) x100*	*13 = 12X 20%*	*14*
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	**247.475**	**247.475**	100	80,00	1	Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	398	313	78,64	15,73	
							2	Tensimeter	398	313	78,64	15,73	
							3	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	278	278	100,00	20,00	
							4	Tenaga Kesehatan: Dokter	35	35	100,00	20,00	
							5	Tenaga Kesehatan: Bidan	35	35	100,00	20,00	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian											Capaian SPM (%) / Katergori
		Penerima Layanan Dasar					Mutu Minimal Pelayanan Dasar						
		Indikator	Realisasi			IP_{SPM} (%)	No	Indikator	Realisasi			IP_{SPM} (%)	
			Jumlah Orang Yang Akan Dilayani	Jumlah Orang Yang terlayani	(%)				Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang tersedia	(%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = (5: 4) x100*	*7 = 6 X 80%*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12 = (11:10) x100*	*13 = 12X 20%*	*14*
							6	Tenaga Kesehatan: Perawat	35	35	100,00	20,00	
							7	Tenaga Kesehatan Masyarakat	35	35	100,00	20,00	
							8	Obat Hipertensi	247.475	247.475	100,00	20,00	
						Rata-Rata	**80,00**					**Rata-Rata**	18,93	**100,00/ Tuntas Utama**
9.	**Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)**	**Jumlah warga negara penderita diabetes melitus yang mendapatkan layanan kesehatan**	15.765	15.765	100	20,00	1	Alat : Glukometer	40	40	100,00	20,00	
							2	Alat : Strip Tes Gula Darah	15.765	15.765	100,00	20,00	
							3	Alat : Kapas Alkohol	15.765	15.765	100,00	20,00	
							4	Alat : Lancet	15.765	15.765	100,00	20,00	
							5	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	278	278	100,00	20,00	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian										Capaian SPM (%) / Katergori
		Penerima Layanan Dasar					Mutu Minimal Pelayanan Dasar					
		Indikator	Realisasi			IP_{SPM} (%)	No	Indikator	Realisasi			IP_{SPM} (%)	
			Jumlah Orang Yang Akan Dilayani	Jumlah Orang Yang terlayani	(%)				Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang tersedia	(%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = (5: 4) x100*	*7 = 6 X 80%*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12 = (11:10) x100*	*13 = 12X 20%*	*14*
							6	Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	398	398	100,00	20,00	
							7	Tenaga kesehatan : Dokter	35	35	100,00	20,00	
							8	Tenaga kesehatan : Bidan	35	35	100,00	20,00	
							9	Tenaga kesehatan : Perawat	35	35	100,00	20,00	
							10	Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	35	35	100,00	20,00	
							11	Tenaga Kesehatan Masyarakat	35	35	100,00	20,00	
							12	Obat Diabetes Melitus	15.765	15.765	100,00	20,00	
					Rata-Rata	**80,00**					**Rata-Rata**	20,00	**100,00/ Tuntas Paripurna**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian											Capaian SPM (%) / Katergori
		Penerima Layanan Dasar					Mutu Minimal Pelayanan Dasar						
		Indikator	Realisasi			IP_{SPM} (%)	No	Indikator	Realisasi			IP_{SPM} (%)	
			Jumlah Orang Yang Akan Dilayani	Jumlah Orang Yang terlayani	(%)				Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang tersedia	(%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = (5: 4) x100*	*7 = 6 X 80%*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12 = (11:10) x100*	*13 = 12X 20%*	*14*
10.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	2.697	2.697	100	80,00	1	Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	35	35	100,00	20,00	
							2	Kit berisi 2 Alat Fiksasi)	70	70	100,00	20,00	
							3	Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan	2.697	2.697	100,00	20,00	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian											Capaian SPM (%) / Katergori
		Penerima Layanan Dasar					Mutu Minimal Pelayanan Dasar						
		Indikator	Realisasi			IP_{SPM} (%)	No	Indikator	Realisasi			IP_{SPM} (%)	
			Jumlah Orang Yang Akan Dilayani	Jumlah Orang Yang terlayani	(%)				Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang tersedia	(%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = (5: 4) x100*	*7 = 6 X 80%*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12 = (11:10) x100*	*13 = 12X 20%*	*14*
							4	Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	35	35	100,00	20,00	
							5	Tenaga kesehatan : Dokter	35	35	100,00	20,00	
							6	Tenaga kesehatan : Perawat Terlatih Jiwa	35	19	54,29	10,86	
							7	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Lainnya	1.390	834	60,00	12,00	
					Rata-Rata	**80,00**					**Rata-Rata**	17,55	**97,55/ Tuntas Utama**
11.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan	Jumlah warga negara terduga tuberkulosis yang	10.639	10.639	100	80,00	1	Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	35	35	100,00	20,00	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian										Capaian SPM (%) / Katergori
		Penerima Layanan Dasar					Mutu Minimal Pelayanan Dasar					
		Indikator	Realisasi			IP_{SPM} (%)	No	Indikator	Realisasi			IP_{SPM} (%)	
			Jumlah Orang Yang Akan Dilayani	Jumlah Orang Yang terlayani	(%)				Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang tersedia	(%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = (5: 4) x100*	*7 = 6 X 80%*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12 = (11:10) x100*	*13 = 12X 20%*	*14*
	terduga Tuberkulosis (TB)	mendapatkan layanan kesehatan					2	Reagen Zn TB	35	35	100,00	20,00	
							3	Masker jenis rumah tangga dan Masker N95	3.500	3.500	100,00	20,00	
							4	Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	11.000	11.000	100,00	20,00	
							5	Catridge tes cepat molekuler	11.000	11.000	100,00	20,00	
							6	Formulir pencatatan dan pelaporan	11.000	11.000	100,00	20,00	
							7	Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	12	12	100,00	20,00	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian										Capaian SPM (%) / Katergori
		Penerima Layanan Dasar					Mutu Minimal Pelayanan Dasar					
		Indikator	Realisasi			IP_{SPM} (%)	No	Indikator	Realisasi			IP_{SPM} (%)	
			Jumlah Orang Yang Akan Dilayani	Jumlah Orang Yang terlayani	(%)				Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang tersedia	(%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = (5: 4) x100*	*7 = 6 X 80%*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12 = (11:10) x100*	*13 = 12X 20%*	*14*
							8	Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru	4	4	100,00	20,00	
							9	Tenaga kesehatan : Perawat	35	35	100,00	20,00	
							10	Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	35	35	100,00	20,00	
							11	Tenaga kesehatan : Penata Rontgen	10	10	100,00	20,00	
							12	Tenaga kesehatan masyarakat	35	35	100,00	20,00	
							13	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	35	35	100,00	20,00	
					Rata-Rata	**80,00**					**Rata-Rata**	20,00	**100,00/ Tuntas Paripurna**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian										Capaian SPM (%) / Katergori
		Penerima Layanan Dasar					Mutu Minimal Pelayanan Dasar					
		Indikator	Realisasi			IP_{SPM} (%)	No	Indikator	Realisasi			IP_{SPM} (%)	
			Jumlah Orang Yang Akan Dilayani	Jumlah Orang Yang terlayani	(%)				Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang tersedia	(%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = (5: 4) x100*	*7 = 6 X 80%*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12 = (11:10) x100*	*13 = 12X 20%*	*14*
12.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan Tg ubuh Manusia (Human Immunodefici Ency Virus yang mendapatkan Layanan kesehatan	21.265	21.265	100,00	80,00	1	Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner)	22.000	22.000	100	20,00	
							2	Tes cepat HIV (RDT) pertama	22.000	22.000	100	20,00	
							3	Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	22.000	22.000	100	20,00	
							4	Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan	22.000	22.000	100	20,00	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian											Capaian SPM (%) / Katergori
		Penerima Layanan Dasar					Mutu Minimal Pelayanan Dasar						
		Indikator	Realisasi			IP_{SPM} (%)	No	Indikator	Realisasi			IP_{SPM} (%)	
			Jumlah Orang Yang Akan Dilayani	Jumlah Orang Yang terlayani	(%)				Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang tersedia	(%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = (5: 4) x100*	*7 = 6 X 80%*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12 = (11:10) x100*	*13 = 12X 20%*	*14*
								pelaksana, Nomor KTP/NIK					
							5	Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	4	4	100	20,00	
							6	Tenaga kesehatan : Perawat	39	39	100	20,00	
							7	Tenaga kesehatan : Bidan	39	39	100	20,00	
							8	Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	39	39	100	20,00	
							9	Tenaga kesehatan masyarakat	35	35	100	20,00	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian											Capaian SPM (%) / Katergori
		Penerima Layanan Dasar					Mutu Minimal Pelayanan Dasar						
		Indikator	Realisasi			IP_{SPM} (%)	No	Indikator	Realisasi			IP_{SPM} (%)	
			Jumlah Orang Yang Akan Dilayani	Jumlah Orang Yang terlayani	(%)				Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang tersedia	(%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = (5: 4) x100*	*7 = 6 X 80%*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12 = (11:10) x100*	*13 = 12X 20%*	*14*
							10	Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu	71	71	100	20,00	
Rata-Rata						**80,00**	**Rata-Rata**					20,00	**100,00/ Tuntas Paripurna**
BIDANG URUSAN KESEHATAN													**97,56/ Tuntas Utama**

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara, 2024

4.2.3 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang mendukung pencapaian dan penerapan SPM Bidang Urusan Kesehatan Kabupaten Banjarnegara bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2022, dengan rincian alokasi anggaran per jenis pelayanan dasar sebagai berikut:

Tabel IV.9.
Alokasi Anggaran Untuk Pemenuhan SPM Bidang Urusan Kesehatan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	ANGGARAN				JUMLAH
		APBD	APBN	DAK	Sumber Dana Lain yang Sah	
1	*2*	*3*	*4*	*6*	*7*	*8*
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu hamil	354.649.300	0	0	0	354.649.300
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	148.215.900	0	0	0	148.215.900
3.	Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir	43.943.800	0	0	0	43.943.800
4.	Pelayanan kesehatan balita	36.995.000	0	0	0	36.995.000
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	288.470.000	0	0	0	288.470.000
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	154.699.800	0	0	0	154.699.800
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	80.300.000	0	0	0	80.300.000
8.	Pelayanankesehatan penderita hipertensi	73.312.000	0	0	0	73.312.000
9.	Pelayanankesehatan penderita diabetes melitus	1.014.979.000	0	0	0	1.014.979.000
10.	Pelayanan kesehatan orangdengan gangguan jiwa berat	129.000.000	0	0	0	129.000.000
11.	Pelayanan kesehatan orangterduga tuberkulosis	2.323.633.500	0	0	0	2.323.633.500
12.	Pelayanan kesehatan orangdengan risiko terinfeksi virusyang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*)	486.575.000	0	0	0	486.575.000
Jumlah		**5.134.773.300**	**0**	**0**	**0**	**5.134.773.300**

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara, 2024

4.2.4 Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai (SDM) yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.

Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlibat di dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Kesehatan Kabupaten Banjarnegara tahun 2022, sebagaimana di uraikan dalam tabel berikut :

Tabel IV.10.
Dukungan Personil Penerapan SPM Bidang Urusan Kesehatan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah Personil
1	*2*	*3*
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	
	- S2/Sp.OG	4
	- S1/Sp.OG	4
	- S2	5
	- S1/D4	45
	- D3	1.075
	- SLTA	0
	Jumlah	**1.133**
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	
	- S2/Sp.OG	4
	- S1/Sp.OG	4
	- S2	5
	- S1/D4	45
	- D3	1.075
	- SLTA	0
	Jumlah	**1.133**
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	
	- S2	2
	- S1/Sp. A	8
	- S1/D4	45
	- D3	1.075
	- SLTA	0
	Jumlah	1.130
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	
	- S2	2
	- S1/Sp. A	8
	- S1/D4	45
	- D3	1.075
	Jumlah	1.130
5.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	
	- S2	2
	- S1	195
	- D3	357
	- SLTA	0
	Jumlah	554
6.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	
	- S2	2

	- S1	195
	- D3	357
	- SLTA	0
	Jumlah	554
7.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	
	- S2	2
	- S1	195
	- D3	357
	- SLTA	0
	Jumlah	554
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	
	- S2	2
	- S1	195
	- D3	357
	- SLTA	0
	Jumlah	554
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	
	- S2	2
	- S1	195
	- D3	357
	- SLTA	0
	Jumlah	554
10.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	
	- S2	2
	- S1	195
	- D3	357
	- SLTA	0
	Jumlah	554
11.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	
	- S2	2
	- S1	195
	- D3	357
	- SLTA	0
	Jumlah	554
12.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	
	- S2	2
	- S1	195
	- D3	357
	- SLTA	0
	Jumlah	554

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara, 2024

4.2.5 Permasalahan dan Solusi

Penerapan dan pencapaian SPM bidang Urusan Kesehatan di Kabupaten Banjarnegara tidak terlepas dari permasalahan yang terjadi, baik permasalahan eksternal maupun internal. Permasalahan yang ada dan solusi yang dilakukan dalam pencapaian SPM diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel IV.11.
Permasalahan dan Solusi SPM Bidang Urusan Kesehatan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023

No	Sumber	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4
1.	Internal	Data Primer dari Puskesmas tidak semua tepat waktu sesuai deadline yang sudah di tentukan	Format laporan SPM dibuat terpisah, dibuat manual yang ditandatangani pimpinan dan per bulan dan jika ada revisi di bulan Berikutnya
		Laptop yang sudah tidak mendukung	Ada aplikasi khusus untuk pengumpulan data primer pelayanan SPM di Puskesmas dan Dinkes yang bisa diisi realtime
		Tenaga administrasi di SPM di kesmas hanya 2 orang	Penambahan sumber daya manusia dan pengadaan sarana prasarana pendukung SPM
		Tenaga pemegang program Puskesmas tidak semua menguasai IT	Ada mapping lokasi domisili dan lokasi bekerja bagi usia produktif,sehingga mudah dalam mapping perencanaan kegiatan capaian SPM Ada database dari setiap puskesmas tentang jumlah penderita hipertensi yang dilayani di wilayahnya. Data didapat dari layanan induk, jejaringdan jaringan, serta penderita yang mendapatkan pelayanan di FKRTL (Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut), sehingga tidak menggunakan data riskesdas 2018
		Pengadaan Sarpras belum memenuhi standar kebutuhan	Memberdayakan kader Kesehatan terlatih kemudian Kader tersebut diberikan perhatian dan reward dari lintas sektoral dan sektor kesehatan sebagai bantuk dukungan dalam rangka meningkatkan

			pembangunan keehatan secara terpadu.
		Anggaran untuk SPM di Dinkes dari APBD masih terbatas	Pengadaan sarana dan Prasarana pendukung SPM
			Usulan Anggaran DAK Non fisik dinkes atau puskesmas
			Rencana kegiatan dibuat secara terintegrasi agar pelaksanaan dapat dilakukan secara efektif dan efisien
			Kebutuhan anggaran dapat dipenuhi secara bersama dengan lintas sektor karena memiliki kegiatan dengan tujuan yang sama
		SDM pelaksana SPM belum semua ada (Bidan Desa), masih merangkap untuk beberapa program atau kegiatan. Pelatihan bagi Tenaga Kesehatan untuk pemenuhan SPM	Pelaksanaan Kegiatan secara terintegrasi antar program sesuai sasaran usia (tidak berdiri sendiri) Sosialisasi/refreshing SPM kepada Kepala Puskesmas dan Pemegang Program dan Pelaksana Usulan Pelatihan USG untuk Dokter, Bidan ANC terintegrasi dan APN , Petugas Gizi PMBA, Tatalaksana MTBS dan Gizi Buruk, Pelatihan Bagi Petugas UKS, Pelatihan Perawatan Jangka Panjang bagi lansia, Pelatihan SDIDTK Usulan formasi Bidan Desa untuk desa yang belum ada bidan desa
2.	Eksternal	Pemetaan nomenklatur pada juknis DAK Non Fisik Kemenkes khusus sub kegiatan mendukung SPM belum sesuai dengan ketetapan pada Mendagri sebagai contoh kegiatan terkait ibu hamil dan ibu bersalin justru pada pemetaan DAK non fisik di sub kegiatan kesehatan ibu dan anak seharusnya di pisah antara ibu hamil dan ibu bersalinibu hamil dan ibu bersalin Jika dijadikan satu dii sub kegiatan kesehatan ibu dan hamil kesulitan membreakdown	Advokasi antara kemenkes RI dan Kemendagri terkait pemetaan sub kegiatan SPM Bidang Kesehatan agar tidak menyulitkan penerapan SPM di Kab/Kota

Sumber : Data Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara, 2024

4.3 BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM

4.3.1. Jenis Pelayanan Dasar

Sesuai dengan Peraturan Menteri Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Dasar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banjarnegara terdiri atas :

1. Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

4.3.2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, pada lampiran huruf A nomor 3 (tiga) mengenai target dan indikator kinerja pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum, maka ditetapkan target pencapaian SPM oleh daerah adalah 100% setiap tahunnya untuk setiap jenis pelayanan dasar dan indikator pencapaiannya.

Berikut tabel target dan indikator kinerja pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023.

Tabel IV.12.
Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian											Anggaran
		Penerima Layanan Dasar					Mutu Minimal Pelayanan Dasar						
		Indikator	Target			Batas Waktu Capaian	No	Indikator	Target			Batas Waktu Capaian	
			Jumlah Orang Yang harus Dilayanani (orang)	Jumlah Orang Yang Terlayani (orang)	(%)				Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang tersedia	(%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = (5: 4) x100*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12 = (11:10) x100*	*13*	*14*
1.	**Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari**	**Jumlah Warga Negara yang memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari**	16.204	16.204	100	TAHUN 2023	1.	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	4.051	4.051	100	TAHUN 2023	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian											Anggaran
		Penerima Layanan Dasar					Mutu Minimal Pelayanan Dasar						
		Indikator	Target			Batas Waktu Capaian	No	Indikator	Target			Batas Waktu Capaian	
			Jumlah Orang Yang harus Dilayanani (orang)	Jumlah Orang Yang Terlayani (orang)	(%)				Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang tersedia	(%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = (5: 4) x100*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12 = (11:10) x100*	*13*	*14*
							2.	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau)	4.051	4.051	100		
							3.	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap	1	1	100		

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian											Anggaran
		Penerima Layanan Dasar					Mutu Minimal Pelayanan Dasar						
		Indikator	Target			Batas Waktu Capaian	No	Indikator	Target			Batas Waktu Capaian	
			Jumlah Orang Yang harus Dilayanani (orang)	Jumlah Orang Yang Terlayani (orang)	(%)				Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang tersedia	(%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = (5: 4) x100*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12 = (11:10) x100*	*13*	*14*
								Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)					
							4.	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau)	1	1	100	-	
22.	**Penyediaan Pelayanan**	**Jumlah Warga Negara yang**	858	858	100	TAHUN 2023	1.	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	332	332	100	TAHUN 2023	7.486.667.000

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian											Anggaran
		Penerima Layanan Dasar					Mutu Minimal Pelayanan Dasar						
		Indikator	Target			Batas Waktu Capaian	No	Indikator	Target			Batas Waktu Capaian	
			Jumlah Orang Yang harus Dilayanani (orang)	Jumlah Orang Yang Terlayani (orang)	(%)				Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang tersedia	(%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = (5: 4) x100*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12 = (11:10) x100*	*13*	*14*
	Pengolahan Air Limbah Domestik	**memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik**						Setempat/SPALD-S terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)					
							2.	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses dasar bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk <25 jiwa /hektar)	1	1	100		

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian											Anggaran
		Penerima Layanan Dasar					Mutu Minimal Pelayanan Dasar						
		Indikator	Target			Batas Waktu Capaian	No	Indikator	Target			Batas Waktu Capaian	
			Jumlah Orang Yang harus Dilayanani (orang)	Jumlah Orang Yang Terlayani (orang)	(%)				Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang tersedia	(%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = (5: 4) x100*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12 = (11:10) x100*	*13*	*14*
							3.	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah perdesaan yang memiliki kepadatan penduduk >25 jiwa / hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	1	1	100		
							4.	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T	526	526	100		

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian											Anggaran
		Penerima Layanan Dasar					Mutu Minimal Pelayanan Dasar						
		Indikator	Target			Batas Waktu Capaian	No	Indikator	Target			Batas Waktu Capaian	
			Jumlah Orang Yang harus Dilayanani (orang)	Jumlah Orang Yang Terlayani (orang)	(%)				Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang tersedia	(%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = (5: 4) x100*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12 = (11:10) x100*	*13*	*14*
								terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)					
							5.	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk >25 jiwa / hektar dan seluruh wilayah perkotaan	1	1	100		

Sumber : Data Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara, 2023

4.3.5 Realisasi (Capaian Hasil)

Realisasi adalah target yang dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya. Berikut ini tabel realisasi capaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2023 :

Tabel IV.13.
Realisasi Penapaian Target SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian											Capaian SPM (%) / Katergori
		Penerima Layanan Dasar					Mutu Minimal Pelayanan Dasar						
		Indikator	Realisasi			IP_{SPM} (%)	No	Indikator	Realisasi			IP_{SPM} (%)	
			Jumlah Orang Yang Akan Dilayani	Jumlah Orang Yang terlayani	(%)				Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang tersedia	(%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = (5: 4) x100*	*7 = 6 X 80%*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12 = (11:10) x100*	*13 = 12X 20%*	*14*
1.	**Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari**	**Jumlah Warga Negara yang memperoleh Kebutuhan Pokok Air**	16.204	16.204	100	80,00	1.	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM	4.051	4.051	100	20,00	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian											Capaian SPM (%) / Katergori
		Penerima Layanan Dasar					Mutu Minimal Pelayanan Dasar						
		Indikator	Realisasi			IP_{SPM} (%)	No	Indikator	Realisasi			IP_{SPM} (%)	
			Jumlah Orang Yang Akan Dilayani	Jumlah Orang Yang terlayani	(%)				Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang tersedia	(%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = (5: 4) x100*	*7 = 6 X 80%*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12 = (11:10) x100*	*13 = 12X 20%*	*14*
		Minum Sehari-hari						Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)					
							2.	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau)	4.051	4.051	100	20	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian											Capaian SPM (%) / Katergori
		Penerima Layanan Dasar					Mutu Minimal Pelayanan Dasar						
		Indikator	Realisasi			IP_{SPM} (%)	No	Indikator	Realisasi			IP_{SPM} (%)	
			Jumlah Orang Yang Akan Dilayani	Jumlah Orang Yang terlayani	(%)				Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang tersedia	(%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = (5: 4) x100*	*7 = 6 X 80%*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12 = (11:10) x100*	*13 = 12X 20%*	*14*
							3.	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	1	Tidak dilaksankan	-	-	
							4.	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak	1	Tidak dilaksankan	-	-	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian											Capaian SPM (%) / Katergori
		Penerima Layanan Dasar					Mutu Minimal Pelayanan Dasar						
		Indikator	Realisasi			IP_{SPM} (%)	No	Indikator	Realisasi			IP_{SPM} (%)	
			Jumlah Orang Yang Akan Dilayani	Jumlah Orang Yang terlayani	(%)				Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang tersedia	(%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = (5: 4) x100*	*7 = 6 X 80%*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12 = (11:10) x100*	*13 = 12X 20%*	*14*
								berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau)					
					Rata-rata	**80,00**					**Rata-rata**	20,00	**100,00/ Tuntas Paripurna**
2.	**Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik**	**Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik**	858	858	100	80,00	1.	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	332	332	100	20,00	7.486.667.000
							2.	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kualitas	1	Tidak Dilaksana kan	-	-	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian											Capaian SPM (%) / Katergori
		Penerima Layanan Dasar					Mutu Minimal Pelayanan Dasar						
		Indikator	Realisasi			IP_{SPM} (%)	No	Indikator	Realisasi			IP_{SPM} (%)	
			Jumlah Orang Yang Akan Dilayani	Jumlah Orang Yang terlayani	(%)				Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang tersedia	(%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = (5: 4) x100*	*7 = 6 X 80%*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12 = (11:10) x100*	*13 = 12X 20%*	*14*
								pelayanan air limbah domestik (akses dasar bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk <25 jiwa /hektar)					
							3.	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah	1	Tidak Dilaksana kan	-	-	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian											Capaian SPM (%) / Katergori
		Penerima Layanan Dasar					Mutu Minimal Pelayanan Dasar						
		Indikator	Realisasi			IP_{SPM} (%)	No	Indikator	Realisasi			IP_{SPM} (%)	
			Jumlah Orang Yang Akan Dilayani	Jumlah Orang Yang terlayani	(%)				Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang tersedia	(%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = (5: 4) x100*	*7 = 6 X 80%*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12 = (11:10) x100*	*13 = 12X 20%*	*14*
								perdesaan yang memiliki kepadatan penduduk >25 jiwa / hektar dan seluruh wilayah perkotaan)					
							4.	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	526	526	100	20,00	
							5.	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kualitas pelayanan air limbah	1	1	100	20,00	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian											Capaian SPM (%) / Katergori
		Penerima Layanan Dasar					Mutu Minimal Pelayanan Dasar						
		Indikator	Realisasi			IP_{SPM} (%)	No	Indikator	Realisasi			IP_{SPM} (%)	
			Jumlah Orang Yang Akan Dilayani	Jumlah Orang Yang terlayani	(%)				Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang tersedia	(%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = (5: 4) x100*	*7 = 6 X 80%*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12 = (11:10) x100*	*13 = 12X 20%*	*14*
								domestik (akses aman bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk >25 jiwa / hektar dan seluruh wilayah perkotaan					
Rata-rata						**80,00**	**Rata-rata**					20,00	**100,00/ Tuntas Paripurna**
BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM													**100,00 (Tuntas Paripurna)**

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara, 2024

4.3.4. Alokasi Anggaran

Sumber anggaran untuk penerapan dan pencapaian indikator SPM bidang urusan Pekerjaan Umum berasal dari alokasi belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan ke dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023, dengan rincian alokasi anggaran per jenis pelayanan dasar sebagai berikut:

Tabel IV.14.
Alokasi Anggaran Untuk Pemenuhan SPM
Bidang Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	ANGGARAN				JUMLAH
		APBD	DAU	DAK	Sumber Dana Lain yang Sah	
1	*2*	*3*	*4*	*6*	*7*	*8*
1.	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;	16.856.335.000	0	0	0	16.856.335.000
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.	7.486.667.000	0	0	0	7.486.667.000
Jumlah		24.343.002.000	0	0	0	24.343.002.000

Sumber : Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara, 2024

Untuk pencapaian indikator SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum di Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2023 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 24,343,002,000,-.

4.3.5. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai (SDM) yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM. Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlibat di dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Banjarnegara tahun 2023, sebagaimana di uraikan dalam tabel berikut :

Tabel IV.15.
Dukungan Personil Penerapan SPM
Bidang Urusan Pekerjaan Umum
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah Personil
1	2	3
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	
	- S1	5
	- D3	1
	- SMA	1
	Jumlah	7
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	
	- S1	3
	- D3	-
	- SMA	4
	Jumlah	4
	Jumlah Total	11

Sumber : Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara, 2023

Jumlah personil yang terlibat dalam penerapan dan pencapaian SPM bidangPekerjaan Umum sebanyak 11 orang.

4.3.6. Permasalahan dan Solusi

Penerapan dan pencapaian SPM bidang Urusan Pekerjaan Umum di Kabupaten Banjarnegara tidak terlepas dari permasalahan yang terjadi, baik permasalahan eksternal maupun internal. Permasalahan yang ada dan solusi yang dilakukan dalam pencapaian SPM diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel IV.16.
Permasalahan dan Solusi SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023

No	Sumber	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4
1.	Internal	Terkait mutu barang jasa yang dibutuhkan untuk Pengolahan Lumpur Tinja, Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik, karena Kabupaten Banjarnegara belum memiliki IPLT sehingga untuk data pengangkutan dan Pengolahan Lumpur tinja	Mengusulkan kembali pembangunan IPLT

		IPLT belum tersedia	
2.	eksternal	Kurangnya petunjuk teknis tentang kebutuhan barang/jasa terkait kebutuhan kuantitas akses pengolahan air limbah domestik	Mengusulkan untuk cara penghitungan kebutuhanbarang/Jasa terkait kuantitas dan kualitas akses Pengolahan air limbah Domestik.

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara, 2024

Standar Pelayanan Minimal (SPM) jenis layanan Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik, salah satu indikator pencapaiannya adalah Sub- sistem pengolahan lumpur tinja (IPLT). Pada saat ini Kabupaten Banjarnegara belum memiliki Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). Dalam pelayanan sanitasi, keberadaan IPLT sebenarnya adalah wajib untuk mewujudkan sanitasi yang layak dan aman. Sesuai dengan standar teknis sanitasi layak dan aman adalah bahwa sarana sanitasi harus dilengkapi dengan septic tank yang kedap, dan harus dilakukan penyedotan secara terjadwal yang kemudian dibuang ke IPLT untuk diolah. Sehingga IPLT menjadi kebutuhan yang sangat mendesak bagi Kabupaten Banjarnegara.

Upaya untuk mewujudkan IPLT di Kabupaten Banjarnegara sudah cukup lama namun banyak kendala yang menyebabkan belum terealisasi sampai saat ini. *Readiness Criteria* sudah disusun baik berupa masterplan air limbah maupun FS untuk lokasi IPLT. Bahkan tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Banjarnegara sudah mengalokasikan anggaran untuk pengadaan tanah IPLT. Namun dinamika proses perencanaan yang panjang kemudian menyebabkan pengadaan tanah IPLT tersebut belum berhasil dilaksanakan. Diharapkan para pemangku kepentingan dari semua Perangkat Daerah terkait mengerti kendala-kendala yang dihadapi dan selanjutnya dapat ikut mengawal agar pembangunan air minum dan sanitasi Kabupaten Banjarnegara akan terwujud sesuai kondisi ideal yang diharapkan.

4. 4 BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN

4.4.1. Jenis Pelayanan Dasar

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pasal 9 ayat (2), Jenis Pelayanan dasar bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman terdiri atas :

1. Penyediaan dan Rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

4.4.2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, pada lampiran huruf A nomor 4 (empat) mengenai target dan indikator kinerja pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman, maka ditetapkan target pencapaian SPM oleh daerah adalah 100% setiap tahunnya untuk setiap jenis pelayanan dasar dan indikator pencapaiannya.

Berikut tabel rencana target capaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023.

Tabel IV.17.
Target dan Indikator Pencapaian Layanan Dasar SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian											Anggaran
		Penerima Layanan Dasar					Mutu Minimal Pelayanan Dasar						
		Indikator	Target			Batas Waktu Capaian	No	Indikator	Target			Batas Waktu Capaian	
			Jumlah Orang Yang harus Dilayanani (orang)	Jumlah Orang Yang Terlayani (orang)	(%)				Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang tersedia	(%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = (5: 4) x100*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12 = (11:10) x100*	*13*	*14*
1.	**Penyediaan dan Rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten**	**Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni**	61	61	100	TAHUN 2023		Pembangunan baru di lokasi baru /relokasi bagi korban bencana	14	14	100	TAHUN 2023	
								Pembangunan baru di lokasi baru /relokasi bagi korban bencana	14	14	100		

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian											Anggaran
		Penerima Layanan Dasar					Mutu Minimal Pelayanan Dasar						
		Indikator	Target			Batas Waktu Capaian	No	Indikator	Target			Batas Waktu Capaian	
			Jumlah Orang Yang harus Dilayanani (orang)	Jumlah Orang Yang Terlayani (orang)	(%)				Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang tersedia	(%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = (5: 4) x100*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12 = (11:10) x100*	*13*	*14*
2.	**Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota**	**Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni**	1	1	100	TAHUN 2023		Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	1	1	100	TAHUN 2023	
								Subsidi uang sewa	1	1	100		
								Penyediaan rumah layak huni	1	1	100		

Sumber : Data Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara, 2024

4.4.5. Realisasi (Capaian Hasil)

Realisasi adalah target yang dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya. Berikut ini tabel realisasi capaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2023 :

Tabel IV.18.
Realisasi Capaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian										Capaian SPM (%) / Katergori
		Penerima Layanan Dasar					Mutu Minimal Pelayanan Dasar					
		Indikator	Realisasi			IP_{SPM} (%)	Indikator	Indikator			IP_{SPM} (%)	
			Jumlah Orang Yang Akan Dilayani	Jumlah Orang Yang terlayani	(%)			Jumlah Mutu Barang/Jasa yang akan dipenuhi	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang terpenuhi	(%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = (5: 4) x100*	*7 = 6 X 80%*	*8*	*9*	*10*	*11 = (10:9) x100*	*12 = 11X 20%*	*13*
1.	**Penyediaan dan Rehabilitasi rumah layak huni bagi korban**	**Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh**	67	67	100	80,00	Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	1	1	100	20,00	
							Rehabilitasi rumah bagi korban bencana					

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian										Capaian SPM (%) / Katergori
		Penerima Layanan Dasar					Mutu Minimal Pelayanan Dasar					
		Indikator	Realisasi			IP$_{SPM}$ (%)	Indikator	Indikator			IP$_{SPM}$ (%)	
			Jumlah Orang Yang Akan Dilayani	Jumlah Orang Yang terlayani	(%)			Jumlah Mutu Barang/Jasa yang akan dipenuhi	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang terpenuhi	(%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = (5: 4) x100*	*7 = 6 X 80%*	*8*	*9*	*10*	*11 = (10:9) x100*	*12 = 11X 20%*	*13*
	bencana kabupaten	**rumah layak huni**					Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	1	1	100	20,00	
							Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana	1	1	100	20,00	
						Rata-Rata	80,00				**Rata-Rata**	20,00	**100,00 Tuntas Paripurna**
2.	**Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten**	**Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten**	1.310	1.310	100	80,00	Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	1	1	100	20,00	
							Subsidi uang sewa	1	1	100	20,00	
							Penyediaan rumah layak huni	1	1	100	20,00	
						Rata-Rata	80,00				**Rata-Rata**	20,00	**100,00 Tuntas Paripurna**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian										Capaian SPM (%) / Katergori
		Penerima Layanan Dasar					Mutu Minimal Pelayanan Dasar					
		Indikator	Realisasi			IP$_{SPM}$ (%)	Indikator	Indikator			IP$_{SPM}$ (%)	
			Jumlah Orang Yang Akan Dilayani	Jumlah Orang Yang terlayani	(%)			Jumlah Mutu Barang/Jasa yang akan dipenuhi	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang terpenuhi	(%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = (5: 4) x100*	*7 = 6 X 80%*	*8*	*9*	*10*	*11 = (10:9) x100*	*12 = 11X 20%*	*13*
BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN												**100,00 Tuntas Paripurna**

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara, 2023

4.4.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang mendukung pencapaian dan penerapan SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Banjarnegara bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Banjarnegara tahun 2023, dengan rincian alokasi anggaran per jenis pelayanan dasar sebagai berikut:

Tabel IV.19.
Alokasi Anggaran Untuk Pemenuhan SPM
Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	ANGGARAN			
		APBD	APBN	DAK	Sumber Dana Lain yang Sah
1	*2*	*3*	*4*	*6*	*7*
1.	Penyediaan dan Rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	3.386.000.000	0	0	0
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	2.041.000.000	0	0	0
Jumlah		5.427.000.000	0	0	0

Sumber : Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara, 2024

4.4.5. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai (SDM) yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM. Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlibat di dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Banjarnegara tahun 2023, sebagaimana di uraikan dalam tabel berikut :

Tabel IV.20.
Dukungan Personil Penerapan SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah Personil
1	2	3

1. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota		
	- S1	6
	- D3	-
	- SMA	-
	Jumlah	6
2. Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
	- S1	6
	- D3	-
	- SMA	-
	Jumlah	6

Sumber : Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara, 2023

4.4.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM bidang Urusan Perumahan Rakyatdan Permukiman, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh adalah sebagai berikut:

Tabel IV.21.
Permasalahan dan Solusi SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022

No	Sumber	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4
1.	Internal	Pengumpulan data perumahan di lokasi rawan bencana membutuhkan waktu yang cukup lama dikarenakan luasnya wilayah. Data awal dari BPBD yang merupakan data daerah rawan bencana secara umum harus disesuaikan dengan wilayah permukiman saat ini	Pengumpulan data perumahan di lokasi rawan bencana dilakukan secara bertahap, dan dilakukan *update* data secara berkala terhadap data yang sudah didapatkan
		1. Penanganan rehab rumah (ringan sedang) tidak bisa menunggu tahun anggaran berikutnya, sehingga harus dianggarkan saat	1. Ada mekanisme BTT yang diatur dalam Perbup No. 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan

		itu juga.	Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
		2. Pada beberapa daerah rawan bencana terdapat warga yang menginginkan untuk direlokasi ke tempat lain namun ada beberapa hal yang perlu pemenuhan, yaitu: a. Belum tersedia studi atau Analisa tentang kondisi di lokasi apakah membutuhkan relokasi atau bisa dilakukan mitigasi struktural untuk mengurangi dampak bencana b. Warga belum memiliki tanah yang akan digunakan untuk lokasi relokasi	2. Berkoordinasi dengan : a. BPBD dan BBWS berkaitan dengan langkah penanganan yang akan dilakukan apakah relokasi atau mitigasi structural b. desa untuk penyediaan tanah
2.	eksternal	Terdapat permohonan untuk pembangunan kembali di lokasi lain namun yang bersangkutan ingin segera membangun dan bersedia menerima BTT (dianggap sebagai rehab rumah dengan nilai bantuan maksimum yaitu 25 juta rupiah)	Tetap diberikan bantuan agar dapat dilaksanakan pembangunan dan memastikan bahwa pembangunan akan selesai dan menjadi rumah layak huni.

Sumber : Data Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara, 2024

4. 5 BIDANG URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, jenis pelayanan dasar pada SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Daerah Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum.
2. Pelayanan informasi rawan bencana.
3. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
4. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
5. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

4.5.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, pada lampiran huruf A nomor 5 (lima) mengenai target dan indikator kinerja pencapaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat, maka ditetapkan target pencapaian SPM oleh daerah adalah 100% setiap tahunnya untuk setiap jenis pelayanan dasar dan indikator pencapaiannya.

Berikut tabel rencana target capaian SPM Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023.

Tabel IV.22.
Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian											Anggaran
		Penerima Layanan Dasar					Mutu Minimal Pelayanan Dasar						
		Indikator	Target			Batas Waktu Capaian	No	Indikator	Target			Batas Waktu Capaian	
			Jumlah Orang Yang harus Dilayanani (orang)	Jumlah Orang Yang Terlayani (orang)	(%)				Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang tersedia	(%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = (5: 4) x100*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12 = (11:10) x100*	*13*	*14*
1.	**Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum**	**Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada**	7	7	100	TAHUN 2023	1.	Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor, b.kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional)	93	93	100	TAHUN 2023	
							2.	Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan Perda,	14	14	100		

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian											Anggaran
		Penerima Layanan Dasar					Mutu Minimal Pelayanan Dasar						
		Indikator	Target			Batas Waktu Capaian	No	Indikator	Target			Batas Waktu Capaian	
			Jumlah Orang Yang harus Dilayanani (orang)	Jumlah Orang Yang Terlayani (orang)	(%)				Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang tersedia	(%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = (5: 4) x100*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12 = (11:10) x100*	*13*	*14*
								Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa,pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)					
							3.	Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas	97	97	100		

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian											Anggaran
		Penerima Layanan Dasar					Mutu Minimal Pelayanan Dasar						
		Indikator	Target			Batas Waktu Capaian	No	Indikator	Target			Batas Waktu Capaian	
			Jumlah Orang Yang harus Dilayanani (orang)	Jumlah Orang Yang Terlayani (orang)	(%)				Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang tersedia	(%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = (5: 4) x100*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12 = (11:10) x100*	*13*	*14*
								personil/SDM)					
							4.	Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)	1	1	100		
							5.	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak	1	1	100		

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian											Anggaran
		Penerima Layanan Dasar					Mutu Minimal Pelayanan Dasar						
		Indikator	Target			Batas Waktu Capaian	No	Indikator	Target			Batas Waktu Capaian	
			Jumlah Orang Yang harus Dilayanani (orang)	Jumlah Orang Yang Terlayani (orang)	(%)				Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang tersedia	(%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = (5: 4) x100*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12 = (11:10) x100*	*13*	*14*
								ringan, rusak sedang, rusak berat)					
							6.	Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cidera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cidera fisik sedang dan/atau berat)	1	1	100		

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian											Anggaran
		Penerima Layanan Dasar					Mutu Minimal Pelayanan Dasar						
		Indikator	Target			Batas Waktu Capaian	No	Indikator	Target			Batas Waktu Capaian	
			Jumlah Orang Yang harus Dilayanani (orang)	Jumlah Orang Yang Terlayani (orang)	(%)				Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang tersedia	(%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = (5: 4) x100*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12 = (11:10) x100*	*13*	*14*
2.	Pelayanan informasi rawan bencana	**Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi**	600	600	100	TAHUN 2023	1.	Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melaluipenyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	1	1	100	TAHUN 2023	
							2.	Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	498.831	498.831	100		
							3.	Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan	600	600	100		

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian											Anggaran
		Penerima Layanan Dasar					Mutu Minimal Pelayanan Dasar						
		Indikator	Target			Batas Waktu Capaian	No	Indikator	Target			Batas Waktu Capaian	
			Jumlah Orang Yang harus Dilayanani (orang)	Jumlah Orang Yang Terlayani (orang)	(%)				Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang tersedia	(%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = (5: 4) x100*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12 = (11:10) x100*	*13*	*14*
								bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)					
							4.	Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	447	447	100		
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan	498.831	498.831	100	TAHUN 2023	1.	Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, …. dll)	68	68	100	TAHUN 2023	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian											Anggaran
		Penerima Layanan Dasar					Mutu Minimal Pelayanan Dasar						
		Indikator	Target			Batas Waktu Capaian	No	Indikator	Target			Batas Waktu Capaian	
			Jumlah Orang Yang harus Dilayanani (orang)	Jumlah Orang Yang Terlayani (orang)	(%)				Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang tersedia	(%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = (5: 4) x100*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12 = (11:10) x100*	*13*	*14*
		terhadap bencana					2.	Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	55	55	100		
4.	**Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana**	**Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana**	1.574	1.574	100	TAHUN 2023	1.	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan	1	1	100	TAHUN 2023	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian											Anggaran
		Penerima Layanan Dasar					Mutu Minimal Pelayanan Dasar						
		Indikator	Target			Batas Waktu Capaian	No	Indikator	Target			Batas Waktu Capaian	
			Jumlah Orang Yang harus Dilayanani (orang)	Jumlah Orang Yang Terlayani (orang)	(%)				Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang tersedia	(%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = (5: 4) x100*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12 = (11:10) x100*	*13*	*14*
								bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)					
							2.	Pendataan terhadap warga yang terkena/ menjadi korban bencana	1.574	1.574	100		
							3.	Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	1	1	100		
							4.	Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/ wabah zoonosis	1	1	100		

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian											Anggaran
		Penerima Layanan Dasar					Mutu Minimal Pelayanan Dasar						
		Indikator	Target			Batas Waktu Capaian	No	Indikator	Target			Batas Waktu Capaian	
			Jumlah Orang Yang harus Dilayanani (orang)	Jumlah Orang Yang Terlayani (orang)	(%)				Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang tersedia	(%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = (5: 4) x100*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12 = (11:10) x100*	*13*	*14*
								prioritas (terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)					
							5.	Pelaksanaan pencarian,pertolongan evakuasi korban bencana	1.574	1.574	100		
5.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	116	116	100	TAHUN 2023	1.	Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan	14	14	100	TAHUN 2023	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian											Anggaran
		Penerima Layanan Dasar					Mutu Minimal Pelayanan Dasar						
		Indikator	Target			Batas Waktu Capaian	No	Indikator	Target			Batas Waktu Capaian	
			Jumlah Orang Yang harus Dilayanani (orang)	Jumlah Orang Yang Terlayani (orang)	(%)				Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang tersedia	(%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = (5: 4) x100*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12 = (11:10) x100*	*13*	*14*
								Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)					
							2.	Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, … dst.)	4	4	100		
							3.	Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar	167	167	100		

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian											Anggaran
		Penerima Layanan Dasar					Mutu Minimal Pelayanan Dasar						
		Indikator	Target			Batas Waktu Capaian	No	Indikator	Target			Batas Waktu Capaian	
			Jumlah Orang Yang harus Dilayanani (orang)	Jumlah Orang Yang Terlayani (orang)	(%)				Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang tersedia	(%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = (5: 4) x100*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12 = (11:10) x100*	*13*	*14*
								sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket,					
							4.	Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/ Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	15	15	100		

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian											Anggaran
		Penerima Layanan Dasar					Mutu Minimal Pelayanan Dasar						
		Indikator	Target			Batas Waktu Capaian	No	Indikator	Target			Batas Waktu Capaian	
			Jumlah Orang Yang harus Dilayanani (orang)	Jumlah Orang Yang Terlayani (orang)	(%)				Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang tersedia	(%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = (5: 4) x100*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12 = (11:10) x100*	*13*	*14*
							5.	Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	104	104	100		
							6.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	65	65	100		

Sumber : Data Satpol PP dan BPBD Kab. Banjarnegara, 2024

4.2.3 Realisasi (Capaian Hasil)

Realisasi adalah target yang dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya. Berikut ini tabel realisasi capaian SPM Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2023 :

Tabel IV.23.
Realisasi Pencapaian Target SPM Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian										Capaian SPM (%) / Katergorii
		Penerima Layanan Dasar					Mutu Minimal Pelayanan Dasar					
		Indikator	Realisasi			IP_{SPM} (%)	No	Indikator	Realisasi			IP_{SPM} (%)	
			Jumlah Orang Yang Akan Dilayani	Jumlah Orang Yang terlayani	(%)				Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang tersedia	(%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = (5: 4) x100*	*7 = 6 X 80%*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12 = (11:10) x100*	*13 = 12X 20%*	*14*
1.	**Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum**	**Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan**	7	7	100	TAHUN 2023	1.	Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor, b.	93	93	100	20,00	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian											Capaian SPM (%) / Katergori
		Penerima Layanan Dasar					Mutu Minimal Pelayanan Dasar						
		Indikator	Realisasi			IP_{SPM} (%)	No	Indikator	Realisasi			IP_{SPM} (%)	
			Jumlah Orang Yang Akan Dilayani	Jumlah Orang Yang terlayani	(%)				Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang tersedia	(%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = (5: 4) x100*	*7 = 6 X 80%*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12 = (11:10) x100*	*13 = 12X 20%*	*14*
		hukum Perda dan Perkada						kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional)					
							2.	Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat	14	14	100	20,00	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian										Capaian SPM (%) / Katergori
		Penerima Layanan Dasar					Mutu Minimal Pelayanan Dasar					
		Indikator	Realisasi			IP_{SPM} (%)	No	Indikator	Realisasi			IP_{SPM} (%)	
			Jumlah Orang Yang Akan Dilayani	Jumlah Orang Yang terlayani	(%)				Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang tersedia	(%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = (5: 4) x100*	*7 = 6 X 80%*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12 = (11:10) x100*	*13 = 12X 20%*	*14*
								penting, pelaksanaan operasional patroli)					
							3.	Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM)	97	97	100	20,00	
							4.	Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian	1	1	100	20,00	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian										Capaian SPM (%) / Katergori
		Penerima Layanan Dasar					Mutu Minimal Pelayanan Dasar					
		Indikator	Realisasi			IP_{SPM} (%)	No	Indikator	Realisasi			IP_{SPM} (%)	
			Jumlah Orang Yang Akan Dilayani	Jumlah Orang Yang terlayani	(%)				Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang tersedia	(%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = (5: 4) x100*	*7 = 6 X 80%*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12 = (11:10) x100*	*13 = 12X 20%*	*14*
								material dan pelayanan pengobatan)					
							5.	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	1	Tidak dilaskanakan	-	20,00	
							6.	Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cidera fisik ringan akibat penegakan Perda	1	Tidak dilaskanakan	-	20,00	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian										Capaian SPM (%) / Katergori
		Penerima Layanan Dasar					Mutu Minimal Pelayanan Dasar					
		Indikator	Realisasi			IP_{SPM} (%)	No	Indikator	Realisasi			IP_{SPM} (%)	
			Jumlah Orang Yang Akan Dilayani	Jumlah Orang Yang terlayani	(%)				Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang tersedia	(%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = (5: 4) x100*	*7 = 6 X 80%*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12 = (11:10) x100*	*13 = 12X 20%*	*14*
								dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cidera fisik sedang dan/atau berat)					
					Rata-rata	**80,00**					**Rata-rata**	**20,00**	**100,00 (Tuntas Paripurna)**
2.	Pelayanan informasi rawan bencana	**Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi**	600	600	100	80,00	1.	Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB	1	1	100	20,00	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian										Capaian SPM (%) / Katergori
		Penerima Layanan Dasar					Mutu Minimal Pelayanan Dasar					
		Indikator	Realisasi			IP_{SPM} (%)	No	Indikator	Realisasi			IP_{SPM} (%)	
			Jumlah Orang Yang Akan Dilayani	Jumlah Orang Yang terlayani	(%)				Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang tersedia	(%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = (5: 4) x100*	*7 = 6 X 80%*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12 = (11:10) x100*	*13 = 12X 20%*	*14*
								dalam bentuk dokumen yang sah/legal)					
							2.	Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	498.831	498.831	100		
							3.	Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	600	600	100		

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian											Capaian SPM (%) / Katergori
		Penerima Layanan Dasar					Mutu Minimal Pelayanan Dasar						
		Indikator	Realisasi			IP_{SPM} (%)	No	Indikator	Realisasi			IP_{SPM} (%)	
			Jumlah Orang Yang Akan Dilayani	Jumlah Orang Yang terlayani	(%)				Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang tersedia	(%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = (5: 4) x100*	*7 = 6 X 80%*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12 = (11:10) x100*	*13 = 12X 20%*	*14*
							4.	Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	447	447	100		
						Rata-rata	**80,00**					**Rata-rata**	**20,00**	**100,00 (Tuntas Paripurna)**
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	498.831	498.831	100	80,00	1.	Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, …. dll)	68	68	100	20,00	
							2.	Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparatur	55	55	100	20,00	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian											Capaian SPM (%) / Katergori
		Penerima Layanan Dasar					Mutu Minimal Pelayanan Dasar						
		Indikator	Realisasi			IP_{SPM} (%)	No	Indikator	Realisasi			IP_{SPM} (%)	
			Jumlah Orang Yang Akan Dilayani	Jumlah Orang Yang terlayani	(%)				Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang tersedia	(%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = (5: 4) x100*	*7 = 6 X 80%*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12 = (11:10) x100*	*13 = 12X 20%*	*14*
								yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)					
						Rata-rata	**80,00**					**Rata-rata**	**20,00**	**100,00 (Tuntas Paripurna)**
4.	**Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana**	**Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana**	1.574	1.574	100	80,00	1.	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat	1	1	100	20,00	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian										Capaian SPM (%) / Katergori
		Penerima Layanan Dasar					Mutu Minimal Pelayanan Dasar					
		Indikator	Realisasi			IP_{SPM} (%)	No	Indikator	Realisasi			IP_{SPM} (%)	
			Jumlah Orang Yang Akan Dilayani	Jumlah Orang Yang terlayani	(%)				Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang tersedia	(%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = (5: 4) x100*	*7 = 6 X 80%*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12 = (11:10) x100*	*13 = 12X 20%*	*14*
								bencana)					
							2.	Pendataan terhadap warga yang terkena/ menjadi korban bencana	1.574	1.574	100	20,00	
							3.	Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	1	1	100	20,00	
							4.	Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/ wabah zoonosis prioritas (terrespon secara cepat setiap	1	Tidak dilaksanakan	-	-	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian										Capaian SPM (%) / Katergori
		Penerima Layanan Dasar					Mutu Minimal Pelayanan Dasar					
		Indikator	Realisasi			IP_{SPM} (%)	No	Indikator	Realisasi			IP_{SPM} (%)	
			Jumlah Orang Yang Akan Dilayani	Jumlah Orang Yang terlayani	(%)				Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang tersedia	(%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = (5: 4) x100*	*7 = 6 X 80%*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12 = (11:10) x100*	*13 = 12X 20%*	*14*
								hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)					
							5.	Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	1.574	1.574	100	20,00	
						Rata-rata	**80,00**					**Rata-rata**	**20,00**	**100,00 (Tuntas Paripurna)**
5.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	116	104	89,66	71,72	1.	Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan	14,05	14,05	100	20,00	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian											Capaian SPM (%) / Katergori
		Penerima Layanan Dasar					Mutu Minimal Pelayanan Dasar						
		Indikator	Realisasi			IP_{SPM} (%)	No	Indikator	Realisasi			IP_{SPM} (%)	
			Jumlah Orang Yang Akan Dilayani	Jumlah Orang Yang terlayani	(%)				Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang tersedia	(%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = (5: 4) x100*	*7 = 6 X 80%*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12 = (11:10) x100*	*13 = 12X 20%*	*14*
								penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)					
							2.	Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, … dst.)	4	4	100	20,00	
							3.	Sarana prasarana pemadam kebakaran	167	167	100	20,00	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian											Capaian SPM (%) / Katergori
		Penerima Layanan Dasar					Mutu Minimal Pelayanan Dasar						
		Indikator	Realisasi			IP_{SPM} (%)	No	Indikator	Realisasi			IP_{SPM} (%)	
			Jumlah Orang Yang Akan Dilayani	Jumlah Orang Yang terlayani	(%)				Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang tersedia	(%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = (5: 4) x100*	*7 = 6 X 80%*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12 = (11:10) x100*	*13 = 12X 20%*	*14*
								(pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, … dll.)					
							4.	Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/ Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah	15	15	100	20,00	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian										Capaian SPM (%) / Katergori
		Penerima Layanan Dasar					Mutu Minimal Pelayanan Dasar					
		Indikator	Realisasi			IP_{SPM} (%)	No	Indikator	Realisasi			IP_{SPM} (%)	
			Jumlah Orang Yang Akan Dilayani	Jumlah Orang Yang terlayani	(%)				Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang tersedia	(%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = (5: 4) x100*	*7 = 6 X 80%*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12 = (11:10) x100*	*13 = 12X 20%*	*14*
								mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)					
							5.	Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	104	104	100	20,00	
							6.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma,	65	Tidak Dilaksanakaan	-	-	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian											Capaian SPM (%) / Katergori
		Penerima Layanan Dasar					Mutu Minimal Pelayanan Dasar						
		Indikator	Realisasi			IP_{SPM} (%)	No	Indikator	Realisasi			IP_{SPM} (%)	
			Jumlah Orang Yang Akan Dilayani	Jumlah Orang Yang terlayani	(%)				Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang tersedia	(%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = (5: 4) x100*	*7 = 6 X 80%*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12 = (11:10) x100*	*13 = 12X 20%*	*14*
								serta dampak sosial akibat kebakaran)					
Rata-rata						**71,72**	**Rata-rata**					**20,00**	**91,72 (Tuntas Utama)**
BIDANG URUSAN TRANTIBUMLINMAS													**97,24 (Tuntas utama)**

Sumber : Data Satpol PP dan BPBD Kab. Banjarnegara, 2024

4.5.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang mendukung pencapaian dan penerapan SPM Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Banjarnegara bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Banjarnegara tahun 2023, dengan rincian alokasi anggaran per jenis pelayanan dasar sebagai berikut:

Tabel IV.24.
Alokasi Anggaran Untuk Pemenuhan SPM Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	ANGGARAN			
		APBD	APBN	DAK	Sumber Dana Lain yang Sah
1	*2*	*3*	*4*	*6*	*7*
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum bencana kabupaten/kota	201.100.950	0	0	0
2.	Pelayanan informasi rawan bencana	108.780.000	0	0	0
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1.023.705.900	0	0	0
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	279.000.000	0	0	0
5.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	639.884.900	0	0	0
Jumlah		2.252.471.750	0	0	0

Sumber : Satpol PP dan BPBD Kab. Banjarnegara, 2024

4.5.5 Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai (SDM) yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM. Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlibat di dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Banjarnegara tahun 2022, sebagaimana di uraikan dalam tabel berikut:

Tabel IV.25.
Dukungan Personil Penerapan SPM Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023

NO	URAIAN	JUMLAH PEGAWAI	KET
1	Sub Urusan Trantibum dan Damkar		
	a. S2 b. S1 c. SLTA d. SLTA	2 14 77 3	
	Jumlah	**96**	
2	Sub Urusan Kebencanaan : - S2 - S1 - D3 - SLTA/Sederajat - Paket B - SD	 2 20 1 26 1 2	
	Jumlah	**52**	

Sumber : Satpol PP dan BPBD Kab. Banjarnegara, 2024

4.5.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh adalah sebagai berikut:

Tabel IV.26.
Permasalahan dan Solusi SPM Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023

No	Sumber	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4
1.	Internal		
	a. Sumber Daya Manusia	Kekurangan SDM yang kopeten	Peningkatan SDM melalui diklat dan bimtek
	b. Sarana dan prasarana	Sarana dan prasarana kurang memadai	Perbaikan dan penambahan Sarana dan Prasarana
		Tidak ada korban terdampak	Usahakan sesuai SOP agar tidak ada korban terdampak

		Tidak ada standar pasti kebutuhan ganti rugi per korban	Mengusulkan SHS
		Tidak ada rekening di SIPD untuk input ganti rugi materiil/ pengobatan	Usul penambahan rekening ganti rugi
2.	Eksternal		
	Pelayanan dasar pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Kurangnya koordinasi dari Perangkat Daerah terkait dalam penanganan pelanggaran Perda	Melakukan koordinasi secara intens dengan Perangkat Daerah terkait
	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Pos pemadam kebakaran yang belum merata di berbagai penjuru wilayah	Perencanaan pembangunan pos Damkar dan Fasilitasnya

Sumber : Data Satpol PP dan BPBD Kab. Banjarnegara, 2023

4.6. BIDANG URUSAN SOSIAL

4.6.1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, jenis pelayanan dasar pada SPM bidang Urusan Sosial Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai berikut :

1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti;
5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.

4.6.2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, pada lampiran huruf A nomor 6 (enam) mengenai target dan indikator kinerja pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial, maka ditetapkan target pencapaian SPM oleh daerah adalah 100% setiap tahunnya untuk setiap jenis pelayanan dasar dan indikator pencapaiannya.

Berikut tabel rencana target capaian SPM Bidang Urusan Sosial Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023.

Tabel IV.27.
Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian											Anggaran
		Penerima Layanan Dasar					Mutu Minimal Pelayanan Dasar						
		Indikator	Target			Batas Waktu Capaian	No	Indikator	Target			Batas Waktu Capaian	
			Jumlah Orang Yang harus Dilayanani (orang)	Jumlah Orang Yang Terlayani (orang)	(%)				Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang tersedia	(%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = (5: 4) x100*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12 = (11:10) x100*	*13*	*14*
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Di Luar Panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti.	314	314	100	TAHUN 2023	1.	Layanan data dan pengaduan	4	4	100	TAHUN 2023	
							2.	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	5	5	100		
							3.	Penyediaan permakanan	70	70	100		
							4.	Penyediaan sandang	30	30	100		
							5.	Penyediaan alat bantu	76	76	100		

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian											Anggaran
		Penerima Layanan Dasar					Mutu Minimal Pelayanan Dasar						
		Indikator	Target			Batas Waktu Capaian	No	Indikator	Target			Batas Waktu Capaian	
			Jumlah Orang Yang harus Dilayanani (orang)	Jumlah Orang Yang Terlayani (orang)	(%)				Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang tersedia	(%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = (5: 4) x100*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12 = (11:10) x100*	*13*	*14*
							6.	Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	1	1	100		
							7.	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	100	100	100		
							8.	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas terlantar	5	5	100		
							9.	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat	1	1	100		

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian											Anggaran
		Penerima Layanan Dasar					Mutu Minimal Pelayanan Dasar						
		Indikator	Target			Batas Waktu Capaian	No	Indikator	Target			Batas Waktu Capaian	
			Jumlah Orang Yang harus Dilayanani (orang)	Jumlah Orang Yang Terlayani (orang)	(%)				Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang tersedia	(%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = (5: 4) x100*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12 = (11:10) x100*	*13*	*14*
								Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak/ Bukti dokumen kependudukan					
							10.	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/ fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	1	1	100		
							11.	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	3	3	100		
							12.	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	4	4	100		
							13.	Layanan rujukan	14	14	100		

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian											Anggaran
		Penerima Layanan Dasar					Mutu Minimal Pelayanan Dasar						
		Indikator	Target			Batas Waktu Capaian	No	Indikator	Target			Batas Waktu Capaian	
			Jumlah Orang Yang harus Dilayanani (orang)	Jumlah Orang Yang Terlayani (orang)	(%)				Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang tersedia	(%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = (5: 4) x100*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12 = (11:10) x100*	*13*	*14*
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Di Luar Panti	Jumlah Anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti.	106	106	100	TAHUN 2023	1.	Layanan data dan pengaduan	2	2	100	TAHUN 2023	
							2.	Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat	3	3	100		
							3.	Penyediaan permakanan	20	20	100		
							4.	Penyediaan sandang	20	20	100		
							5.	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritualdan sosial	24	24	100		
							6.	Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	1	1	100		

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian											Anggaran
		Penerima Layanan Dasar					Mutu Minimal Pelayanan Dasar						
		Indikator	Target			Batas Waktu Capaian	No	Indikator	Target			Batas Waktu Capaian	
			Jumlah Orang Yang harus Dilayanani (orang)	Jumlah Orang Yang Terlayani (orang)	(%)				Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang tersedia	(%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = (5: 4) x100*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12 = (11:10) x100*	*13*	*14*
							7.	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	15	15	100		
							8.	Fasilitas pembuatan NomorInduk Kependudukan, KartuTanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak/ Bukti dokumen kependudukan	2	2	100		
							9.	Akses kelayanan pendidikan dan kesehatan dasar/ fasilitasi layanan pendidikan dan	1	1	100		

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian											Anggaran
		Penerima Layanan Dasar					Mutu Minimal Pelayanan Dasar						
		Indikator	Target			Batas Waktu Capaian	No	Indikator	Target			Batas Waktu Capaian	
			Jumlah Orang Yang harus Dilayanani (orang)	Jumlah Orang Yang Terlayani (orang)	(%)				Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang tersedia	(%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = (5: 4) x100*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12 = (11:10) x100*	*13*	*14*
								kesehatan					
							10.	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	3	3	100		
							11.	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	3	3	100		
							12.	Layanan rujukan	12	120	100		
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Diluar Panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar	192	192	100	TAHUN 2023	1.	Layanan data dan pengaduan	2	2	100	TAHUN 2023	
							2.	Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat	1	1	100		
							3.	Penyediaan permakanan	50	50	100		

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian											Anggaran
		Penerima Layanan Dasar					Mutu Minimal Pelayanan Dasar						
		Indikator	Target			Batas Waktu Capaian	No	Indikator	Target			Batas Waktu Capaian	
			Jumlah Orang Yang harus Dilayanani (orang)	Jumlah Orang Yang Terlayani (orang)	(%)				Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang tersedia	(%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = (5: 4) x100*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12 = (11:10) x100*	*13*	*14*
		Panti.					4.	Penyediaan sandang	10	10	100		
							5.	Penyediaan alat bantu	111	111	100		
							6.	Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	1	1	100		
							7.	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritualdan sosial	1	1	100		
							8.	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut usia terlantar	5	5	100		

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian											Anggaran
		Penerima Layanan Dasar					Mutu Minimal Pelayanan Dasar						
		Indikator	Target			Batas Waktu Capaian	No	Indikator	Target			Batas Waktu Capaian	
			Jumlah Orang Yang harus Dilayanani (orang)	Jumlah Orang Yang Terlayani (orang)	(%)				Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang tersedia	(%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = (5: 4) x100*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12 = (11:10) x100*	*13*	*14*
							9.	Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, KartuTanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah/Bukti dokumen kependudukan	1	1	100		
							10.	Akses kelayanan pendidikan/fasilitasi layanan kesehatan	1	1	100		
							11.	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	3	3	100		
							12.	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	1	1	100		

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian											Anggaran
		Penerima Layanan Dasar					Mutu Minimal Pelayanan Dasar						
		Indikator	Target			Batas Waktu Capaian	No	Indikator	Target			Batas Waktu Capaian	
			Jumlah Orang Yang harus Dilayanani (orang)	Jumlah Orang Yang Terlayani (orang)	(%)				Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang tersedia	(%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = (5: 4) x100*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12 = (11:10) x100*	*13*	*14*
							13.	Layanan rujukan	5	5	100		
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan Dan Pengemis Di Luar Panti	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis Tuna Sosial Khususnya yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	42	42	100	TAHUN 2023	1.	Layanan data dan pengaduan	2	2	100	TAHUN 2023	
							2.	Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	1	1	100		
							3.	Penyediaan permakanan	15	15	100		
							4.	Penyediaan sandang	15	15	100		
							5.	Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	1	1	100		
							6.	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritualdan sosial	1	1	100		

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian											Anggaran
		Penerima Layanan Dasar					Mutu Minimal Pelayanan Dasar						
		Indikator	Target			Batas Waktu Capaian	No	Indikator	Target			Batas Waktu Capaian	
			Jumlah Orang Yang harus Dilayanani (orang)	Jumlah Orang Yang Terlayani (orang)	(%)				Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang tersedia	(%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = (5: 4) x100*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12 = (11:10) x100*	*13*	*14*
							7.	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	1	1	100		
							8.	Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, KartuTanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	1	1	100		

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian											Anggaran
		Penerima Layanan Dasar					Mutu Minimal Pelayanan Dasar						
		Indikator	Target			Batas Waktu Capaian	No	Indikator	Target			Batas Waktu Capaian	
			Jumlah Orang Yang harus Dilayanani (orang)	Jumlah Orang Yang Terlayani (orang)	(%)				Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang tersedia	(%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = (5: 4) x100*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12 = (11:10) x100*	*13*	*14*
							9.	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	1	1	100		
							10.	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	1	1	100		
							11.	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	2	2	100		
							12.	Layanan rujukan	1	1	100		
5.	Perlindungan Dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap	Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/ kota	851	851	100	TAHUN 2023	1.	Penyediaan permakanan	300	300	100	TAHUN 2023	
							2.	Penyediaan sandang	300	300	100		

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian											Anggaran
		Penerima Layanan Dasar					Mutu Minimal Pelayanan Dasar						
		Indikator	Target			Batas Waktu Capaian	No	Indikator	Target			Batas Waktu Capaian	
			Jumlah Orang Yang harus Dilayanani (orang)	Jumlah Orang Yang Terlayani (orang)	(%)				Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang tersedia	(%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = (5: 4) x100*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12 = (11:10) x100*	*13*	*14*
	& Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kab/Kota	yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/ kota					3.	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	1	1	100		
							4.	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	100	100	100		
							5.	Pelayanan dukungan Psikososial	150	150	100		

Sumber : Data Dinas Sosial Kab. Banjarnegara,2024

4.6.5. Realisasi

Realisasi adalah target yang dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya. Berikut ini tabel realisasi pencapaian target SPM Bidang Urusan Sosial Tahun 2023 :

Tabel IV.28.
Realisasi Pencapaian Target SPM Bidang Urusan Sosial
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian											Capaian SPM (%) / Katergori
		Penerima Layanan Dasar					Mutu Minimal Pelayanan Dasar						
		Indikator	Realisasi			IP_{SPM} (%)	No	Indikator	Realisasi			IP_{SPM} (%)	
			Jumlah Orang Yang Akan Dilayani	Jumlah Orang Yang terlayani	(%)				Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang tersedia	(%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = (5: 4) x100*	*7 = 6 X 80%*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12 = (11:10) x100*	*13 = 12X 20%*	*14*
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang	314	314	100	80	1.	Layanan data dan pengaduan	4	4	100	20,00	
							2.	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	5	5	100	20,00	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian											Capaian SPM (%) / Katergori
		Penerima Layanan Dasar					Mutu Minimal Pelayanan Dasar						
		Indikator	Realisasi			IP_{SPM} (%)	No	Indikator	Realisasi			IP_{SPM} (%)	
			Jumlah Orang Yang Akan Dilayani	Jumlah Orang Yang terlayani	(%)				Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang tersedia	(%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = (5: 4) x100*	*7 = 6 X 80%*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12 = (11:10) x100*	*13 = 12X 20%*	*14*
	Terlantar Di Luar Panti	memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti.					3.	Penyediaan permakanan	70	70	100	20,00	
							4.	Penyediaan sandang	30	30	100	20,00	
							5.	Penyediaan alat bantu	76	76	100	20,00	
							6.	Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	1	1	100	20,00	
							7.	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	100	100	100	20,00	
							8.	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas terlantar	5	5	100	20,00	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian											Capaian SPM (%) / Katergori
		Penerima Layanan Dasar					Mutu Minimal Pelayanan Dasar						
		Indikator	Realisasi			IP_{SPM} (%)	No	Indikator	Realisasi			IP_{SPM} (%)	
			Jumlah Orang Yang Akan Dilayani	Jumlah Orang Yang terlayani	(%)				Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang tersedia	(%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = (5: 4) x100*	*7 = 6 X 80%*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12 = (11:10) x100*	*13 = 12X 20%*	*14*
							9.	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak/ Bukti dokumen kependudukan	1	1	100	20,00	
							10.	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/ fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	1	1	100	20,00	
							11.	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	3	3	100	20,00	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian											Capaian SPM (%) / Katergori
		Penerima Layanan Dasar					Mutu Minimal Pelayanan Dasar						
		Indikator	Realisasi			IP_{SPM} (%)	No	Indikator	Realisasi			IP_{SPM} (%)	
			Jumlah Orang Yang Akan Dilayani	Jumlah Orang Yang terlayani	(%)				Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang tersedia	(%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = (5: 4) x100*	*7 = 6 X 80%*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12 = (11:10) x100*	*13 = 12X 20%*	*14*
							12.	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	4	4	100	20,00	
							13.	Layanan rujukan	14	14	100	20,00	
						Rata-rata	**80,00**					**Rata-rata**	**20,00**	**100,00 (Tuntas Paripurna)**
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Di Luar Panti	Jumlah Anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti.	106	106	100	TAHUN 2023	1.	Layanan data dan pengaduan	2	2	100	20,00	
							2.	Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat	3	3	100	20,00	
							3.	Penyediaan permakanan	20	20	100	20,00	
							4.	Penyediaan sandang	20	20	100	20,00	
							5.	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritualdan sosial	24	24	100	20,00	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian										Capaian SPM (%) / Katergori
		Penerima Layanan Dasar					Mutu Minimal Pelayanan Dasar					
		Indikator	Realisasi			IP_{SPM} (%)	No	Indikator	Realisasi			IP_{SPM} (%)	
			Jumlah Orang Yang Akan Dilayani	Jumlah Orang Yang terlayani	(%)				Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang tersedia	(%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = (5: 4) x100*	*7 = 6 X 80%*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12 = (11:10) x100*	*13 = 12X 20%*	*14*
							6.	Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	1	1	100	20,00	
							7.	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	15	15	100	20,00	
							8.	Fasilitas pembuatan NomorInduk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak/ Bukti dokumen kependudukan	2	2	100	20,00	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian											Capaian SPM (%) / Katergori
		Penerima Layanan Dasar					Mutu Minimal Pelayanan Dasar						
		Indikator	Realisasi			IP_{SPM} (%)	No	Indikator	Realisasi			IP_{SPM} (%)	
			Jumlah Orang Yang Akan Dilayani	Jumlah Orang Yang terlayani	(%)				Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang tersedia	(%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = (5: 4) x100*	*7 = 6 X 80%*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12 = (11:10) x100*	*13 = 12X 20%*	*14*
							9.	Akses kelayanan pendidikan dan kesehatan dasar/ fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	1	1	100	20,00	
							10.	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	3	3	100	20,00	
							11.	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	3	3	100	20,00	
							12.	Layanan rujukan	12	120	100	20,00	
					Rata-rata	**80,00**					**Rata-rata**	**20,00**	**100,00 (Tuntas Paripurna)**
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar	192	192	100	TAHUN 2023	1.	Layanan data dan pengaduan	2	2	100	20,00	
							2.	Penyediaan layanan	1	1	100	20,00	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian											Capaian SPM (%) / Katergori
		Penerima Layanan Dasar					Mutu Minimal Pelayanan Dasar						
		Indikator	Realisasi			IP_{SPM} (%)	No	Indikator	Realisasi			IP_{SPM} (%)	
			Jumlah Orang Yang Akan Dilayani	Jumlah Orang Yang terlayani	(%)				Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang tersedia	(%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = (5: 4) x100*	*7 = 6 X 80%*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12 = (11:10) x100*	*13 = 12X 20%*	*14*
	Terlantar Diluar Panti	yang memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti.						kedaruratan/ layanan reaksi cepat					
							3.	Penyediaan permakanan	50	50	100	20,00	
							4.	Penyediaan sandang	10	10	100	20,00	
							5.	Penyediaan alat bantu	111	111	100	20,00	
							6.	Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	1	1	100	20,00	
							7.	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritualdan sosial	1	1	100	20,00	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian										Capaian SPM (%) / Katergori
		Penerima Layanan Dasar					Mutu Minimal Pelayanan Dasar					
		Indikator	Realisasi			IP_{SPM} (%)	No	Indikator	Realisasi			IP_{SPM} (%)	
			Jumlah Orang Yang Akan Dilayani	Jumlah Orang Yang terlayani	(%)				Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang tersedia	(%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = (5: 4) x100*	*7 = 6 X 80%*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12 = (11:10) x100*	*13 = 12X 20%*	*14*
							8.	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut usia terlantar	5	5	100	20,00	
							9.	Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah/Bukti dokumen kependudukan	1	1	100	20,00	
							10.	Akses kelayanan pendidikan/fasilitasi layanan kesehatan	1	1	100	20,00	
							11.	Pemberian pelayanan	3	3	100	20,00	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian											Capaian SPM (%) / Katergori
		Penerima Layanan Dasar					Mutu Minimal Pelayanan Dasar						
		Indikator	Realisasi			IP_{SPM} (%)	No	Indikator	Realisasi			IP_{SPM} (%)	
			Jumlah Orang Yang Akan Dilayani	Jumlah Orang Yang terlayani	(%)				Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang tersedia	(%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = (5: 4) x100*	*7 = 6 X 80%*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12 = (11:10) x100*	*13 = 12X 20%*	*14*
								penelusuran keluarga					
							12.	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	1	1	100	20,00	
							13.	Layanan rujukan	5	5	100	20,00	
						Rata-rata	**80,00**					**Rata-rata**	**20,00**	**100,00 (Tuntas Paripurna)**
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan Dan Pengemis Di Luar Panti	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis Tuna Sosial Khususnya yang memperoleh rehabilitasi sosial	42	42	100	TAHUN 2023	1.	Layanan data dan pengaduan	2	2	100	20,00	
							2.	Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	1	1	100	20,00	
							3.	Penyediaan permakanan	15	15	100	20,00	
							4.	Penyediaan sandang	15	15	100	20,00	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian										Capaian SPM (%) / Katergori
		Penerima Layanan Dasar					Mutu Minimal Pelayanan Dasar					
		Indikator	Realisasi			IP_{SPM} (%)	No	Indikator	Realisasi			IP_{SPM} (%)	
			Jumlah Orang Yang Akan Dilayani	Jumlah Orang Yang terlayani	(%)				Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang tersedia	(%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = (5: 4) x100*	*7 = 6 X 80%*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12 = (11:10) x100*	*13 = 12X 20%*	*14*
		dasar tuna sosial di luar panti					5.	Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	1	1	100	20,00	
							6.	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritualdan sosial	1	1	100	20,00	
							7.	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	1	1	100	20,00	
							8.	Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau	1	1	100	20,00	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian											Capaian SPM (%) / Katergori
		Penerima Layanan Dasar					Mutu Minimal Pelayanan Dasar						
		Indikator	Realisasi			IP_{SPM} (%)	No	Indikator	Realisasi			IP_{SPM} (%)	
			Jumlah Orang Yang Akan Dilayani	Jumlah Orang Yang terlayani	(%)				Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang tersedia	(%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = (5: 4) x100*	*7 = 6 X 80%*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12 = (11:10) x100*	*13 = 12X 20%*	*14*
								Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan					
							9.	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	1	1	100	20,00	
							10.	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	1	1	100	20,00	
							11.	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	2	2	100	20,00	
							12.	Layanan rujukan	1	1	100	20,00	
					Rata-rata	**80,00**					**Rata-rata**	**20,00**	**100,00 (Tuntas Paripurna)**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian											Capaian SPM (%) / Katergori
		Penerima Layanan Dasar					Mutu Minimal Pelayanan Dasar						
		Indikator	Realisasi			IP_{SPM} (%)	No	Indikator	Realisasi			IP_{SPM} (%)	
			Jumlah Orang Yang Akan Dilayani	Jumlah Orang Yang terlayani	(%)				Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang tersedia	(%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = (5: 4) x100*	*7 = 6 X 80%*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12 = (11:10) x100*	*13 = 12X 20%*	*14*
5.	Perlindungan Dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap & Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kab/Kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/ kota yangmemperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/ kota	851	851	100	TAHUN 2023	1.	Penyediaan permakanan	300	300	100	20,00	
							2.	Penyediaan sandang	300	300	100	20,00	
							3.	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	1	1	100	20,00	
							4.	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	100	100	100	20,00	
							5.	Pelayanan dukungan Psikososial	150	150	100	20,00	
					Rata-rata	**80,00**					**Rata-rata**	**20,00**	**100,00 (Tuntas Paripurna)**
												BIDANG URUSAN SOSIAL	**100,00 (Tuntas Paripurna)**

Sumber : Data Dinas Sosial Kabupaten Banjarnegara, 2024

4.6.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang mendukung pencapaian dan penerapan SPM Bidang Urusan Sosial Kabupaten Banjarnegara bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Banjarnegara tahun 2023, dengan rincian alokasi anggaran per jenis pelayanan dasar sebagai berikut:

Tabel IV.29.
Alokasi Anggaran Untuk Pemenuhan SPM Bidang Urusan Sosial Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	ANGGARAN				JUMLAH
		APBD	APBN	DAK	Sumber Dana Lain yang Sah	
1	*2*	*3*	*4*	*6*	*7*	*8*
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	1.015.518.430	0	0	0	1.015.518.430
2.	Rehabilitasi sosial dasar Anak Telantar di luar panti		0	0	0	
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti		0	0	0	
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti					
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kabupaten /kota	47.566.300				47.566.300
Jumlah		**1.063.084.730**	0	0	0	**1.063.084.730**

Sumber : Dinas Sosial PPPA Kabupaten Banjarnegara, 2024

4.6.5. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM. Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlibat di dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial Kabupaten Banjarnegara tahun 2023, sebagaimana di uraikan dalam tabel berikut :

Tabel IV.30.
Dukungan Personil Penerapan SPM Bidang Urusan Sosial Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023

NO	Jenis Pelayanan/Pendidikan	JUMLAH PERSONIL	KET
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Di Luar Panti		
	a. S2	0	
	b. S1/D-IV	16	
	c. D3	4	
	d. SMA	10	
	Jumlah	30	
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Di Luar Panti		
	a. S2	0	
	b. S1/D-IV	16	
	c. D3	4	
	d. SMA	10	
	Jumlah	30	
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Di Luar Panti		
	a. S2	0	
	b. S1/D-IV	16	
	c. D3	4	
	d. SMA	10	
	Jumlah	30	
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial KhususnyaGelandangan DanPengemis Di Luar Panti		
	a. S2	0	
	b. S1/D-IV	16	
	c. D3	4	
	d. SMA	10	
	Jumlah	30	

NO	Jenis Pelayanan/Pendidikan	JUMLAH PERSONIL	KET
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggapdan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota		
	a. S2	0	
	b. S1/D-IV	2	
	c. D3	0	
	d. SMA	41	
	Jumlah	43	
	Jumlah Total	**73**	

Sumber : Dinas Sosial PPPA Kabupaten Banjarnegara, 2024

4.6.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM bidang Urusan Sosial, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh adalah sebagai berikut:

Tabel IV.31.
Permasalahan dan Solusi SPM Bidang Urusan Sosial
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023

No	Sumber	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4
1.	Internal	Dalam melakukan pengumpulan data membutuhkan waktu yang lama, data bisa menjadi kurang akurat karena sasaran SPM terutama gelandangan serta pengemis yang mobilitasnya sangat tinggi antar wilayah, bahkan antar kabupaten, banyak yang belum memiliki identitas diri, terutama lansia terlantar, anak terlantar, gelandangan dan pengemis	Bekerja sama dengan pihak desa, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara relawan (TKSK) dan tenaga sosial yang ada di desa untuk mendapatkan data identitas sasaran
		Pengumpulan data yang membutuhkan waktu lama, sehingga mempengaruhi dalam penghitungan kebutuhan sasaran	Melakukan pencermatan terhadap data dasar,

No	Sumber	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4
		Pelaksanaan pemenuhan kebutuhan dasar yang didata tahun berjalan untuk diusulkan mendapatkan bantuan kebutuhan dasar pada tahun N+1, sehingga terkadang sasaran sudah tidak tepat dengan berbagai Alasan	Melakukan advokasi untuk pelaksanaan tahun berikutnya pelaksanaan pemenuhan kebutuhan dasar dapat dilaksanakan pada tahun berjalan
2.	Eksternal	Pemenuhan kebutuhan dasar dihitung berdasarkan jumlah sasaran, tetapi terkendala dengan anggaran yang tersedia	Bekerjasama dengan lintas sektor dan pihak swasta untuk dapat ikut berpartisipasi dalam pemenuhan kebutuhan dasar sasaran, terutama untuk pemenuhan alat bantu kepada disabilitas

Sumber : Data Dinas Sosial Kabupaten Banjarnegara, 2024

4.7 Program dan Kegiatan

Pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Banjarnegara dalam rangka pemenuhan layanan dasar kepada masyarakat didukung dengan anggaran melalui program dan kegiatan yang diampu oleh Perangkat Daerah yang membidangi 6 urusan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal.

Berikut adalah rincian alokasi anggaran dan realisasi anggaran pada program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 :

Tabel IV.32.
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
SPM Bidang Urusan Pendidikan
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Prosentase
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.	**Pendidikan Anak Usia Dini**	**PROGRAM SPM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**	**28.729.360.153**	**28.569.864.231**	**99,44**
		Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM PAUD	**16.360.587.000**	**16.298.894.778**	**99.62**
		Penyelenggaraan sosialisasi pentingnya pendidikan anak usia dini kepada masyarakat paling sedikit 2 (dua) kali per tahun	648.575.000	628.881.800	96.96
		Pengadaan bantuan biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu agar mendapat layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	14.418.000.000	14.379.646.978	99.73
		Penyediaan layanan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan anak usia dini di setiap desa	305.875.000	302.607.000	98.93
		Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	988.137.000	987.759.000	99.96
		Kegiatan Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan satuan	**2.945.000.000**	**2.885.000.000**	**97.96**
		Pemeliharaan dan perbaikan terhadap kondisi sarana dan	2.945.000.000	2.885.000.000	97.96

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Prosentase
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
		prasarana satuan pendidikan yang rusak			
		Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (PAUD)	**6.536.773.153**	**6.536.773.153**	**100**
		Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	2.388.733.693	2.388.733.693	100
		Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	4.148.039.460	4.148.039.460	100
		Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (PAUD)	**2.887.000.000**	**2.849.196.300**	**98,69**
		Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	2.887.000.000	2.849.196.300	98,69
2.	**Pendidikan Dasar**	**PROGRAM SPM PENDIDIKAN DASAR**	**136.558.348.150**	**133.592.711.326**	**97,83**
		Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM (SD/SMP/MI/MTs/ Paket A/Paket B)	**103.093.322.974**	**102.400.686.968**	**99,33**
		Pendataan warga negara usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang tidak bersekolah	476.107.500	453,116,176	95.17
		Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus	247.645.000	247,448,100	99.92
		Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	102.369.570.474	101,700,122,692	99.35
		Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik (SD/SMP/MI/ MTs/Paket A/Paket B)	**1.289.453.100**	**1,179,547,680**	**91.48**
		Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut	85.000.000	72.668.660	85.49

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Prosentase
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
		Pelatihan/seminar/ lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru	1.204.453.100	1.106.879.020	91.90
		Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan (SD/SMP /MI/MTs/Paket A/Paket B)	**12.670.489.148**	**12.476.239.142**	**98.47**
		Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	542.398.900	535,586,650	98.74
		Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah dasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	430.855.000	409,759,410	95.10
		Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat	11.233.733.648	11,072,271,793	98.56
		Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	463.501.600	458,621,289	98.95
		Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (SD/SMP/Paket A/Paket B)	**18.432.368.528**	**16.545.578.669**	**89.76**
		Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	6.408.361.080	6.155.476.741	96.05
		Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	12.024.007.448	10.390.101.928	86.41
		Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (SD/SMP/Paket A/Paket B)	**1.072.714.400**	**990.658.867**	**92.35**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Prosentase
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
		Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	877.489.400	798.273.342	90.97
		Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	195.225.000	192.385.525	98.55
3.	Pendidikan Kesetaraan	**PROGRAM PENDIDIKAN KESETARAAN**	**14.666.773.153**	**14.659.256.396**	**99,95**
		Kegiatan Pemenuhan Layanan Dasar SPM (Kesetaraan)	**5.713.700.000**	**5,712,983,243**	**99.99**
		Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus	1.500.000.000	1,500,000,000	100.00
		Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	4.213.700.000	4,212,983,243	99.98
		Pemenuhan Kualitas dan Pemerataan Hasil Belajar Peserta Didik (Kesetaraan)	**745.650.000**	**742.250.000**	**99,54**
		Pelatihan/seminar/lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru	745.650.000	742.250.000	99,54
		Pemenuhan Kualitas dan Pemerataan Layanan (Kesetaraan)	**1.670.650.000**	**1,667.250.000**	**99,80**
		Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat	925.000.000	925.000.000	100
		Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	745.650.000	742.250.000	99,54

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Prosentase
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
		Pemenuhan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Kesetaraan)	**6.536.773.153**	**6.536.773.153**	**100**
		Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	2.388.733.693	2.388.733.693	100
		Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	4.148.039.460	4.148.039.460	100

Tabel IV.33.
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
SPM Bidang Urusan Kesehatan
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Prosentase
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
		Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	**5.134.773.300**	**4.655.035.374**	**90,66**
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**5.134.773.300**	**4.655.035.374**	**90,66**
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	354.649.300	310.005.450	87,41
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	148.215.900	132.220.500	89,21
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	43.943.800	35.760.400	81,38
4.	Pelayanan kesehatan balita	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	36.995.000	35.437.400	95,79
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	288.470.000	279.458.750	96,88
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	154.699.800	147.657.410	95,45

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Prosentase
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	80.300.000	65.250.000	81,26
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	73.312.000	71.437.500	97,44
9.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	1.014.979.000	764.574.500	75,33
10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	129.000.000	120.569.200	93,46
11.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2.323.633.500	2.267.482.584	97,58
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	486.575.000	425.181.680	87,38

Tabel IV.34.
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Prosentase
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**16.856.335.000**	**16.815.315.959**	**99,76**
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota	**16.856.335.000**	**16.815.315.959**	**99,76**
		Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM	99.500.000	98.010.300	98,50
		Supervisi pembangunan/peningkatan/perluasan/perbaikan SPAM	109.750.000	105.840.669	96,44
		Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	3.000.000.000	2.980.270.100	99,34

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Prosentase
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
		Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	9.009.285.000	9.004.318.290	99,94
		Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan Perdesaan	2.563.050.000	2.552.973.980	99,61
		Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	2.074.750.000	2.073.902.620	99,96
2.	Penyediaan Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**7.486.667.000**	**7.467.087.480**	**99,74**
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten /Kota	**7.486.667.000**	**7.467.087.480**	**99,74**
		Supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala permukiman	904.800.000	888.887.259	98,24
		Pembangunan/penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala permukiman	6.581.867.000	6.578.200.221	99,94

Tabel IV.35.
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SPM Bidang Perumahan Rakyat Dan Permukiman Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Prosentase
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.	**Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**1.603.897.500**	**1.233.626.595**	**76,91**
		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	**58.262.500**	**0**	**0**
		Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota	41.875.000	0	0
		Pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang	16.387.500	0	0

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Prosentase
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
		belum tertangani			
		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten /Kota	**1.545.635.000**	**1.233.626.595**	**79,81**
		Pengadaan lahan untuk pembangunan rumah bagi korban bencana	965.046.300	735.041.854	76,17
		Pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	580.588.700	498.584.741	85,88

Tabel IV.36.
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SPM
Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Prosentase
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM)**	**1.331.141.000**	**1.326.650.249**	**99,66**
		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten Kota	**910.375.900**	**908.726.659**	**99,82**
		Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan	217.349.900	217.249.659	99,95
		Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota	11.438.700	11.419.500	99,83
		Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	655.987.400	654.457.600	99,77
		Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi	600.000	600.000	100

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Prosentase
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
		Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia			
		Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum	24.999.900	24.999.900	100
		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	**420.147.600**	**417.321.950**	**99,33**
		Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	43.794.800	43.210.620	98,67
		Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	24.087.400	23.958.800	99,47
		Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	352.265.400	350.152.530	99,40
		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota	**617.500**	**617.500**	**97,43**
		Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	617.500	601.640	97,43
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (KEBENCANAAN)			
2.	Pelayanan informasi rawan bencana	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	**386.941.000**	**373.865.200**	**96,62**
		Penyusunan kajian risiko bencana Kabupaten/Kota	111.441.000	111.440.200	100
		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana)	275.500.000	262.425.000	95,25
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**1.920.648.000**	**1.808.065.803**	**94,14**
		Penyusunan rencana penanggulangan bencana Kabupaten/ Kota	218.800.000	218.795.800	100
		Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kabupaten/Kota	182.725.600	178.092.900	97,46
		Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan	245.335.000	209.472.103	85,38

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Prosentase
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
		terhadap bencana Kabupaten/Kota			
		Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	627.578.400	608.480.000	96,96
		Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	379.559.000	334.014.000	88
		Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana Kabupaten/Kota	125.400.000	124.673.500	99,42
		Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	141.250.000	134.537.500	95,25
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		**470.977.600**	**394.285.000**	**83,72**
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	**376.420.000**	**309.377.650**	**82,19**
		Respon cepat Kejadian Luar Biasa penyakit/wabah Zoonosis prioritas	3.150.000	3.150.000	100
		Respon cepat darurat bencana Kabupaten /Kota	115.330.000	73.604.950	63,82
		Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/ Kota	28.040.000	9.770.700	34,85
		Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	225.750.000	218.702.000	96,88
		Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	1.000.000	1.000.000	100
		Respon cepat bencana non alam epidemi/wabah penyakit	3.150.000	3.150.000	100
		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	**94.557.600**	**84.907.350**	**89,79**
		Penyusunan regulasi penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	17.210.100	13.762.350	79,97
		Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana Kabupaten/ Kota	77.347.500	71.145.000	91,98
5.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**			

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Prosentase
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
		NON KEBAKARAN (DAMKAR)			
		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	**406.084.300**	**405.294.700**	**99,81**
		Pencegahan kebakaran dalam daerah Kabupaten /Kota	889.000	886.700	99,74
		Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/ Kota	351.700.000	351.033.700	99,81
		Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	4.366.500	4.357.100	99,78
		Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	868.800	867.850	99,89
		Pembinaan aparatur pemadam kebakaran	40.640.000	40.637.750	99,99
		Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	7.620.000	7.511.600	98,58
		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	**5.270.000**	**5.067.500**	**96,16**
		Pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran	5.270.000	5.067.500	96,16
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	**140.090.000**	**139.310.750**	**99,44**
		Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	99.225.000	98.660.500	99,43
		Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran	40.865.000	40.650.250	99,47
		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	**1.479.900**	**1.479.900**	**100**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Prosentase
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
		Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang penimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia	1.197.500	1.197.500	100
		Pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/ penyelamatan dan evakuasi	282.400	282.400	100

Tabel IV.37.
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SPM
Bidang Urusan Sosial
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Prosentase
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**			
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	874.588.600	847.970.850	**96,96**
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Penyediaan permakanan	38.795.000	35.349.800	91,12
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Penyediaan sandang	2.506.000	2.369.800	94,57
		Penyediaan alat bantu	739.259.600	721.634.550	97,62
		Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	675.000	619.750	91,81
		Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	87.282.000	82.100.400	94,06

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Prosentase
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***
		Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat	1.000.000	982.250	98,23
		Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	927.400	927.400	100,00
		Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	764.400	764.400	100,00
		Pemberian layanan data dan pengaduan	618.300	597.800	96,68
		Pemberian layanan kedaruratan	692.100	692.100	100,00
		Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	1.000.000	949.400	94,94
		Pemberian layanan rujukan	1.068.600	983.000	91,99
5.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	**53.230.500**	**51.888.950**	**97,48**
		Penyediaan makanan	40.090.500	39.838.100	99,37
		Penyediaan sandang	5.000.000	4.803.550	96,07
		Penyediaan tempat penampungan pengungsi	2.310.000	1.497.350	64,82
		Penanganan khusus bagi kelompok rentan	5.000.000	4.924.150	98,48
		Pelayanan dukungan Psikososial	830.000	825.800	99,49

BAB V

P E N U T U P

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 pada dasarnya ditujukan untuk mencapai kemajuan yang diindikasikan oleh kemandirian, produktif, inovatif, adaptif terhadap dinamika perubahan namun tetap berpegang pada nilai budaya serta kearifan lokal dan berdaulat secara pangan, ketahanan ekonomi dan sosial. Kemajuan suatu daerah sejatinya memiliki keterpautan yang erat dengan kesejahteraan masyarakatnya. Daerah yang maju adalah daerah yang masyarakatnya sejahtera. Upaya pemerintah untuk memajukan daerah adalah juga langkah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya, yang dicirikan oleh peningkatan capaian kinerja di berbagai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Tahun 2023 adalah tahun pertama dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026. Dengan memperhatikan sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, maka tema pembangunan Kabupaten Banjarnegara tahun 2023 adalah "***Pemulihan Perekonomian melalui Peningkatan Daya Saing Daerah***". Untuk mendorong ketercapaian target pembangunan Tahun 2023, telah ditetapkan 6 arah kebijakan pembangunan daerah yang kemudian dijabarkan ke dalam program-program.

Semoga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2023 ini dapat memberikan gambaran penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Banjarnegara yang berkesinambungan dan menjadi bahan evaluasi dalam menetapkan regulasi serta kebijakan Pemerintah ditahun berikutnya..

Demikian penyampaian LPPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 ini dengan harapan dan do'a semoga keberhasilan senantiasa mengiringi pelaksanaan pembangunan sehingga tercapai kemajuan Kabupaten Banjarnegara di tahun-tahun mendatang. Aamiin